



RANCANGAN AKHIR **RPJMD**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PERUBAHAN

Tahun 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
TAHUN 2019



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 44)

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016- 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- BAB IX : PENUTUP**
memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2020 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

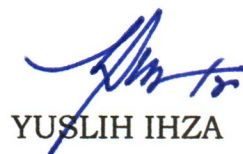
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR



YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.3/2019)



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk sampai selesainya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.

Dasar acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) Kabupaten Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 342.

Materi yang disajikan RPJMD Perubahan meliputi gambaran umum kondisi daerah; keuangan daerah; Permasalahan dan isi-isu strategis; Visi, Misi, Tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Semoga RPJMD Perubahan 2016-2021 ini bisa menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melaksanakan dan mengawasi pembangunan di Kabupaten Belitung Timur. Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) ini disampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Belitung Timur senantiasa memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan diterima sebagai amal ibadah, Amin.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1.1
1.2. Dasara Hukum Penyusunan	1.2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	1.5
1.4. Maksud dan Tujuan	1.6
1.5. Sistematika Dokumen RPJMD-P	1.6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2.1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2.15
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	2.29
2.4. Aspek Pelayanan Umum	2.31

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2011-2015	3.1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015	3.17
3.3. Kerangka Pendanaan	3.19

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan	4.1
4.2. Isu Strategis	4.6

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi	5.1
5.2 Misi	5.1
5.3 Tujuan dan Sasaran	5.3



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

BAB VI STRATEGIS, ARAH KBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	6.1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7.1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	8.1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan di daerah menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun komponen utama dari perencanaan pembangunan terdiri dari; (1) usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan, (2) mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan, (3) menyangkut variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung, (4) mempunyai tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Pada Tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Belitong Timur melaksanakan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 342. Adapun hal-hal yang mendasarinya adalah:

1. Bahwa pada RPJMD Kabupaen Belitong Timur Tahun 2016-2021 belum menyajikan Tahun Rencana 2021. Hal ini dikarenakan pada proses penyusunannya terjadi perbedaan persepsi mengingat Bupati Belitong Timur dilantik Pada Tanggal 16 Februari 2016.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

2. Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih belum dijabarkan dengan baik melalui komponen perencanaan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan. Hal ini muncul dengan melihat hasil evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016 dan 2017 dimana Nilai LKj Kabupaten Belitong Timur adalah CC. Selain itu melalui Laporan hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Nomor 700/12/INPT/LHR/2018 tanggal 25 Maret 2018 menyarankan agar segera melakukan Revisi RPJMD
3. Dalam rangka sinkronisasi akuntabilitas kinerja terhadap perencanaan, Kabupaten Belitong Timur telah melakukan perubahan Peraturan Bupati Belitong Timur tentang Indikatoe Kinerja Utama sebanyak dua kali yaitu Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 50 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 28 Tahun 2017
4. Pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19); dan
31. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Agar dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 selaras, maka perlu dilakukan telaah terhadap kebijakan nasional maupun provinsi yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Belitung Timur. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

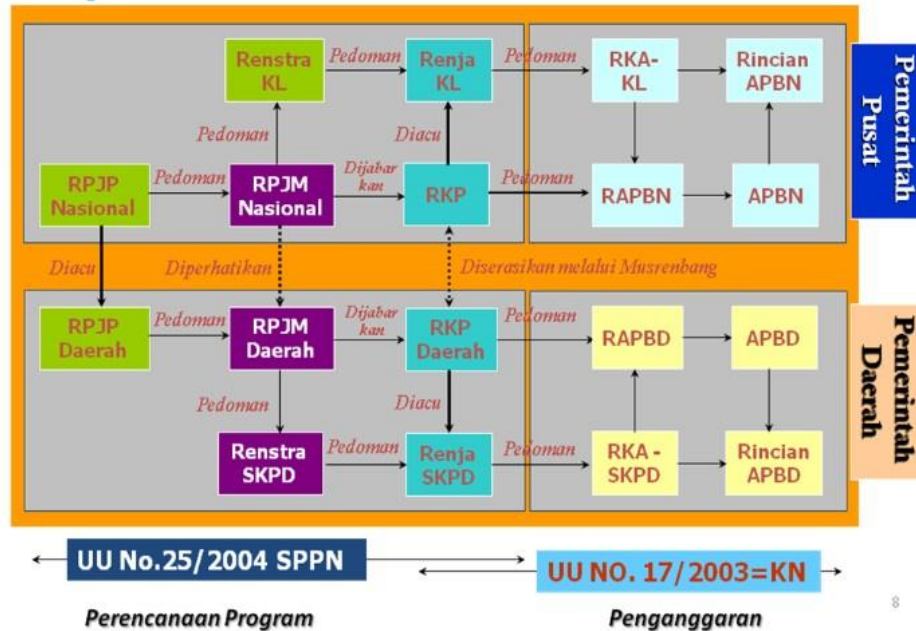
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, serta dari keberadaannya akan dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai acuan bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD Perubahan ke dalam RKPD Kabupaten Belitung Timur untuk setiap tahunnya, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belitung Timur pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, keterkaitan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui alur gambar berikut:

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan oleh seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan kehidupan Kabupaten Belitung Timur yang maju dan unggul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD-P

RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dengan subbab sebagai berikut:

1.6| Pendahuluan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika RPJMD-P

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini diuraikan tentang penjelasan logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan subbab sebagai berikut:

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini menyajikan gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan subbab sebagai berikut:

- 3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2011-2015
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Tahun 2011-2015
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini mengemukakan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis lima tahunan, dengan subbab sebagai berikut:

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini mengemukakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan subbab sebagai berikut:

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Letak geografis Kabupaten Belitung Timur adalah 107°45'-108°18' Bujur Timur dan 02°30'-03°15' Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967,93km² yang terdiri dari luas darat 2.506,90km² dan luas wilayah laut 15.461,03km². Kabupaten Belitung Timur dibagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan. Selain itu kabupaten ini berada pada posisi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut

Sebelah Barat : Kabupaten Belitung
Sebelah Timur : Selat Karimata
Sebelah Selatan : Laut Jawa
Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

Tabel 2.1. Luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Manggar	229,00	9,13
2	Damar	236,90	9,45
3	Kelapa Kampit	498,51	19,89
4	Gantung	546,30	21,79
5	Simpang Renggang	390,70	15,58
6	Simpang Pesak	243,30	9,71
7	Dendang	362,20	14,45
TOTAL		2.506,91	100

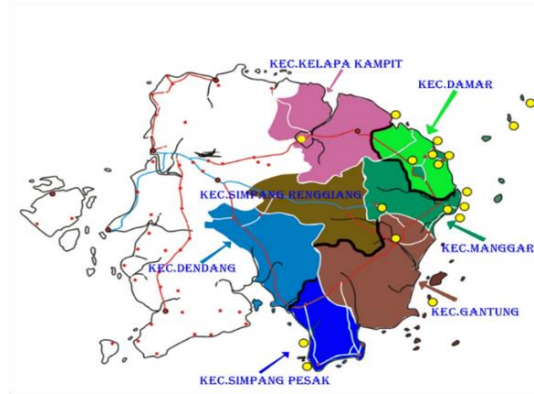
Sumber: Data Dasar Kabupaten Belitung Timur, 2017

Secara geografis, batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Gambar 2. 1.
Posisi Geografis Kabupaten Belitung Timur



Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut dengan luas mencapai 15.461,03km², hal ini menyebabkan daerah ini kaya dengan pantai, yang mana ada 17 pantai yang indah, antara lain Pantai Nyiur Melambai, Pantai Punai, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Burung Mandi, dan lainnya.

a. Topografi

Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100m diatas permukaan laut dan sisinya sebagian kecamatan merupakan perbukitan.

b. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral, biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kwarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari tekstur tanah yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung).

c. Iklim

Kabupaten Belitung Timur mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada Tahun 2014 antara 26,9mm sampai 502,0mm dengan jumlah hari hujan antara 7 hari sampai 27 hari setiap bulannya. Rata-rata temperatur udara yang terjadi pada Tahun 2011 bervariasi antara 25,1⁰C sampai 27,4⁰C. Sementara itu, kelembaban udaranya bervariasi antara 77% sampai 91%, dan tekanan udara antara 1.007,2mb sampai dengan 1.010,1mb.

2.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Belitung Timur dilakukan berdasarkan penataan ruang yang memiliki potensi yang penting untuk dikembangkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya:

- Pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu kawasan perdesaan yang terpadu;

2.2 | Gambaran Umum Kondisi Daerah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

- b. Pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;
- c. Pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil di setiap kecamatan, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari, industri perikanan, serta mempermudah jangkauan pelayanan publik dan penguatan struktur ekonomi bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam aksesibilitas wilayah; dan
- e. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kebijakan perlu dikaji ulang, terutama kebijakan pengembangan wilayah laut dan penguatan struktur ekonomi bidang kelautan yang saat ini telah menjadi kewenangan Provinsi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Beberapa kawasan yang telah dan berpotensi untuk dikembangkan, antara lain:

- a. Kawasan Perkantoran Terpadu, Permukiman, dan Perdagangan di Desa Padang dengan luas $\pm 500\text{Ha}$, saat ini sudah dikembangkan $\pm 50\text{Ha}$ sedangkan sisa areal $\pm 450\text{Ha}$ masih dalam proses penyusunan masterplan kawasan;
- b. Kawasan Industri Air Kelik di Kecamatan Damar dengan luas $\pm 1.532\text{Ha}$;
- c. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Gantung dan Manggar dengan luas $\pm 3.402\text{Ha}$;
- d. Kawasan Desa Wisata Sejuta Pelangi di Kecamatan Gantung dengan luas $\pm 120\text{Ha}$;
- e. Kawasan Pelabuhan Dendang di Kecamatan Dendang;
- f. Kawasan Wisata Kuala Tambak di Kecamatan Damar;
- g. Kawasan Wisata Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak; dan
- h. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Manggar.

Tabel 2.2.

Luasan Kawasan Budidaya di Kecamatan Kabupaten Belitong Timur

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Manggar	14.442
2	Damar	17.070
3	Kelapa Kampit	36.212
4	Gantung	50.932
5	Simpang Renggiang	32.388
6	Simpang Pesak	21.859
7	Dendang	39.209
TOTAL		212.112

Sumber: RTRW Kabupaten Belitong Timur, 2014 - 2034



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Kawasan budidaya di Kabupaten Belitung Timur meliputi kawasan pertahanan keamanan, kawasan hortikultura, kawasan hutan produksi, kawasan industri, PLTU, kawasan pariwisata, kawasan perikanan laut, kawasan perkebunan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan kawasan tanaman pangan.

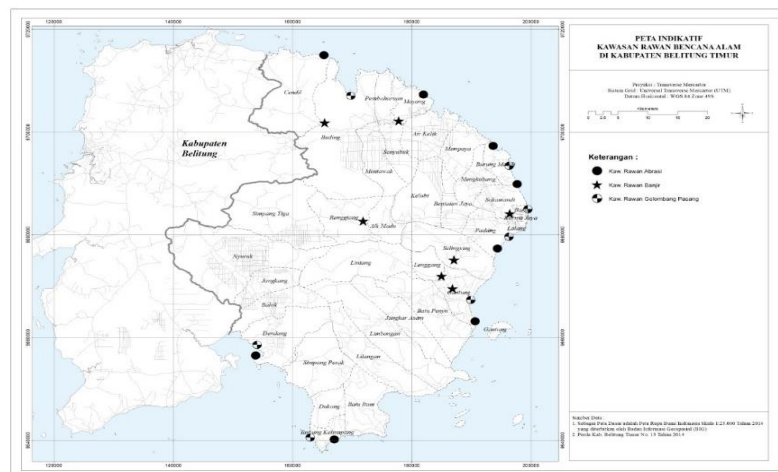
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Beberapa wilayah di Kabupaten Belitung Timur memang berpotensi sebagai wilayah yang rawan terjadi bencana. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah rawan bencana. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Belitung Timur dapat berupa kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan abrasi, dan kawasan rawan banjir. Titik wilayah rawan bencana tersebut telah teridentifikasi sebagai berikut:

1. Kawasan rawan gelombang pasang, tersebar di sepanjang pantai kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.
2. Kawasan rawan abrasi, tersebar di sepanjang pantai kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.
3. Kawasan rawan banjir, meliputi:
 - a. Desa Baru,
 - b. Desa Kurnia Jaya,
 - c. Desa Mekar Jaya,
 - d. Desa Buding,
 - e. Desa Mayang,
 - f. Desa Lenggang,
 - g. Desa Gantung,
 - h. Desa Selinsing,
 - i. Desa Aik Madu, dan
 - j. Desa Renggiang

Gambar 2. 2.

Peta Indikatif Kawasan Rawan Bencana





RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

2.1.3. Demografi

Hasil Sensus Penduduk yang diselenggarakan pada bulan Mei tahun 2010 di Kabupaten Belitong Timur jumlah penduduk yang tercatat sebagai penduduk Belitong Timur itu sebanyak 106.432 jiwa, terdiri dari 55.361 laki-laki dan 51.071 perempuan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 52% laki-laki dan 49% perempuan. Dan kondisi Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu sepuluh tahun sebesar 2,75%.

Jumlah penduduk Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember (Semester II) berjumlah 122.398 jiwa dengan 39.950 Kepala Keluarga. Terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sebanyak 3.137 orang atau 2,63% dari jumlah penduduk tahun 2016, dengan kepadatan penduduk 48,82 jiwa per Km². Untuk data detail dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah / Total	
1	Manggar	9	229	19,786	18,779	38,565	168.41
2	Gantung	7	546.3	13,868	12,951	26,819	49.09
3	Dendang	4	243.3	5,335	4,931	10,266	42.19
4	Kelapa Kampit	6	498.5	9,461	8,980	18,441	36.99
5	Damar	5	236.9	6,426	6,292	12,718	53.69
6	Simpang Renggang	4	390.7	3,732	3,502	7,234	18.52
7	Simpang Pesak	4	362.2	4,306	4,049	8,355	23.07
Jumlah Kabupaten		39	2506.9	62,914	59,484	122,398	48.82

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II

Tabel 2.4.
Jumlah Rumah Tangga / Kepala Keluarga
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga
Manggar	12,462
Gantung	8,612
Dendang	3,280
Kelapa Kampit	6,108
Damar	4,265
Simpang Renggang	2,513
Simpang Pesak	2,710
Total	39,950

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Belitung Timur di dominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dengan porsi sebesar 68,99% disusul dengan usia muda (0 – 14 tahun) sebesar 25,58% dan usia tua (65+) sebesar 5,43%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017

Struktur Usia	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	4,972	4,577	9,549
5 - 9	5,533	5,254	10,787
10 - 14	5,451	5,154	10,605
15 - 19	5,444	5,209	10,653
20 - 24	4,691	4,476	9,167
25 - 29	4,607	4,413	9,020
30 - 34	5,112	4,726	9,838
35 - 39	6,092	5,614	11,706
40 - 44	5,266	4,656	9,922
45 - 49	4,406	3,840	8,246
50 - 54	3,289	3,013	6,302
55 - 59	2,662	2,693	5,355
60 - 64	2,122	2,142	4,264
65 - 69	1,521	1,579	3,100
70 - 74	825	888	1,713
75 +	921	1,250	2,171
TOTAL	62,914	59,484	122,398

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II

Persebaran penduduk menurut kelompok umur dapat diperinci menurut Kecamatan seperti pada tabel Berikut ini :



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan, Desa dan Kelompok Umur
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

Kec.	Desa	Tingkatan Usia (Jiwa)																Jumlah
		0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	
Manggar	1 Lalang Jaya	270	338	317	297	245	258	282	326	275	252	202	175	122	77	53	73	3,562
	2 Kurnia Jaya	440	524	495	471	415	393	430	537	429	338	262	247	227	151	65	67	5,491
	3 Padang	559	707	549	491	406	489	626	710	541	433	344	305	264	192	97	127	6,840
	4 Kelubi	192	240	208	246	238	190	176	245	238	194	139	121	90	67	39	66	2,689
	5 Lalang	379	415	369	390	317	334	339	399	387	373	271	236	220	182	114	135	4,860
	6 Baru	794	902	885	889	780	701	831	860	692	578	457	411	370	244	131	166	9,691
	7 Pulau Buku Limau	72	73	94	58	73	63	85	79	51	46	31	23	26	20	14	12	820
	8 Mekar Jaya	251	268	287	284	206	190	248	291	267	233	142	130	123	114	63	77	3,174
	9 Bentaian Jaya	116	113	106	141	120	85	118	115	143	116	74	64	50	28	16	33	1,438
Jumlah		3,073	3,580	3,310	3,267	2,800	2,703	3,135	3,562	3,023	2,563	1,922	1,712	1,492	1,075	592	756	38,565
Gantung	1 Gantung	473	509	512	468	412	407	460	494	421	397	262	211	159	121	80	86	5,472
	2 Selinsing	458	573	554	444	415	432	506	546	468	354	275	240	151	128	73	69	5,686
	3 Jangkar Asam	145	171	145	136	149	137	138	155	108	92	66	58	52	38	17	21	1,628
	4 Lilangan	293	316	332	316	300	294	302	338	257	204	155	120	94	70	36	34	3,461
	5 Lenggang	347	373	336	336	317	343	341	402	327	296	232	222	154	108	77	98	4,309
	6 Batu Penyu	386	404	430	394	347	364	430	460	371	308	264	232	180	110	50	84	4,814
	7 Limbongan	109	114	147	154	115	118	111	136	129	92	64	58	45	28	13	16	1,449
Jumlah		2,211	2,460	2,456	2,248	2,055	2,095	2,288	2,531	2,081	1,743	1,318	1,141	835	603	346	408	26,819
Dendang	1 Dendang	145	171	192	177	135	140	182	179	149	136	121	78	47	36	25	31	1,944
	2 Jangkang	217	231	285	343	237	248	264	327	280	236	153	110	92	50	40	40	3,153

2.7 | Gambaran Umum Kondisi Daerah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Kec.	Desa	Tingkatan Usia (Jiwa)																Jumlah
		0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	
	3 Nyuruk	207	197	254	292	249	240	254	312	266	199	169	120	74	75	34	55	2,997
	4 Balok	145	175	192	204	194	190	180	220	182	147	117	97	45	35	23	26	2,172
Jumlah		714	774	923	1,016	815	818	880	1,038	877	718	560	405	258	196	122	152	10,266
Kelapa Kampit	1 Mentawak	290	337	323	363	267	237	275	384	366	282	226	185	158	121	58	82	3,954
	2 Senyubuk	303	338	382	373	268	231	258	426	398	336	207	179	180	152	64	80	4,175
	3 Cendil	130	110	121	135	110	134	120	138	130	129	81	61	53	31	28	25	1,536
	4 Buding	185	216	208	225	222	190	178	278	214	217	164	118	93	80	45	66	2,699
	5 Mayang	241	254	228	283	206	222	224	298	258	177	164	121	138	88	34	42	2,978
	6 Pembaharuan	202	261	274	273	198	218	220	319	235	196	182	146	143	101	55	76	3,099
Jumlah		1,351	1,516	1,536	1,652	1,271	1,232	1,275	1,843	1,601	1,337	1,024	810	765	573	284	371	18,441
Damar	1 Air Kelik	141	149	162	193	151	153	133	187	165	149	107	94	55	37	25	26	1,927
	2 Mempaya	157	188	187	206	175	165	161	208	220	171	101	107	79	60	29	38	2,252
	3 Burong Mandi	125	128	124	123	113	106	108	144	115	94	76	72	39	40	20	28	1,455
	4 Mengkubang	243	316	311	249	229	259	262	311	262	222	185	148	121	92	42	66	3,318
	5 Sukamandi	326	353	296	279	289	301	315	373	287	256	186	187	126	84	39	69	3,766
Jumlah		992	1,134	1,080	1,050	957	984	979	1,223	1,049	892	655	608	420	313	155	227	12,718
Simpang Renggiang	1 Simpang Tiga	117	99	121	125	121	110	108	140	137	99	83	51	40	27	22	22	1,422
	2 Renggiang	114	147	143	175	140	111	161	202	175	124	84	77	55	45	36	35	1,824
	3 Aik Madu	89	92	69	80	91	74	84	106	78	57	54	42	35	23	15	20	1,009
	4 Lintang	238	219	210	289	255	220	223	294	269	205	171	134	93	65	37	57	2,979
Jumlah		558	557	543	669	607	515	576	742	659	485	392	304	223	160	110	134	7,234
Simpang Pesak	1 Simpang Pesak	305	348	353	346	289	307	323	361	279	232	203	145	105	63	45	44	3,748
	2 Tjg. Batu Itam	144	171	168	161	145	152	153	166	144	112	92	79	71	43	25	29	1,855
	3 Tjg. Kelumpang	132	164	165	177	156	147	151	166	148	117	85	106	55	55	21	34	1,879

2.8 | Gambaran Umum Kondisi Daerah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Kec.	Desa	Tingkatan Usia (Jiwa)																Jumlah
		0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	
	4 Dukong	69	83	71	67	72	67	78	74	61	47	51	45	40	19	13	16	873
Jumlah		650	766	757	751	662	673	705	767	632	508	431	375	271	180	104	123	8,355
Total		9,549	10,787	10,605	10,653	9,167	9,020	9,838	11,706	9,922	8,246	6,302	5,355	4,264	3,100	1,713	2,171	122,398

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tingkat Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia disebuah daerah. Di Kabupaten Belitung Timur jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat yang paling tinggi, hal ini sejalan dengan tingginya jumlah penduduk di usia 5 – 14 tahun.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggang	Simpang Pesak	Total
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	7,603	4,968	1,558	2,927	2,248	1,055	1,803	22,162
2	TIDAK TAMAT SD / SEDERAJAT	6,799	5,411	2,706	3,527	1,916	1,570	1,496	23,425
3	SD / SEDERAJAT	9,177	7,247	3,897	4,333	3,984	2,678	2,931	34,247
4	SLTP / SEDERAJAT	4,832	3,767	1,085	2,922	2,015	1,070	1,078	16,769
5	SLTA / SEDERAJAT	7,710	4,447	842	3,867	2,128	721	845	20,560
6	DIPLOMA I/II	334	219	44	174	87	26	51	935
7	AKADEMI / DIPLOMA III/ S.MUDA	747	263	47	223	126	48	42	1,496
8	DIPLOMA IV / STRATA I	1,306	486	86	456	207	63	108	2,712
9	STRATA II	57	11	1	12	6	2	1	90
10	STRATA III					1	1		2
Jumlah		38,565	26,819	10,266	18,441	12,718	7,234	8,355	122,398

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017

No	Pekerjaan	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggang	Simpang Pesak	Total
1	BELUM_TIDAK_BEKERJA	9,105	5,690	1,898	3,599	2,598	1,244	2,036	26,170
2	MENGURUS_RUMAH_TANGGA	9,391	7,035	2,663	4,256	3,363	1,981	2,273	30,962
3	PELAJAR_MAHASISWA	6,813	5,246	2,040	3,671	2,258	1,299	1,274	22,601
4	PENSIUNAN	287	129	12	118	87	26	20	679
5	PEGAWAI_NEGERI_SIPIL	1,263	523	88	423	212	58	130	2,697
6	TENTARA_NASIONAL_INDONESIA	19	8	1	10	5	2	0	45
7	KEPOLISIAN_RI	130	38	7	18	9	0	4	206
8	PERDAGANGAN	243	126	25	115	51	29	44	633
9	PETANI_PKEBUN	239	553	1,112	116	39	431	404	2,894
10	PETERNAK	14	3	1	7	3	1	1	30
11	NELAYAN_PERIKANAN	1,812	484	83	166	106	5	408	3,064



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Pekerjaan	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggang	Simpang Pesak	Total
12	INDUSTRI	8	5	0	20	0	2	2	37
13	KONSTRUKSI	13	8	1	13	1	2	5	43
14	TRANSPORTASI	22	6	4	2	1	0	5	40
15	KARYAWAN_SWASTA	1,034	288	833	1,915	589	464	91	5,214
16	KARYAWAN BUMN	106	42	1	22	18	4	10	203
17	KARYAWAN BUMD	8	6	0	1	2	1	0	18
18	KARYAWAN_HONORER	648	184	32	163	124	34	43	1,228
19	BURUH_HARIAN_LEPAS	5,215	5,285	1,029	2,944	2,940	1,475	1,316	20,204
20	BURUH_TANI_PERKEBUNAN	67	74	136	125	23	51	63	539
21	BURUH_NELAYAN_PERIKANAN	131	44	16	35	11	0	18	255
22	BURUH_PETERNAKAN	6	0	0	0	0	0	1	7
23	PEMBANTU_RUMAH_TANGGA	83	16	0	18	12	0	4	133
24	TUKANG_CUKUR	1	0	0	0	0	0	0	1
25	TUKANG_LISTRIK	4	3	0	2	1	0	0	10
26	TUKANG_BATU	13	1	1	1	2	2	1	21
27	TUKANG_KAYU	34	17	10	24	2	7	1	95
28	TUKANG_SOL_SEPATU	0	0	0	1	0	0	0	1
29	TUKANG_LAS_PANDAI_BESI	15	9	1	10	1	2	1	39
30	TUKANG_JAHIT	14	6	2	14	4	0	2	42
31	TUKANG_GIGI	2	0	0	0	0	0	0	2
32	PENATA_RIAS	3	3	1	0	1	0	0	8
33	PENATA_BUSANA	0	0	0	0	0	0	0	0
34	PENATA_RAMBUT	5	3	1	1	1	0	0	11
35	MEKANIK	30	14	1	11	2	2	4	64
36	SENIMAN	3	3	0	0	0	0	0	6
37	TABIB	1	1	1	2	0	0	0	5
38	PARAJI	0	0	0	0	0	0	0	0
39	PERANCANG_BUSANA	0	0	0	0	0	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	0	0	0	0	0	0	0
41	IMAM_MESJID	8	2	0	3	2	0	1	16
42	PENDETA	3	3	0	2	1	0	0	9
43	PASTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
44	WARTAWAN	7	2	0	1	1	0	0	11
45	USTADZ_MUBALIGH	3	0	0	1	0	0	0	4
46	JURU_MASAK	3	1	0	4	0	0	0	8
47	PROMOTOR_ACARA	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ANGGOTA_DPR_RI	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ANGGOTA_DPD	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ANGGOTA_BPK	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
52	WAKIL_PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ANGGOTA_MAHKAMAH_KONSTITUSI	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ANGGOTA_KABINET_KEMENTERIAN	2	0	0	0	0	0	0	2
55	DUTA_BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
57	WAKIL_GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0	0	0	0	0	0
59	WAKIL_BUPATI	0	0	0	1	0	0	0	1
60	WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
61	WAKIL_WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	0	0	1	0	0	0	2



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Pekerjaan	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggang	Simpang Pesak	Total
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN_KOTA	9	7	0	4	2	3	2	27
64	DOSEN	3	0	0	0	1	0	0	4
65	GURU	125	54	14	41	13	13	15	275
66	PILOT	0	0	0	0	0	0	0	0
67	PENGACARA	1	2	0	0	0	0	0	3
68	NOTARIS	1	0	0	0	0	0	0	1
69	ARSITEK	1	0	0	0	0	0	0	1
70	AKUNTAN	0	0	0	0	0	0	0	0
71	KONSULTAN	4	0	0	1	0	1	1	7
72	DOKTER	6	3	0	1	0	0	0	10
73	BIDAN	17	9	3	7	2	0	1	39
74	PERAWAT	21	11	0	12	9	3	0	56
75	APOTEKER	2	0	0	0	0	0	0	2
76	PSIKIATER_PSIKOLOG	1	0	0	0	0	0	0	1
77	PENYIAR_TELEVISI	0	0	0	0	0	0	0	0
78	PENYIAR_RADIO	2	0	0	0	0	0	0	2
79	PELAUT	30	32	3	0	2	0	0	67
80	PENELITI	0	0	0	0	0	0	0	0
81	SOPIR	58	29	50	48	17	12	16	230
82	PIALANG	0	0	0	0	0	0	0	0
83	PARANORMAL	0	0	0	0	0	0	0	0
84	PEDAGANG	220	103	16	88	22	13	18	480
85	PERANGKAT_DESA	25	25	9	24	24	16	14	137
86	KEPALA_DESA	4	2	3	2	2	4	2	19
87	BIARAWATI	0	0	0	0	0	0	0	0
88	WIRASWASTA	1,206	660	165	372	146	44	120	2,713
89	LAINNYA	20	21	3	5	8	3	4	64

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

No	Kecamatan	TIDAK ADA				ADA				JUMLAH PENDUDUK
		LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	
01	KEC. MANGGAR	3,652	3,321	6,973	18.08%	16,134	15,458	31,592	81.92%	38,565
2001	LALANG JAYA	228	201	429	12.04%	1608	1525	3,133	87.96%	3,562
2002	KURNIA JAYA	601	555	1,156	21.05%	2231	2104	4,335	78.95%	5,491
2003	PADANG	637	626	1,263	18.46%	2843	2734	5,577	81.54%	6,840
2004	KELUBI	219	202	421	15.66%	1198	1070	2,268	84.34%	2,689
2006	LALANG	389	335	724	14.90%	2123	2013	4,136	85.10%	4,860
2007	BARU	1010	856	1,866	19.25%	3958	3867	7,825	80.75%	9,691
2010	PULAU BUKU LIMA	161	158	319	38.90%	259	242	501	61.10%	820
2012	MEKAR JAYA	333	308	641	20.20%	1242	1291	2,533	79.80%	3,174
2013	BENTAIA JAYA	74	80	154	10.71%	672	612	1,284	89.29%	1,438
02	KEC. GANTUNG	2,474	2,265	4,739	17.67%	11,394	10,686	22,080	82.33%	26,819



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Kecamatan	TIDAK ADA				ADA				JUMLAH PENDUDUK
		LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	
2001	GANTUNG	553	477	1,030	18.82%	2271	2171	4,442	81.18%	5,472
2002	SELINSING	478	456	934	16.43%	2474	2278	4,752	83.57%	5,686
2003	JANGKAR ASAM	70	67	137	8.42%	778	713	1,491	91.58%	1,628
2004	LILANGAN	436	368	804	23.23%	1355	1302	2,657	76.77%	3,461
2009	LENGGANG	660	616	1,276	29.61%	1532	1501	3,033	70.39%	4,309
2010	BATU PENYU	218	228	446	9.26%	2277	2091	4,368	90.74%	4,814
2011	LIMBONGAN	59	53	112	7.73%	707	630	1,337	92.27%	1,449
03	KEC. DENDANG	974	943	1,917	18.67%	4,361	3,988	8,349	10,266	10,266
2001	DENDANG	260	214	474	24.38%	752	718	1,470	1,944	1,944
2002	JANGKANG	309	303	612	19.41%	1317	1224	2,541	3,153	3,153
2005	NYURUK	324	350	674	22.49%	1236	1087	2,323	2,997	2,997
2008	BALOK	81	76	157	7.23%	1056	959	2,015	2,172	2,172
04	KEC. KELAPA KAMPIT	1,286	1,208	2,494	13.52%	8,175	7,772	15,947	18,441	18,441
2001	MENTAWAK	162	160	322	8.14%	1849	1783	3,632	3,954	3,954
2002	SENYUBUK	377	394	771	18.47%	1735	1669	3,404	4,175	4,175
2003	CENDIL	37	38	75	4.88%	750	711	1,461	1,536	1,536
2005	BUDING	148	117	265	9.82%	1254	1180	2,434	2,699	2,699
2006	MAYANG	252	222	474	15.92%	1318	1186	2,504	2,978	2,978
2007	PEMBAHARUAN	310	277	587	18.94%	1269	1243	2,512	3,099	3,099
05	KEC. DAMAR	926	911	1,837	14.44%	5,500	5,381	10,881	12,718	12,718
2001	AIR KELIK	184	175	359	18.63%	783	785	1,568	1,927	1,927
2002	MEMPAYA	211	235	446	19.80%	923	883	1,806	2,252	2,252
2003	BURONG MANDI	68	67	135	9.28%	668	652	1,320	1,455	1,455
2004	MENGKUBANG	159	165	324	9.76%	1512	1482	2,994	3,318	3,318
2005	SUKAMANDI	304	269	573	15.22%	1614	1579	3,193	3,766	3,766
06	KEC. SIMPANG RENGGIANG	679	650	1,329	18.37%	3,053	2,852	5,905	7,234	7,234
2001	SIMPANG TIGA	120	112	232	16.32%	631	559	1,190	1,422	1,422
2002	RENGGIANG	210	189	399	21.88%	757	668	1,425	1,824	1,824
2003	AIK MADU	58	65	123	12.19%	444	442	886	1,009	1,009
2004	LINTANG	291	284	575	19.30%	1221	1183	2,404	2,979	2,979
07	KEC. SIMPANG PESAK	798	793	1,591	19.04%	3,508	3,256	6,764	8,355	8,355
2001	SIMPANG PESAK	335	331	666	17.77%	1604	1478	3,082	3,748	3,748
2002	TANJUNG BATU ITAM	115	128	243	13.10%	843	769	1,612	1,855	1,855
2003	TANJUNG KELUMPANG	308	292	600	31.93%	664	615	1,279	1,879	1,879
2004	DUKONG	40	42	82	9.39%	397	394	791	873	873
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN		10,789	10,091	20,880	17.06%	52,125	49,393	101,518	82.94%	122,398

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.10.

Jumlah Penduduk Kab Belitong Timur Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah Pemeluk Agama				
	2013	2014	2015	2016	2017
Islam	113.490	106.418	109.108	113.749	116.867
Kristen	1.577	1.215	1.292	1.509	1.534
Katolik	387	275	308	378	398
Hindu	4	3	2	2	3
Budha	4.045	3.193	3.260	3.473	3.444
Konghucu	143	116	121	145	147
Lainya	6	5	4	5	5
Jumlah	119.692	111.225	114.095	119.261	122.398

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.11.

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Belitong Timur

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk (jiwa)	119.692	111.225	114.095	119.621	122.398
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	51,309	54.145	57.405
Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (%)	5,69	5,13	4,40	4,25	4,85
Pendapatan Asli Daerah (rupiah)	56.946.464.677,58	72.694.090.077,18	86.065.752.914,86	76.146.013.501	109.294.133.255,57
Pendapatan Daerah (rupiah)	674.061.718.267,97	733.024.711.651,40	734.294.499.526,40	790.031.349.731	737.862.387.444,63
Belanja Daerah (rupiah)	596.878.359.473,16	652.796.833.456,99	775.507.580.042,05	939.839.110.364,00	710.149.155.248,86
Kemiskinan (%)	6,90	6,68	7,33	6,99	6,81

Sumber : BPS Kabupaten Belitong Timur, 2018

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam satu wilayah. PDRB Kabupaten Belitong Timur menurut lapangan usaha terbagi menjadi 17 kategori lapangan usaha yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Angka PDRB Kabupaten Belitong Timur disajikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.12.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitong Timur Tahun 2013-2017 (persentase)

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015 r)	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	7,46	7,13	3,94	4,62	0,31



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015 r)	2016*	2017**
B	Pertambangan Dan Penggalian	1,03	3,06	2,53	1,39	7,87
C	Industri Pengolahan	5,95	4,63	5,01	3,76	9,50
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	5,4	17,03	10,47	11,89	5,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	4,83	4,61	4,41	3,69	4,58
F	Konstruksi	6,98	6,52	6,12	5,77	0,95
G	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2,68	2,44	1,64	3,97	7,17
H	Transportasi Dan Pergudangan	7,5	5,47	6	4,46	6,82
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,33	4,91	4,75	4,54	4,63
J	Informasi & Komunikasi	11,96	6,74	8,16	7,54	2,64
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	19,63	11,84	3,3	7,73	1,15
L	Real Estat	8,27	7,64	5,9	4,36	1,61
M,N	Jasa Perusahaan	7,8	8,54	7,27	5,25	1,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	10,01	6,97	8,71	7,28	1,23
P	Jasa Pendidikan	14,68	5,53	8,42	8,4	7,87
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	14,44	4,71	8,27	7,46	7,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10,51	7,02	7,72	7,17	3,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,7	5,17	4,39	4,19	4,85

Sumber : Data Dasar Kabupaten Belitong Timur Tahun 2013-2017

Keterangan : r) Angka Revisi *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.13.
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Belitong Timur

No	Sektor	2013		2014		2015		2016*		2017**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	24,87	24,77	25,65	25,30	25,49	25,12	25,85	25,23	24,50	25,28
2	Pertambangan dan penggalian	19,46	19,93	18,80	19,60	18,23	19,17	17,21	19,40	17,60	18,65
3	Industri pengolahan	19,38	19,16	19,29	19,06	19,38	19,18	19,05	18,81	20,01	19,93
4	Pengadaan Listrik, gas	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,07	0,05
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,02	0,2	0,02	0,2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	7,82	7,40	7,82	7,50	7,91	7,61	8,05	7,62	7,91	7,73
7	Perdagangan	10,29	10,74	10,07	10,42	10,13	10,18	10,56	10,16	10,85	10,15



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Sektor	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor										
8	Transportasi dan Pergudangan	1,90	1,85	1,88	1,86	1,94	1,88	1,90	1,88	1,98	1,89
9	Penyediaan akomodasi dan makan minuman	2,28	2,30	2,30	2,29	2,28	2,30	2,32	2,30	2,33	2,31
10	Informasi dan komunikasi	1,05	1,19	1,06	1,21	1,08	1,25	1,09	1,25	1,06	1,29
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,43	0,42	0,49	0,45	0,48	0,44	0,48	0,44	0,48	0,46
12	Real estate	2,90	2,67	2,91	2,73	2,89	2,77	2,95	2,79	2,82	2,77
13	Jasa perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,27	0,28	0,27	0,28
14	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	5,55	5,50	5,53	5,60	5,75	5,83	5,88	5,83	5,70	6,00
15	Jasa pendidikan	2,09	2,10	2,16	2,14	2,33	2,19	2,50	2,24	2,56	2,27
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,19	1,19	1,21	1,18	1,25	1,23	1,27	1,23	1,31	1,26
17	Jasa lainnya	0,49	0,47	0,51	0,48	0,52	0,50	0,54	0,50	0,53	0,51
PDRB KAB. BELITUNG TIMUR		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB se Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung 2013-2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pada Fokus Kesejahteraan Masyarakat, terdapat 3 (tiga) bidang indikator yang akan dibahas yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

A. Pendidikan

Tabel 2.14.

Capaian Indikator Bidang Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka rata-rata lama sekolah (tahun) *)	7,83	7,89	7,91	7,95	8
Angka Partisipasi Kasar :					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (persen)	108,21	111,70	111,96	112,34	112,87
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (persen)	96,34	97,98	98,23	98,41	99,03



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Murni :					
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (persen)	88,46	90,34	90,83	90,88	93,75
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (persen)	74,23	78,26	82,32	84,70	89,18

Sumber : Dinas Pendidikan, Kabupaten Belitung Timur, 2018

*) : BPS Kab Belitung Timur, 2018

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung Timur belum mengalami peningkatan yang memuaskan. Selama lima tahun berjalan baru mencapai angka 8, hal ini menandakan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur baru pada tahap pendidikan menengah pertama atau SMP. Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat dikatakan belum berhasil, hal ini juga menandakan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam program pendidikan usia dini sampai pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangannya belum terlalu memberikan hasil yang memuaskan.

Angka rata-rata lama sekolah yang belum mencapai 9 Tahun merupakan permasalahan pembangunan di Belitung Timur yang harus diidentifikasi dengan benar dimana sesungguhnya fokus dan lokus permasalahannya. Faktor-faktor di bawah ini bisa menjadi penyebab rendahnya angka dimaksud, yaitu:

- 1) Jarak dari rumah ke SMP/setara sangat jauh (tidak semudah akses ke SD/setara dengan jarak sekitar 3 s.d. 6 km);
- 2) Orang tua tidak memiliki cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit, biaya yang cukup memberatkan adalah biaya personal yaitu buku, seragam, transportasi, dan uang jajan;
- 3) Kemampuan belajar anak yang rendah, didukung oleh rendahnya motivasi orang tua terhadap pendidikan (karena terkait juga dengan faktor ekonomi), dan pengaruh temannya yang juga tidak sekolah; dan
- 4) Pandangan orang tua bahwa pendidikan bukan merupakan kebutuhan pokok, tamat SD saja sudah cukup karena penghasilan orang yang tamat SD dan SMA sama saja.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar dan Murni Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan yang memuaskan. Data menunjukkan bahwa Penduduk usia 13-15 Tahun dengan jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) yang memiliki angka partisipasi murni masih perlu diintervensi dengan tepat. Sekolah yang dimaksud adalah Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kecamatan Simpang Renggang sebesar 88,6% dengan Dendang sebesar 88,1%. Sekolah-sekolah jenjang SMP di daerah ini merupakan penyebab kesenjangan angka partisipasi murni tersebut.

Salah satu permasalahan tingginya APK SD adalah karena masih banyaknya Sekolah Dasar yang menerima siswa baru dibawah usia 6 tahun.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Permasalahan APK SMP adalah masih banyaknya yang menerima sisa baru dibawah usia 13 tahun, masih adanya siswa lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, dan masih ada siswa lulusan SD yang melanjutkan pendidikan SMP di Kabupaten lain terutama di Daerah Perbatasan.

c. Sekolah yang terakreditasi minimal B Pada semua jenjang pendidikan

Sekolah yang terakreditasi minimal B pada jenjang pendidikan SD dan SMP pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 28 sekolah, sedangkan tahun sebelumnya yaitu 23 sekolah. Hal ini disebabkan sekolah-sekolah sudah terpenuhi kebutuhannya dan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Tabel 2.15.

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017
Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitong Timur

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Manggar	31	3.791	122	7	1.995	285
2	Damar	9	931	103	2	71	359
3	Kelapa Kampit	17	1.739	102	4	1.079	270
4	Simpang Renggang	8	617	77	2	430	215
5	Gantung	21	2.764	132	5	1.467	293
6	Simpang Pesak	9	829	92	3	491	164
7	Dendang	10	975	98	2	672	336
Jumlah		105	11.646	111	25	6.851	274

Sumber : Dinas Pendidikan, Kabupaten Belitong Timur, 2018

Tabel 2.16.

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2017
Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitong Timur

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Manggar	304	3.979	13	133	1.923	15
2	Damar	89	1.125	13	37	637	12
3	Kelapa Kampit	149	1.858	13	68	973	14
4	Simpang Renggang	69	872	13	25	428	17
5	Gantung	189	2.939	13	87	1.445	17
6	Simpang Pesak	82	1.045	13	30	534	19
7	Dendang	92	1.237	13	37	621	17
Jumlah		974	13.055	13	417	6.561	16

Sumber : Dinas Pendidikan, Kabupaten Belitong Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

B. Kesehatan

Tabel 2.17.
Capaian Indikator Bidang Kesehatan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka kelangsungan hidup bayi (per 1000 bayi)	987.11	989.78	991.75	993.29	991.05
Angka usia harapan hidup (tahun)	71.01	71.03	71.23	71.30	71.37
Persentase balita gizi buruk(persen)	0.15	0.02	0.06	0.04	0.04
Prevalensi balita gizi kurang	2.84	1.11	0.94	1.03	1.03
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	47,81	61,95	64,15	64,76	68.91
Angka Kematian Balita	14.7	11,15	8.25	8,62	10.44
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan layanan kesehatan balita standar (SPM)	80.41	88.89	88,60	88	90
Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100
Jumlah Desa siaga aktif strata mandiri	0	0	0	0	0
AKI (Angka Kematian Ibu) per 100.000 Kelahiran hidup	36.4	37.65	41.75	82.75	41.70
AKB (Angka Kematian Bayi) per 1.000 kelahiran hidup	12.89	10:22	8:25	8.62	8.95
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	77	78.5	78.6
Indek Keluarga Sehat	-	-	-	40	45
Persentase angka penyakit menular	2,41	2,61	2,76	2,91	1,28
Persentase angka penyakit tidak menular	-	-	27,70	2,49	24,57
Penemuan Pasien Baru Penderita TB (jiwa)	103	58	53	67	24
Penemuan Pasien Baru Penderita AIDS (Jiwa)	4	3	4	4	3
Persentase Penderita Hipertensi (%)	-	-	27,70	2,49	22,30
Prevalensi HIV dari total populasi	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02
Prevalensi TB	0,8	0,4	0,4	0,5	0,1
Angka Kejadian Malaria	67	65	6	8	0
Jumlah Baduta Stunting (Jiwa)	-	-	-	188	184
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100	100	100	100	100
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	81,38	88.15	88.17	24,62	54.8

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitong Timur 2018

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) menggambarkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun per 1000 bayi dan indikator kinerja ini terkait langsung dengan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan standar SDGs Angka Kematian Neonatus (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu 12 per 1000 Kelahiran Hidup, artinya standar angka kelangsungan hidup bayi ($1000-12 = 988$ per 1000 bayi). Kabupaten Belitong Timur masih dibawah standar, namun peningkatan angka kelangsungan hidup bayi pertahun menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam upaya menurunkan angka kematian bayi.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITANG TIMUR TAHUN 2016-2021

b. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka ini didefinisikan sebagai perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian. Besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Belitang Timur tahun 2017 mencapai 71,37 tahun.

Selain itu angka usia harapan hidup juga dipengaruhi oleh indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sebesar 99,48% dan persalinan di polindes dan poskesdes yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebanyak 0,52%. Jadi dari 2.111 persalinan ibu hamil ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 100%.

c. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk adalah jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani pada waktu tersebut dibagi dengan seluruh balita pada tahun tersebut, Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score < -3, dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).

Cara Perhitungan/Rumus :

$$\text{Rumus Persentase Balita gizi buruk} = \frac{\text{Balita gizi buruk yang sudah ditangani}}{\text{Jumlah seluruh balita pada tahun tersebut}} \times 100\%$$

Pembilang Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani pada sarana pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut Jumlah seluruh balita pada tahun tersebut di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Ukuran/Konstanta Persentase (%).

Tabel 2.18.
Jumlah Balita Gizi Buruk

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Balita gizi buruk	14	2	6	4	13
Balita	9153	8325	10466	10340	10332
Persentase Balita Gizi Buruk	0,15%	0,02%	0,06%	0,04%	0,13%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitang Timur 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2017 merupakan jumlah balita dengan BGM (Bawah Garis Merah) yang terindikasi gizi buruk di Kabupaten Belitang Timur sampai dengan akhir tahun sebanyak 13 anak dan 10 anak, setelah ditangani (tata laksana sesuai dengan prosedur gizi), terdapat 2 balita yang termasuk kategori balita gizi buruk dikarenakan mempunyai penyakit penyerta. Pencatatan peningkatan penemuan kasus Balita BGM merupakan deteksi dini terhadap gizi buruk berat. Sampai saat ini kondisi di Belitang Timur tercatat bahwa balita mengalami Kekurangan Energi Protein (KEP) Ringan dan Sedang yang biasa dijumpai pada anak adalah berupa kondisi badan yang tampak kurus. Sedangkan gejala klinis Kekurangan Energi Protein (KEP) berat/gizi buruk secara garis besar yang dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu kwashiorkor, marasmus, dan marasmic-kwashiorkor.

d. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian Anak umur 0 – 5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor - faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Penurunan dan peningkatan Angka kematian Balita dipengaruhi oleh Angka Kematian Neonatus (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Tabel 2.19.
AKN, AKB, dan AKABA

Uraian	2015	2016	2017
Neonatal (0-29 hari)	13	8	17
AKN	5.96	3.83	8.45
Bayi (0-11 bulan 29 hari)	18	14	18
AKB (Neonatal+Bayi)	8.25	6.71	8.95
Balita (0- 60 bulan)	18	18	21
AKABA (Neonatal+Bayi+Balita)	8.25	8.62	10.44

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitang Timur 2018

Berdasarkan uraian di atas, peningkatan Angka Kematian Balita dikarenakan peningkatan angka kematian neonatal (AKN). Upaya menurunkan AKABA merupakan proses dari peningkatan status kesehatan ibu dan anak dimulai dari proses kehamilan, kelahiran, dan status kesehatan anak dari usia 0-60 bulan. Hal ini memberikan informasi bahwa pelaporan memang telah berjalan dengan baik, walaupun ada kenaikan angka kematian balita akan tetapi masih dibawah angka nasional. Peningkatan AKABA pada tahun 2017 disebabkan tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN).



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITANG TIMUR TAHUN 2016-2021

e. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kehamilan hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, melahirkan dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Pada tahun 2017 AKI sebesar 49,7 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun masih dibawah target nasional yaitu di bawah 102 per 1000 kelahiran hidup hal ini tentu menimbulkan masalah. Meskipun sudah 100% angka persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi akan tetapi AKI masih terus meningkat. Kiranya masih perlu ditingkatkan kembali program kesehatan ibu hamil seperti kelas ibu hamil sebagai persiapan ibu selama masa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Adapun Sistem rujukan telah berjalan baik untuk kasus kehamilan yang beresiko.

f. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Indikator yang digunakan umur bayi 29 hari – 11 bulan 29 hari.

Pencapaian tahun 2017 sebesar 14 kematian bayi (8.95 per 1.000 kelahiran hidup) dengan indikator pencapaian kinerja 100%,. Angka ini masih dibawah target nasional yaitu di bawah 23 per 1000 kelahiran hidup, dengan nilai normatif AKB < 20 tergolong rendah. Di tahun mendatang angka kematian bayi harus diturunkan melalui upaya pendidikan dan latihan pelatihan manajemen BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)/ MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) sehingga penatalaksanaan bayi baru lahir sesuai standar.

g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penilaian/pengukuran tentang kepuasan masyarakat dibidang pelayanan kesehatan di 7 puskesmas dan 1 RSUD



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

melalui survey pengunjung dengan metode kuesioner didapatkan nilai rata-rata 78,48 dengan grade B (Baik).

h. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Sasaran dari program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

i. Persentase Angka Penyakit Menular

Persentase angka penyakit menular adalah banyaknya kasus baru dari penyakit-penyakit infeksi yang ditularkan oleh patogen secara langsung ataupun tidak langsung dalam kurun waktu tertentu. Penyakit menular yang umum dikenal antara lain: infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), diare, tuberkulosis, kusta, demam dengue, malaria, HIV/AIDS.

Tingkat prevalensi penyakit menular berhubungan dengan perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat baik itu kebersihan individu maupun lingkungan, saat ini faktor terbesar penyakit menular adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan serta arus urbanisasi yang sangat tinggi dari dan ke daerah dengan penyakit menular.

Persentase penyakit tidak menular yang dihitung adalah kasus tuberkulosis, kusta, pneumonia, HIV positif, diare, demam berdarah dengue, malaria dan filariasis. cakupan persentase penyakit menular tahun 2017 sebesar 1,28%.

j. Angka Penyakit Tidak Menular

Persentase angka penyakit tidak menular adalah banyaknya kasus baru dari penyakit-penyakit yang disebabkan bukan karena penularan oleh patogen dalam kurun waktu tertentu. Penyakit tidak menular disebabkan oleh gaya hidup, faktor lingkungan ataupun faktor genetik. Penyakit tidak menular yang umum dikenal antara lain: hipertensi, diabetes, penyakit jantung, luka/cedera kecelakaan, kanker, penyakit kejiwaan. Tingkat prevalensi penyakit tidak menular berhubungan dengan konsumsi rokok, konsumsi alkohol, konsumsi gula, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur.

Persentase penyakit tidak menular yang dihitung adalah kasus hipertensi, diabetes melitus dan gangguan jiwa berat. Cakupan persentase penyakit tidak menular tahun 2017 sebesar 24,57%. Tren sejak 2013 sulit digambarkan dikarenakan sebelum tahun 2017 seksi PTM belum terbentuk sehingga pencatatan penyakit tidak menular masih belum terpilah.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

k. Penemuan Pasien Baru Penderita TB (jiwa)

Tuberkulosis (TB) Paru merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang jaringan paru. Gejala utama yaitu batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Pada tahun 2017 ditemukan 24 kasus baru TB, Jika dilihat dari tahun 2013 penemuan kasus baru TB menunjukkan tren penurunan.

l. Penemuan Pasien Baru Penderita AIDS (Jiwa)

HIV/ AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya.

Pada tahun 2017 ditemukan 23 kasus baru HIV/AIDS, jika dilihat dari tahun 2013 penemuan pasien baru penderita AIDS. menunjukkan tren penurunan.

m. Persentase Penderita Hipertensi (%)

Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Pada tahun 2017 persentase penderita hipertensi adalah sebesar 24,57%, Jika dilihat dari tahun 2014 persentase penderita hipertensi menunjukkan tren penurunan.

n. Prevalensi HIV dari total populasi

Prevalensi HIV dari total populasi adalah banyaknya jumlah penderita HIV dibagi jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2017 prevalensi HIV adalah sebesar 0,02%, jika dilihat dari cakupan sejak tahun 2013, prevalensi HIV tergolong stabil terkendali dan masih jauh di bawah target nasional yaitu di bawah 0,4% (2014).

o. Prevalensi TB

Prevalensi TB adalah banyaknya jumlah penderita TB dibagi jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2017 prevalensi TB adalah sebesar 0,1%, jika dilihat dari cakupan sejak tahun 2013, prevalensi TB menunjukkan tren menurun.

p. Angka kejadian malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles* sp) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Angka Kesakitan / Annual Parasite Incidence (API) adalah jumlah penderita positif malaria (dengan pemeriksaan sediaan darah) di suatu



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu per 1.000 jumlah penduduk berisiko pada wilayah kurun waktu yang sama.

q. Jumlah Baduta Stunting (Jiwa)

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Perbaikan pola makan yaitu meningkatkan jumlah dan kualitas gizi bagi ibu hamil dan dan baduta. Pola asuh dimulai sejak masa kehamilan yaitu edukasi kesehatan ibu hamil, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI dan imunisasi anak. Perbaikan sanitasi dan akses air bersih dimaksudkan mengurangi resiko ancaman penyakit infeksi pada ibu dan anak.

Jumlah anak bawah dua tahun (baduta) stunting mengalami penurunan dari 188 orang pada tahun 2016 menjadi 184 orang pada tahun 2017. Tindak lanjut dan intervensi gaji spesifik untuk kembali menurunkan baduta pstunting antara lain: pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis (kek), pemberian dan pemantauan tablet tambah darah ibu hamil, edukasi kelas ibu hamil mengenai inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A ibu nifas, pelacakan baduta stunting di posyandu, pelatihan pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) bagi kader posyandu dan perbaikan sanitasi melalui program STBM.

r. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

Cakupan persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pemeriksaan kesehatan adalah cakupan siswa kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS / dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

s. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar (SPM)}

Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut adalah pra usia lanjut dan usia lanjut yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada pada pedoman, di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

C. Pertanian

Tabel 2.20.
Capaian Indikator Bidang Pertanian

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017*)
Realisasi lahan bersertifikat (ha/tahun)	5.662,4157	94,8791	114,2166	790,252	829,1736
Penyelesaian kasus Tanah Negara (%)	-	-	-	-	100

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Belitong Timur 2016

*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitong Timur, 2018

a. Realisasi Lahan Bersertifikat (ha)

Secara keseluruhan, pertambahan permintaan akan kawasan permukiman ke depan meningkat dari luas kawasan permukiman saat ini sehingga kebutuhan akan tanah yang bersertifikat meningkat pula. Rencana pengembangan kawasan permukiman seluas kurang lebih 14.802 hektar yang terdiri atas peruntukan pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan untuk pengembangan permukiman kawasan perdesaan

b. Penyelesaian kasus Tanah Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pengertian Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;
2. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan
3. menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan inisiatif dari Kementerian atau pengaduan masyarakat.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pada Fokus Seni Budaya dan Olahraga, terdapat 2 bidang indikator yang akan di bahas, yaitu bidang kebudayaan dan olahraga.

A. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan satu kesatuan didalam pengembangan kesenian di Kabupaten Belitung Timur, memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat, kreatifitas seniman dan seniwatinya. Capaian Indikator Bidang Kebudayaan pada Fokus Seni Budaya dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel 2.21.

Capaian Indikator Bidang Kebudayaan pada Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kesenian (grup)/lembaga kesenian	41	41	52	52	57
Jumlah gedung (buah)	7	7	7	6	6

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Belitung Timur 2018

Jumlah kelompok seni/sanggar budaya tradisional di daerah/lembaga kesenian yang ada di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2013 jumlah kelompok seni/sanggar budaya tradisional di daerah menjadi 41 grup/lembaga. Tahun 2015 jumlah grup/lembaga kesenian menjadi 52 grup/lembaga bertambah 11 grup/lembaga meningkat 26,83%, sedangkan Tahun 2017 jumlah kelompok seni/sanggar budaya tradisional di daerah yaitu 57 dengan penambahan 5 grup/lembaga dengan peningkatan dari Tahun 2016 sebesar 9,62%. Peningkatan jumlah kelompok seni/sanggar budaya tradisional di daerah/lembaga kesenian yang ada di Kabupaten Belitung Timur pada kurun waktu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 dipengaruhi dengan meningkatnya kuantitas penyelenggaraan pagelaran, atraksi seni dan budaya maupun *event* pariwisata yang menampilkan kesenian daerah, bantuan maupun pelatihan serta apresiasi terhadap hasil karya pelaku seni dengan melakukan pengiriman kontingen baik ke tingkat provinsi maupun nasional. Pada tahun 2017 bertambah sebanyak 9 (Sembilan) kelompok/sanggar seni aktif, menjadi 57 (Lima Puluh Tujuh) kelompok/sanggar seni.

B. Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.22.

Capaian Indikator urusan Pemuda dan Olahraga
pada Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah klub olahraga	259	231	262	266	285



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah gedung olahraga	3	4	5	5	6

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Belitung Timur 2018

a. Jumlah Klub Olahraga,

Jumlah Klub Olahraga Jumlah klub olahraga berdasarkan data Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Beltim dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2017 sebanyak 285 klub keolahragaan sesuai dengan induk dari cabang olahraga, baik itu cabang olahraga prestasi maupun cabang olahraga lainnya yang ada di kabupaten.

b. Jumlah Gedung Olahraga,

Jumlah penambahan gedung olahraga yang ada di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2013 s.d 2017 sesuai dengan data yang ada pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kab. Beltim sejumlah 6 unit, diantaranya yaitu :

- GOR Utama Belitung Timur di Komplek Kawasan Sport Centre : 1 unit
- GOR di Kecamatan Kelapa Kampit : 1 unit
- GOR di Kecamatan Damar : 1 unit
- GOR eks Gudang Beras di Kecamatan Manggar : 1 unit
- GOR Kecamatan Gantung : 1 unit
- GOR SMA Pergib di Kecamatan Manggar : 1 unit

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Urusan Pendidikan

Tabel 2.23.

Capaian Indikator Urusan Pendidikan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Pendidikan dasar :					
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	74,15	75,23	75,55	191,7	192,5
Rasio guru/murid :					
Rasio Guru Murid SD/MI	1 : 14	1 : 12	1 : 12	1 : 13	1 : 13
Rasio Guru Murid SMP/MTs	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1 : 16	1 : 16
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1 : 14	1 : 14	1 : 15	1 : 14	1 : 15
Pendidikan menengah:					
Rasio ketersediaan sekolah terhadap	47,48	47,95	48,03	258	260



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITANG TIMUR TAHUN 2016-2021

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
penduduk usia sekolah					
Rasio guru terhadap murid	732	762	766	1 : 25	1 : 25
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1 : 20	1 : 22	1 : 22	1 : 27	1 : 27
Fasilitas Pendidikan:					
Persentase sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan TK/SD/SMP	55	56	58	60	62
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):					
Jumlah TK/PAUD	85	89	90	91	92
Angka Partisipasi Murni (APM) TK/PAUD	42,76	45,76	57,16	57,50	61,25
Angka Putus Sekolah:					
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,35	0,10	0,15	0,09	0,07
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,74	0,60	0,75	0,62	0,54
Angka Kelulusan:					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,96	99,98	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,28	98,99	99,15	99,76	99,93
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	94,90	94,86	95,87	97,68	97,70
Persentase Guru Bersertifikasi	24,05	26,63	46,63	60	65
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1	77,00	78,00	78,50	89,5	91,5
Persentase capaian realisasi target SPM	-	-	-	65	75
Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik	65	68	73	75	78

Sumber : Dinas Pendidikan, Kabupaten Belitang Timur 2018

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah untuk pendidikan dasar di Kabupaten Belitang Timur berdasarkan kelompok umur pendidikan dasar pada Tahun 2011 mencapai 77,50% dan selama 5 tahun pada Tahun 2015 menjadi 87,65% atau mengalami kenaikan sebesar 10,15%. Sedangkan untuk pendidikan menengah pada Tahun 2011 sebesar 35,28% dan selama 5 tahun pada Tahun 2015 menjadi 69,47% atau mengalami kenaikan sebesar 34,19%.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid pada pendidikan dasar untuk SD/MI Tahun 2013 sebesar 14% dan pada Tahun 2017 sebesar 13%, sedangkan untuk SMP/MTs Tahun 2013 sebesar 18% dan Tahun 2017 sebesar 16%. Sedangkan untuk pendidikan menengah Tahun 2017 sebesar 25%.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

c. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata pada pendidikan dasar pada Tahun 2016 sebesar 14% dan Tahun 2017 menjadi 15% terjadi kenaikan sebesar 1%. Untuk pendidikan menengah Tahun 2016 dan 2017 sebesar 27%.

d. Persentase sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan TK/SD/SMP

Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini merupakan pelaksana SPM Bidang Pendidikan, adapun data SPM TK/SD/SMP Tahun 2017 sebesar 62% telah sesuai SPM dari keseluruhan jenjang yang ada, sedangkan Tahun 2016 sebesar 60%.

e. Angka Putus Sekolah.

Angka putus sekolah ini sudah cukup baik, hal ini dapat kita lihat persentase penurunan tiap tahun baik untuk tingkat Pendidikan SD/MI, SMP/MTs maupun tingkat SMA/SMK. Untuk tingkat SMA/SMK angka putus sekolah masih perlu untuk mendapat perhatian yang serius karena angka persentase masih melebihi 1%. Hal ini dapat kita lihat untuk tingkat SD/MI pada Tahun 2011 angka mencapai 0,27% dan sampai Tahun ke-5 0,15%, begitu juga untuk pendidikan SMP/MTs Tahun 2011 mencapai 1,03% dan sampai Tahun 2015 mencapai 0,75%. Untuk tingkat SMA/SMK Tahun 2011 Angka Putus Sekolah mencapai 1,39%. Tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 3,52% dan Tahun 2015 Angka Putus Sekolah terjadi penurunan menjadi 1,33%.

f. Angka Kelulusan.

Angka kelulusan baik untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari perkembangan tiap tahunnya yang sudah mencapai 100%. Perubahan hal ini disebabkan karena adanya peraturan dari Menteri Pendidikan yang menetapkan proses kelulusan/keberhasilan seorang siswa ditentukan tidak hanya berdasarkan hasil dari ujian nasional tapi juga hasil dari ujian sekolah dan ulangan semester/rapor.

g. Angka Melanjutkan.

Angka melanjutkan di Kabupaten Belitung Timur sudah sangat baik. Dapat dilihat angka melanjutkan dari tingkat SD/MI ke tingkat SMP/MTs sudah mencapai angka 99,15%, sedangkan angka melanjutkan dari tingkat SMP/MTs ke tingkat



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

SMA/SMK mencapai 95,87%. Keberhasilan ini tidak terlepas adanya kesadaran dari orang tua maupun siswa akan pentingnya pendidikan, juga peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendidikan dalam upaya menambah unit sekolah baru serta penambahan ruang kelas baru dan penunjang lainnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

h. Persentase Guru Bersertifikasi

Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan persentase guru bersertifikasi dari Tahun 2016 sebesar 60 persen menjadi 65 persen Tahun 2017.

i. Guru Berkualifikasi S1/Diploma IV.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Belitung Timur peran guru sangat mendukung demi tercapainya keberhasilan seorang siswa. Untuk itulah peningkatan mutu guru sangat diperlukan yaitu guru harus memiliki pendidikan S1/D-IV. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Belitung Timur sudah cukup baik hal ini dapat dilihat untuk Tahun 2013 baru mencapai 77,00% dan pada Tahun 2017 sudah mencapai 91,25%.

B. Urusan Kesehatan

Tabel 2.24.
Capaian Indikator Urusan Kesehatan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Posyandu per satuan balita (per 1.000)	10.70	13.07	12.71	12.86	12.87
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0.23	0.23	0.24	0.26	0.25
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	-	-	60	70
Cakupan kunjungan bayi	93.69	94.91	98.12	91.49	91.52
Cakupan Puskesmas yang memberikan Pelayanan sesuai Standar	-	-	-	80	81
Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	0	0	0	1	3
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	78.10	87.01	94.72	95	95
Prevalensi anemia pada ibu hamil				19,82	19,77
Rasio Tenaga Medis	33,46	44,23	53,94	49,96	46,12

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitung Timur 2018

a. Rasio Posyandu

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Di Belitong Timur dalam 3 tahun terakhir rasio posyandu per satuan balita menunjukkan trend naik. Pada tahun 2016 rasio posyandu per satuan balita sebesar 12,86, kemudian tahun 2017 naik menjadi 12,87. Akan tetapi bertambah besarnya jumlah balita juga terus diimbangi dengan jumlah posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya.

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk adalah 0,25% dengan rincian Puskesmas 7 unit, Poliklinik 2 unit dan pustu 17 unit, dengan total jumlah keseluruhan pada tahun 2018 sebanyak 26 unit. Pencapaian ini sudah melebihi target diharapkan kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau fasilitas kesehatan.

c. Rasio Rumah Sakit

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Saat ini di Kabupaten Belitong Timur tersedia 1 (satu) Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah hal ini masih memungkinkan bila dibandingkan jumlah penduduk yang ada, sehingga keberadaan rumah sakit tersebut mampu menampung pasien dalam keadaan normal kecuali adanya Kejadian Luar Biasa (KLB).

d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sesuai dengan peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional bahwa 2018 harus memenuhi target cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di masing-masing daerah. Artinya minimal 95% masyarakat di masing-masing daerah menjadi peserta JKN-KIS. Pada tahun 2017 jumlah kepesertaan JKN-KIS di Belitong Timur baru mencapai 70% dari total jumlah penduduk sebanyak 122.398 jiwa.

e. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Belitong Timur dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat 91,49% kunjungan, kemudian tahun 2017 naik menjadi 91,52%.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

f. Cakupan Puskesmas yang memberikan Pelayanan sesuai Standar

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

g. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi

Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko.

Jumlah puskesmas yang terakreditasi di Belitong Timur hingga tahun 2017 sebanyak 3 puskesmas dari total 7 puskesmas yang ada dengan status Madya. Target tahun 2018 jumlah puskesmas yang terakreditasi di Belitong Timur sebanyak 7 puskesmas dengan status Madya. Dengan meningkatnya status akreditasi tersebut diharapkan ada peningkatan mutu kinerja dan perbaikan pelayanan pada seluruh warga di Belitong Timur.

h. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian program pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar. K4 adalah kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan yang dilakukan paling sedikit 4 kali selama hamil yaitu satu kali pada trimester satu, satu kali pada trimester dua, dan dua kali pada trimester tiga dengan asuhan standar minimal 7 T yaitu: 1) timbang berat badan/tinggi badan 2) ukur tekanan darah 3) ukur tinggi fundus uteri 4) tetanus toxoid 5) pemberian tablet besi 6) test laboratorium sederhana 7) temu wicara.

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur tahun 2017, Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar tercatat sebesar 95%. Sementara ini masih belum mencapai target kabupaten sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan masing-masing target maka pencapaian masih di bawah target.

Salah satu sasaran pokok pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Arah kebijakan peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dalam RPJMN Tahun 2015-2019 salah satunya adalah pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta. Definisi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah pengakuan terhadap Puskesmas, Klinik Pratama,



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Manfaat akreditasi ini antara lain:

- 1) Bagi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota : Sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko
- 2) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan : Sebagai syarat *recredentialing* Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- 3) Bagi FKTP:
 - a. Memberikan keunggulan kompetitif;
 - b. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas;
 - c. Meningkatkan pendidikan pada staf;
 - d. Meningkatkan pengelolaan risiko;
 - e. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf;
 - f. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja ;
 - g. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
- 4) Bagi Masyarakat (pengguna jasa):
 - a. Memperkuat kepercayaan masyarakat;
 - b. Adanya jaminan kualitas

Melihat manfaat-manfaat tersebut maka dibutuhkan akreditasi diseluruh fasilitas kesehatan pertama di Belitong Timur.

Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa pada akses ini. Agar usaha tersebut berhasil, akses masyarakat pada jamban sehat harus mencapai 100% pada seluruh komunitas. Keadaan ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Open Defecation Free (ODF), artinya adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Satu komunitas/masyarakat dikatakan telah ODF jika :

- 1) Semua masyarakat telah Buang Air Besar (BAB) hanya di jamban dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban;
- 2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar;
- 3) Tidak ada bau tidak sedap akibat pembuangan tinja/kotoran manusia;
- 4) Ada peningkatan kualitas jamban yang ada supaya semua menuju jamban sehat;
- 5) Ada mekanisme monitoring peningkatan kualitas jamban;
- 6) Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat;



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITANG TIMUR TAHUN 2016-2021

- 7) Ada mekanisme monitoring umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai jamban sehat;
- 8) Di sekolah yang terdapat di komunitas tersebut, telah tersedia sarana jamban dan tempat cuci tangan (dengan sabun) yang dapat digunakan murid-murid pada jam sekolah;
- 9) Analisa kekuatan kelembagaan di kabupaten menjadi sangat penting untuk menciptakan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga tujuan masyarakat ODF dapat tercapai. Untuk Kabupaten Belitang Timur sampai dengan tahun 2018 baru 30,7% desa yang mendeklarasikan sebagai desa bebas ODF.

Tabel 2.25.
Rasio Posyandu per Satuan Balita

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Posyandu per satuan Balita (per 1.000)	10,70	13,07	12,71	12,86	12,87
a. Jumlah Posyandu	130	131	133	133	133
b. Jumlah Balita di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	12.150	10.025	10.466	10.340	10.332

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitang Timur 2018

Tabel 2.26.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (per 1.000)	0,23	0,23	0,24	0,26	0,25
a. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	27	27	27	30	30
b. Jumlah penduduk di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	116.560	117.579	111.225	114.095	119.261

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitang Timur 2018

Tabel 2.27.
Jumlah Dokter Kabupaten Belitang Timur

Tenaga Dokter	2013	2014	2015	2016	2017
Dokter Umum	27	36	41	37	36
Dokter Spesialis	5	7	10	11	10
Dokter Gigi	7	9	9	9	9
Jumlah	39	52	60	57	55

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitang Timur 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.28.

Rasio Dokter Kabupaten Belitong Timur

Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	0,30	0,31	0,37	0,32	0,30
a. Jumlah dokter	35	36	41	37	36
b. Jumlah penduduk di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	116.560	117.579	114.095	114.095	119.261

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalain Penduduk dan KB Kabupaten Belitong Timur 2018

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1 Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.29.

Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	77,22	78,03	79,86	80,64	78,10
Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen)	47,3	51,57	57,73	62,21	63,39
Akses Sanitasi Masyarakat	-	-	-	64,58	62,88
Akses Air Bersih Masyarakat	-	-	-	74,41	81,12
Akses air minum masyarakat	-	-	-	74,41	74,39
Persentase Kawasan Rawan gelombang pasang dan kawasan rawan abrasi yang ditanggulangi	22	22	22	22	22
Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air	100	100	100	100	100
Persentase keberadaan sumber air pada daerah rawan bencana sesuai dengan fungsi dan manfaatnya	-	-	-	-	-
Rumah tangga pengguna air bersih (persen)	50,12	68,91	74,64	79,16	81,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitong Timur, 2018

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 2016

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 nilai persentase jalan kondisi baik belum menambahkan kondisi sedang dalam perhitungannya sehingga nilai yang didapat tidak bergeser terlalu jauh. Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2013 adalah 272,57km dengan total panjang 353km, dengan persentase realisasi sangat tinggi dikarenakan target yang semula 372,27km menjadi 353km. Panjang Jalan kota dalam kondisi baik dengan menggunakan perbandingan jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan total panjang jalan kabupaten. Pada tahun anggaran 2014 realisasi atau capaian pembangunan/peningkatan jalan kabupaten di Belitong Timur adalah 275,45 atau 78,03% meningkat dari capaian pada tahun sebelumnya.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Realisasi capaian kinerja persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 80,64%, terealisasi sebesar 98,36% dari target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 81,99%. Pada tahun 2017 realisasi capaian kinerja persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 92,83%, terealisasi sebesar 78,10% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 84,13%.

Jalan mantap (stabil; selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya sudah 'baik/sedang' yang hanya memerlukan pemeliharaan. Jalan tidak mantap (tidak stabil; tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya 'rusak/rusak berat' yang memerlukan 'pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi), termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda-4.

Tabel 2.30.
Kondisi Jalan Kabupaten (km)

URAIAN	TAHUN	
	2016	2017
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	349,15	355,73
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Sedang	38,64	19,84
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Rusak Ringan	23,45	21,14
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Rusak Berat	69,64	84,17
Total Panjang Jalan Kabupaten/Kota	480,88	480,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitong Timur, 2018

Berdasarkan pendataan kondisi jalan kenaikan dan penurunan kondisi jalan tahun 2017 jalan kabupaten kondisi baik di kabupaten Belitong Timur mengalami kenaikan, sedangkan kondisi jalan sedang mengalami penurunan begitu juga dengan jalan kondisi rusak ringan mengalami penurunan yang diikuti dengan kenaikan jalan kondisi rusak berat.

b. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dalam hal ini untuk jamban sehat tahun 2017 mencapai 63,39% atau 25.113 Kepala Keluarga (KK) dari 39.619 KK. Data pada tahun 2017 merupakan data sanitasi total berbasis masyarakat yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017. Data ini di dapat dari sanitarian yang ada di setiap kecamatan.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.31.

Akses Sanitasi Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA/KEPA LA KELUARGA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEMAJUAN					
				JSP	JSSP	SHARING	BABS	PENYEDIAAN SANITASI (JSP+JSSP+SHARING)	
				KK	KK	KK	KK	KK	Penduduk (Jiwa)*
1	DAMAR	4.247	12.505	3.015	111	146	691	3.272	9.816
2	MANGGAR	12.392	37.811	9.425	366	197	2.019	9.988	29.964
3	SIMPANG PESAK	2.683	8.169	1.579	35	9	814	1.623	4.869
4	SIMPANG RENGGIANG	2.470	7.070	1.333	11	20	632	1.364	4.092
5	KELAPA KAMPIT	6.051	18.016	3.485	156	30	1.522	3.671	11.013
6	DENDANG	3.246	9.994	1.552	-	10	1.029	1.562	4.686
7	GANTUNG	8.530	26.242	3.618	-	15	2.131	3.633	10.899
	TOTAL	39.619	119.807	24.007	679	427	8.838	25.113	75.339

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitong Timur 2018

*)merupakan hasil perkalian jumlah KK dengan 3(rata-rata jumlah penduduk/KK)

Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Jamban Sehat Permanen(JSP)
2. Jamban Sehat Semi permanen(JSSP)
3. Sharing/Numpang
4. Masih Buang Air Besar Sembarangan(BABS)

Penilaian Rumah Tinggal Bersanitasi bersumber dari laporan kemajuan akses sanitasi kabupaten Belitong Timur data STBM dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman.berdasarkan tugas dan fungsi pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang, maka untuk layanan drainase belum dapat disajikan dikarenakan belum tersedianya data jumlah penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase. Sampai dengan tahun 2017 saluran drainase yang telah dibangun oleh bidang cipta karya sampai dengan tahun 2017 adalah 114.315,73 m yang tersebar di kabupaten Belitong Timur.

c. Akses Sanitasi Masyarakat

Akses sanitasi masyarakat tahun 2017 mencapai 83,84% dengan realisasi 62,88% atau 75.339 jiwa dari target 75% atau 89.855 jiwa. Sedangkan capaian akses sanitasi masyarakat tahun 2016 mencapai 64,58%, dimana 72.518 jiwa dari total 119.261 jiwa penduduk Kabupaten Belitong Timur telah terlayani sistem air limbah yang memadai.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Data pada tahun 2017 merupakan data sanitasi total berbasis masyarakat yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017. Data ini di dapat dari sanitarian yang ada di setiap kecamatan. Jumlah angka penduduk yang mendapat akses sanitasi merupakan perkalian jumlah kk dengan 3 (rata-rata jumlah penduduk per/kk).

Penilaian akses sanitasi masyarakat bersumber dari laporan kemajuan akses sanitasi kabupaten Belitong Timur data STBM dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman. Berdasarkan tugas dan fungsi pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka untuk layanan drainase belum dapat disajikan dikarenakan belum tersedianya data jumlah penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase. Pada laporan kinerja tahun 2017 ini data yang disajikan adalah saluran drainase yang telah dibangun oleh bidang cipta karya sampai dengan tahun 2017 adalah 114.315,73m yang tersebar di kabupaten Belitong Timur. Akses sanitasi masyarakat pada tahun 2017 hanya meningkat 2,03% dari tahun 2016 hal ini dikarenakan pada tahun 2017 kegiatan yang langsung berdampak pada akses sanitasi dalam hal ini penduduk yang memiliki jamban sehat tidak ada, melainkan hanya kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

d. Akses Air Bersih Masyarakat

Capaian kinerja untuk indikator Akses air bersih masyarakat tahun 2017 adalah 81,12% atau 97.183 jiwa dari target 119.807 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 mencapai 74,41% yang meliputi 86.736 jiwa. capaian ini berdasarkan pada jumlah penduduk(jiwa) yang mendapatkan akses air bersih dari SPAM IKK, PDAM dan jaringan non perpipaan (pengguna mata air terlindung, sumur pompa, sumur gali penampungan air hujan dll). Angka jumlah penduduk (jiwa) yang mendapat akses air bersih pada data PDAM merupakan perkalian antara jumlah rumah tangga dikalikan dengan 3 (rata-rata jumlah penduduk/kecamatan berdasarkan data jumlah penduduk dan kepala keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester I tahun 2017)

e. Akses air minum masyarakat

Capaian kinerja untuk indikator Akses air minum masyarakat tahun 2017 adalah 74,39% atau 89.122 jiwa dari target 80% atau 95.846 jiwa dari 119.807 jiwa total penduduk kabupaten Belitong Timur. Sedangkan pada tahun 2016 mencapai 74,41% yang meliputi 86.736 jiwa dari 119.261 jiwa total penduduk kabupaten Belitong Timur. Capaian ini berdasarkan pada jumlah penduduk (jiwa) yang mendapatkan akses air minum dari SPAM IKK dan jaringan non perpipaan (pengguna mata air terlindung, sumur pompa, sumur gali penampungan air hujan dll).



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Secara jumlah penduduk yang terlayani akses air minum pada tahun 2017 meningkat dari 86.736 jiwa ditahun 2016 menjadi 95.846 jiwa di tahun 2017. Persentase capaian berdasarkan rencana target di tahun 2017 yaitu 80% baru terpenuhi 74,39%. Hal ini sama halnya dengan akses air bersih masyarakat perhitungannya berdasarkan data dari SPAM IKK dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk jaringan non perpipaannya tanpa penambahan data layanan air bersih dari PDAM. Adapun secara uji kelayakan minum untuk jaringan non perpipaan dan pengelolaan SPAM IKK harus berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Kondisi umum wilayah Kabupaten Belitung Timur memang mempunyai kandungan kimia yang besar di dalam tanah, terutama dalam kandungan air, karena wilayah Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah pertambangan timah, sehingga sumber air yang dikelola juga masih banyak mengandung bahan kimia. Pemeriksaan terhadap kualitas air struktur kimiawi dari sumber air yang digunakan, seperti silikat, besi, kalsium, magnesium, sodium, potasium, bikarbonat, sulfat, chlorida, florida, nitrat, CaCO_3 , kondisi pH air, dan sebagainya.

Tabel 2.32.
Jumlah Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum

No	Uraian	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk	Akses Air Minum			
				Bukan Jaringan Perpipaan		SPAM IKK	
				Penduduk(jiwa) *	Rumah Tangga/KK	Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga/ KK
1	Manggar	12.392	37.811	30.070	10.023	2.952	984
2	Gantung	8.530	26.242	15.270	5.090	-	-
3	Dendang	3.246	9.994	4.991	1.664	-	-
4	Kelapa Kampit	6.051	18.016	14.660	4.887	-	-
5	Damar	4.247	12.505	8.425	2.808	2.021	674
6	Simpang Renggang	2.470	7.070	3.267	1.089	1.575	525
7	Simpang Pesak	2.683	8.169	3.654	1.218	2.237	746
JUMLAH		39.619	119.807	80.337	26.779	8.785	2.928

* Sumber Data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

f. Persentase Kawasan Rawan gelombang pasang dan kawasan rawan abrasi yang ditanggulangi

Wilayah Kabupaten Belitung Timur memang berpotensi sebagai wilayah yang rawan terjadi bencana, namun sampai saat ini belum ditetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah rawan bencana. Beberapa jenis kejadian bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Belitung Timur yaitu abrasi pantai, banjir, dan tanah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

longsor. Titik wilayah yang rawan jenis kejadian bencana tersebut telah teridentifikasi sebagai berikut:

1. Wilayah rawan abrasi, meliputi:
 - a. Pantai Mudong, meliputi Kecamatan Gantung dan Manggar.
 - b. Pulau Buku Limau, Pulau Long, Pulau Sekunyit, Pulau Ketapang, Pulau Bulian, Pulau Batu, dan Pulau Pesemut.
 - c. Muara Sungai Manggar sampai ke Pantai Kuala Tambak.
2. Wilayah Dusun Canggau sepanjang Sungai Lenggang Kecamatan Gantung.

g. Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air

Kawasan rawan bencana banjir merupakan salah satu masalah di Kabupaten Belitong Timur. Dari titik lokasi genangan dan banjir diketahui bahwa terdapat di 6 (enam) titik kawasan rawan banjir saat hujan turun meliputi: kawasan Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Buding, Mayang dan Lenggang.

Beberapa faktor penyebab terjadinya genangan yang teridentifikasi adalah:

- Faktor alamiah itu sendiri berupa tingginya gelombang pasang air laut dan ditambah besarnya debit air hujan yang turun sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air;
- Faktor pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase dan pembangunan fisik sehingga menyebabkan penyumbatan dan kerusakan saluran drainase; dan
- Adanya pengembangan wilayah kota yang mengubah tata guna lahan, mengakibatkan bertambahnya debit air di saluran. Luapan/genangan terjadi karena pertambahan debit tersebut tidak disertai dengan perencanaan ulang saluran drainase eksisting.

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengendalian daya rusak air diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Pencegahan sebagaimana dimaksud adalah dengan lebih mengutamakan kegiatan non fisik.

a. Kegiatan Fisik

Yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Contoh dari daya rusak air seperti banjir, erosi, kekeringan, kepunahan satwa dan tumbuhan, wabah penyakit, longsor, tsunami, terjadinya amblesan tanah.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

b. Kegiatan Non Fisik

Kegiatan non fisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Sampai dengan tahun 2017 Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang melaksanakan dan merealisasikan pembangunan talud pada setiap saluran primer yang memiliki tekstur tanah yang cenderung berpasir/rawan longsor.

Wilayah Kabupaten Belitong Timur memang berpotensi sebagai wilayah yang rawan banjir dan tanah longsor. Titik wilayah yang rawan banjir dan tanah longsor tersebut telah teridentifikasi sebagai berikut (*sumber: Data Bencana Indonesia 2017 BNPB*):

1. Wilayah rawan banjir, meliputi:
 - b. Lokasi sekitar Jembatan Sungai Buding Kecamatan Kelapa Kampit.
 - c. Dusun Balai Selatan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit.
 - d. Desa Mempaya RT 02, 07, 08, dan 10 Kecamatan Damar
 - e. Desa Sukamandi Kecamatan Damar.
 - f. Kampung Bugis Desa Lenggang Kecamatan Gantung.
 - g. Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung
 - h. Air Kundor Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.
2. Wilayah rawan longsor lebih berpotensi pada lokasi-lokasi pertambangan.

h. Persentase keberadaan sumber air pada daerah rawan bencana sesuai dengan fungsi dan manfaatnya

Keberadaan sumber air yang dimaksud adalah keberadaan sumber air pada suatu lokasi yang rawan kekeringan/air bersih yang membutuhkan sumber air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya baik sebagai penyuplai kebutuhan air untuk irigasi sehingga dapat meningkatkan pertanian atau untuk memenuhi air bersih masyarakat saat kemarau tiba .

Sampai dengan tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum telah membangun sebanyak satu Embung di Desa Dukong atau baru 25% dari 4 rencana embung yang akan dibangun yaitu di Desa Nyuruk ,Desa Lintang dan Desa Aik Kelik pada kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

i. Rumah tangga pengguna air bersih (persen)

Capaian kinerja untuk indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih tahun 2017 adalah 88,55% atau 35.081 KK dari 39.619 kk. Capaian ini berdasarkan pada jumlah Kepala Keluarga(KK) yang mendapatkan akses air bersih dari SPAM IKK, PDAM dan jaringan non perpipaan (pengguna mata air terlindung, sumur pompa,sumur gali penampungan air hujan dll).

Tabel 2.33.

Jumlah Penduduk yang Mendapat Akses Air Bersih

No	Uraian	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk	Akses Air Bersih					
				Bukan Jaringan Perpipaan		SPAM IKK		PDAM	
				Penduduk (jiwa) *	Rumah Tangga/ KK	Penduduk (jiwa)	Rumah Tangga/ KK	Rumah Tangga/ KK**	Penduduk (jiwa)
1	Manggar	12.392	37.811	30.070	10.023	2.952	984	1.263	3.789
2	Gantung	8.530	26.242	15.270	5.090	-	-	786	2.358
3	Dendang	3.246	9.994	4.991	1.664	-	-	-	-
4	Kelapa Kampit	6.051	18.016	14.660	4.887	-	-	638	1.914
5	Damar	4.247	12.505	8.425	2.808	2.021	674	-	-
6	Simpang Renggiang	2.470	7.070	3.267	1.089	1.575	525	-	-
7	Simpang Pesak	2.683	8.169	3.654	1.218	2.237	746	-	-
8	Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		39.619	119.807	80.337	6.779	8.785	2.928	2.687	8.061

Sumber : *) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018

**) PDAM Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

1. Unit IKK Manggar dibangun sekitar tahun 2013, terletak di Desa Padang (Kompleks Perkantoran Terpadu) Kecamatan Manggar. Sistem ini merupakan sistem pengolahan lengkap kapasitas 20 L/D dengan sumber air baku dari kolong Tebat Gadong Sistem pengaliran transmisi dan distribusi dilakukan secara pemompaan.
2. Unit IKK Damar dibangun sekitar tahun 2013, terletak di Desa Mengkubang Kecamatan Damar. Sistem ini merupakan sistem pengolahan lengkap kapasitas 20 L/D dengan sumber air baku dari kolong penasin. Sistem pengaliran transmisi dan distribusi dilakukan secara pemompaan.
3. Unit IKK Simpang Renggiang dibangun sekitar tahun 2013, terletak di Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang. Sistem ini merupakan sistem pengolahan lengkap kapasitas 10 L/D dengan sumber air baku dari kolong tempayan Sistem pengaliran transmisi dan distribusi dilakukan secara pemompaan.
4. Unit IKK Simpang Pesak dibangun sekitar tahun 2008 terletak di Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak. Sistem ini merupakan sistem pengolahan lengkap kapasitas 10 L/D dengan sumber air baku dari Kolong Kumpe Sistem pengaliran transmisi dan distribusi dilakukan secara pemompaan.

Diperlukan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum yaitu Perencana Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum pada SPAM IKK untuk meningkatkan akses air bersih terutama pada kawasan permukiman yaitu berupa data teknis jaringan, peta exsisting jaringan, peta perencanaan untuk 4 SPAM IKK.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Inventarisasi data infrastruktur yang mendukung persentase akses air bersih masyarakat diperlukan untuk memenuhi target perencanaan terhadap pemenuhan rasio akses air bersih masyarakat. Dengan basis data yang baik diharapkan setiap pengajuan usulan kegiatan untuk penyediaan air bersih masyarakat dapat diwujudkan.

C.1.1 Bidang Bina Marga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menegaskan bahwa untuk sub urusan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pengembangan sistem transportasi di tanah air. Infrastruktur jalan menjadi unsur sentral dalam pengembangan wilayah serta peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Jaringan transportasi yang baik akan membawa dampak pada peningkatan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi program prioritas seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dan kendaraan pengguna jalan.

Status jalan di Kabupaten Belitong Timur selain jalan kabupaten dan jalan desa, terdiri dari jalan nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional. Jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/79/PU/I/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Provinsi

1. Jalan Nasional

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015.

Tabel 2.34.
Daftar Ruas Jalan Nasional

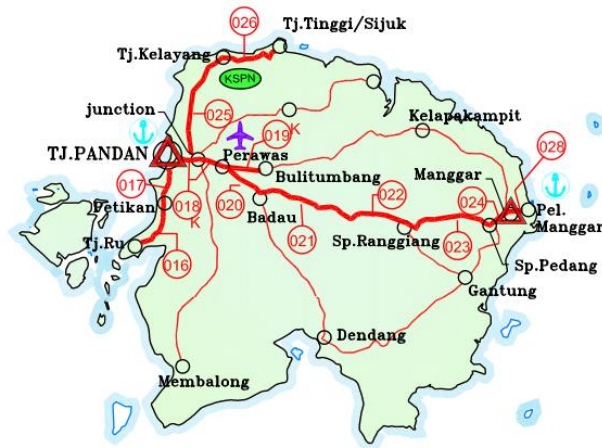
Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)
022	BTS.KAB.BELITUNG/BELITUNG TIMUR-SP.RENGGIANG	23,48
023	SP.RENGGIANG-SP.PADANG	24,02
024	SP.PADANG - MANGGAR	2,08
028	MANGGAR-PELABUHAN MANGGAR	3,39
	TOTAL	52,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitong Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Gambar 2. 3.
Peta Jaringan Jalan Nasional



2. Jalan Provinsi

Tabel 2.35.
Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer
Menurut Perannya Sebagai Jalan Provinsi

Nama Ruas	Nomor Ruas	Panjang (km)	Fungsi	Kabupaten/Kota
Bantan - Pelulusan	018.8	11,5	JKP-3	Belitung dan Belitung Timur
Badau - Dendang	020.1	35,99	JKP-3	Belitung dan Belitung Timur
Dendang - Gantung	020.2	36,96	JKP-3	Belitung Timur
Perawas - Buding	019.1	30,31	JKP-3	Belitung dan Belitung Timur
Buding - Manggar	019.2	43,85	JKP-3	Belitung Timur
Sp.Renggiang - Gantung	020.3	18,1	JKP-3	Belitung Timur
Gantung - Sp.padang	020.4	16,58	JKP-3	Belitung Timur
Total		193,29		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitung Timur, 2018

3. Jalan Kabupaten

Tabel 2.36.
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik di Aspal Tahun 2013-2017

Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi	2013	2014	2015	2016	2017
Jalan Baik (km)	272.57	275.45	357,1	349,15	355,73
Jalan Rusak Ringan /sedang (km)	22.11	22.90	72,47	62,09	40,98
Jalan Rusak Berat (km)	58.32	54.65	51,31	69,64	84,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitung Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.37.

Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Rusak Tahun 2013-2017

Tahun	Kondisi Jalan	
	Panjang Jalan Kabupaten/Kota(km)	Kondisi Jalan yang Rusak(km)
2013	353	58,32
2014	353	54,65
2015	480,88	51,31
2016	480,88	69,64
2017	480,88	84,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitung Timur, 2018

Jaringan jalan menjadi bagian penting dalam sistem transportasi. Pemeliharaan dan pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan jaringan jalan. Jaringan jalan juga merupakan penunjang utama dalam melakukan kegiatan perekonomian dan dapat menjadi media untuk menjalin komunikasi dan interaksi antar masyarakat agar terjaga kesatuan dan dapat berkembang secara lebih merata.

Menyesuaikan dengan salah satu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung Timur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 yaitu Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten, meliputi Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Yang Berkualitas dan Mampu Melayani Masyarakat Secara Optimal dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Serta Berperan Penting dalam Memperluas Aksesibilitas Wilayah.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam memperluas aksesibilitas wilayah terdiri atas: membangun jaringan jalan yang menghubungkan ruas jalan nasional di bagian tengah wilayah kabupaten dengan ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten di bagian utara dan selatan, serta mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, wisata, dan pertanian di sepanjang wilayah pesisir timur pulau.

Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten Belitung Timur terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dengan luas wilayah daratan seluas 250.690Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2015 berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berjumlah 114.095 jiwa mengalami pertambahan 2.870 jiwa dari Tahun 2014 yang berjumlah 111.225 jiwa. Sementara penyebaran kendaraan bermotor secara umum urutannya mengikuti penyebaran penduduk karena berkaitan dengan alat transportasi masyarakat. Perbandingan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalan dapat digunakan sebagai informasi tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

C.1.2 Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menegaskan bahwa untuk sub urusan sumber daya air meliputi:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dan sub urusan drainase meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota adalah kewenangan kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan sumber daya air mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 Tanggal 6 April 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Memahami definisi dari pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi sangat diperlukan sehingga program dan kegiatan yang ada bisa mencapai target yang diharapkan. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya sedangkan peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah Daerah Irigasi Selingsing seluas 4.318 ha tergolong daerah irigasi permukaan, Daerah Irigasi Rawa Meranti seluas 600 ha, Daerah Irigasi Permukaan di Simpang Tiga seluas 31.84 ha, Daerah Irigasi di Simpang Renggang seluas 25 ha, dan Daerah Irigasi di Limbongan seluas 30 ha.

Terdapat 3 jenis luas daerah irigasi yaitu luas baku, luas potensial, luas fungsional. Luas baku adalah luas bersih yang berdasarkan perencanaan teknis dapat dialiri oleh jaringan irigasi. Luas potensial merupakan bagian dari luas baku yang telah selesai dibangun jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder). Luas fungsional adalah bagian dari luas potensial yang telah diolah untuk pertanian

Tabel 2.38.

Daerah Irigasi di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018

No	Daerah Irigasi	Desa	Kecamatan	Efektif (ha)	Potensi (ha)
1	Cendil	Cendil	Kelapa Kampit	32.11	32.11
2	Air Kelik	Air Kelik	Damar	74.65	81.65
3	Kolong Kero	Padang	Manggar	155.00	155.00



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Daerah Irigasi	Desa	Kecamatan	Efektif (ha)	Potensi (ha)
4	Kelubi	Kelubi	Manggar	151.00	151.00
5	Lintang	Lintang	Simpang renggiang	95.00	95.00
6	Renggiang	Renggiang	Simpang Renggiang	25	30
7	Simpang Tiga	Simpang Tiga	Simpang Renggiang	31.84	41.86
8	Batu Penyu	Batu Penyu	Gantung	25.00	25.00
9	Trans Lilangan	Lilangan	Gantung	40.00	150.00
10	Limbongan	Limbongan	Gantung	30.00	40.00
11	Dendang	Dendang	Dendang	33.00	75.00
12	Jangkang	Jangkang	Dendang	35.00	40.40
13	Nyurok	Nyurok	Dendang	59.80	83.80
14	Balok	Balok	Dendang	93.78	93.78
15	Tanjung Batu Itam	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	20.30	57.30
16	Tanjung kelumpang	Tanjung Kelumpang	Simpang Pesak	19.40	19.40
17	Simpang Pesak	Simpang Pesak	Simpang Pesak	63.00	123.00

Sumber : Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-366 Tahun 2018
tentang Daerah Irigasi di Kabupaten Belitung Timur.

Pengelolaan sumber daya air menjadi bagian yang amat penting bagi keberlangsungan bangsa suatu bangsa. Air sebagai sumber kehidupan perlu pengelolaan yang bijak agar manfaatnya dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi saat ini, melainkan juga generasi berikutnya. Namun, air juga dapat mendatangkan bencana jika daya rusaknya tidak dikendalikan. Berpedoman pada salah satu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, yaitu Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten, meliputi pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu sistem kawasan perdesaan yang terpadu. Strateginya adalah mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan perdesaan yang produktif dan memiliki potensi komoditas pertanian unggulan sebagai kawasan agropolitan.

Untuk meminimalisir dampak krisis sumber daya air yang telah dan mungkin akan terjadi, dilakukan upaya penanganan baik secara fisik maupun non fisik. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses terhadap air bersih, penyediaan air baku, pengamanan pantai, dan sebagainya. Salah satu infrastruktur SDA yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan adalah irigasi.

Tabel 2.39.

Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Belitong Timur

NO	DAERAH IRIGASI	Vol	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Trans Lilangan	40 ha	-	-	-	930	180	80 (Talud Reservoir)	-
2	Limbongan	30 ha	-	742	-	-	600	170 (Talud sal.pembuang)	-
3	Renggang	25 ha	-	1.005	1.210	-	220	160 (Sal.pembuang)	-
4	Simpang Tiga	31,8 4 ha	994	-	157	-	100	377 (Sal. Sekunder)150 (Sal.pembuang)	-
5	Sp.Pesak	63 ha	-	-	-	-	1.000	-	-
6	Tj.Batu Itam	20,30 ha	-	-	-	-	730	-	-
7	Lintang	95 ha	-	-	-	-	-	912,1(Sal.Sekunder) 750 m ² (bangunan reservoir)	1.534,7
8	Jangkang	35 ha	-	-	-	-	-	-	1.775
9	Batu Penyu	25 ha	-	-	-	-	-	-	567

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitong Timur, 2018

Tabel 2.40.

Capaian Indikator Urusan Sumber Daya Air

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Jaringan Irigasi	11,84	14,52	22,67	27,28	38,45

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitong Timur, 2018

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi mencerminkan luas daerah irigasi yang terairi pada suatu daerah irigasi. Untuk menghitung rasio jaringan irigasi, hanya memasukkan data daerah irigasi kewenangan kabupaten yang telah dibangun jaringan irigasi. Luas daerah irigasi yang digunakan sampai dengan 2017 adalah 347 ha. Dari hasil kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang telah dibangun sampai dengan tahun 2017 jaringan irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten adalah sepanjang ± 13.343,80 m, maka rasio jaringan irigasi sampai dengan tahun 2017 menjadi 38,45%.

C.2 Penataan Ruang

Tabel 2.41.

Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase tersedianya Luasan RTH publik	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	-	-	65	65
Luas Wilayah Produktif(ha)	98,43	98,43	98,43	98,43	98,43
Luas Wilayah Industri(ha)	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
Luas Wilayah Kebanjiran(ha)	-	-	-	-	21.453,26*)
Luas Wilayah Kekeringan(ha)	-	-	-	-	-
Luas Wilayah Perkotaan(ha)	53,36	-	-	676,6	676,6
Persentase kawasan strategis dengan infrastruktur baik	-	-	-	16	16

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitong Timur, 2018

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per-Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada merupakan RTH Publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk luasan RTH Privat tidak diketahui karena belum ada mekanisme pengukuran, pencatatan dan pemeliharaan data yang terstruktur. Namun, dalam pengajuan IMB syarat ketersediaan RTH harus dipenuhi oleh pemohon. Data Hak Pengelolaan (HPL)/Hak Guna Bangunan (HGB) dimiliki dan dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga penambahan/pengurangannya bersifat independen.

Tabel 2.42.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per-Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
RTH (Ha)	248,835	248,91	249,78	252,98	255,60
HPL/HGB (Ha)	5.242,32	806,19	806,19	806,19	403,59
Rasio RTH terhadap HPL/HGB (%)	4,74	30,87	30,98	31,38	63,33

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitong Timur, 2018

Rasio capaian ruang terbuka hijau terhadap HPL/HGB pada tahun 2017 adalah 63,33 % .Persentase ini didapat dengan membagi luas terbuka hijau yaitu 255,60 ha dengan 403,59 ha (luas Hak Guna Bangunan). Peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan adanya penambahan ruang terbuka hijau kawasan yang berbentuk areal.

Penjelasan hal ini adalah sebagai berikut: Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

utama lindung atau budidaya. RTH kawasan berbentuk suatu areal dan non-linear dan RTH jalur memiliki bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.

Jenis RTH berbentuk areal adalah sebagai berikut:

- Hutan Kota

Dalam membangun sebuah hutan kota terdapat dua pendekatan yang dapat dipakai. Pendekatan pertama, hutan kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Pada bagian ini, hutan kota merupakan bagian dari suatu kota. Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk hutan kota. Pada pendekatan ini, komponen yang ada di kota seperti pemukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) yang ada dalam suatu hutan kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat dengan luas minimal sebesar 0.25 ha dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu). Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, dan bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai hutan kota.

Hutan kota juga mempunyai beberapa fungsi seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam, rekreasi, olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu fungsi hutan kota.

- Taman Kota

Taman kota merupakan ruang di dalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunaannya. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan

- Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.

Peningkatan persentase realisasi Persentase penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dikarenakan penambahan hutan kota Simpang Pesak 3,92 ha dan penurunan luas lahan ber hpl/hgb menjadi 403,59 ha(data sementara dari BPN) dari 806,19 ha pada tahun 2016. Berikut data taman, areal hutan kota dan areal pemakaman umum di kabupaten Belitong Timur Tahun 2017:

Tabel 2.43.
Data Taman, Areal Hutan Kota dan Areal Pemakaman Umum
di kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

NO	NAMA	LOKASI	LUAS(HA)	KETERANGAN
1.	Taman Bundaran Air Mancur	Depan Kantor Bupati / DPRD Kab. Beltim	0,45	
2.	Taman Kater	Desa Padang (Depan Hotel Oasis)	0,0378	
3.	Taman Beransai (Segitiga)	Depan Kantor Camat Manggar	0,735	
4.	Taman Depan Rumah Makan Wena	Depan Rumah Makan Wena	0,011	Taman Kecil (Penunjang)
5.	Taman Bantuan Bank Sumsel	Depan TK Negeri Pembina Manggar	0,0033	Taman Kecil (Penunjang)
6.	Taman I	Depan Rumah Dinas Camat Manggar	0,0124	Taman Kecil (Penunjang)
7.	Taman II	Depan Rumah Dinas Manggar	0,0042	Taman Kecil (Penunjang)
8.	Taman III	Depan Rumah Dinas Manggar	0,0048	Taman Kecil (Penunjang)
9.	Taman IV	Samping Terminal Manggar	0,0042	Taman Kecil (Penunjang)
10.	Taman STMJ	Depan Puncak Manggar	0,0105	Taman Kecil (Penunjang)
11.	Taman Patung Nelayan	Depan Puncak Manggar	0,008	Taman Kecil (Penunjang)
12.	Taman Samping Puncak	Samping Puncak Manggar	0,2	
13.	Taman Pos Kota	Depan Pos Lantas Manggar	0,008	Taman Kecil (Penunjang)
14.	Taman Pegadaian	Depan Pegadaian Manggar	0,0065	Taman Kecil (Penunjang)
15.	Taman Rusa	Jln. Gajah Mada Dsn. Taruna Mulya	0,027	
16.	Taman Depan Polsek Manggar	Depan Rumah Makan Eka	0,007	Taman Kecil (Penunjang)
17.	Taman Depan RBT I	Depan RBT Manggar	0,0108	Taman Kecil (Penunjang)
18.	Taman Depan RBT II	Depan RBT Manggar	0,0102	Taman Kecil (Penunjang)
19.	Taman Depan RBT III	Depan RBT Manggar	0,024	Taman Kecil (Penunjang)
20.	Taman Depan SMPN 4 Manggar	Samping SMPN 4 Manggar	0,0068	Taman Kecil (Penunjang)
21.	Taman Base Camp Yonif I	Samak Manggar	0,008	Taman Kecil (Penunjang)
22.	Taman Base Camp Yonif II	Samak Manggar	0,003	Taman Kecil (Penunjang)
23.	Taman Teropong	Pantai Keramat Manggar	0,0345	
24.	Taman Depan DPPKAD Kab. Belitong Timur	Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan	0,52	
25.	Taman Arwana Gantung	Jln. A. Yani Desa Selinsing Kec. Gantung	0,00935	
26.	Taman Segitiga Kelapa Kampit	Desa Senyubuk	0,467	
27.	Ruang Terbuka Publik Manggar	Kawasan Pasar Lipat Kajang Manggar	0,03	
28.	Ruang Terbuka Publik Dendang	Depan Kantor Desa Dendang	0,0787	
29.	Pulau Gantong	Jln. Sudirman Desa Lenggag Kec. Gantung	0,96	



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

NO	NAMA	LOKASI	LUAS(HA)	KETERANGAN
30.	RTH Pasar Gantung	Jln. Sudirman Desa Lenggang Kec. Gantung	0,012	
31.	Taman MPB Damar	Depan SPM N.1 Damar	0,02	
32.	Ruang Terbuka Publik Gantung	Pasar Gantung	0,036	
33.	Ruang Terbuka Publik Manggar	Pasar Manggar	0,018	
34	Taman simpur depan BLHD	Komplek Perkantoran	0,02	
35	Tebat Gadong	kec.Manggar	96,04	
36	Hutan Kota Damar	Kec.Damar	51,96	
37	Hutan Kota Kec.Simpang Pesak	Kec.Sp.Pesak	3,92	
38	Luas Tempat Pemakaman Umum	Kab.Belitong Timur	99,88	
JUMLAH			255,60	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitong Timur, 2018

Meningkatkan peran masyarakat baik secara individu/kelompok, swasta, lembaga/badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebagai berikut:

- Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran masyarakat, swasta dan badan hukum dalam penyediaan RTH Publik, meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH.

Peran masyarakat pada RTH privat, meliputi:

1. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
2. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
3. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot; dan
4. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

- Peran Individu/Kelompok

Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat:

1. Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta ruang terbuka hijau dapat membentuk suatu komunitas ruang terbuka hijau;
2. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas, dan sebagainya) dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
5. Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
6. Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama;
7. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

■ Peran Swasta

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak swasta:

1. Pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha (mall, plaza, dan sebagainya) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau;
2. Bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau;
3. Memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan ruang terbuka hijau maupun dengan proses diskusi dan seminar;
4. Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
5. Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
6. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

▪ Peran Lembaga/Badan Hukum

Lembaga atau badan hukum yang dimaksud merupakan Organisasi nonpemerintah, atau organisasi lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya. Beberapa hal yang dapat dilakukan organisasi non-pemerintah antara lain:

1. Membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan ruang terbuka hijau;
2. Menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
3. Berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
4. Mendorong dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan ruang terbuka hijau, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
5. Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab;
6. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

b. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Merujuk pada Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2014 yaitu Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang berikut penjelasan dari Ruang Terbuka Hijau Publik: Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana (RTR masing-masing kabupaten/kota).

▪ Ruang Lingkup

1. Indikator Penyediaan RTH Publik adalah persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
2. Sasaran Penyediaan RTH Publik adalah Meningkatnya ketersediaan RTH.
3. Penyediaan RTH Publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

4. Tata cara penyediaan RTH Publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

■ Target Capaian

Persentase target pencapaian SPM Penyediaan RTH Publik di tingkat kabupaten dan kota adalah 50% pada Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota telah menyediakan RTH publik sebanyak 50% dari seluruh luasan yang ditargetkan dalam perda tentang RTRW kabupaten/kota.

Cara perhitungan pencapaian target:

$$\text{SPM Penyediaan RTH Publik} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH publik yang tersedia}}{\sum \text{wil. kota/kawasan perkotaan Luasan RTH publik yang seharusnya}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembilang : Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.
- Penyebut : Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan adalah luasan RTH publik sesuai amanat UU 26/2007 yaitu 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Tabel 2.44.

Data Pertamanan Kawasan Perkotaan
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

NO	NAMA	LOKASI	LUAS (HA)
1.	Taman Bundaran Air Mancur	Depan Kantor Bupati / DPRD Kab. Beltim	0,45
2.	Taman Kater	Desa Padang (Depan Hotel Oasis)	0,0378
3.	Taman Beransai (Segitiga)	Depan Kantor Camat Manggar	0,735
4.	Taman Depan Rumah Makan Wena	Depan Rumah Makan Wena	0,011
5.	Taman Bantuan Bank Sumsel	Depan TK Negeri Pembina Manggar	0,0033
6.	Taman I	Depan Rumah Dinas Camat Manggar	0,0124
7.	Taman II	Depan Rumah Dinas Manggar	0,0042
8.	Taman III	Depan Rumah Dinas Manggar	0,0048
9.	Taman IV	Samping Terminal Manggar	0,0042
10.	Taman STMJ	Depan Puncak Manggar	0,0105
11.	Taman Patung Nelayan	Depan Puncak Manggar	0,008
12.	Taman Samping Puncak	Samping Puncak Manggar	0,2



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

NO	NAMA	LOKASI	LUAS (HA)
13.	Taman Pos Kota	Depan Pos Lintas Manggar	0,008
14.	Taman Pegadaian	Depan Pegadaian Manggar	0,0065
15.	Taman Rusa	Jln. Gajah Mada Dsn. Taruna Mulya	0,027
16.	Taman Depan Polsek Manggar	Depan Rumah Makan Eka	0,007
17.	Taman Depan RBT I	Depan RBT Manggar	0,0108
18.	Taman Depan RBT II	Depan RBT Manggar	0,0102
19.	Taman Depan RBT III	Depan RBT Manggar	0,024
20.	Taman Depan SMPN 4 Manggar	Samping SMPN 4 Manggar	0,0068
21.	Taman Base Camp Yonif I	Samak Manggar	0,008
22.	Taman Base Camp Yonif II	Samak Manggar	0,003
23.	Taman Teropong	Pantai Keramat Manggar	0,0345
24.	Taman Depan DPPKAD Kab. Belitong Timur	Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan	0,52
26.	Taman Segitiga Kelapa Kampit	Desa Senyubuk	0,467
27.	Ruang Terbuka Publik Manggar	Kawasan Pasar Lipat Kajang Manggar	0,03
33.	Ruang Terbuka Publik Manggar	Pasar Manggar	0,018
34.	Taman simpur depan BLHD	Komplek Perkantoran	0,02
35.	Tebat Gadong	kec.Manggar	96,04
	Total		98,722

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitong Timur, 2018

Adapun arahan kawasan permukiman perkotaan berdasarkan materi teknis RTRW Kab.Belitong Timur 2014-2034 diarahkan pada wilayah-wilayah yang secara eksisting sudah menjadi permukiman (permukiman swadaya) secara linear mengikuti perkembangan jaringan jalan dan tidak mengarah pada wilayah sempadan pantai dan tidak mengekskansi hutan lindung. Rencana pembangunan permukiman perkotaan di Kabupaten Belitong Timur, diarahkan pada Kecamatan Manggar (Desa Baru, Desa Lalang, Desa Lalang Jaya, Desa Kurnia Jaya, Desa Padang, dan Desa Mekar Jaya), Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Pembaharuan, Desa Mentawak, Desa Senyubuk, dan Desa Mayang), dan Kecamatan Gantung (Desa Gantung dan Desa Lenggang).

Tabel 2.45.
Luas Ruang Terbuka Hijau yang Harusnya Tersedia

No	Uraian	Luas Wilayah(ha)	20% RTH yang Harus Tersedia(ha)
1	Bagian wilayah perkotaan Manggar	1.699	339,8
2	Bagian wilayah perkotaan Kelapa Kampit	1.684	336,8
Total			676,6

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Belitong Timur, 2018

$$SPM Penyediaan RTH Publik = \frac{98,722}{676,6} \times 100\%$$

$$SPM Penyediaan RTH Publik = 14,59 \%$$



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai target penyediaan RTH Publik melalui beberapa hal diantaranya dengan melakukan penertiban area yang direncanakan menjadi RTH dan penganggaran penyediaan dan pengelolaan RTH publik. Upaya pencapaian ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya SPM bidang penataan ruang di tingkat pemerintah daerah kabupaten, dan kota. Meningkatkan peran masyarakat baik secara individu/kelompok, swasta, lembaga/badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

- Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
Indikator ruang publik yang sesuai peruntukannya dapat diperoleh jika diketahui berdasarkan pemantauan atau laporan bahwa terdapat luasan areal ruang publik yang mengalami perubahan fungsi. Perhitungan dilakukan dengan menghitung pengurangan luasan areal ruang publik yang mengalami perubahan fungsi terhadap luasan areal ruang publik yang seharusnya tersedia jika tidak terjadi perubahan fungsi. Indikator ini adalah bentuk inversi dari Rasio Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya. Saat ini penilaian indikator lebih pada adanya laporan masyarakat. Sedangkan untuk penilaian indikator berdasarkan pemantauan belum dijalankan dengan intensif karena terkendala pada kesiapan kebijakan daerah dan dokumen teknis untuk pemantauan/pengendalian ruang publik.
- Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Pelaksanaan penerbitan IMB di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG) kabupaten/kota yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG).

Rumus:
$$\frac{\Sigma \text{ IMB yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ bangunan gedung di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Jumlah IMB yang diterbitkan $\frac{1.720}{41.687} \times 100 = 4,13\%$

Jumlah IMB yang diterbitkan merupakan jumlah akumulatif dari tahun 2010 sampai dengan 2017 adalah 1.720 dengan penambahan 370 IMB yang diterbitkan pada tahun 2017 dan jumlah bangunan gedung di kabupaten Belitong Timur berdasarkan data jenis bangunan yang ada pada tahun 2017 (Sumber Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan tahun 2017).



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Penerbitan IMB tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan. Fungsi bangunan yang terdiri dari fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi bangunan gedung lebih dari satu fungsi (bangunan pemerintah), menara telekomunikasi, dermaga dan jembatan. Untuk menara telekomunikasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 telah dikeluarkan sejumlah 55 IMB.

Tabel 2.46.

Jumlah dan Luas Bangunan berdasarkan Jenis Bangunannya
pada Tahun 2017

Jenis Bangunan	Jumlah	Luas m ²
hotel	22	6.353
perumahan	37.787	2.300.314
bengkel/gudang pertanian	167	57.256
toko	2.068	142.982
pom bensin	9	1.520
lain-lain	1.181	66.168
rumah sakit	5	1.034
perkantoran swasta	57	8.202
tangki minyak	81	4.102
pabrik	6	1.550
bangunan tidak kena pajak	127	20.645
gedung sekolah	53	18.850
gedung pemerintah	116	17.805
olahraga/rekreasi	5	2.421
bangunan parkir	3	374
	41.687	2.649.576

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2018

Berdasarkan data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada peningkatan dari tahun ke tahun izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan. Penurunan capaian kinerja di tahun 2017 dikarenakan jumlah bangunan gedung di kabupaten Belitung Timur dihitung bukan hanya jumlah bangunan rumah tetapi juga jumlah bangunan berdasarkan jenis bangunannya.

Dalam rangka peningkatan IMB serta peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi IMB diperlukan kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan sebelum melakukan aktifitas pembangunan. Sosialisasi Peraturan Bupati Belitim Nomor 47 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam peraturan ini untuk persyaratan IMB, ada sedikit perubahan dari persyaratan sebelumnya, ada penambahan dan pengurangan syarat. Di mana sebelumnya masih mempersyaratkan Rekomendasi Desa dan Rekomendasi Camat, tetapi sekarang tidak lagi. Tetapi Desa dan Camat langsung diajak saat peninjauan lapangan. Saat itulah saran dan masukan Kades atau camat diberikan. Sedangkan penambahan syarat, yakni memerlukan Keterangan Rencana Kabupaten.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan menyusul terbitnya Perbup Beltim nomor 47 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Beltim adalah perlunya Sertifikat Laik Fungsi yang terkait dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2.47.
Rasio Bangunan ber-IMB per-Satuan Bangunan

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
IMB diterbitkan	997	1.077	1.225	1.350	1.720
Jumlah Rumah/Jenis Bangunan	29.117	29.532	29.946	29.934	41.687
Persentase	3,42	3,65	4,09	4,51	4,13

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Belitong Timur, 2018

c. Ketaatan Tata Ruang

Kabupaten Belitong Timur telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014 – 2034 . Namun dengan berbagai perkembangan yang ada, kondisi pada bidang penataan ruang yang ditemui sampai saat ini masih belum optimal, khususnya dalam tataran pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih belum semua RTR pada tiap tingkatan selesai disusun dan masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan pembangunan saat ini masih lebih fokus pada perencanaan, sehingga terjadi inkonsistensi dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang akibat lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.

Pada Tahun 2017 angka persentase ketaatan terhadap tata ruang adalah 100 persen atau 206.372 ha sesuai peruntukannya, dimana semua perijinan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Belitong Timur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014 – 2034 yang menyebutkan Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) , terdiri atas:

- kawasan peruntukan hutan produksi;
- kawasan peruntukan hutan rakyat;
- kawasan peruntukan pertanian;
- kawasan peruntukan perikanan;
- kawasan peruntukan pertambangan;
- kawasan peruntukan permukiman;



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan industri; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Ketaatan terhadap rencana tata ruang adalah mutlak diperlukan sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan agar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Proses pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur yang mengalokasikan dan memanfaatkan ruang harus menempatkan aspek tata ruang sebagai pertimbangan utama. Ketaatan terhadap tata ruang dapat dilihat dari perijinan-perijinan dan pemanfaatan ruang kegiatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Untuk alih fungsi lahan kawasan hortikultura seperti pada Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 27 tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 pasal 91, sebaiknya tidak dilakukan alih fungsi lahan dikarenakan pada saat dilakukan peninjauan kembali alih fungsi ini tidak bisa dilakukan pemutihan.

Kendala dalam upaya pencapaian indikator kinerja ketaatan terhadap tata ruang adalah dalam hal pengawasan dan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Belitung Timur masih terkendala dengan kurangnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang berkompeten dalam Bidang Penataan Ruang serta keterbatasan fasilitas yang ada. Pemecahan masalahnya adalah dengan memperketat proses dan prosedur perijinan pemanfaatan ruang dan pemberian planning advice pada setiap kegiatan yang mengalokasikan dan memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

d. Luas Wilayah Industri

Rencana kawasan peruntukan industri dikembangkan di Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) dengan pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Peruntukan lahan untuk rencana Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) adalah 1.532 hektar. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri ini, akan dikembangkan pengembangan kawasan sekitarnya, seperti: Kecamatan Kelapa Kampit/Damar. Ketentuan mengenai kawasan industri/zona industri dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Mengarahkan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan.
Arahan lokasi pengembangan industri di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Kelapa Kampit
 - Kawasan Industri Terpadu (KIAK) di Desa Air Kelik
 - Pelabuhan Teluk Asam di Desa Air Kelik

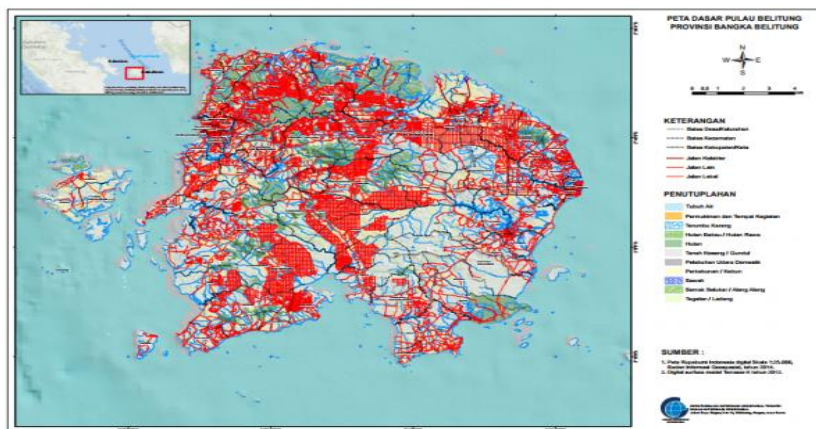
- b. Kecamatan Damar
 - Kawasan Industri Terpadu (KIAK) di Desa Mempaya
 - Pelabuhan Teluk Asam di Desa Mempaya

e. Luas Wilayah Kebanjiran (ha)

Perubahan iklim dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan berbagai bencana alam yang berkepanjangan. Letak geografis Indonesia yang berada pada ekuator menjadikan Indonesia rawan bencana hidrometeorologis. Curah hujan ekstrem selama 4 hari berturut-turut (16 s.d 19 Juli 2017) dengan intensitas tinggi mencapai 387,6 mm/hari dengan durasi hujan lebih kurang 20 jam per hari mengakibatkan ribuan orang terkena dampaknya.

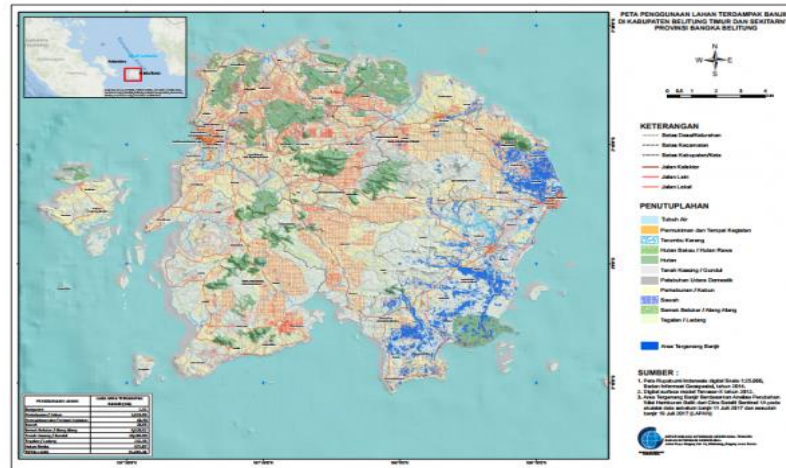
Hasil pemetaan fisiografis yang dilakukan oleh BIG dengan mengoverlay antara Citra Terrasar X tahun 2012 dengan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 25.000 dihasilkan peta kenampakan 3 dimensi. Berdasarkan hasil analisa terrain dari pemetaan fisiografis tersebut diketahui bahwa wilayah Belitong Timur relatif datar yang merupakan ciri khas dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kepulauan, kondisi ini biasanya memiliki *Time to Concentration* yg cepat, sehingga mudah terjadi penggenangan jika input hujan besar dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Dari pengamatan penggunaan lahan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 25.000 banyak dijumpai tubuh air, hal ini mencerminkan daerah ini merupakan dataran alluvial yang dikelilingi oleh sungai dan tubuh air lainnya yang secara kondisi fisiografis rawan terhadap terjadinya banjir.

Gambar 2. 4.
Peta dasar/fisiografis Pulau Belitong



Setelah diperoleh pemetaan fisiografis, selanjutnya ialah melakukan analisa luas daerah terdampak banjir. Hasil perhitungan luas terdampak diperoleh dari overlay antara peta fisiografis dengan peta estimasi genangan banjir hasil analisa perubahan nilai hamburan balik dari citra satelit sentinel 1A pada akuisisi data sebelum banjir 11 juli 2017 dan sesudah banjir 19 juli 2017 (LAPAN).

Gambar 2. 5.
Peta penggunaan lahan terdampak banjir Kab. Belitong Timur



Berdasarkan analisa kaji cepat yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial didapatkan estimasi hasil luas penggunaan lahan terdampak seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.48.
Luas Area Terdampak Banjir

NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS AREA TERDAMPAK BANJIR (HA)
1	Bangunan	1,31
2	Perkebunan /Kebun	1.515,55
3	Permukiman dan Tempat Kegiatan	10,70
4	Sawah	20,85
5	Semak Belukar / Alang Alang	8.520,52
6	Tanah Kosong / Gundul	10.269,90
7	Tegalan / Ladang	242,35
8	Hutan Rimba	872,07
	TOTAL LUAS	21.453,26

NB: Hasil diatas mengabaikan luas perairan daratan terdampak (sungai, danau, rawa, dan tubuh air lainnya)

Banjir ini disebabkan pula oleh kemampuan drainase dan sungai beserta anak-anak sungainya yang idak mampu menampung hujan dengan intensitas inggi ditambah meningkatnya degradasi lingkungan di Belitong dan Belitong Timur. Air hujan di wilayah Belitong biasanya mengalir sebagai aliran permukaan (run of) dan menggerus permukaan. Kandungan biji imah dan kaolin banyak ditemukan di daerah endapan batuan granit, sehingga daerah sekitar sungai banyak dimanfaatkan sebagai usaha pertambangan. Banyaknya usaha pertambangan ini yang tidak didukung dengan upaya perbaikan lingkungan yang banyak menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan. Air menjadi keruh



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

karena parikel lumpur dan sukar untuk meresap ke tanah dan sungai yang dangkal terdapat di Belitong sebagai akibat dari aktivitas pertambangan tersebut.

Parikel lumpur hasil tambang yang terbawa aliran tersebut menyebabkan drainase dan sungai-sungai menjadi dangkal. Jika terus terjadi, daya tampung sungai akan semakin berkurang dan saat hujan lebat dapat terjadi banjir. Perlu segera ada kebijakan strategis dari pemerintah setempat untuk melakukan restorasi kerusakan akibat tambang dan melakukan pengerukan di aliran-aliran sungai yang sudah dangkal.

f. Luas Wilayah Kekeringan(ha)

Menurut *International Glossary of Hidrology* (WMO 1974) dalam Pramudia (2002), pengertian kekeringan adalah suatu keadaan tanpa hujan berkepanjangan atau masa kering di bawah normal yang cukup lama sehingga mengakibatkan keseimbangan hidrologi terganggu secara serius. Secara tipologi kekeringan didefinisikan sebagai berikut :

1. Kekeringan Meteorologis

Kekeringan meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Kekeringan meteorologis biasanya didefinisikan sebagai kurangnya curah hujan selama periode waktu yang telah ditentukan. Ambang batas yang dipilih, seperti 50% dari curah hujan normal selama jangka waktu enam bulan akan bervariasi menurut lokasi sesuai dengan kebutuhan pengguna atau aplikasi (SAARC, 2010). Data yang diperlukan untuk menilai kekeringan meteorologi adalah informasi curah hujan harian, suhu, kelembaban, kecepatan dan tekanan angin serta penguapan.

2. Kekeringan Hidrologis

Kekeringan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan hidrologis biasanya didefinisikan oleh kekurangan pada permukaan dan persediaan air bawah permukaan relatif terhadap kondisi rata-rata pada berbagai titik dalam waktu semusim. Seperti kekeringan pertanian, tidak ada hubungan langsung antara jumlah curah hujan dengan status air permukaan dan persediaan air bawah permukaan di danau, waduk, akuifer, dan sungai karena komponen sistem hidrologi digunakan untuk beberapa tujuan, seperti irigasi, rekreasi, pariwisata, pengendalian banjir, transportasi, produksi listrik tenaga air, air pasokan dalam daerah, perlindungan spesies terancam punah, dan manajemen lingkungan, ekosistem, dan pelestarian. Ada juga waktu kesenjangan yang cukup besar antara penyimpangan dari curah hujan dan titik di mana kekurangan-kekurangan ini menjadi jelas dalam komponen permukaan dan bawah permukaan dari sistem hidrologi (SAARC, 2010).



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITANG TIMUR TAHUN 2016-2021

3. Kekeringan Pertanian

Kekeringan pertanian berhubungan dengan kekurangan kandungan air tanah di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu yang mempengaruhi penurunan produksi pertanian. Kekeringan pertanian didefinisikan sebagai kurangnya ketersediaan air tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan makanan ternak dari curah hujan normal selama beberapa periode waktu tertentu. Hubungan antara curah hujan dan infiltrasi air hujan ke dalam tanah seringkali tidak berlangsung. Tingkat infiltrasi bervariasi tergantung pada kondisi kelembaban, kemiringan, jenis tanah, dan intensitas dari peristiwa presipitasi. Karakteristik tanah juga berbeda. Sebagai contoh, beberapa tanah memiliki kapasitas menyimpan air lebih tinggi, yang membuat mereka kurang rentan terhadap kekeringan (SAARC, 2010).

4. Kekeringan Sosial Ekonomi

Kekeringan sosial ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana pasokan komoditas ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi dan pertanian. Kekeringan sosial ekonomi berbeda nyata dari kekeringan yang lain karena mencerminkan hubungan antara penawaran dan permintaan untuk beberapa komoditas atau ekonomi yang baik (seperti air, pakan ternak, atau pembangkit listrik tenaga air) yang tergantung pada curah hujan. Pasokan bervariasi setiap tahun sebagai fungsi dari ketersediaan air. Permintaan juga naik turun dan sering dikaitkan dengan suatu kecenderungan yang positif akibat peningkatan populasi, pengembangan dan faktor lainnya (SAARC, 2010).

Dampak kekeringan bisa ekonomi, lingkungan atau sosial. Kekeringan menghasilkan dampak yang kompleks mencakup banyak sektor ekonomi baik luar daerah yang mengalami kekeringan. Kompleksitas ini ada karena air merupakan bagian integral dari kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan menyediakan layanan. Dampak kekeringan sering disebut bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung termasuk tanaman berkurang, lahan tidur, dan produktivitas hutan, meningkatkan bahaya kebakaran, ketinggian air berkurang, tingkat kematian satwa liar, dan kerusakan satwa liar dan habitat ikan. Penginderaan jauh dan teknologi GIS memberikan kontribusi signifikan untuk manajemen kekeringan (Jeyaseelan, 2003).

Dari definisi di atas kekeringan yang melanda Kab.belitang Timur tidak sampai pada kekeringan sosial ekonomi. Sampai dengan tahun 2017 belum ada informasi atau data yang menjelaskan bahwa kabupaten Belitang Timur memiliki wilayah kekeringan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

g. Luas Wilayah Perkotaan (ha)

Adapun arahan kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada wilayah-wilayah yang secara eksistng sudah menjadi permukiman (permukiman swadaya) secara linear mengikuti perkembangan jaringan jalan dan tidak mengarah pada wilayah sempadan pantai dan tidak mengekspansi hutan lindung. Rencana pembangunan permukiman perkotaan di Kabupaten Belitung Timur, diarahkan pada Kecamatan Manggar (Desa Baru, Desa Lalang, Desa Lalang Jaya, Desa Kurnia Jaya, Desa Padang, dan Desa Mekar Jaya), Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Pembaharuan, Desa Mentawak, Desa Senyubuk, dan Desa Mayang), dan Kecamatan Gantung (Desa Gantung dan Desa Lenggang). (sumber RTRW Kab.Belitung Timur)

Tabel 2.49.
Luas Wilayah Perkotaan tahun 2017

No	Uraian	Luas Wilayah(ha)
1	Bagian wilayah perkotaan Manggar	1.699
2	Bagian wilayah perkotaan Kelapa Kampit	1.684

h. Persentase kawasan strategis dengan infrastruktur baik

Sehubungan dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja utama kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2021 yaitu kawasan strategis kelautan dan perikanan dengan infrastruktur baik dan Kawasan Strategis Pariwisata dengan Infrastruktur Baik maka berdasarkan peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan Kawasan strategis kelautan dan perikanan serta kawasan strategis pariwisata di tujuh kecamatan yang terdiri dari Sembilan desa sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Kelautan dan Perikanan adalah
 - a. Kecamatan Manggar: Desa Bukulimau, Desa Baru, Desa Kurnia Jaya;
 - b. Kecamatan Gantung : Desa Lenggang;
 - c. Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Mayang;
 - d. Kecamatan Simpang Renggang : Desa Lintang;
 - e. Kecamatan Damar : Desa Burung Mandi;
 - f. Kecamatan Simpang Pesak : Desa Tanjung Batu Itam; dan
 - g. Kecamatan Dendang : Desa Dendang.
2. Kawasan Strategis Pariwisata adalah
 - a. Kecamatan Manggar : Desa Lalang, Desa Baru;
 - b. Kecamatan Gantung : Desa Lenggang;
 - c. Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Senyubuk, Desa Mayang;
 - d. Kecamatan Simpang Renggang : Desa Simpang Tiga;
 - e. Kecamatan Damar : Desa Burung Mandi;



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

- f. Kecamatan Simpang Pesak : Desa Tanjung Kelumpang; dan
- g. Kecamatan Dendang : Desa Balok.

Capaian indikator sasaran Persentase kawasan strategis dengan infrastruktur baik adalah 72,23 % merupakan rata-rata persentase dari dua kawasan strategis yang terdiri dari kawasan strategis kelautan dan perikanan dan sasaran kawasan strategis pariwisata. Kawasan strategis kelautan dan perikanan pada tahun 2016 dan 2017 masih 66,67 % yaitu baru 6 desa yang memiliki infrastruktur baik. Tiga desa dengan kondisi jalan yang belum baik adalah Desa Lintang yaitu kurang lebih masih 2,3 km perlu dilakukan peningkatan jalan menuju pangkalan Damar, Desa Tanjung Batu Itam peningkatan jalan direncanakan sampai dengan tahun 2019 yang bersumber dari DAK, sedangkan desa Dendang di Semalar dikarenakan terhambat kawasan hutan lindung.

Kawasan strategis pariwisata pada tahun 2016 dan 2017 adalah 77,78% yaitu terealisasi di tujuh desa. Dua desa dengan kondisi jalan yang belum baik adalah desa Simpang Tiga yaitu menuju kawasan air terjun dan desa Tanjung Kelumpang yang direncanakan akan dilaksanakan dalam tiga tahun dengan anggaran yang bersumber dari APBN.

Pada tahun selanjutnya untuk mendukung kedua indikator sasaran ini selain dengan program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan maka akan dilaksanakan juga pada program dan kegiatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mulai dikelola secara efektif sejak tahun 2017 dengan dibentuknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Data dasar terkait urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih terbatas dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) baru disusun pada tahun 2018 sehingga tidak semua komponen data historis dimiliki.

Tabel 2.50.

Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	20,25	33,42	40,42	40,4	54,5
Rasio rumah layak huni (%)	-	-	39,69	38,21	51,82
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	-	124,56	124,56	120,6 1	118,2 7
Persentase luasan permukiman kumuh di	-	-	-	3,17	5,05



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
kawasan perkotaan (%)					
Persentase permukiman yang tertata (%)	-	-	96,29	96,41	96,48

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur, 2017

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

Jumlah rumah pada tahun 2017 sebanyak 31.082 unit dan tumbuh 1,8% dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 30.132 unit. Secara umum rasio rumah layak huni dan cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami tren meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah rumah sehingga dapat disimpulkan terdapat peningkatan kualitas perumahan di Kabupaten Belitung Timur.

Luas area permukiman di Kabupaten Belitung Timur seluas 3.358,39 ha berdasarkan kajian penyusunan Dokumen Tata Ruang Tahun 2014. Dari luasan tersebut terdapat 124,56 ha kawasan permukiman kumuh yang perlu ditangani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-609 Tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Belitung Timur. Sampai dengan tahun 2017 pengurangan kawasan kumuh baru mencapai 6,29 ha. Basis data luasan kawasan kumuh tahun 2018 mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-400 Tahun 2018 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Belitung Timur dengan luas 55,78 hektar. Pada proses perhitungannya kawasan kumuh yang telah diselesaikan pada tahun 2017 dikeluarkan dari daftar, selain itu wilayah-wilayah yang teridentifikasi bukan kumuh juga dikeluarkan dari daftar. Sebaran luas Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.51.
Luas Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Belitung Timur

NO	LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	SATUAN	2014*	2018**
1	Desa Baru Kecamatan Manggar	Ha	37,95	28,90
2	Desa Lenggang Kecamatan Gantung	Ha	3,15	3,4
3	Desa Gantung Kecamatan Gantung	Ha		13,86
4	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	Ha	83,46	9,62
Kabupaten Belitung Timur		Ha	124,56	55,78

Ket: * SK BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 188.45-609 Tahun 2014

** SK BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 188.45-400 Tahun 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

E. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
serta Perlindungan Masyarakat

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) (*), **)	30,71	30,71	30,71	41,92	41,92
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) (persen) *)	84,21	100	100	100	100
Persentase Penegakan Perda (persen) *)	62,83	70,91	77,29	79,51	100
Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) (persen) ***)	66,67	100,00	95,45	100	100
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (persen)***)	70,31	70,31	70,31	70,31	70,31
Persentase Partisipasi Pemilih (persen) **)	70	75,93	75,93	75,93	75,93
Persentase menurunnya kasus konflik sosial	90	90	90	80	80
Persentase kasus penyelenggaraan demokrasi	0	3	3	3	0
Persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza	10	10	10	16,6	40
Persentase terwujudnya aparaturnya polisi pamong praja yang tangguh dan profesional	90	90	90	80	80

Sumber : *) Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

**) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2018

***) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan beranggotakan warga masyarakat paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk setiap Desa/Kelurahan. Menurut permendagri tersebut di atas di kabupaten Belitong Timur minimal ada 390 orang satlinmas. Tahun 2016 anggota Satlinmas pada 39 Desa di Belitong Timur berjumlah 314 orang dan untuk tahun 2017 berjumlah 384 orang. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diartikan sebagai jumlah anggota satlinmas kabupaten belitong timur pada tahun tersebut di bagi dengan jumlah minimal satlinmas berdasarkan permendagri 84 thn 2014 x 100%.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)

Kegiatan penertiban penyakit masyarakat (PEKAT) dilakukan pada tempat-tempat hiburan malam, rumah kontrakan/kost, menindaklanjuti laporan masyarakat perihal pelanggaran izin pertambangan, dan reklame yang bekerjasama dengan OPD yang terkait, TNI/POLRI, dan Kejaksaan.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITANG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.53.

Data Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

NO.	Tahun	Pelanggaran K3 yang Terselesaikan	Pelanggaran K3 yang dilaporkan/teridentifikasi SATPOLPP
1	2013	32	38
2	2014	13	13
3	2015	7	7
4	2016	26	26
5	2017	23	23

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Belitang Timur, 2018

c. Persentase Penegakan Perda

Saat ini Satpol PP Kabupaten Belitang Timur hanya dapat melakukan tindakan non yustisi. Untuk melakukan penindakan diperlukan pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara di Satpol PP Kabupaten Belitang Timur ada 3 orang PPNS. Namun belum bisa melakukan penindakan dikarenakan 1 orang PPNS belum ada pelantikan ulang dari Kemenkumham dikarenakan pernah bertugas di OPD lain dan 1 orang PPNS tidak memenuhi ketentuan dan syarat pendidikan tentang pengangkatan PPNS. Capaian indikator sasaran ini dihitung berdasarkan jumlah penyelesaian penegakan perda di bagi jumlah pelanggaran perda di kali 100 %.

Tabel 2.54.

Data Penyelesaian Penegakan PERDA

NO.	Tahun	Penegakan PERDA yang Terselesaikan	Jumlah Pelanggaran PERDA
1	2013	32	38
2	2014	15	27
3	2015	9	16
4	2016	15	25
5	2017	32	32

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Belitang Timur, 2018

d. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten Belitang Timur hanya di kecamatan manggar Pada tahun 2016 laporan kebakaran yang masuk ke pos pemadam kebakaran Kabupaten Belitang Timur sebanyak 8 kali, semua dapat di tertangani dengan baik, namun dari 8 kali kebakaran yang terjadi di tahun 2016, yang masuk WMK ada 5 (lima) kali sedangkan yang di luar WMK ada 3 (tiga) kali. Sedangkan tahun 2017 laporan kebakaran yang masuk ke pos pemadam kebakaran Kabupaten Belitang Timur sebanyak 24 kali, namun dari 24 kali kebakaran yang terjadi di tahun 2017, yang masuk WMK ada 16 (enam belas) kali sedangkan yang di luar WMK ada 8 (delapan) kali.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

e. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten Kota

Pos pemadam kebakaran Kabupaten Belitung Timur dapat melayani kebakaran hampir di seluruh wilayah kabupaten belitung timur dikecualikan di wilayah pulau kecil

f. Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat Partisipasi pemilih pada pemilu presiden dan legislative pada tahun 2014 kabupaten Belitung Timur menempati posisi tertinggi diantara 7 Kabupaten/kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung dari 85 % yang ditargetkan tercapai 83% jumlah partisipasi pemilih pada tahun tersebut. Tingkat partisipasi tahun 2015 yakni 76,7 % dengan capaian kinerja mencapai 100% dengan rincian jumlah pemilih DP4 pada tahun 2015 sebanyak 83.690 suara dengan suara sah sebesar 62.429 suara, suara tidak sah sebesar 1.762 . suara Di tahun 2016 ada pemilu/ pilkada yakni Pilkades (pemilihan Kepala Desa) di 17 Desa pada 7 Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Dengan rincian jumlah pemilih DP4 pada tahun 2016 sebesar 83.627 dengan suara Pengguna hak pilih sebesar 58.689 suara, suara yang tidak menggunakan Hak Pilihnya sebesar 24,938 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 70,40 % dengan capaian kinerja 88 %. Jumlah DP4 ditetapkan sebesar 83.627 orang untuk Pilkada Gubernur/ Wagub Kep. Bangka Belitung pada tahun 2017. Tingkat Partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung adalah 70.4 % dengan suara pengguna hak pilih sebesar 58.689 suara dengan capaian kinerja sebesar 88 %. Sehingga dapat dikatakan tingkat partisipasi pemilih pada Tahun 2016 dan 2017 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 70.4 %. Hasil ini diperoleh pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017 di tingkat KPU Belitung Timur pada tanggal 22 Februari 2017 bertempat di Rumah Makan Fega. Adapun persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan dalam menghadapi PILKADA Gubernur/ Wagub Kep. Bangka Belitung. Yakni yang bersifat Non Budgeter / tidak ada dalam Penganggaran Misalnya: Sosialisasi kepada masyarakat melalui Pemberitahuan ke Tingkat Kecamatan , Desa, dan RT. Memasang Spanduk tentang informasi Pilkada Gubernur/ Wagub Kep. Bangka Belitung.

g. Persentase menurunnya kasus konflik sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial maka diharuskan melakukan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Belitung Timur, selain melakukan potensi konflik yang disebabkan konflik social dan terorisme juga dilakukan pemantauan situasi dan kondisi konflik di wilayah kabupaten Belitung Timur secara terus menerus terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

yang dibentuk setelah disahkannya undang-undang nomor 7 tahun 2012 dan PP Nomor 2 tahun 2015 . selama kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan kasus konflik sosial yang ada di Belitung Timur, selain permasalahan sosial kemasayakatan ,masalah sengketa lahan masih cukup tinggi.

h. Persentase partisipasi memilih

Partisipasi masyarakat pada momen pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka memilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu, jangan dipandang sebelah mata. Karena, eksistensinya dapat mencegah tindakan-tindakan kontra demokrasi yang dapat mengoyak dan mendegradasi loyalitas rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Apabila dilihat dari data yang ada persentase memilih pada kurun waktu pemilu 2014, 2015, 2017 dikatakan tinggi dari sebelum pemilu 2014 yakni hanya 70 persen.

i. Persentase kasus penyelenggaraan demokrasi

Kedewasaan bangsa dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh, hal ini ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat, semakin membaiknya kesadaran politik masyarakat, semakin tumbuhnya budaya politik yang demokratis, serta stabilitas politik yang semakin baik. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan agar sepenuhnya berada di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi dalam kehidupan politik, sertamelaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas.

Memperkuat peran pemerintah masyarakat dan partai politik dalam kehidupan politik merupakan salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan proses Demokrasi selain memantapkan pelebagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip – prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dan sistem pemerintahan. Memantau situasi Daerah terhadap stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur dan fungsi serta budaya politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Upaya meminimalisir kasus penyelenggran demokrasi di daerah lainnya juga memanfaatkan integritas bangsa dengan mengedepankan upaya - upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui berbagai pendekatan sosial, politik dan budaya. Serta mewujudkan Aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi. Sehingga kasus yang ada dilapangan dapat ditekan dengan baik.

j. Persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza

Selain dilakukan Penyuluhan/ Sosialisasi terhadap bahayanya Miras dan Napza di Lingkungan pelajar, atau pendidikan juga pada kalangan masyarakat, pemuda, karang taruna juga dilakukan penyuluhan dan pembinaan di lingkungan café remang-remang atau tempat hiburan sekaligus melakukan kontrol tes narkoba pada waktu-waktu pengawasan terhadap bahaya Napza dengan melibatkan Tim dari Kesbangpol, Polres, Dinas Kesehatan, Sat Pol PP, Dinas Sosial. Sehingga angka perubahan perilaku masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik. Selain dari pada itu adanya kebijakan Pemerintah daerah melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur untuk menyelenggarakan proses penanganan para pecandu napza melalui rehabilitasi medik dan sosial yang terjadi di Kabupaten Belitong .sebagai leading sektor sebelum BNK Belitong Timur ada penanggungjawab mencatat, meregistrasi dan mendata nama dan identitas, pecandu yang terkena razia dari satauan tugas ataupun yang datang langsung ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dilaksanakan pengobatan secara berkelanjutan di sarana kesehatan yang di tunjuk. Apabila terjadi proses kegiatan razia penertiban yang melibatkan satuan tugas penindakan hukum dan diterjaring pelaku-pelaku penyalahgunaan penggunaan napza maka yang bersangkutan akan terlebih dahulu diproses secara hukum dan apabila di katagorikan dalam hal penyalahgunaan zat adiktif berbahaya maka yang bersangkutan akan diserahkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Belitong Timur. Tahap pengobatan dilakukan oleh Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Belitong Timur, Rumah Singgah Rehabilitasi dengan Standar Pengobatan Rehabilitasi Medik yang ditetapkan.

F. Urusan Sosial

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Urusan Sosial

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (persen)	31,13	47,6	19,89	16,96	46,15
Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis (persen)	3,55	19,98	2,00	19,01	13,89
Presentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (persen)	100	100	100	100	-



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100	100
Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (persen)	2,94	2,94	70,44	8,39	12,50
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial Kesehatan	-	-	-	75,00	80,00
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial	-	-	-	75,00	61,00
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial pendidikan (KIP dan Bea Siswa)	-	-	23,55	33,42	24,21
Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan akses, kemudahan dan jangkauan rumah tangga miskin	-	-	-	100	100
Persentase peningkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga sasaran	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur 2018

*) Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur, 2018

a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial [PMKS] yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan Dasar di Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2017 sebanyak 46,15% dimana jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 20%.

Tabel 2.56.

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial					
- Orang	5.677	5.714	5.237	9.646	3.653
- Target (%)	82,94	80	80	75	75
PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun					
- Jumlah PMKS yang menerima bantuan	1767	1199	1.042	1.636	1.686
- Realisasi (%)	31,13	47,60	19,89	16,96	46,15

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur 2018

b. Persentase PMKS Skala Kabupaten/Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis.

Jumlah PMKS yang menerima program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE pada tahun 2017 sebanyak 1.040 jiwa sedangkan Tahun 2016 sebanyak 1.424. Jika dibandingkan tahun sebelumnya maka mengalami penurunan sebanyak 384 jiwa.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.57.

Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial
Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Tahun	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis (orang)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis (orang)	Persentase Capaian
2013	4.791	170	3,55%
2014	4.897	245	19,98%
2015	4.642	67	2%
2016	7.491	1.424	19,01
2017	7.491	1.040	13,89

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur 2018

- c. Presentase Panti Sosial Skala Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Penanganan Panti Sosial sejak tahun 2017 diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.58.

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tahun	Jumlah panti sosial skala Kabupaten/Kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasaran pelayanan kesejahteraan sosial (unit)	Jumlah panti sosial skala Kabupaten/Kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasaran pelayanan kesejahteraan sosial (unit)	Persentase Capaian
2013	2	2	100
2014	2	2	100
2015	2	2	100
2016	2	2	100
2017	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur 2018

Keterangan: untuk Tahun 2017, penyediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menjadi kewenangan provinsi

- d. Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat.

Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial pada tahun 2017 sebanyak 3.644 kepala keluarga dari 3.644 jumlah kepala keluarga yang ditangani, dimana jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yaitu sebanyak 28 kepala keluarga dari 28 jumlah kepala keluarga yang ditangani pertahun 100% hal ini disebabkan bencana banjir bandang yang melanda Kab. Belitong Timur pada Bulan Juli 2017 serta bencana yang bersifat tak terduga atau spontan.

Tabel 2.59.

**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat**

Tahun	Jumlah Korban Bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK)	Jumlah Korban Bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK)	Persentase Capaian
2013	38	38	100
2014	69	69	100
2015	26	26	100
2016	28	28	100
2017	3.644	3.644	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur 2018

e. Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2017 sebanyak 152 orang dengan target 1.220 orang, ini meningkat dari tahun 2016 yaitu sebanyak 103 orang.

Tabel 2.60.

**Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental,
Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

Tahun	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 Tahun (orang)	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 Tahun (orang)	Persentase Capaian
2013	2.521	74	2,94
2014	2.521	74	2,94
2015	1.719	1.211	70,44
2016	1.228	103	8,39
2017	1.220	152	12,50

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur 2018

f. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial [PMKS] yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2017 sebanyak 46,16% dimana jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 16,96%.

g. Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dengan jumlah korban bencana



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

yang seharusnya dievakuasi pada tahun 2017 sebanyak 11.728 korban dari 11.728 jumlah korban yang ditangani, dimana jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yaitu sebanyak 28 korban dari 28 jumlah korban yang ditangani dengan capaian pertahun 100% hal ini disebabkan bencana banjir bandang yang melanda Kab. Belitang Timur pada Bulan Juli 2017 serta bencana yang bersifat tak terduga atau spontan.

Tabel 2.61.

Persentase korban bencana skala kabupaten yang di evakuasi
menggunakan sarana prasarana tanggap darurat

Tahun	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun (Orang)	Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun (Orang)	Persentase (%)
2013	36	36	100%
2014	63	63	100%
2015	47	47	100%
2016	28	28	100%
2017	11.728	11.728	100%

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2017

h. Persentase peningkatan akses, kemudahan dan jangkauan rumah tangga miskin

Persentase peningkatan akses, kemudahan dan jangkauan rumah tangga miskin terdata pada dinas sosial pada tahun 2016 bersama pembentukan program baru bernama PSPPK (Program Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan) yang terealisasi 100% pada Tahun 2016 dan 2017

i. Persentase peningkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga sasaran

Persentase peningkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga sasaran terdata pada dinas sosial pada tahun 2016 bersama pembentukan program baru bernama Program Keluarga Sinergi pada saat Masih di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sekarang menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan yang terealisasi 100% pada Tahun 2016 dan 2017



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2.62.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Belitong Timur

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pencari kerja yang terdaftar (orang)	1.151	334	69	239	482
Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	282	250	22	130	172
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (kasus)	18	8	13	14	8
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB (%)	90	100	80,95	61,90	61,54
Besaran pemeriksaan perusahaan (kali)	66	179	35	-	-
Angka Kecelakaan kerja (kali)	30	45	112	-	-
Tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek (orang)	6.527	5.632	6.985	6.928	7.314
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek (%)	88,94	73,52	89,02	82,43	89,12
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (orang)	190	282	332	40	160
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	0	50	100	100	80
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	60	127	60	100	84,2
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	15,78	100	44	54	28
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	65,09	68,79	68,11	68,52	68,00
Persentase penurunan sengketa hubungan industril (%)	-	-	-	26,58	13,68
Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,25	2,61	2,55	2,29	2,62
Keselamatan dan perlindungan / BPJS (buruh)	6.527	5.632	6.985	6.928	7.312

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur, 2018

a. Jumlah pencari kerja yang terdaftar

Jumlah pencari kerja yang terdaftar cenderung fluktuatif, dimana periode tahun 2013-2015 mengalami penurunan selanjutnya kembali meningkat kembali mulai tahun 2016. Beberapa terobosan yang dilaksanakan adalah dengan pelaksanaan kegiatan bursa kerja.

b. Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan juga fluktuatif, dimana pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan secara jumlah. Peningkatan kepedulian perusahaan dan pencari kerja dalam informasi kesempatan kerja turut mempengaruhi pencapaian ini.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

c. Besar kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus dan Persentase)

Tabel 2.63.

Daftar Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Jumlah/Jenis Perselisihan				Tingkat Penyelesaian		Sisa
		HAK	Kepentingan	PHK	Antar SP	PB	Anjuran	
1	PT. Sinar Prapanca	1	0	0	0	PB		
2	PT. Puncak Jaya Lestari Cab Manggar	1	0	0	0		Anjuran	
3	PT. Belitong Sand Mining	0	0	1	0	Proses		
4	PT. Putra Timur Setia	0	0	1	0	Proses		
5	Koperasi Bina Sejahtera Perhubungan	0	0	1	0	PB		
6	PT. Belitong Timur Permai	0	0	1	0	PB		
7	PT. Nurindra Eka Persada	0	0	1	0	PB		
8	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	0	0	1	0	PB		
9	Eks. Karyawan PT.MASJ	0	0	1	0			Tidak sepakat
10	PT. Mulia Anugerah Wisata	0	0	1	0	PB		
11	PT. Steelindo Wahana Perkasa	0	0	1	0	PB		
12	PT. Nurindra Eka Persada	0	0	1	0	PB		
13	CV. Kiwarsa Belitong Indonesia	1	0	0	0	Proses		
Jumlah		3	0	10	0			

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur, 2018

d. Besaran pemeriksaan perusahaan

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana pada urusan ketenagakerjaan terjadi perubahan kewenangan terkait pengawasan ketenagakerjaan dari Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini menyebabkan pihak Kabupaten tidak lagi berwenang untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan perusahaan.

e. Angka kecelakaan kerja

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana pada urusan ketenagakerjaan terjadi perubahan kewenangan terkait pengawasan ketenagakerjaan dari Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini menyebabkan wajib lapor perusahaan tidak lagi disampaikan kepada Kabupaten melainkan kepada Provinsi.

f. Tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek (orang dan persentase)

Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar menjadi peserta Jamsostek atau saat ini dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan cenderung fluktuatif. Tahun 2017, jumlah peserta jamsostek adalah sebanyak 7.314 orang atau 89,12% dari jumlah pekerja. Sektor perkebunan masih menjadi yang memiliki tingkat kepesertaan terbesar, sedangkan sektor lainnya masih diperlukan upaya-upaya untuk peningkatan.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

g. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan dunia kerja serta menciptakan wirausaha – wirausaha baru di Belitung Timur. Kegiatan ini sangat berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan di Belitung Timur. Pada tahun 2017 jumlah peserta pelatihan berbasis kewirausahaan sebanyak 140 orang atau sesuai dengan target, sedangkan jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 96 orang atau tercapai 100%. Adapun sumber dana kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, tidak hanya bersumber pada APBD II melainkan juga APBD I dan APBN.

h. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Belitung Timur selama empat tahun terakhir cenderung fluktuatif. Dimana pada tahun 2014 TPAK sebesar 68,79%, menurun menjadi 68,11% di tahun 2015, lalu meningkat lagi menjadi 68,52% pada tahun 2016, serta turun kembali menjadi 68,00% di tahun 2017. Menurunnya angka TPAK tahun 2017, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk usia kerja (PUK) yang lebih besar dibandingkan angkatan kerja.

i. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung Timur cenderung fluktuatif. Jika dilihat dari tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai tahun 2016 yaitu dari 2,61% menjadi 2,29%, akan tetapi kembali naik pada tahun 2017 menjadi 2,62%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang tidak bisa diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang seimbang serta faktor-faktor lainnya. Meskipun begitu, TPT Belitung Timur masih jauh dibawah TPT nasional yang sebesar 5,50% atau TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 3,78%. Dengan berlakunya UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memberi dampak yang cukup signifikan terutama terkait dengan kewenangan pengawasan. Dimana pengawasan ketenagakerjaan menjadi wewenang provinsi. Besaran kasus yang diselesaikan dengan PB (Perjanjian Bersama) menunjukan trend menurun pada tiga tahun terakhir yaitu 86,7% pada tahun 2015 menjadi 61,54% tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya yaitu 10 kasus tahun 2014 menjadi 15 tahun 2015, 21 tahun 2016, dan menurun tahun 2017 menjadi 13 kasus. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan juga fluktuatif, dimana tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 250 menjadi 22 orang, akan tetapi periode tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan kembali yaitu 130 orang dan 172 orang. Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan meningkat, dimana tahun 2016 sebesar 6.928 orang menjadi 7.312 orang.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

j. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Tabel 2.64.
Rasio Lulusan Universitas (S1/S2/S3) Tahun 2014 - 2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah Lulusan Universitas (S1/S2/S3)*)	4.069	2.849	3.042	2.995
Jumlah Penduduk **)	111.225	114.095	119.261	122.398
Rasio lulusan S1/S2/S3	0,036	0,024	0,025	0,024

Sumber : *) BPS, Sakernas Tahun 2014-2017 (Agustus)

**) Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 Semester II

k. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tabel 2.65.
Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2017
Kabupaten Belitang Timur

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk usia < 15 tahun	31.716	29.970	29.770	30.300	30.941
Jumlah penduduk usia > 64 tahun	6.301	6.075	6.423	6.624	6.984
Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	38.017	36.045	36.193	36.924	37.925
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	81.675	75.180	77.922	82.337	84.473
Rasio ketergantungan (3) / (4)	46,5	47,9	46,4	44,845	44,896

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitang Timur, 2018

B. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah koperasi aktif (unit)	76	85	90	56	59
Jumlah UMKM (Unit)	9.979	10.027	10.101	10.158	10.260
Persentase UMK terhadap UMKM (Persen)	99,83	99,84	99,85	99,79	99,80
Pertumbuhan Koperasi baru (unit)	8	9	5	2	2
Jumlah BPR/LKM (unit)	3	3	0	0	0
Jumlah anggota koperasi (Orang)	8.708	8.840	9.250	9.386	10.067
Persentase koperasi sehat	0,08	0,1	0,1	0,27	0,27
Persentase usaha mikro yang mempunyai ijin usaha	-	-	0,115	0,013	0,05

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitang Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan 2015, selanjutnya menurun tahun 2016 dan kembali naik sebanyak 3 unit tahun 2017 yaitu KUD Bhakti di Dendang, KUD Tri Karya makmur di Simpang Renggang, dan Koperasi Tani Maju di Manggar. Adanya penurunan jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 yang signifikan yaitu dari 90 unit menjadi 56 unit adalah terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tentang pembubaran koperasi dimana koperasi yang tidak menjalankan usaha nyata selama 2 tahun berturut-turut sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi dibubarkan. Pertumbuhan koperasi baru di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan angka yang cenderung menurun, dan stagnan pada tahun 2016 serta 2017 yaitu 2 unit. Adapun koperasi baru pada tahun 2017 adalah Koperasi Barokah Mitra Mandiri Selinsing dan Koperasi Nelayan Usaha Mandiri Belitong (NUM Belitong). Jumlah anggota koperasi mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu menjadi 7.363 orang. Jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan, mulai 9.979 unit tahun 2013 menjadi 10.260 unit pada tahun 2017.

Penilaian kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan koperasi, sehingga koperasi dapat mengambil keputusan untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Penilaian kesehatan koperasi merupakan bagian dari pengawasan koperasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi, yaitu penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

Sebagaimana tercantum pada table diatas, kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP/USP) di Belitung Timur cenderung naik tiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah KSP/USP yang terdata sebanyak 37 unit dengan kesehatan 0,08%. Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah KSP/USP meningkat menjadi 41 unit dengan kesehatan 0,1%. Selanjutnya pada tahun 2017 dari 41 unit koperasi kesehatan koperasi sebesar 0,27%.

Persentase UMKM yang mempunyai ijin usaha pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Dalam data tercatat pada tahun 2015 merupakan jumlah tertinggi UMKM yang memiliki ijin usaha yaitu sebesar 0,115% atau sebanyak 1.171 UMKM dari 10.101 UMKM. Kemudian pada tahun 2016 jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha sebesar 0,013% atau sebanyak 139 dari 10.158 UMKM, menurun jika dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 0,05% atau sebanyak 519 UMKM dari 10.260 UMKM. Kenaikan tersebut disebabkan oleh dilaksanakannya kegiatan pendampingan perijinan bagi UMKM dan wirausaha pemula, serta ijin usaha mikro kecil menjadi salah satu persyaratan permodalan baik melalui bank maupun Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Untuk Indeks daya saing koperasi dan UMKM sampai dengan saat ini belum dilaksanakan penghitungan, sehingga data belum tersedia.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

C. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.67.

Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	40	52,7	53,3	53,3	52,30
Partisipasi perempuan di lembaga swasta (persen)	49	47,3	46,7	46,7	47,70
Rasio KDRT (persen)	0,043	0,003	0,002	0,079	0,058
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	45	35,6	49,45	48,24	51,89
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (persen)	12	14	47	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur 2018

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah sampai dengan tahun 2017 sebesar 52,30%, dibandingkan Tahun 2016 sebesar 53,3% mengalami Penurunan, hal ini dikarenakan lebih banyak dibutuhkan Pegawai laki-laki pada tahun tersebut.
2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami pasang surut dari tahun 2013 hingga 2017. Hal tersebut dikarenakan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan bertambah akan tetapi pekerja perempuan di lembaga swasta tidak mengalami penambahan yang signifikan.
3. Rasio KDRT dapat diperoleh dari hasil pembagian antara KDRT dengan Jumlah Keluarga yang ada. Tahun 2016 capaian kinerja sebesar 0,079 sedangkan Tahun 2017 capaian kinerja mencapai 0,058. Hal ini mengalami penurunan jumlah KDRT dikarenakan sudah adanya sosialisasi dan penanganan kasus yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur.
4. Partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2017 mengalami peningkatan dari sebelumnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya penerimaan CPNS, terbukanya lowongan kerja bagi perempuan di lembaga-lembaga lainnya.
5. Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak realisasi tahun 2017 mencapai 100%. Dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kabupaten Belitong Timur banyak melaksanakan kegiatan dalam bentuk advokasi yang lebih menyentuh dan mengarah, hal ini karena Kabupaten Belitong Timur sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mempunyai peran penting dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Peningkatan persentase dalam hal ini dikarenakan adanya kesadaran para wanita mengenai tindakan kekerasan yang terjadi baik langsung dan tidak langsung yang selama ini terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini banyak dipicu dari berbagai masalah sosial yang ada, antara lain faktor ekonomi, sosial budaya masyarakat, dan beberapa faktor lainnya sehingga mendukung terjadinya hal-hal tersebut. Bentuk nyata kegiatan dapat berupa advokasi, pendampingan, konseling, bantuan hukum, dan ada beberapa kasus yang langsung di dampingi terutama terhadap korban walaupun langsung



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

D. Urusan Pangan

Tabel 2.68.
Capaian Indikator Urusan Pangan Kabupaten Belitong Timur

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan pangan utama (kg/thn/1.000 penduduk)	66.128,06	105.434	128.454	115.217,7	83,,142,71
Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	3.940	2.408	2.423	2.716	2.553
Ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)	100,98	153,89	130,66	134,96	125,35

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitong Timur, 2018

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Secara keseluruhan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Belitong Timur dari Tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2016 dan 2017 ketersediaan pangan utama mengalami penurunan. Ketersediaan pangan suatu wilayah ini sangat penting dilakukan untuk melihat surplus tidaknya pangan di suatu daerah, dengan diketahuinya neraca tersebut maka antisipasi untuk ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dapat dilakukan sejak dini, adanya penurunan jumlah ketersediaan bukan berarti konsumsi pangan masyarakat tidak tercukupi, hanya saja stok pangan di wilayah tersebut yang menurun, hal ini bisa dipengaruhi oleh jumlah panen domestik, harga pangan, proses distribusi dari luar pulau, pertambahan penduduk yang cukup besar dan berdampak pada peningkatan kebutuhan konsumsi.

Ketersediaan pangan utama 2017 dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) sebesar 10.141 ton dibagi jumlah penduduk sebanyak 121.971 jiwa, diperoleh nilai ketersediaan pangan utama sebesar 83.142,71 kg per tahun per 1000 penduduk, target capaian tahun 2017 sebesar 135.169 kg/thn/1000 penduduk, Jumlah ketersediaan beras sebagai pangan utama di Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2018 sebanyak 11.904.000 kg dengan jumlah penduduk sebanyak 124.079 jiwa, sehingga jumlah ketersediaan pangan utama untuk tahun 2018 sebanyak 95.939 kg/thn per 1000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Belitong Timur belum mencapai target ketersediaan pangan dalam jumlah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

cukup dan aman baik dari produksi sendiri, impor maupun cadangan pangan, tetapi jumlah yang tersedia masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

b. Ketersediaan energi perkapita dan Ketersediaan protein perkapita

Situasi ketersediaan energi Kabupaten Belitong Timur tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diatas 2.400 kkalori/kapita/hari. Capaian ini menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG XI) Tahun 2012 sebesar 2.400 kkalori/kapita/hari. Penyediaan energi tertinggi terjadi pada jenis bahan makanan padi-padian yaitu 1.187 Kkal/kap/hari dan komoditi yang lainnya relatif kecil dengan kisaran 0–458 Kkal/kap/hari. Demikian juga halnya dengan tingkat ketersediaan protein pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diatas 63 gram/kapita/hari, nilai ketersediaan protein Kabupaten Belitong Timur sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tersebut tak terlepas dari peranan besar dari jenis bahan makanan dari ikan setelah padi-padian.

E. Urusan Pertanian

Tabel 2.69.
Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tanah yang bersertifikat	2013		2014		2015	
	Jumlah (Bidang)	Luas (m ²)	Jumlah (Bidang)	Luas (m ²)	Jumlah (Bidang)	Luas (m ²)
Hak Milik	1.495	737.875	1.347	860.086	918	496.163
Hak Guna Bangunan	9	5.064	5	3.278	114	354.567
Hak Guna Usaha	30	55.855.200	-	-	2	157.389
Hak Pakai	23	26.018	30	85.427	20	132.202
Wakaf	-	-	-	-	2	1.845
Girik	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1.557	56.624.157	1.382	948.791	1.056	1.142.166

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur 2016

Data diakumulasikan pertahun dengan jumlah luas lahan bersertifikat yang dimiliki oleh Kabupaten Belitong Timur yang dihitung per meter persegi adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2011 lahan bersertifikat seluas 36.946.797m²
2. Tahun 2012 lahan bersertifikat seluas 52.135.900m²
3. Tahun 2013 lahan bersertifikat seluas 35.407.478m²
4. Tahun 2014 lahan bersertifikat seluas 38.773.040m²
5. Tahun 2015 lahan bersertifikat seluas 39.915.206m²



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

a. Penyelesaian Kasus Negara

Berdasarkan pada Sengketa Kasus Tanah Negara pada Tahun 2011 sampai Tahun 2015 di Kabupaten Belitung Timur yang belum terealisasi sampai dengan Tahun 2015 yaitu :

1. Sengketa Lahan Pelabuhan ASDP Manggar yang belum mendapatkan kesepakatan bersama dari PT.Galangan Manggar Belitung (GMB) dan PT.Timah seluas 500m² dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2015;
2. Sengketa Lahan Pelabuhan Dendang yang direncanakan 6Ha baru terrealisasi 4Ha sedangkan 2Ha belum mendapatkan kesepakatan bersama dari pihak Polisi Sektor Dendang dari Tahun 2012 sampai Tahun 2015;
3. Sengketa Lahan GOR Sukamandi yang belum mendapatkan kesepakatan bersama dari pihak PT.MGM dan Masyarakat Lokal Desa Sukamandi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015.

b. Penerbitan Izin Lokasi

Berdasarkan pada data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Timur pada BPMPPT Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 di Kabupaten Belitung Timur, data Penerbitan Izin Lokasi adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011 Penerbitan Izin Lokasisebesar 20%atau 2 (dua) izin dari 10 (sepuluh) permohonan izin lokasi. Izin lokasi yang telah diterbitkan terdiri dari izin lokasi budidaya udang terpadu dan izin smelter. Izin lokasi yang belum diterbitkan terdiri dari izin lokasi *stockpile*, lokasi perkebunan, lokasi gudang dan lokasi kepariwisataan. Izin-izin tersebut belum seluruhnya diterbitkan karena masih dalam proses;
2. Tahun 2012 belum ada izin baru yang terealisasi, hanya ada perpanjangan izin;
3. Tahun 2013 penyelesaian ijin lokasi sebesar 37,50%yaitu 3 (tiga) dari 8 (delapan) permohonan izin lokasi, yaitu terdiri dari:
 - a) Izin lokasi berupa pembangunan Pembangunan Gudang oleh PT. Belitung Timur Permai
 - b) Izin lokasi berupa Pembangunan *Stockpile* dan Jalan oleh CV. Bumi Pasundan
 - c) Izin lokasi berupa Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah oleh PT. Tommy Utama
4. Tahun 2014 Penerbitan Izin Lokasisebesar 83,33% yaitu 5 (lima) dari 6 (enam) permohonan izin lokasi, terdiri dari :
 - a) Izin lokasi berupa Pembangunan Hotel oleh PT. Gunung Harjasa
 - b) Izin lokasi berupa Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam/Smelter oleh PT. Menara Cipta Mulia
 - c) Izin lokasi berupa Pembangunan Perumahan Bersubsidi oleh PT. Batu Alam Sakti
 - d) Izin lokasi berupa Pembangunan Agro Wisata oleh PT. Wisata Sukma Alam
 - e) Izin lokasi berupa Pembangunan Kawasan Wisata oleh PT. Pelangi Beltim Sejahtera



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

5. Tahun 2015 penyelesaian izin lokasi sebesar 10% yaitu 1 (satu) dari 10 (sepuluh) permohonan izin lokasi, yaitu izin lokasi untuk keperluan pembangunankawasan wisata atas nama PT. Pelangi Beltim Sejahtera terletak di Desa Burong Mandi Kecamatan Damar.

F. Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.70.
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	2013	2014	2015	2016 *)	2017 *)
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (persen)	100	100	100	100	100
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (persen)	100	100	100	100	100
Persentase sumber mata air yang dipantau mutu airnya (persen)	-	99,75	85,19	88,89	92,59
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (persen)	18	21	18	11	12
Jumlah penanganan kasus lingkungan (kasus)	4	1	8	2	1
Persentase penanganan sampah (persen)	65,96	73,71	48,33	32	34
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per-satuan penduduk (liter/jiwa)	3,26	3,41	-	3,037	3,0

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Tahun 2013-2016,

*) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017-2018

a. Pencemaran Status Mutu Air

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik Pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, status mutu air Badan Lingkungan Hidup Daerah yang dapat diukur hanya sungai saja dengan capaian sebesar 100%. Pada Tahun 2014-2017, status mutu air yang dapat diukur adalah kawasan pemukiman, sumber daya air, dan sungai dengan capaian masing-masing sebesar 99,75%. Status mutu air yang diukur ini belum termasuk status mutu air untuk kawasan industri. Untuk perhitungan uji mutu air kawasan industri belum bisa dilakukan karena Laboratorium Lingkungan BLHD Kabupaten Belitong Timur belum terakreditasi oleh lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kondisi sekarang baru bisa menguji 7 (tujuh) parameter kualitas air dengan jumlah SDM fungsional saat berjumlah 1 (satu) orang dan belum memenuhi persyaratan standar mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2008 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. Selain itu kurangnya pelatihan bagi personil laboratorium juga menjadi kendala tersendiri.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

b. Jumlah Penanganan Kasus Lingkungan

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan penanganan kasus lingkungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan. Salah satu contoh penanganan kasus lingkungan yang bersumber dari pengaduan masyarakat yaitu adanya dugaan kasus pencemaran air yang dilakukan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan(IUP).

c. Persentase Penanganan Sampah

Pada tahun 2016 indikator ini masih menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Cipta Karya dengan capaian indikator 48,63%. Adanya Peraturan Bupati Belitong Timur nomor 45 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur maka indikator dari Persentase Penanganan Sampah diwilayah perkotaan pada Bidang Persampahan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Indikator persentase penanganan sampah wilayah perkotaan diperoleh dengan menghitung volume sampah yang ditangani dibandingkan jumlah volume timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat selama setahun. indikator capaian pada tahun 2017 sebesar 50,46 % dengan target 50% atau sebesar 100% , Pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini masih terbatas pada Desa yang memiliki karakter perkotaan seperti pemukiman padat penduduk, ketersediaan pasar atau lokasi dengan potensi timbunan sampah yang tinggi dan kepadatan penduduk yang besar, antara lain kecamatan Manggar, Gantung, Damar dan Kelapa Kampit. Dengan demikian dari data terlihat bahwa peningkatan produksi sampah masih dapat diimbangi dengan pertumbuhan pengangkutan sampah ke TPA .

Volume sampah yang diangkut petugas kebersihan dengan menghitung frekuensi masuknya mobil sampah ke TPA Trafo Mayang di Kecamatan Damar selama 1 (satu) tahun dan dengan asumsi bahwa dalam keadaan penuh kapasitas tiap truk sampah sebesar 6m³. Asumsi ini digunakan karena belum adanya jembatan timbang yang digunakan untuk mengetahui volume sampah masuk TPA secara tepat. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat dihitung dengan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

pendekatan bahwa diasumsikan setiap orang akan menghasilkan sampah sebanyak 2,5 liter/jiwa/hari, kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk diwilayah layanan persampahan. Sampai dengan Tahun 2015, pelayanan persampahan di Kabupaten Belitong Timur mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar, dengan fokus utama pengelolaan kebersihan di Kota Manggar sebagai ibukota kabupaten. Demikian pula untuk penambahan luasan daerah pelayanan kebersihan juga masih difokuskan di Kota Manggar, dengan asumsi permasalahan kebersihan lingkungan terutama sampah masih sangat tinggi sebagai ciri dari kota yang sedang mengalami perkembangan pembangunan.

Tabel 2.71.

Penanganan Sampah Perkotaan di Kabupaten Belitong Timur

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk (jiwa)	57.107	52.082	70.216	71.643	61.872
Produksi Sampah (m ³ /tahun)	52.110	47.525	64.072	65.374,2	56.458,20
Pengangkutan Sampah (m ³ /tahun)	34.379,60	35.029	30.968	31.788,8	28.490,20
Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan (%)	65,97	73,71	48,33	48,63	50,46

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Tahun 2013-2016,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017-2018

Jumlah ini jika ditinjau dari jumlah penanganan sampah pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terjadi fluktuasi nilai indikator, mengalami penurunan dari 65,97% menjadi 50,46 %, kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu jumlah penduduk di daerah layanan yang berubah/bertambah cukup besar yaitu dari 57.107 jiwa pada Tahun 2013 menjadi 61,872 jiwa . Faktor kedua yaitu pada metode penghitungan jumlah sampah yang diangkut yaitu hanya dengan menggunakan metode ritasi(pendekatan volume). Pada tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan jumlah penanganan sampah meski belum signifikan.

Penghitungan Produksi sampah hanya dengan menggunakan pendekatan volume yaitu dengan menghitung frekuensi truk/bak sampah yang masuk ke TPA setiap bulannya. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional pengangkutan sampah, di awal Tahun 2015 dilaksanakan pengaturan ulang trayek pengumpulan sampah dan diberikan perlakuan berupa pemilahan/ penyusunan/ pemadatan sampah yang dimasukkan kedalam truk/bak sampah yang mengakibatkan jumlah ritasi(frekuensi) menjadi berkurang di tiap bulannya. Jumlah Pengangkutan sampah pada Tahun 2013 sebanyak 34,379 (m³/tahun) mengalami penurunan 28,490.60 (m³/tahun) di Tahun 2017 . Perlu dijelaskan pula bahwa penanganan sampah tidak hanya dengan mengangkut sampah hingga ke TPA, peran serta masyarakat dalam mengurangi/ mengolah sampah secara mandiri juga

merupakan bagian dari penanganan sampah. Namun demikian efektifitas dari aktifitas mandiri masyarakat dalam mengolah sampah belum mampu diukur oleh Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per-Satuan Penduduk

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per-Satuan Penduduk diperoleh dengan menghitung luasan seluruh TPS diwilayah layanan persampahan yang dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah layanan persampahan tersebut. Panduan tentang luasan TPS yang diperlukan berdasarkan hasil kajian Kementerian PU disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.72.
Panduan Tentang Luasan TPS yang diperlukan
berdasarkan hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum

No	Klasifikasi Kota	Volume (l/orang/hari)	Berat (kg/orang/hari)
1	Kota Besar (500.000-1.000.000 jiwa)	2,75-3,25	0,70-0,80
2	Kota Sedang (100.000-500.000 jiwa)	2,75-3,25	0,70-0,80
3	Kota Kecil (20.000-100.000 jiwa)	2,50-2,75	0,625-0,70

Besaran rasio TPS di Kabupaten Belitung Timur telah melebihi klasifikasi kota kecil yaitu 3,22 liter/orang/hari, upaya yang diperlukan di tahun-tahun yang akan datang adalah memelihara TPS yang ada agar dapat berfungsi, serta perlu di sosialisasikan agar kesadaran Masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi lebih baik.

e. Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pencemaran Udara

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggambarkan kondisi lingkungan hidup khususnya kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan di Kabupaten Belitung Timur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kondisi lingkungan hidup yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh instansi dan masyarakat umum lainnya guna pengambilan kebijakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan.

Pesatnya pertumbuhan industri, perekonomian dan peningkatan jumlah populasi penduduk tentunya akan memberikan dampak terhadap perubahan kondisi lingkungan. Permasalahan lingkungan pada dasarnya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara organisme hidup dengan unsur-unsur tidak hidup dalam suatu lingkungan ekosistem. Sebagai bagian yang penting dari kehidupan manusia, ekosistem lingkungan memiliki kadar kualitas tersendiri yang memungkinkan bagi manusia untuk terus hidup didalamnya dengan kualitas hidup yang baik. Atas dasar hal tersebut, perlu adanya korelasi simbiosis mutualisme antara manusia dengan ekosistem lingkungan sekitarnya dimana akan berpengaruh terhadap kualitas



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

hidup manusia itu sendiri. Kabupaten Belitung Timur salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bangka Belitung memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda dengan kabupaten di provinsi lainnya yaitu memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah sebagai salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia.

Kegiatan penambangan timah yang telah menjadi aktivitas keseharian bagi masyarakat baik di Provinsi Bangka Belitung maupun di Kabupaten Belitung Timur sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat. Disisi lain, kegiatan pertambangan timah ini menghasilkan permasalahan lingkungan sebagai dampak negatif dari kegiatan. Salah satu dampak negatif yang dihasilkan diantaranya perubahan bentang alam, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran air dan sedimentasi.

Sehubungan dengan permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur dan berlandaskan pada undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka diperlukan indikator yang dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang mewakili tiga indikator utama diantaranya yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara sebagai penentuan kondisi lingkungan hidup dalam periode tertentu yang dapat dijadikan sebuah referensi yang berfungsi sebagai sarana pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam

G. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.73.

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kepemilikan KTP	71,44	74,65	81,15	84,38	88,08
Cakupan kepemilikan kartu keluarga	62,83	70,91	77,29	82,42	86,87
Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	-	25	29,97
Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran	68,7	71,4	79,95	83,28	82,94
Cakupan kepemilikan Akte Kematian	56,2	58,83	70,55	76,85	79,45
Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder dinas	-	-	-	6	8,83
Jenis inovasi pelayanan	-	-	1	2	3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belitung Timur 2018

a. Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Cakupan kepemilikan KTP yang dimaksud adalah KTP elektronik, karena sejak tahun 2015 KTP konvensional sudah tidak berlaku lagi.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

b. Cakupan Kepemilikan kartu keluarga

Yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah orang berstatus sebagai kepala keluarga didalam sebuah dokumen kartu keluarga. Di dalam satu rumah tangga bisa saja terdapat lebih dari satu keluarga/kepala keluarga, sehingga terdapat lebih dari satu kartu keluarga.

c. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah “identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota “ (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 1)

d. Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder dinas

Persentase pemanfaatan data oleh stakeholders dinas diukur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Belitung Timur, kondisi pada tahun 2017 baru ada 3 yaitu:

- PKS dengan RSUD Kab. Belitung Timur
- PKS dengan BAPPEDA Kab. Belitung Timur
- PKS dengan Dinas Perpustakaan Kearsipan Kab. Belitung Timur

e. Jenis Inovasi Pelayanan

Inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sampai akhir tahun 2017 adalah:

- **Akta kelahiran Siap Saji (3 in 1 RSUD)**

Akta Kelahiran Siap Saji (3 IN 1 RSUD) merupakan inovasi pelayanan bagi penduduk yang melahirkan di RSUD ataupun bayi yang dirujuk ke RSUD yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan menggunakan metode pendekatan pelayanan. Dengan adanya layanan ini, diharapkan penduduk dapat berpartisipasi dan langsung melaporkan/mendaftar kelahiran anak mereka kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditugaskan di RSUD, sehingga mereka bisa langsung mendapatkan dokumen kependudukan yaitu Akta Lahir Anak, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerapan pelayanan Akta Kelahiran Siap Saji (3 in 1 RSUD) ini bekerja sama dengan RSUD sebagai wadah/ tempat proses administrasi berlangsung, dengan ruang lingkup pelayanan bagi bayi yang lahir atau mendapatkan perawatan di RSUD. Pada awalnya kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2016 merupakan kegiatan non DPA, namun setelah ditetapkan sebagai pelayanan regular kebutuhannya telah di anggarkan pada tahun berjalan untuk menunjang fasilitas pelayanan.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

- **Sisir Desa**

Sisir Desa yaitu kegiatan yang bersifat jemput bola melalui kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, dimana pada kegiatan ini tim pelayanan keliling dengan dibantu petugas register desa menjemput langsung ke rumah penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Pelayanan ini diutamakan bagi penduduk Lanjut Usia dan penduduk penyandang difabilitas. Dengan cara ini diharapkan tidak mengganggu waktu dan kegiatan masyarakat itu dalam aktifitasnya sehari-hari karena petugas langsung mengurus kelengkapan berkas sampai selesai dan masyarakat menunggu dan menerima dokumen kependudukan di rumah.

- **5 In one KUA / Peleser Manggar Yuk**

Layanan ini sebelumnya diberi nama Layanan Adminkuk “three in one” di KUA Manggar. 5 In one KUA/Peleser Manggar Yuk adalah berupa Perjanjian Kerja Sama dengan KUA Manggar dan MOU dengan Kementerian Agama untuk pelayanan bagi pasangan pengantin yang menikah di KUA Manggar sehingga selain mendapatkan surat nikah, mereka akan langsung mendapat Kartu Keluarga baru dan KTP-el dengan status menikah, juga kartu keluarga bagi orang tua mereka. Inovasi ini merupakan kegiatan non DPA dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 di KUA Kecamatan Manggar.

H. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.74.

Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	2	2	2	3	4
Jumlah PKK aktif	47	47	47	47	47
Jumlah Posyandu aktif	130	131	133	133	133
Persentase aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	100	100	100	100	100
Profil desa sesuai standar	39	39	39	33	30
Persentase penyusunan dan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	100	100	100	100	100
Persentase BUMDes yang terbentuk (Unit)	-	7	7	11	27
Desa yang menyusun RKPDes per tahun	39	39	39	39	39
Posyantek aktif	2	2	2	3	3

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Berdasarkan data tabel 2.74 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jumlah kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Jumlah kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2017 sebesar 4 kelompok binaan dari target capaian 3 kelompok binaan. Data kelompok binaan LPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.
Data Kelompok Binaan LPM Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Binaan LPM
1	DAMAR	Mengkubang	Lesong Ketintong
2		Sukamandi	Hadrah Ma'idi
3	GANTUNG	Lilangan	Hadrah Desa Lilangan
4		Lenggang	Hadrah Al-Fitrah Lenggang

b. PKK aktif

Jumlah PKK aktif di Kabupaten Belitong Timur berjumlah 47 kepengurusan PKK, terdiri dari:

- a. PKK tingkat Kabupaten : 1 Kepengurusan
- b. PKK di tingkat Kecamatan : 7 Kepengurusan
- c. PKK di tingkat Desa : 39 Kepengurusan
47 Kepengurusan

c. Posyandu Aktif

Jumlah Posyandu aktif pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 berjumlah 133 Posyandu dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 2.76.
Rekapitulasi Data Posyandu Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Posyandu
1	Damar	Sukamandi	Dahlia 1
2	Damar	Sukamandi	Dahlia 2
3	Damar	Sukamandi	Dahlia 3
4	Damar	Mengkubang	Dahlia 4
5	Damar	Mengkubang	Dahlia 5
6	Damar	Burong Mandi	Dahlia 6
7	Damar	Burong Mandi	Dahlia 7
8	Damar	Burong Mandi	Dahlia 8
9	Damar	Mempaya	Dahlia 9
10	Damar	Mempaya	Dahlia 10
11	Damar	Aik Kelik	Dahlia 11



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Kecamatan	Desa	Nama Posyandu
12	Damar	Aik Kelik	Dahlia 12
13	Kelapa Kampit	Senyubuk	Mawar 1
14	Kelapa Kampit	Senyubuk	Mawar 2
15	Kelapa Kampit	Senyubuk	Kenanga
16	Kelapa Kampit	Senyubuk	Keremuntingan
17	Kelapa Kampit	Senyubuk	Tenara
18	Kelapa Kampit	Senyubuk	Kamboja
19	Kelapa Kampit	Mentawak	Cempaka 1
20	Kelapa Kampit	Mentawak	Cempaka 2
21	Kelapa Kampit	Mentawak	Anggrek
22	Kelapa Kampit	Mentawak	Kasih Ibu
23	Kelapa Kampit	Mentawak	Kaswari
24	Kelapa Kampit	Pembaharuan	Bougenville
25	Kelapa Kampit	Pembaharuan	Kurnia Sejati
26	Kelapa Kampit	Pembaharuan	Melati
27	Kelapa Kampit	Pembaharuan	Nusa Indah
28	Kelapa Kampit	Mayang	Lestari
29	Kelapa Kampit	Mayang	Melati
30	Kelapa Kampit	Mayang	Sakura
31	Kelapa Kampit	Buding	Kenari 1
32	Kelapa Kampit	Buding	Kenari 2
33	Kelapa Kampit	Buding	Kenari 3
34	Kelapa Kampit	Cendil	Lestari 1
35	Kelapa Kampit	Cendil	Lestari 2
36	Simpang Pesak	Simpang pesak	Alamanda
37	Simpang Pesak	Simpang pesak	Flamboyan
38	Simpang Pesak	Simpang pesak	Mawar Merah
39	Simpang Pesak	Simpang pesak	Satam
40	Simpang Pesak	Simpang pesak	Asoka
41	Simpang Pesak	Simpang pesak	Melati
42	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	Kenanga
43	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	Sedap Malam
44	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	P.Ketapang
45	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	Cempaka
46	Simpang Pesak	Tanjung Batu Itam	Bogenvile
47	Simpang Pesak	Tanjung Batu Itam	Bunga Tanjung
48	Simpang Pesak	Tanjung Batu Itam	Dahlia
49	Dendang	Dendang	Anggrek Bulan
50	Dendang	Dendang	Anggrek Merah
51	Dendang	Dendang	Anyelir
52	Dendang	Balok	Bunga Rose
53	Dendang	Balok	Putri Malu
54	Dendang	Jangkang	Nusa Indah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Kecamatan	Desa	Nama Posyandu
55	Dendang	Jangkang	Teratai
56	Dendang	Nyuruk	Kemuning
57	Dendang	Nyuruk	Pesona
58	Dendang	Nyuruk	Cempaka Putih
59	Dendang	Nyuruk	Mentari
60	Gantung	Gantung	Cempaka Putih
61	Gantung	Gantung	Kamboja
62	Gantung	Gantung	Ganse
63	Gantung	Lenggang	Dahlia
64	Gantung	Lenggang	Mekar Cangu
65	Gantung	Lenggang	Teratai
66	Gantung	Lenggang	Melati
67	Gantung	Batu Penyu	Mekar Bahagia
68	Gantung	Batu Penyu	Bunga Harapan
69	Gantung	Batu Penyu	Sejahtera
70	Gantung	Batu Penyu	Pulau Sekunyit
71	Gantung	Jangkar Asam	Harapan Bangsa
72	Gantung	Limbongan	Flamboyan
73	Gantung	Lilangan	Trans Lilangan I
74	Gantung	Lilangan	Trans Lilangan li
75	Gantung	Lilangan	Nusa Indah
76	Gantung	Lilangan	Melati
77	Gantung	Selinsing	Bkjm
78	Gantung	Selinsing	Keluarga Bahagia
79	Gantung	Selinsing	Harapan Kita
80	Gantung	Selinsing	Mawar
81	Gantung	Selinsing	Trans Meranteh
82	Gantung	Selinsing	Pulau Long
83	Manggar	Baru	Anggrek 2
84	Manggar	Baru	Anggrek 14
85	Manggar	Baru	Anggrek 17
86	Manggar	Baru	Anggrek 10
87	Manggar	Baru	Anggrek 11
88	Manggar	Baru	Anggrek 15
89	Manggar	Baru	Anggrek 1
90	Manggar	Baru	Anggrek 3
91	Manggar	Kurnia Jaya	Anggrek 4
92	Manggar	Kurnia Jaya	Anggrek 12
93	Manggar	Kurnia Jaya	Anggrek 13
94	Manggar	Kurnia Jaya	Anggrek 8
95	Manggar	Kurnia Jaya	Anggrek 9
96	Manggar	Kurnia Jaya	Anggrek 7
97	Manggar	Kurnia Jaya	Anggrek 16



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Kecamatan	Desa	Nama Posyandu
98	Manggar	Lalang Jaya	Melati 12
99	Manggar	Lalang Jaya	Melati 2
100	Manggar	Lalang Jaya	Melati 11
101	Manggar	Lalang Jaya	Melati 13
102	Manggar	Lalang	Melati 7
103	Manggar	Lalang	Melati 10
104	Manggar	Lalang	Melati 1
105	Manggar	Lalang	Melati 5
106	Manggar	Lalang	Melati 6
107	Manggar	Padang	Sakura 1
108	Manggar	Padang	Sakura 7
109	Manggar	Padang	Sakura 2
110	Manggar	Padang	Sakura 4
111	Manggar	Padang	Sakura 5
112	Manggar	Padang	Sakura 6
113	Manggar	Padang	Sakura 3
114	Manggar	Kelubi	Mawar 4
115	Manggar	Kelubi	Mawar 2
116	Manggar	Kelubi	Mawar 3
117	Manggar	Pulau Buku Limau	Anggrek 5
118	Manggar	Pulau Buku Limau	Anggrek 6
119	Manggar	Mekar Jaya	Melati 4
120	Manggar	Mekar Jaya	Melati 3
121	Manggar	Mekar Jaya	Melati 8
122	Manggar	Mekar Jaya	Melati 9
123	Manggar	Bentaian Jaya	Mawar 1
124	Manggar	Bentaian Jaya	Pestivera
125	Simpang Renggang	Lintang	Mawar Merah
126	Simpang Renggang	Lintang	Flamboyan
127	Simpang Renggang	Lintang	Mawar
128	Simpang Renggang	Aik Madu	Nusa Indah
129	Simpang Renggang	Renggang	Kaswari
130	Simpang Renggang	Renggang	Mawar Merah
131	Simpang Renggang	Aik Ruak	Mawar
132	Simpang Renggang	Aik Ruak	Smm
133	Simpang Renggang	Aik Ruak	Mawar 2

d. **Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan.**

Realisasi capaian indikator kinerja urusan pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100% yang diikuti oleh seluruh Sekdes, Bendahara, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan dan Ketua TPK di tiap - tiap desa.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

e. Profil Desa sesuai standar

Tahun 2017 ketersediaan Dokumen Profil Desa sebanyak 35 dokumen profil desa dari 39 Desa sedangkan yang terverifikasi dan pada tahun 2017 terealisasi 30 dokumen profil desa. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa desa yang masih belum menyelesaikan data Profil Desa.

Tabel 2.77.
Ketersediaan dokumen Profil Desa Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Input Data	Terverifikasi
1	DAMAR	Mengkubang	V	-
2		Sukamandi	V	V
3		Mempaya	V	V
4		Aik Kelik	V	V
5		Burong Mandi	V	-
6	KELAPA KAMPIT	Mentawan	V	V
7		Senyubuk	V	-
8		Cendil	V	V
9		Buding	V	V
10		Mayang	V	V
11		Pembaharuan	V	-
12	MANGGAR	Lalang Jaya	V	V
13		Kurnia Jaya	V	V
14		Padang	V	V
15		Kelubi	V	V
16		Lalang	V	V
17		Baru	V	V
18		Buku Limau	-	-
19		Mekar Jaya	V	V
20		Bentaian Jaya	V	V
21	DENDANG	Dendang	V	V
22		Jangkang	V	-
23		Nyuruk	V	V
24		Balok	V	V
25	SIMPANG RENGGIANG	Renggiang	V	V
26		Lintang	-	-
27		Aik Madu	V	V
28		Simpang Tiga	V	V
29	SIMPANG PESAK	Sp. Pesak	V	V
30		Tjg. Kelumpang	V	V
31		Tjg Batu Itam	V	V
32		Dukong	-	-
33	GANTUNG	Gantung	V	V



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Kecamatan	Desa	Input Data	Terverifikasi
34		Selinsing	V	V
35		Jangkar Asam	V	V
36		Lilangan	V	V
37		Limbongan	V	V
38		Lenggang	-	-
39		Batu Penyu	V	V

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur 2018

f. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan berupa kegiatan Asistensi Penyusunan APBDes meliputi pendampingan, monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keuangan desa. Pada tahun 2016 dan 2017 Asistensi Penyusunan APBDes terealisasi sebanyak 39 dokumen atau 100%.

g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terbentuk, pada tahun 2017 terbentuk 27 BUMDes dari 10 BUMDes yang ada. Pembentukan BUMDes diserahkan sepenuhnya ke masing-masing desa sesuai dengan potensi yang dimiliki baik berupa modal, sumber daya manusia maupun kesiapan AD/ARTnya. Data BUMDes yang telah terbentuk pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.78.
Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2017

No	Nama BUMDes/ BUMDes Bersama	Lokasi		Jenis Usaha BUMDes/ BUMDes Bersama
		Kecamatan	Desa	
1	Kelubi Makmur	Manggar	Kelubi	Usaha Jasa, Penyaluran Sembilan bahan Pokok, Perdagangan hasil Pertanian serta industri dan kerajinan rakyat
2	Sedulang Jaya	Manggar	Lalang Jaya	Perdagangan umum , penyewaan , jasa , peternakan
3	Anugerah Makmur	Manggar	Baru	Jasa, Perdagangan sarana dan hasil pertanian , Industri kecil dan kerajinan rakyat , Pelayanan air bersih dan air minum , Pariwisata , Perbengkelan
4	Mitra Sejahtera	Manggar	Mekar Jaya	Jasa Jual Tiket , Pulsa , Galeri
5	Maju Makmur	Manggar	Bentaian Jaya	Cetak Batako
6	Mitra Solusi Utama	Manggar	Padang	Bidang Jasa , Perdagangan Umum
7	Lalang Mandiri	Manggar	Lalang	Jasa , Pariwisata, Kebutuhan Bahan Pokok
8	Beregong	Manggar	Kurniajaya	



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Nama BUMDes/ BUMDes Bersama	Lokasi		Jenis Usaha BUMDes/ BUMDes Bersama
		Kecamatan	Desa	
9	Mitra Jaya Selinsing	Gantung	Selinsing	Foto copy , Pembuatan Patok Pembatas , Pengadaan Bibit, Pertanian
10	Lenggang Membangun	Gantung	Lenggang	Jasa Pariwisata, Usaha Bersama, Perindustrian, Pertambangan
11	Makmur Sejahtera	Gantung	Gantung	Cetak Batako
12	Batu Penyu Maju Berkah	Gantung	Batu Penyu	Perdagangan & Jasa, Pertanian & Perkebunan, Perikanan & Kelautan, Pertambangan & Pariwisata
13	Bumdes Lilangan	Gantung	Lilangan	Percetakan batako, Pengelolaan Kebun Karet, Jasa Penyediaan sarana dan Prasarana Simpan Pinjam, Penyediaan Sarana Air Bersih Perdagangan
14	Sejahtera Bersama	Gantung	Limbongan	Jasa Travel , Pelatihan Komputer
15	Karya Makmur	Simpang Pesak	Tanjung Batu Itam	Perdagangan , Pertambangan, Perkebunan , Pertanian
16	Sepaham	Simpang Pesak	Simpang Pesak	Pengelolaan Pasar Desa
17	Dukong Mandiri	Simpang Pesak	Dukong	Pangkalan Minyak Tanah
18	Balok Sehati	Dendang	Balok	Penyedia Air Bersih, Perdagangan, dan Pertanian
19	Bina Karya	Dendang	Nyuruk	Jasa sewa kursi, panggung, dan tarub/tenda, Rumah kontrakan, Pengelolaan Air Bersih, Kebun Karet Desa, Jual Beli Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan kerajinan dan lainnya
20	Simpang Tige Berkarya	Simpang Renggiang	Simpang Tiga	Pengelolaan Kebun Sawit, Penyewaan Traktor, Penyewaan Molen
21	Maju Sejahtera	Simpang Renggiang	Aik Madu	Peternakan, Perdagangan
22	Aik Kelik Mandiri	Damar	Aik Kelik	Pertukangan
23	Mang Payak Jaya	Damar	Mempaya	Pengelolaan Air Minum, Perikanan
24	Sukamandi Sejahtera Bersama	Damar	Sukamandi	Perdagangan, Jasa , Produksi Primer , Pengelolaan
25	Pemuda Damar	Kelapa Kampit	Mengkubang	Perdagangan
26	Bumdes Harapan Sejahtera	Kelapa Kampit	Mayang	Isi Ulang Air Minum, Pembuatan Es Batu,.
27	Bumi Jaya	Kelapa Kampit	Buding	Jasa Transportasi, Pembuatan Batako , Simpan Pinjam , Perdagangan , Pasar Desa , Kerajinan

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur 2018

h. RKPDes Yang Tersusun

RKPDes Yang Tersusun (pertahun) pada tahun 2016 dan 2017 tersusun 39 dokumen RKPDes atau terealisasi 100% yang kemudian menjadi masukan (input) dalam penyusunan APBDes.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

i. Posyantek Aktif

Posyantek Aktif pada tahun 2016 dan 2017 berjumlah 2 posyantek dari target 2 Posyantek atau terealisasi 100%. Data posyantek tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79.
Tabel Posyantek Tahun 2017

No	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Dasar Hukum
1	Kep.Bangka Belitung	Belitung Timur	Manggar	Padang	Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-666 Tahun 2015
2	Kep.Bangka Belitung	Belitung Timur	Gantung	Gantung	Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-666 Tahun 2015

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur 2018

l. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.80.
Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2	2	2	2	2
Cakupan peserta KB aktif (%)	94	95,98	89,97	84,19	85
Keluarga Pra Sejahtera (%)	18,24	17,82	23,44	11,15	4,98
Keluarga Sejahtera I (%)	11,02			14,64	64,17
Pengendalian penduduk (laju pertumbuhan penduduk)	-	3,14	2,2	2,18	2,16
Total Fertility Rate (TFR)	-	2,6	2,57	2,56	2,55
Angka Pemakaian kontrasepso (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	-	65,3	66,48	66,73	66,97
Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	-	19,4	11,6	12,1	12,9
Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-29 tahun per 1000 perempuan	62	64	59	58	56

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2018

a. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB aktif

Persentase jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif dijabarkan bahwasanya peserta KB aktif baik yang produktif dan tidak produktif atau keikutsertaan keanggotaan Keluarga Berencana baik yang sudah usia lanjut maupun usia produktif. Melihat beberapa indikator di tabel 2.8 ada beberapa peningkatan capaian, seperti cakupan peserta KB aktif naik 18,57%, Keluarga



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

prasejahtera turun 0,37% dan laju pertumbuhan penduduk membaik menjadi 1,35%.

Tabel 2.81.

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif

Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	85,2	95,98	89,97	133,53	89,19

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitong Timur, 2018

b. Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2018 terealisasi 103,57% naik sebesar 14,38% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 89,19%. Angka tersebut didapat dari data update pendataan keluarga dengan menggunakan database online rekam data yang diolah dari proses pendataan keluarga setiap tahun di bulan Juli secara serentak di Indonesia dengan sistem baru yang lebih mutakhir dan bisa di pertanggungjawabkan .

Tabel 2.82.

Cakupan peserta KB Aktif

NO	PESERTA KB AKTIF	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	IUD (Intra Uterine Device)	Akseptor	398	459	518	265
2	MOW/Tubectomi	Akseptor	433	491	520	411
3	MOP/Vasectomi	Akseptor	97	94	96	59
4	KONDOM	Akseptor	442	464	590	372
5	IMPLAN	Akseptor	1.944	2.399	2.347	1.470
6	SUNTIK	Akseptor	12.084	12.872	13.658	11.780
7	PIL KB	Akseptor	5.487	5.332	5.441	3.998
	Jumlah PA	Akseptor	20.885	14.085	23.220	18.335
	Jumlah PUS	Akseptor	24.500	26.263	26.903	22.241

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitong Timur, 2018

c. Keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera 1

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan atau kategori tersebut adalah kategori dengan keluarga yang masih tahap kehidupan rendah atau yang berpendapatan minimal. Dari Hasil capaian yang didapat BKKBD telah mendapatkan hasil adanya peningkatan dari target yang telah ditetapkan dalam hal ini BKKBD melalui kegiatan ini berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga dan membatasi jumlah kelahiran dengan maksud dan tujuan bahwasanya semakin banyaknya kebutuhan dari jumlah anak akan mempengaruhi tingkatan segi sosial, ekonomi dan kesejahteraan keluarga.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

d. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Jumlah Anak/Jumlah KK dengan penjabaran sebagai berikut jumlah anak/yang masih termasuk kategori anak yang ada dibagi dengan jumlah kepala keluarga. Adanya peningkatan atau tidak dipengaruhi tingginya kesadaran masyarakat Belitung Timur terhadap Program KB di daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang didapat oleh Bupati Belitung Timur dan Ketua Tim Penggerak PKK pada forum berskala nasional. Belitung Timur menjadi pusat kajian dan proses pembelajaran bagi kabupaten lain maupun pusat.

Tabel 2.83.

Persentase Rata-rata Jumlah Anak Meningkatnya Keluarga Sejahtera

No	Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Kepala Keluarga	Persentase Rata-rata Jumlah Anak
1	2013	-	-	-
2	2014	39.133	19.571	2
3	2015	42.697	23.613	2
4	2016	12.935	28.979	2
5	2017	17.312	33.864	2
6	2018	45.017	34.688	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2018

e. Rasio Akseptor KB

Jumlah akseptor KB adalah jumlah kesertaan anggota KB dibagi dengan jumlah kepala keluarga yang ada.

Tabel 2.84.

Jumlah Rasio Akseptor KB

Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Akseptor KB (%)	77,50	95,93	96,11	86,31	82,53

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2018

Peningkatan angka realisasi mencapai hasil yang maksimal hal ini merupakan kinerja yang memuaskan bagi BKKBD selaku Pelaksana Program Pemerintah serta Kabupaten Belitung Timur sebagai wilayah kinerja sasaran Kabupaten dalam pengertian bahwa semua ini bekerja dengan maksimal, baik dari BKKBD maupun mitra kerja serta bidang pemerintah dan unsur pendukung lainnya beserta kemitraan baik itu kelompok binaan, TNI, Polri dan kelompok lainnya.

f. Pengendalian penduduk

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk terjadi terus-menerus akibat



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

adanya kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota terus berperan aktif membantu mensukseskan program KB. Maka dengan demikian kualitas penduduk bisa meningkat jika mengikuti program KB.

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 adalah sebesar 2,14%, lebih rendah jika dibandingkan laju tahun 2017 sebesar 2,16%. Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahun 2013-2018 mengalami tren penurunan.

g. Total Fertility Rate/ TFR

Total Fertility Rate adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Dengan demikian nilai TFR yang rendah menunjukkan atau menjadi indikator keberhasilan program KB. TFR pada tahun 2018 adalah sebesar 2,53, menurun dari TFR tahun 2017 sebesar 2,55. TFR pada kurun waktu tahun 2013-2018 mengalami tren penurunan.

h. Contraceptive Prevalence Rate/ CPR

Contraceptive Prevalence Rate adalah banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada kurun waktu tertentu. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR pada tahun 2018 adalah sebesar 67,23%, mengalami peningkatan 0,24% dari CPR tahun 2017 sebesar 66,97%. CPR pada kurun waktu 2013-2018 mengalami tren peningkatan.

i. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang / MKJP

Metode kontrasepsi jangka panjang adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan, yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD, implant dan kontrasepsi mantap. MKJP lebih efisien karena dapat digunakan dalam waktu lebih lama, lebih aman dan efektif, serta memiliki angka kegagalan lebih rendah dibandingkan non-MKJP.

Persentase penggunaan MKJP pada tahun 2018 adalah sebesar 13,7%, meningkat 0,8% dari tahun 2017 sebesar 12,9%. MKJP pada kurun waktu 2013-2018 mengalami tren peningkatan.

j. Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-29 tahun

ASFR 15-29 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000, 100.000, atau 1.000.000 wanita pada kelompok umur tertentu. ASFR ini sebagai dasar rujukan pembangunan kependudukan terkait kelahiran misalnya SDGs goal 3, indikator ke 3.7.2. angka kelahiran usia remaja (wanita umur 15-19 tahun). Dimana makin banyaknya wanita masuk katagori ASFR maka makin tinggi angka



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

pertambahan penduduk yang merupakan sasaran dalam pengaturan jumlah penduduk. ASFR pada tahun 2017 adalah sebesar 56. ASFR pada kurun waktu 2013-2017 mengalami tren penurunan.

J. Urusan Perhubungan

Tabel 2.85.
Capaian Indikator Urusan Perhubungan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase angkutan umum yang laik jalan	116,13	108,59	97,08	68,42	47,22
Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan darat, laut/penyeberangan	-60,8	-24,97	23,33	0	0
Persentase pembangunan kawasan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitung Timur	50	50	50	100	100
Menurunnya kecelakaan transportasi	-	-	-	5	10
Jumlah arus penumpang angkutan umum	31.726	25.387	33.112	17.165	5.829
Rasio ijin trayek	0,0001504	0,000164	0,00016	-	-
Jumlah uji KIR angkutan umum	1.790	2.095	2.025	1.869	1.746
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1/0/1	1/0/1	1/0/1	1/0/1	1/0/1
Persentase Layanan Angkutan darat	0,000977	0,001221	0,003620	0,001049	0,002916
Kepemilikan KIR angkutan umum	180	177	166	114	36
Lama pengujian kelayakan angkutan umum /KIR(menit)	20	20	20	35	35
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	155.000	100.000	100.000	91.000	91.000
Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas darat (Unit)	205	100	0	36	220
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,007515629	0,007028738	0,00822	0,00791	0,00760
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	31.726	25.387	33.112	17.165	5.829
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	680/0/31.726	0/0/25.387	0/0/33.112	0/0/17.165	0/0/5.829

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur, 2018

a. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas

Indikator Persentase ruas yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas belum pernah dilakukan penghitungan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Indikator ini merupakan penyempurnaan indikator yang sebelumnya yaitu indikator jumlah fasilitas perlengkapan jalan dan indikator rasio panjang jalan

b. Persentase angkutan umum yang laik jalan

Angkutan umum yang laik merupakan angkutan umum yang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor.

c. Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan darat, laut/penyeberangan

Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan darat, laut dan penyeberangan merupakan jumlah penumpang yang melewati terminal dan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

dermaga (tahun ke n) dikurang dengan tahun (N-1) di bagi dengan tahun (N-1). Berdasarkan data pada tahun 2013 dan tahun 2014 jumlah penumpang yang melewati Terminal dan Dermaga mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 51.015 pada tahun 2012 menjadi 31.726 penumpang pada tahun 2013, namun pada tahun 2015 peresentase jumlah penumpang bertambah sebanyak 23,33%

d. Persentase pembangunan kawasan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitung Timur

Persentase pembangunan kawasan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitung Timur merupakan perbandingan antara pelabuhan yang telah di bangun dengan pelabuhan yang sudah ada. Pembangunan pelabuhan yang sudah ada yaitu pelabuhan ASDP Manggar

e. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum pada Tahun 2013-2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Peningkatan hanya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 63% dari tahun sebelumnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi setiap tahunnya terutama kendaraan bermotor jenis sedan dan sepeda motor.

f. Rasio Ijin Trayek

$$\text{Rasio Ijin Trayek} = \frac{\text{Jumlah izin trayek yang telah dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk pada tahun n di Kabupaten Belitung Timur}}$$

Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah izin trayek yang telah dikeluarkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur. Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan menurut Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188/KEP/DISHUBPAR/II/2008 Tanggal 24 September 2008 perihal Tarif Angkutan Penumpang dalam Kabupaten Belitung Timur sebanyak 18 trayek, dimana jumlah penduduk pada Tahun 2015 sebesar 111.397 jiwa, sehingga rasio izin trayek pada Tahun 2015 adalah 0,000162. Sejak tahun 2016 kewenangan ijin trayek bukan lagi merupakan kewenangan Dinas Perhubungan dan sudah dilimpahkan ke perijinan satu pintu.

g. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR Angkutan dari Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan antara lain pada Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 14,56% dari Tahun 2013, sedangkan realisasi pencapaian pada Tahun 2017 menjadi 1.746. penurunan jumlah uji kir ini terkait adanya sebagian masyarakat yang tidak melakukan uji kir kendaraan serta kendaraan yang mutasi ke luar wilayah Belitung Timur. Berikut data perkembangan uji kendaraan berdasarkan jenis kendaraan :



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.86.

Data Perkembangan Uji Kendaraan

No.	Kendaraan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pick Up	1057	1.288	1.289	1.172	1.123
2	Pick Up Box					
3	Light Truck	674	745	684	626	551
4	Truck					
5	Dump Truck					
6	Truck Tangki					
8	Mini Bus	59	62	52	71	72
9	Bus					
Jumlah		1.790	2.095	2.025	1.869	1.746

Sumber: Dinas Perhubungan, Kabupaten Belitung Timur 2018

h. Jumlah Pelabuhan/Terminal Bus

Kabupaten Belitung Timur mempunyai 1 (satu) pelabuhan yaitu Pelabuhan Penyeberangan ASDP Manggar yang melayani jalur pelayaran Manggar (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)- Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat) dan juga memiliki 1 (satu) terminal yang berada di Ibukota kabupaten yaitu Terminal Manggar dengan pelayanan tipe C.

i. Persentase Layanan Angkutan Darat

$$\text{Angkutan Darat} = \frac{\text{Jumlah Angkutan Darat pada Tahun } n}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat pada tahun } n \text{ di Kabupaten Belitung Timur}}$$

Layanan Angkutan darat merupakan Indikator Kinerja Kunci yaitu perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat. Rasio angkutan darat pada Tahun 2014 sebesar 0,001221 dan rasionya semakin meningkat menjadi 0.002916 pada Tahun 2017, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penumpang angkutan umum setiap tahunnya sedangkan jumlah angkutan tidak mengalami penambahan.

Tabel 2.87.

Data Angkutan Darat Tahun 2013-2017

No.	Trayek	No. Kendaraan
1	Tanjungpandan – Kelapa Kampit – Manggar	BN 1575 WL
2	Tanjungpandan – Renggiang – Manggar	BN 7795 PU
3	Tanjungpandan – Kelapa Kampit – Manggar	BN 7001 WU
4	Tanjungpandan – Dendang – Gantung – Manggar	BN 7051 PU



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No.	Trayek	No. Kendaraan
5	Tanjungpandan – Sijuk – Kelapa Kampit – Manggar	BN 7707 PU
6	Tanjungpandan – Kelapa Kampit – Manggar	BN 3019 LB
7	Manggar – Renggiang – Tanjungpandan	BN 3049 LB
8	Manggar – Kelapa Kampit – Tanjungpandan	BN 3001 LG
9	Manggar – Kelapa Kampit – Tanjungpandan	BN 3037 LB
10	Manggar – Kelapa Kampit – Tanjungpandan	BN 3026 BB
11	Manggar – Renggiang – Tanjungpandan	BN 3025 FA
12	Manggar – Kelapa Kampit – Tanjungpandan	BN PU
13	Tanjungpandan – Kelapa Kampit – Manggar	BN 7004 UP
14	Renggiang – Manggar	BN 9117
15	Renggiang – Manggar	BN 9710
16	Damar – Manggar	BN 9069
17	Kelubi – Manggar	BN 9118 GT

Sumber: Dinas Perhubungan, Kabupaten Belitung Timur 2018

Tabel di atas menjelaskan jumlah angkutan yang ada di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2017 terdiri dari AKDP sebanyak 13 kendaraan dan Angkutan pedesaan sebanyak 4 kendaraan.

j. Kepemilikan KIR angkutan umum

Dari data selama lima tahun terakhir peningkatan kendaraan angkutan umum terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 177 kendaraan. Namun pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan hanya sebanyak 36 kendaraan.

Tabel 2.88.
Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum

No	Jenis Kendaraan	2013	2014	2015	2016	2017
1	PICKUP	40	45	39	26	11
2	LIGHT TRUCK	89	76	70	34	7
3	TRUCK	13	16	19	18	2
4	DUMP TRUCK	7	14	11	16	2
5	MINI BUS	5	5	5	5	2
6	BUS	26	21	22	15	12
Jumlah		180	177	166	114	36

Sumber: Dinas Perhubungan, Kab. Belitung Timur 2018

k. **Lama pengujian kelayakan angkutan umum/KIR (Menit)**

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor per unit kendaraan adalah ± 20 menit dalam keadaan normal. Penambahan waktu pemeriksaan kendaraan disesuaikan dengan penambahan alat uji kelayakan kendaraan.

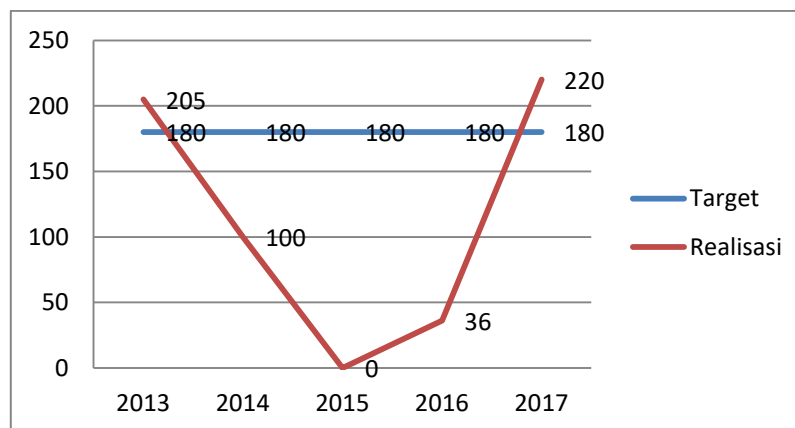
l. **Biaya pengujian kelayakan angkutan umum**

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum tidak mengalami perubahan. Penetapan biaya pengujian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

m. **Pemasangan Rambu**

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas didasarkan pada kebutuhan rambu-rambu di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Berikut grafik perkembangan jumlah rambu-rambu tahun 2013 sampai dengan 2017 :

Grafik 2. 1.
Perkembangan Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas
Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Perhubungan, Kab. Belitung Timur 2018

n. **Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di hitung berdasarkan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Pada tahun 2017 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,00760 . Dapat dijelaskan bahwa setiap 0,007600 panjang jalan mewakili 1 kendaraan, maka setiap 1 km jalan menampung 132 kendaraan. Ada peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan pada tahun 2017, namun kondisi jalan yang dilewati oleh kendaraan di Kabupaten Belitung Timur masih dalam keadaan normal dan belum terlalu padat.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Berikut penghitungan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dan data jumlah kendaraan yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur :

$$\text{Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan} = \frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$$

Tabel 2.89.
Jumlah Kendaraan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 dan 2017

No	Kode Jenis	Nama Jenis	Jumlah	
			2016	2017
1	101	Sedan	286	317
2	102	Jeep	408	432
3	103	Mini Bus	3.064	3.494
4	110	Station Wagon	10	11
5	201	Microbus	79	77
6	202	Bus	18	18
7	301	Pick Up	1.918	1.987
8	302	Pick Up Bestelwagon	1	1
9	303	Pick Up Box	9	9
10	305	Pick Up Double Cabin	15	15
11	307	Pick Up Blind Van	6	6
12	312	Delivery Van	4	4
13	351	Light Truck	539	546
14	352	Light Truck Box	4	5
15	353	Light Truck Dump	15	34
16	357	Light Truck Tanki	4	6
17	401	Truck	115	118
18	404	Truck Box	2	2
19	411	Truck Crane	1	1
20	413	Delivery Van	13	13
21	417	Truck Dump	171	172
22	419	Truck Dump Tandum	1	1
23	435	Truck Tanki	27	28
24	437	Truck Trailer	2	2
25	464	Truck Arm Roll	2	2



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Kode Jenis	Nama Jenis	Jumlah	
			2016	2017
26	511	Ransus Pemadam Api	3	3
27	514	Ransus Ambulance	18	18
28	701	Sepeda Motor R2	79.148	84.318
29	702	Sepeda Motor R3	152	165
JUMLAH			86.035	91.805

Sumber : UPTD DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Kabupaten Belitung Timur

o. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 33.112 penumpang atau sebesar 23,33% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun –tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi lebih memilih kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya kendaraan pribadi setiap tahunnya.

p. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal,

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pada tahun 2013 penumpang yang melalui dermaga sebanyak 680 orang dan terminal sebanyak 31.726 orang. Namun sejak tahun 2014 kapal penumpang KM. Manumbing dengan rute Manggar-Ketapang sudah tidak beroperasi lagi, sehingga data jumlah penumpang hanya berasal dari penumpang Terminal Manggar.

K. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.90.

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Wartel/warnet terhadap penduduk	0,2924	0,3194	0,314	0,314	0,29
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui (%):					
a. Media massa (majalah, radio, televise)	36	36	36	80	650
b. Media website (media online)	67	80	80	90	53,89
c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	8	17	25	75	50
d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	8	8	17	75	50
e. Media luar ruang (bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)	86	86	86	95	83,33

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel di atas merupakan tabel data capaian indikator urusan komunikasi dan informatika tahun 2013 - 2017. Tabel di atas menjelaskan setiap indikator di bidang komunikasi dan informatika dimulai 2013 sampai 2017 diantaranya seperti:

a. Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk

$$\text{Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Wartel/Warnet pada tahun } n \text{ yang ada di Kabupaten Belitong Timur}}{\text{Jumlah Penduduk yang ada pada tahun } n \text{ di Kabupaten Belitong Timur}} \times 1.000$$

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk merupakan perbandingan dari jumlah wartel/warnet dengan jumlah penduduk dikalikan 1.000. Capaian realisasi di Tahun 2014 dibandingkan dengan capaian realisasi di Tahun 2013 sebesar 113,54%.

Adapun jumlah warnet yang ada di Kabupaten Belitong Timur berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2011, jumlah wartel/warnet sebanyak 21 wartel/warnet, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Data Dasar Tahun 2011 sejumlah 113.315 jiwa sehingga rasionya sebesar 0,1853. Pada Tahun 2012 jumlah wartel/warnet sebanyak 23 wartel/warnet, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Data Dasar Tahun 2012 sejumlah 116.356 jiwa sehingga rasionya sebesar 0,1977.

Pada Tahun 2013 jumlah wartel/warnet sebanyak 35 wartel/warnet sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Data Dasar Tahun 2013 sebanyak 119.692 jiwa sehingga rasionya sebesar 0,2924. Pada Tahun 2014 wartel/warnet yang ada sebanyak 35 warnet sedangkan wartel 0, sedangkan untuk jumlah penduduk di Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Data Dasar Tahun 2014 sejumlah 109.564 jiwa sehingga rasio wartel/warnet terhadap penduduk sebesar 0,3194. Pada Tahun 2015, sebanyak 35 warnet sedangkan wartel 0. Untuk jumlah penduduk di Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitong Timur Semester 1 Tahun 2015 sejumlah 111.397 jiwa sehingga rasio wartel/warnet terhadap penduduk sebesar 0,314

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah. Evaluasi ini diampu oleh Kementerian PAN dan RB.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah. Tujuan evaluasi SPBE itu sendiri yaitu :



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

- Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Belitung Timur
- Sebagai dasar untuk mengupayakan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE
- Menjamin kualitas pelaksanaan SPBE

Metode pelaksanaan evaluasi SPBE melalui 3 tahapan yaitu evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

c. IKM terhadap Pelayanan Informasi Publik

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan informasi melalui berbagai media sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) serta Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki pelayanan informasi adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat pengguna layanan. Dalam melakukan survei ini menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melalui hasil IKM terhadap pelayanan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

L. Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.91.
Capaian Indikator Urusan Penanaman modal

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Investor yang berinvestasi	18	45	10	7	9
Nilai Realisasi investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	506.410.819.337	654.601.042.634	514.219.561.226	211.051.631.894	472.918.842.124
Rasio daya serap tenaga kerja (orang/perusahaan)	216,86	198,73	171,08	155,33	141,84
Jumlah penerbitan izin	1.671	1.462	877	966	827
Rata-rata lama penyelesaian ijin	2 - 21	22,5	9	5	< 5
Indek kepuasan masyarakat (IKM) Layanan PTSP	80,15	80,49	82,96	81,9	82

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

a. Investor yang berinvestasi

Data investor yang berinvestasi berdasarkan data investor PMDN dan PMA yang mengajukan izin investasi dan terbit pada tahun berkenaan yang bersumber dari SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik). Capaian data investor pada tahun 2013, 2014, dan 2015 didominasi oleh investor yang mengajukan izin usaha sektor pertambangan dengan 10 investor (tahun 2013), 37 investor (tahun 2014) dan 7 investor (tahun 2015) yang mengurus izin investasinya, 8 (delapan) investor tahun 2013 dan tahun 2014, 2 investor tahun 2015 terbagi ke sektor lainnya yaitu perkebunan, dan penginapan/hotel. Untuk investor tahun 2016 dan 2017, izin investor didominasi sektor perkebunan, sedangkan sektor pertambangan menjadi kewenangan provinsi, Pemerintah Daerah hanya mengeluarkan rekomendasi. Hal ini juga menjadi alasan capaian investor tahun 2016 dan 2017 lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2016 dari 7 investor yang mengajukan izin, 4 investor di sektor perkebunan, 3 lainnya bergerak disektor lainnya (konstruksi, Pariwisata, dan SPBU). Untuk tahun 2017 dari 9 investor yang mengajukan izin, 6 investor sektor perkebunan, dan 3 lainnya sektor lainnya (konstruksi, dan real estate/developer).

b. Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Bedasarkan nilai investasi untuk untuk tahun 2016 dan 2017 didominasi oleh sektor perkebunan/primer, dibanding nilai investasi sektor pertambangan, walaupun terlihat pada tabel tahun 2016 nilai realisasi sektor sekunder/ industri lebih besar dari sektor primer/perkebunan, namun apabila dilihat lebih detil peruntukan investasi sektor sekunder/industri nilai terbesar berasal dari investor jenis usaha perkebunan, hanya karena peruntukan investasinya untuk pabrik pengolahan minyak sawit yang dikategorikan sebagai investasi sektor industri sehingga tahun 2016 sektor industri/tersier nilai realisasi investasinya terlihat lebih tinggi dari sektor perkebunan/ primer.

Berikut tabel nilai realisasi investasi tahun 2016 dan 2017 dari berbagai sektor :

Tabel 2.92.
Nilai Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor
Tahun 2016 dan 2017

Sektor	2016		2017	
Pertambangan/ Sektor Primer	4.693.500.000	2,22%	10.060.000.000	2,13%
Perkebunan / Sektor Primer	91.331.549.323	43,27%	278.268.973.989	58,84%
Perikanan /Sektor Primer	-	0,00%	-	0,00%
Industri/ Sektor Sekunder	109.734.246.008	51,99%	172.077.894.688	36,39%
Hotel, Restoran dan Jasa Lainnya / Sektor Tersier	5.292.336.563	2,51%	3.061.973.447	0,65%



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Sektor	2016		2017	
Konstruksi / Sektor Tersier	-	0,00%	9.450.000.000	2,00%
Perdagangan/ Sektor Tersier	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	211.051.631.894	100%	472.918.842.124	100%

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur 2018

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Sektor perkebunan juga berkontribusi tinggi dalam menyerap tenaga kerja dibanding dengan sektor lainnya. Dari tabel Capaian indikator urusan penanaman modal, rasio tenaga kerja dari tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung menurun, walaupun dari Jumlah total investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat ini disebabkan antara lain:

- Adanya pengurangan tenaga kerja di beberapa perusahaan;
- Adanya perusahaan yang sudah tidak aktif beroperasi, namun masih dihitung sebagai investor, disebabkan izin dari usaha perusahaan tersebut masih berlaku dan belum dicabut, sehingga perusahaan tersebut masih memiliki kewajiban pelaporan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal). Perusahaan yang tidak aktif ini pada umumnya hanya menyisakan beberapa tenaga kerja pengamanan (security).

d. Jumlah Penerbitan ijin

Jenis perizinan terdiri dari 2 jenis perizinan, yaitu perizinan jasa usaha/ perizinan usaha dan perizinan tertentu/ Perizinan dasar dan non perizinan. Tahun 2015 pengurusan izin dan perpanjangan SITU (surat izin tempat usaha) sudah beralih ke kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 64 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014. Dan ini juga menjadi penyebab data perizinan dari tahun 2014 ke 2015 dan terdapat perbedaan yang cukup jauh. Untuk perizinan jasa usaha/ perizinan usaha didominasi oleh jenis perizinan SIUP (surat izin perdagangan), TDP (tanda daftar perusahaan), dan Reklame. Sedangkan jenis perizinan tertentu/ perizinan dasar dan non perizinan didominasi oleh jenis IMB (izin mendirikan bangunan), surat izin gangguan (HO) dan izin mendirikan/ perpanjangan/daftar ulang PAUD.

Tabel 2.93.
Jumlah Penerbitan Izin Tahun 2013-2017

Jenis Perizinan	2013	2014	2015	2016	2017
Perizinan Jasa Usaha/ Perizinan Usaha	506	382	429	576	465
Perizinan Tertentu/ Perizinan Dasar dan Non Perizinan	1165	1080	448	390	362
Jumlah	1671	1462	877	966	827

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

e. Rata-rata lama penyelesaian izin

Rata-rata lama penyelesaian izin adalah akumulasi dari seluruh jenis dan waktu yang ditetapkan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Untuk realisasi dari indikator rata-rata lama penyelesaian izin menggunakan waktu rata-rata suatu izin dikeluarkan. Penghitungan dimulai dari berkas pemohon yang diterima oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di bagian pendaftaran sampai dengan terbitnya izin. Lama lama penyelesaian izin ini dihitung selama berkas pemohon ada di PTSP. Sedangkan apabila dalam proses terbitnya izin, mengharuskan menggunakan rekomendasi dari instansi teknis, hari dimana berkas pemohon diserahkan ke instansi teknis tidak dihitung (tidak menjadi hitungan rata-rata lamanya lama penyelesaian izin di PTSP), dan apabila berkas pemohon tersebut diserahkan kembali oleh instansi teknis ke PTSP, hari (lama berkas di PTSP) dihitung lagi. Melihat tabel diatas capaian realisasi rata-rata lama penyelesaian izin tahun 2013 dan 2014 jauh lebih lama dibandingkan tahun 2015, 2016, dan 2017. Hal ini disebabkan perbedaan konsep cara perhitungan lama penyelesaian izin. Perhitungan rata-rata lama penyelesaian izin sebelum tahun 2015, untuk jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi instansi teknis, saat berkas permohonan perizinan di instansi teknis dihitung sebagai bagian dari lama penyelesaian izin yang ada di pelayanan perizinan. Namun sejak tahun 2015 konsep cara perhitungan rata-rata lama penyelesaian izin diubah menjadi seperti tersebut diatas. Hal ini dikarenakan saat menunggu rekomendasi dari instansi teknis bukan merupakan kewenangan dari bidang pelayanan perizinan.

f. Indek kepuasan masyarakat (IKM) Layanan PTSP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil dari survey kepuasan terhadap pelayanan perizinan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur, dengan karakteristik utama responden adalah orang-orang yang pernah mendapat layanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur. Capaian IKM bidang penanaman modal tahun 2015 dan 2016 dapat dikategorikan mutu pelayanan A dengan kategori pelayanan Sangat Baik dengan Interval Konversi IKM (81,26-100,00), sedangkan tahun 2013, 2014, dan tahun 2017 dikategorikan mutu pelayanan B dengan kategori pelayanan Baik dengan Interval Konversi IKM (62,51-81,25).

g. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Secara umum, investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tarik terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relative terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya daya tarik investasi dan memenangkan persaingan. Kabupaten Belitung Timur sebagai usaha untuk mendukung iklim usaha sampai saat ini baru sebatas menerbitkan peraturan daerah berupa peraturan mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi perijinan. Berikut peraturan daerah yang mendukung iklim investasi Kabupaten Belitung Timur sampai dengan 31 Desember 2017.

Tabel 2.94.
Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

No	Jenis Peraturan Daerah
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Ketenagalistrikan
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tata Cara Penyelenggaraan Izin Gangguan
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Surat Izin Usaha Perdagangan
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame
8.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan dan,

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 2018

Tabel 2.95.
Capaian Indikator Bidang Administrasi Daerah

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	11 Jenis Pajak, 3 Jenis Retribusi, 22 Macam Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 3 Jenis Retribusi, 22 Macam Retribusi	11 Jenis Pajak, 3 Jenis Retribusi, 34 Macam Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 3 Jenis Retribusi, 27 Macam Retribusi Daerah	11 Jenis Pajak, 3 Jenis Retribusi, 26 Macam Retribusi Daerah

Sumber : Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.96.
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO	JENIS RETRIBUSI	NO	JENIS PAJAK
1	Retribusi Jasa Umum	1	Pajak Hotel
2	Retribusi Jasa Usaha	2	Pajak Restoran
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3	Pajak Hiburan
		4	Pajak Reklame
		5	Pajak Penerangan Jalan
		6	Pajak Parkir
		7	Pajak Air Tanah
		8	Pajak Sarang Burung Walet
		9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
		10	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
		11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Sumber : Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur 2018

Tabel 2.97.
Rincian Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 – 2017

KEADAAN : s/d DESEMBER 2016		KEADAAN : s/d DESEMBER 2017	
NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/RETRIBUSI
1	2	1	2
A	RETRIBUSI DAERAH	A	RETRIBUSI DAERAH
I	RETRIBUSI JASA UMUM	I	RETRIBUSI JASA UMUM
1	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN -PUSKESMAS	1	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN -PUSKESMAS
	- Partik (Puskesmas Manggar)		- Partik (Puskesmas Manggar)
	- Partik (Puskesmas Gantung)		- Partik (Puskesmas Gantung)
	- Partik (Puskesmas Kelapa Kampit)		- Partik (Puskesmas Kelapa Kampit)
	- Partik (Puskesmas Mengkubang)		- Partik (Puskesmas Mengkubang)
	- Partik (Puskesmas Renggiang)		- Partik (Puskesmas Renggiang)
	- Partik (Puskesmas Simpang Pesak)		- Partik (Puskesmas Simpang Pesak)
	- Partik (Puskesmas Dendang)		- Partik (Puskesmas Dendang)
2	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA DIKELOLA OLEH PEMDA	2	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA DIKELOLA OLEH PEMDA
	- BPJS (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)		- BPJS (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
	- Partik (BKJM)		- Partik (BKJM)
3	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	3	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
	- Sampah Harian (DCKPR)		- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)
	- Sampah Bulanan (DCKPR)		
	- Kebersihan Kawasan Tempat Olahraga/Stadion/GOR BTP (Dispora)		- Kebersihan Kawasan Tempat Olahraga/Stadion/GOR BTP (Dispora)
	- Kebersihan Kawasan Tempat Olahraga Lainnya (Dispora)		- Kebersihan Kawasan Tempat Olahraga Lainnya (Dispora)
4	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	4	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

NOMO R REKENI NG	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	NOMO R REKENI NG	JENIS PAJAK/RETRIBUSI
	- Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		- Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
5	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - PELATARAN	5	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - PELATARAN
	- Pelataran /Amparan		- Pelataran /Amparan
6	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - LOS	6	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - LOS
	- Los /Plank		- Los /Plank
7	RETRIBUSI PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS	7	RETRIBUSI PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS
	- PKB Mobil Penumpang Minibus		- PKB Mobil Penumpang Minibus
8	RETRIBUSI PKB MOBIL BUS	8	RETRIBUSI PKB MOBIL BUS
	- PKB Mobil Bus		- PKB Mobil Bus
9	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG /BEBAN PICK UP	9	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG /BEBAN PICK UP
	- PKB Mobil Barang /Beban Pick Up		- PKB Mobil Barang /Beban Pick Up
10	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG /BEBAN LIGHT TRUCK	10	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG /BEBAN LIGHT TRUCK
	- PKB Mobil Barang /Beban Light Truck		- PKB Mobil Barang /Beban Light Truck
11	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG /BEBAN TRUCK	11	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG /BEBAN TRUCK
	- PKB Mobil Barang /Beban Truck		- PKB Mobil Barang /Beban Truck
12	RETRIBUSI PKB KENDARAAN BERMOTOR DIOPERASIKAN DI AIR	12	RETRIBUSI PKB KENDARAAN BERMOTOR DIOPERASIKAN DI AIR
	- PKB Kendaraan Bermotor Di Air		- PKB Kendaraan Bermotor Di Air
13	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PENYEDIAAN PETA TEKNIS	13	RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI - LRA
	- Penggantian Biaya Cetak Peta		- Pengendalian Menara Telekomunikasi
14	RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI - LRA		
	- Pengendalian Menara Telekomunikasi		
II	RETRIBUSI JASA USAHA	II	RETRIBUSI JASA USAHA
15	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH-PENYEWAAN TANAH/BANGUNAN	14	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH-PENYEWAAN TANAH/BANGUNAN
	- Sewa Kios Makanan Dan Minuman (Include Souvenir) (Disbudpar)		- Sewa Kios Makanan Dan Minuman (Include Souvenir) (Disbudpar)
	- Sewa Panggung Hiburan (Disbudpar)		- Sewa Panggung Hiburan (Disbudpar)
	- Sewa Tanah dan Bangunan (Disbudpar)		- Sewa Tanah dan Bangunan (Disbudpar)
	- Gedung Serba Guna Damar (MPB) (Camat Damar)		- Gedung Serba Guna Damar (MPB) (Camat Damar)
	- Gedung Pertemuan/Aula (Camat Damar)		- Gedung Pertemuan/Aula (Camat Damar)
	- Sewa Tanah SPDN Gantung (DKP)		- Sewa Tanah SPDN Gantung (DKP)
	- Sewa Tanah SPDN Manggar (DKP)		- Sewa Tanah SPDN Manggar (DKP)
	- Sewa Tanah EX APMS Manggar (DKP)		- Sewa Tanah EX APMS Manggar (DKP)
	- Sewa Tanah Bangunan Perikanan Manggar Gudang Nomor 18 (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Perikanan Manggar Gudang Nomor 18 (DKP)
	- Tanah Perikanan Cool Room Gantung (DKP)		- Tanah Perikanan Cool Room Gantung (DKP)
	- Tanah Perikanan Gantung Nomor 3 (DKP)		- Tanah Perikanan Gantung Nomor 3 (DKP)
	- Sewa Tanah Bangunan Gudang Pesisir (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Gudang Pesisir (DKP)
	- Sewa Tanah Bangunan Pabrik Es Manggar (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Pabrik Es Manggar (DKP)
	- Sewa Tanah Bangunan Cool Storage Manggar (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Cool Storage Manggar (DKP)
	- Sewa Tanah Bangunan Cool Room Manggar (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Cool Room Manggar (DKP)
	- Sewa Tanah Perikanan Manggar (DKP)		- Sewa Tanah Perikanan Manggar (DKP)
	- Sewa Tanah Bangunan Cool Room Batu Itam (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Cool Room Batu Itam (DKP)
	- Sewa Tanah Bangunan Pabrik Es Gantung (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Pabrik Es Gantung (DKP)
	- Sewa Tanah Bangunan Cool Room Kampit (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Cool Room Kampit (DKP)



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

NOMO R REKENI NG	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	NOMO R REKENI NG	JENIS PAJAK/RETRIBUSI
	- Sewa Tanah Bangunan Pabrik Es Dendang (DKP)		- Sewa Tanah Bangunan Pabrik Es Dendang (DKP)
16	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RUANGAN	15	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RUANGAN
	- Gedung Pertemuan Masyarakat Umum (Siang) (Camat Manggar)		- Gedung Pertemuan Masyarakat Umum (Siang) (Camat Manggar)
	- Gedung Pertemuan Dinas/Lembaga Pemerintahan Swasta (Camat Manggar)		- Gedung Pertemuan Dinas/Lembaga Pemerintahan Swasta (Camat Manggar)
	- Gedung Pertemuan (Malam) (Camat Manggar)		- Gedung Pertemuan (Malam) (Camat Manggar)
	- Gedung Pertemuan (Siang dan Malam) (Camat Manggar)		- Gedung Pertemuan (Siang dan Malam) (Camat Manggar)
	- Gedung Serba Guna (Camat Gantung)		- Gedung Serba Guna (Camat Gantung)
	- Gedung Pertemuan (Camat Gantung)		- Gedung Pertemuan (Camat Gantung)
	- Ruang Pertemuan (Camat Simpang Pesak)		- Ruang Pertemuan (Camat Simpang Pesak)
	- Gedung Serbaguna (Camat Kelapa Kampit)		- Gedung Serbaguna (Camat Kelapa Kampit)
	- Sewa Gudang /Kios Gantung (DKP)		- Sewa Gudang /Kios Gantung (DKP)
	- Sewa Gudang /Kios Manggar (DKP)		- Sewa Gudang /Kios Manggar (DKP)
	- Bengkel Gantung (DKP)		- Bengkel Gantung (DKP)
	- Sewa Ruangan Sarana Isi Ulang Galon Manggar (DKP)		- Sewa Ruangan Sarana Isi Ulang Galon Manggar (DKP)
	- Sewa Kios Kawasan Stadion BTP (Dispora)		- Sewa Kios Kawasan Stadion BTP (Dispora)
17	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - KENDARAAN BERMOTOR	16	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - KENDARAAN BERMOTOR
	- Kapal (SpeedBoat) (Camat Gantung)		- Kapal (SpeedBoat) (Camat Gantung)
	- Sewa Alat Berat (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		- Sewa Alat Berat (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
	- Sewa Bus Pariwisata (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata)		- Sewa Bus Pariwisata (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata)
	- Uji Emisi Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)		- Uji Emisi Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)
	- Sewa Kapal Motor Cahaya Pelangi (Dinas Perhubungan)		- Sewa Kapal Motor Cahaya Pelangi (Dinas Perhubungan)
	- Sewa Backhoe (Dinas Lingkungan Hidup)		- Sewa Backhoe (Dinas Lingkungan Hidup)
18	RETRIBUSI PASAR GROSIR /PERTOKOAN	17	RETRIBUSI PASAR GROSIR /PERTOKOAN
	- Sewa Toko /Kios		- Sewa Toko /Kios
19	RETRIBUSI TERMINAL-PARKIR KENDARAAN PENUMPANG DAN BIS UMUM	18	RETRIBUSI TERMINAL-PARKIR KENDARAAN PENUMPANG DAN BIS UMUM
	- Terminal		- Terminal
20	RETRIBUSI TERMINAL - TEMPAT KEGIATAN USAHA	19	RETRIBUSI TERMINAL - TEMPAT KEGIATAN USAHA
	- Sewa Petak Kios Terminal Manggar		- Sewa Petak Kios Terminal Manggar
21	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN /VILLA	20	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN /VILLA
	- Mess Kecamatan (Camat Gantung)		- Mess Kecamatan (Camat Gantung)
	- Mess Kecamatan (Camat Kelapa Kampit)		- Mess Kecamatan (Camat Kelapa Kampit)
	- Sewa Bungalow (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata)		- Sewa Bungalow (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata)
	- Mess Jakarta (Kamar AC) (Bidang Administrasi Umum)		- Mess Jakarta (Kamar AC) (Bidang Administrasi Umum)
	- Mess Jakarta (Kamar Non AC) (Bidang Administrasi Umum)		- Mess Jakarta (Kamar Non AC) (Bidang Administrasi Umum)
	- Mess Pangkalpinang (Kamar AC) (Bidang Administrasi Umum)		- Mess Pangkalpinang (Kamar AC) (Bidang Administrasi Umum)
	- Mess Pangkalpinang (Kamar Non AC) (Bidang Administrasi Umum)		- Mess Pangkalpinang (Kamar Non AC) (Bidang Administrasi Umum)
22	RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA	21	RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA
	- Lapangan Olah Raga Untuk Latihan (Camat Manggar)		- Lapangan Olah Raga Untuk Latihan (Camat Manggar)
	- Lapangan Olah Raga Untuk Tournamen (Camat Manggar)		- Lapangan Olah Raga Untuk Tournamen (Camat Manggar)
	- Gedung Olah Raga (Camat Kelapa Kampit)		- Gedung Olah Raga (Camat Kelapa Kampit)
	- Lap. Olahraga Sepak Bola (Stadion Mini) (Camat Gantung)		- Lap. Olahraga Sepak Bola (Stadion Mini) (Camat Gantung)
	- Lap. Olahraga Bulu Tangkis (Indoor) (Camat Gantung)		- Lap. Olahraga Bulu Tangkis (Indoor) (Camat Gantung)



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/RETRIBUSI
	- Lap. Olahraga Bola Volly (Camat Gantung)		- Lap. Olahraga Bola Volly (Camat Gantung)
	- Stadion BTP (Dispora)		- Stadion BTP (Dispora)
	- GOR BTP (Dispora)		- GOR BTP (Dispora)
	- Sarana dan Prasarana Olahraga Diluar Stadion Utama dan Gor Beltim (Dispora)		- Sarana dan Prasarana Olahraga Diluar Stadion Utama dan Gor Beltim (Dispora)
23	RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	22	RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
	- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
24	RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH LAIN - LAIN	23	RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH LAIN - LAIN
	- Sewa Kursi, Sofa (Bagian Administrasi Umum)		- Sewa Kursi, Sofa (Bagian Administrasi Umum)
	- Sewa Sound System (Bagian Administrasi Umum)		- Sewa Sound System (Bagian Administrasi Umum)
	- Sewa Mobil Tangki Air (Bagian Administrasi Umum)		- Sewa Mobil Tangki Air (Bagian Administrasi Umum)
	- Sewa Bus (Bagian Administrasi Umum)		- Sewa Bus (Bagian Administrasi Umum)
	- Sewa Auditorium (Bagian Administrasi Umum)		- Sewa Auditorium (Bagian Administrasi Umum)
	- Tenda Panggung (Camat Simpang Pesak)		- Tenda Panggung (Camat Simpang Pesak)
	- Tenda/ Tarub (Camat Simpang Pesak)		- Tenda/ Tarub (Camat Simpang Pesak)
	- Kursi Plastik (Camat Simpang Pesak)		- Kursi Plastik (Camat Simpang Pesak)
	- Sound System (Camat Simpang Pesak)		- Sound System (Camat Simpang Pesak)
	- Sewa Kursi (Camat Kelapa Kampit)		- Sewa Kursi (Camat Kelapa Kampit)
	- Toilet Pasar (DPMPTSP)		- Toilet Pasar (DPMPTSP)
	- Parkir (DPMPTSP)		- Parkir (DPMPTSP)
	- Alat Selam Lengkap (Disbudpar)		- Alat Selam Lengkap (Disbudpar)
	- Tabung Selam (Disbudpar)		- Tabung Selam (Disbudpar)
	- Isi Tabung Selam (Disbudpar)		- Isi Tabung Selam (Disbudpar)
	- Life Jacket (Disbudpar)		- Life Jacket (Disbudpar)
	- Boat Diving (Disbudpar)		- Boat Diving (Disbudpar)
	- Alat Snorkeling (Disbudpar)		- Alat Snorkeling (Disbudpar)
	- Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya (Disbudpar)		- Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya (Disbudpar)
	- Tiket Masuk Kolam Renang		- Tiket Masuk Kolam Renang
	- Alat Selam Lengkap (DKP)		- Alat Selam Lengkap (DKP)
	- Alat Snorkling (DKP)		- Alat Snorkling (DKP)
	- Isi Tabung Selam (DKP)		- Isi Tabung Selam (DKP)
	- Sarana Isi Ulang Galon Manggar (DKP)		- Sarana Isi Ulang Galon Manggar (DKP)
	- Life Jacket (DKP)		- Life Jacket (DKP)
	- Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian dan Pangan)		- Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian dan Pangan)
	- Kursi Plastik (Camat Manggar)		- Kursi Plastik (Camat Manggar)
	- Kursi Lipat (Camat Manggar)		- Kursi Lipat (Camat Manggar)
	- Sound System (Camat Manggar)		- Sound System (Camat Manggar)
	- Meja Rempel (Camat Manggar)		- Meja Rempel (Camat Manggar)
	- Tiket Masuk Tempat Wisata		- Tiket Masuk Tempat Wisata
III	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	III	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
25	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	24	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
	- Izin Mendirikan Bangunan		- Izin Mendirikan Bangunan
26	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA /KEGIATAN ORANG PRIBADI	25	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA /KEGIATAN ORANG PRIBADI
	- Izin Gangguan Tempat Usaha /Kegiatan Kepada Orang Pribadi		- Izin Gangguan Tempat Usaha /Kegiatan Kepada Orang Pribadi



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/RETRIBUSI
27	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA /KEGIATAN KEPADA BADAN	26	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA /KEGIATAN KEPADA BADAN
	- Izin Gangguan Tempat Usaha /Kegiatan Kepada Badan		- Izin Gangguan Tempat Usaha /Kegiatan Kepada Badan

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.98.
Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pemuda pelopor	-	-	-	60	67
Persentase Wirausaha Muda (persen)	-	-	-	60	60
Persentase pembangunan/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga dalam kondisi baik	-	-	-	70	70
Persentase Pembinaan Olahraga (persen)	-	-	-	70	70
Jumlah medali Emas				30	30

Sumber :Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitong Timur 2018

Berdasarkan tabel capaian indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitong Timur sebagai data penyusunan RJMD/RPJMD-Perubahan Tahun 2016-2021 untuk indikator diatas pada tahun 2013 s/d 2015 target dan realisasi capaiannya belum dapat di data, hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator dalam penyusunan Renstra Perubahan 2013-2015 degan penyusunan Renstra 2016-2021 sehingga terjadi perbedaan dalam penghitungan Capaian Indikator tersebut. Disamping itu pula terjadinya penyesuaian Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43) dan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu penghitungan awal capaian indikator dari table diatas baru dimulai pada tahun 2016 dari target capaian yang telah ditentukan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

N. Urusan Statistik

Tabel 2.99.
Capaian Indikator Urusan Statistik

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	ada	ada
Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	ada	ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2018

a. Buku Kabupaten Dalam Angka

merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur dalam memenuhi tuntutan data dan informasi mengenai data statistik yang menyajikan aneka jenis data dari berbagai aspek, secara komprehensif dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada pada usaha-usaha pembangunan berdaya guna dan berhasil guna. Publikasi tersebut senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah tidak menyusun buku tersebut dikarenakan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur bahwa urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komonikasi dan Informasi.

b. Buku PDRB Kabupaten

merupakan publikasi tahunan yang menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Belitung Timur secara deskriptif dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. Dengan adanya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi Belitung Timur. Penyusunan buku PDRB dilaksanakan oleh Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2013 sampai dengan 2016, namun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur bahwa urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komonikasi dan Informasi sehingga pada tahun 2017 Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Daerah tidak menyusun buku PDRB



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

c. Statistik Sektoral

1. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Urusan Statistik dilaksanakan oleh Bappeda)

Sebelum diberlakukannya UU 23/2014, Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah masih mengacu ke UU 32/2004 tentang Pemda, bahwa urusan pemerintah daerah atau urusan desentralisasi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dimana pembagian urusan ini diatur lebih tegas pada PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Dalam banyak kasus, termasuk di Kabupaten Belitong Timur, urusan wajib perencanaan pembangunan, urusan wajib tata ruang, dan urusan wajib statistik dilaksanakan oleh SKPD setingkat eselon II yaitu Bappeda. Kondisi ini masih dipertahankan di Kab Belitong Timur sampai dengan Tahun 2016 akhir.

Unit kerja setingkat eselon III yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang urusan statistik yaitu Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik. Bidang ini melaksanakan 2 urusan wajib sekaligus yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Kemudian untuk urusan statistik sektoral sendiri dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon IV di bawah bidang tersebut yaitu Sub Bidang Litbang dan Statistik. Karena UU 32/2004 dan PP 38/2007 tidak mengatur adanya pemisahan antara urusan statistik dan litbang, sehingga fungsi litbang dan statistik merupakan satu kesatuan urusan wajib statistik. Beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda melalui Sub Bidang Litbang dan Statistik ini adalah mulai dari pengumpulan data, analisa data, penyusunan kajian, sampai dengan penyajian hasil litbang dan data statistik dalam media cetak berupa buku yang disebarluaskan ke seluruh instansi di lingkungan Kab Belitong Timur.

2. Setelah Terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Urusan Statistik dialihkan ke Diskominfo)

Sejak berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitong Timur menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib statistik sektoral dipindahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Belitong Timur, yang semula dilaksanakan oleh Bappeda Kab Belitong Timur. Hal ini dikarenakan UU 23/2014 dan PP 18/2016 memisahkan antara Urusan Wajib Statistik dengan Urusan Fungsi Penunjang Kelitbangan. Adapun unit



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

kerja yang ditugaskan untuk mengampu bidang urusan wajib non pelayanan dasar statistik sektoral di Diskominfo adalah Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik. Penggabungan dari 2 urusan wajib pemerintah daerah yaitu urusan wajib non pelayanan dasar persandian dan urusan wajib non pelayanan dasar statistik. Lebih lanjut bidang urusan statistik sektoral ini diselenggarakan oleh unit kerja setingkat eselon IV, yaitu seksi statistik dan pengolahan data.

Diambilnya keputusan bahwa penyelenggara urusan wajib non pelayanan dasar statistik sektoral ini dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon IV karena berdasarkan hasil perhitungan kelas urusan yang dilaksanakan oleh bagian organisasi sekretariat daerah pada proses peyusunan perangkat daerah dan validasi data hasil inventarisasi Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D) sesuai dengan PP 18/2016 karena penyelenggaraan urusan statistik yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Belitung Timur memperoleh nilai C, sehingga untuk kepentingan perampingan struktur organisasi sebagaimana spirit PP 18/2016 dan peningkatan kelas urusan menjadi B, urusan statistik digabung dengan urusan persandian menjadi unit kerja setingkat eselon III sebagai bagian dari diskominfo Kabupaten Belitung Timur.

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Diskominfo, diberlakukan beberapa aturan bahwa, segala bentuk kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, sampai ke proses penyajian data statistik sektoral dikoordinasikan oleh Diskominfo selaku wali data, dimana data diperoleh dan dikumpulkan dari OPD dan lembaga negara lainnya di lingkungan Kab Belitung Timur selaku produsen data. Pengecualian untuk data yang dibutuhkan di e-database Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Permendagri 98/2018 ttg SIPD), bahwa khusus data SIPD tersebut, proses pemetaan, validasi dan verifikasi dikoordinasikan oleh Bappeda selaku Sekretariat Data dengan membentuk terlebih dahulu forum data yang beranggotakan Bappeda selaku Sekretariat Data, Diskominfo selaku Wali Data, BPS selaku Penyelenggara Statistik Dasar, dan perwakilan seluruh OPD serta instansi pemerintah di Lingkungan Kab Belitung Timur.

Dijelaskan di atas setelah urusan statistik dialihkan ke Diskominfo dari Bappeda, maka Bappeda pada prinsipnya tugas Bappeda telah diringankan, karena kepentingan Bappeda terhadap data statistik adalah sebagai pengguna data. Data statistik sektoral yang diproduksi oleh Diskominfo digunakan oleh Bappeda sebagai input dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang litbang. Oleh karena itu peran sentral dan strategis Diskominfo dalam menyediakan data statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan dan litbang menjadi penting, perlu penguatan anggaran dan kesiapan SDM yang mumpuni dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di daerah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

melalui Diskominfo. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemendagri melalui dirjen Bangda menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 120/066/Bangda, Tanggal 7 Januari 2019, Perihal: Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Statistik, bahwa berdasarkan Surat Edaran dimaksud, Pemerintah Daerah diminta untuk memberdayakan dan memampukan unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik sektoral melalui penyediaan anggaran yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia. Adapun usulan program/kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah sebagaimana tertuang di dalam surat Edaran Mendagri Nomor 120/066/Bangda, Poin 4.

Guna melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diurai di atas, maka pada Tahun 2020, Diskominfo melalui Bidang Persandian dan Statistik mengusulkan beberapa kegiatan antara lain: Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Statistik Sektoral Bidang Ekonomi; Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Statistik Sektoral Bidang Sosial; Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Statistik Sektoral Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Statistik Sektoral Bidang Infrastruktur, Sarana dan Prasarana; Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; Koordinasi statistik sektoral; Pengembangan sistem informasi statistik sektoral terintegrasi. Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut bisa menyuplai kebutuhan data statistik sektoral (sebagai input) bagi penyusunan perencanaan pembangunan dan penyusunan kajian litbang.

3. Persentase Ketersediaan Data

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyediakan data statistik sektoral yang meliputi data statistik di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan dan aparatur serta bidang infrastruktur, sarana dan prasarana. Data statistik sektoral diperlukan untuk memberikan percepatan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga informasi tersebut bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Masyarakat bisa mengetahui tentang tren data dan indikator apa saja yang dapat memajukan pembangunan. Selain itu, data ini digunakan dan dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan oleh *stakeholders*.

O. Urusan Persandian

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang salah satunya yaitu urusan Persandian berada satu rumpun dengan urusan statistik. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, Urusan Persandian dan Statistik digabung dengan Urusan Komunikasi dan Informatika di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam satu Bidang yang bernama Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik terdapat pada bagian ke 9 Pasal 33. Sebelum disatukan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, persandian berada di Sekretariat Daerah pada Sub bagian yang bernama Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pada tanggal 3 Januari 2017 terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika yang masuk pada tipe B yang terdiri dari 4 Urusan yaitu Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta 3 Bidang yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Penyelenggaraan *E-Government* dan Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan statistik.

P. Urusan Kebudayaan

Tabel 2.100.
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Event seni dan budaya	3	4	4	5	3
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	61	61	61	61	62
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7	7	7	7	7
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	594	594	628	628	628

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur 2018

a. Jumlah Event seni dan budaya

Jumlah event seni dan budaya di Kabupaten Belitung Timur tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan, pencapaian kinerja pada sasaran ini untuk tahun 2018 tercapai 100% dan dapat dijelaskan bahwa Jumlah event seni dan budaya pada tahun 2018 memiliki target kinerja sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi sebanyak 3 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Paduan Suara Gita Bahana Nusantara ke Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 April 2018 bertempat di Rumah Makan Vega Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Dengan peserta dari SMP dan SMA sebelitim yang diikuti sebanyak 90 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari dengan perincian sebagai berikut: hari pertama tanggal 4 April 2018 melaksanakan pengambilan nada peserta, hari kedua tanggal 5 April 2018 seleksi peserta dengan lagu pilihannya, sesuai dengan kategori suaranya. Kemudian setelah selesai seleksi tersebut didapat 12 kategori peserta kemudian untuk dikirim ke Provinsi hanya 8 peserta dengan kategori Alto, Tenor, Sopran dan Bass.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

2. Kegiatan Penyelenggaraan Atraksi Seni dan Budaya

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka melestariakan seni dan budaya di Kabupaten Belitung Timur sekaligus sebagai ajang pagelaran dan pertunjukan seni dari pelaku seni dan budaya terutama di beberapa objek wisata dan momen tertentu. Pada tahun 2018, kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun selama 11 bulan dengan perincian kegiatan dilaksanakan pada minggu weekend atau pada hari Sabtu dan Minggu, untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke Belitung Timur.

3. Kegiatan Festival Seni dan Budaya Belitong

Festival Seni dan Budaya Belitong diselenggarakan selain sebagai ajang pagelaran seni dan budaya bagi pelaku seni juga sebagai ajang kompetensi sanggar-sanggar/pelaku seni di Belitung Timur. Dalam kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28 s.d 30 Agustus 2018 di objek wisata pantai Nyiur Melambai kecamatan Manggar selama 3 hari. Dalam kegiatan ini ditampilkan 11 (sebelas) kategori kesenian yang diikuti oleh sekitar 20 sanggar dimana masing-masing sanggar terdapat sekitar 20 orang pelaku seni. Dari kompetisi tersebut dihasilkan beberapa peserta dengan penampilan terbaik. Selain mendapat penghargaan peserta terbaik tersebut selanjutnya diikutsertakan dalam ajang festival Seni dan Budaya Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan beberapa pertunjukan seni di Tingkat Nasional.

b. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 diselenggarakan sebanyak 61 kali, Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan agenda rutin yang cukup terjadwal sepanjang tahun guna mendukung *event* kepariwisataan. Kegiatan atraksi seni dan budaya yang menampilkan gelar seni ke beberapa destinasi dan objek wisata di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2017 penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat menjadi 62 kali penyelenggaraan, hal ini terjadi seiring diadakannya Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur salah satu Destinasi Wisata di Kabupaten Belitung Timur melalui Objek Wisata Unggulan Ngenjungak (OWUN). Adapun Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Belitung Timur diantaranya:

Tabel 2.101.

Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017

No.	Nama	Lokasi
1	Atraksi Seni dan Budaya	DPRD Belitung Timur
2	Atraksi Seni dan Budaya	Auditorium Zahari MZ
3	Atraksi Seni dan Budaya	Pantai Nyiur Melambai



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No.	Nama	Lokasi
4	Atraksi Seni dan Budaya	MPD Damar
5	Atraksi Seni dan Budaya	Disbudpar Belitung Timur
6	Atraksi Seni dan Budaya	Lapangan Segitiga Kelapa Kampit
7	Atraksi Seni dan Budaya	SMA N 1 Gantung
8	Atraksi Seni dan Budaya	RM Lemadang Tanjung Tinggi
9	Atraksi Seni dan Budaya	SMA N 1 Manggar
10	Atraksi Seni dan Budaya	Dusun Batu Penyru
11	Atraksi Seni dan Budaya	Dusun Bentaian
12	Atraksi Seni dan Budaya	Masjid Assalam Desa Baru
13	Atraksi Seni dan Budaya	Kampung Ahok
14	Atraksi Seni dan Budaya	Pujamas Gantung
15	Atraksi Seni dan Budaya	RM Ayung Desa Baru
16	Atraksi Seni dan Budaya	Desa Limbongan
17	Atraksi Seni dan Budaya	KPU Belitung Timur
18	Atraksi Seni dan Budaya	RM Fega Desa Baru
19	Atraksi Seni dan Budaya	Kejaksan Negeri Belitung Timur
20	Atraksi Seni dan Budaya	Kelenteng Kelapa Kampit
21	Atraksi Seni dan Budaya	Vihara Dewi Kwan Im
22	Atraksi Seni dan Budaya	Warkok KEK Manggar
23	Atraksi Seni dan Budaya	Taman Kota Manggar
24	Perayaan Maras Taun	Desa Limbongan
25	Tradisi Buang Jong	Suku Sawang Gantung
26	Perayaan Selamat Laut	Dusun Suge Desa Tanjung Kelumpang
27	Festifal Seni dan Budaya Belitong	Pantai Nyiur Melambai
26	Gita Bahana Nusantara	Aula RM Vega Desa Baru

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur 2018

c. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2017 terdapat 7 unit berupa bangunan pementasan dan panggung hiburan, antara lain:

Tabel 2.102.

Sarana penyelenggaraan Seni Budaya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017

No.	Uraian	Lokasi	Jumlah unit
1	Panggung Hiburan	Pantai Nyiur Melambai Desa Lalang Kecamatan Manggar	1
2	Pendopo Seni	Komplek Perkantoran Terpadu Desa Padang, Kecamatan Manggar	1
3	Panggung Hiburan	Pantai Burung Mandi Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar	1
4	Panggung Hiburan	Pice Kecamatan Gantung	1



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No.	Uraian	Lokasi	Jumlah unit
5	Pendopo Laskar Pelangi	Desa Selinsing Kecamatan Gantung	1
6	Panggung Hiburan	Pantai Punai Kecamatan Simpang Pesak	1
7	Panggung Hiburan	Desa Balok Kecamatan Dendang	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitong Timur 2018

d. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dari tahun 2013 sebanyak 589 buah terdiri dari Situs dan Bangunan Cagar Budaya (BCB) sebanyak 15 buah, benda sejarah sebanyak 446 buah, serta benda sejarah koleksi Museum Buding 128 buah. Tahun 2014 tidak terjadi peningkatan sama dengan jumlah tahun 2013.. Pada tahun 2015 meningkat sebanyak 628 buah meningkat 6,62% peningkatan tersebut didapat dari temuan benda cagar budaya yang terdapat di Museum Buding sejumlah 39 unit barang. Tahun 2016 dan Tahun 2017 kondisi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sama dengan Tahun 2015.

Berikut rincian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan :

Tabel 2.103.

Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

No	Nama	Lokasi	Dilestarikan	Keterangan
1	Sites Ex. Rumah Sakit	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Belum	Situs Cb/Hasil Registrasi
2	Makam Belanda (KERKOFF)	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Belum	Situs Cb/Hasil Registrasi
3	Situs EC	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Belum	Situs Cb/Hasil Registrasi
4	Situs Balok Lama	Desa Balok, Kecamatan Dendang	Sudah	Situs Cb/Hasil Registrasi
5	Situs Balok Baru	Desa Balok, Kecamatan Dendang	Sudah	Situs Cb/Hasil Registrasi
6	Rumah Dinas Bupati	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
7	Rumah Dinas Wakil Bupati	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
8	Sekolah AC	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
9	SDN 29 Manggar	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
10	Gereja Santo Joseph	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
11	Eks Rumah Sakit	Desa Lalang, Kecamatan Manggar	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
12	Islamic Center	Desa Lalang,	Sudah	BCB/Hasil Registrasi



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Nama	Lokasi	Dilestarikan	Keterangan
		Kecamatan Manggar		
13	Makam Cakraningrat I	Situs Balok lama	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
14	Makam Syeikh Abduljabar Sjamsudin	Situs Balok lama	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
15	Makam Cakraningrat II	Situs Balok Baru	Belum	Situs Cb Keramat Sisilan/Hasil Registrasi
16	Makam Cakraningrat III	Situs Balok Baru	Belum	Situs Cb Keramat Sisilan/Hasil Registrasi
17	Makam KA Siasip	Situs Balok Baru	Belum	Situs Cb Keramat Sisilan/Hasil Registrasi
18	Makam Keramat Kelumpai	Situs Balok Baru	Belum	Struktur Cagar Budaya/Hasil Registrasi
19	Makam KA Loso	Kamput Parit Tebu, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung	Sudah	Bangunan Cagar Budaya/Hasil Registrasi
20	Stoven	Kecamatan Kelapa Kampit	Belum	Struktur Cagar Budaya/Hasil Registrasi
21	Bendungan Pice	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung	Sudah	Struktur Cagar Budaya/Hasil Registrasi
22	Vihara Dewi Kwan Im	Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
23	Vihara Dewi Kwan Im	Kamput Parit Tebu, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung	Sudah	BCB/Hasil Registrasi
Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang dimiliki Daerah			23	
Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan			15	
Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang belum dilestarikan			8	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitong Timur, 2018

Tabel 2.104.

Benda Sejarah yang Dilestarikan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

No	Nama benda	Tahun	Kondisi		Jumlah
		Periode Masa	Baik	Rusak	
1	Uang Logam Indonesia 5 Cen	1951	2	0	2
2	Uang Logam 5 Cen	1954	3	0	3
3	Uang Logam Indonesia 5 Cen	1951	11	0	11
4	Uang Logam Indonesia 10 Cen	1954	5	0	5
5	Uang Logam Indonesia 25 Cen	1952	14	0	14
6	Uang Logam Indonesia 25 Cen	1955	1	0	1
7	Uang Logam Indonesia 50 Cen	1952	101	0	101
8	Uang Logam Indonesia 50 Cen	1955	30	0	30
9	Uang Logam Indonesia 50 Cen	1957	35	0	35
10	Uang Logam Indonesia 50 Cen	1958	13	0	13



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Nama benda	Tahun	Kondisi		Jumlah
		Periode Masa	Baik	Rusak	
11	Uang Logam Nederlanch Indie 1/2 Cen	1968	1	0	1
12	Uang Logam Nederlanch Indie 1/2 Cen	1945	32	0	32
13	Uang Logam Nederlanch 1 1/2 Cen	1945	1	0	1
14	Uang Logam Nederlanch 1 1/2 Cen		8	0	8
15	Uang Logam Indonesia Rp. 5	1974	2	0	2
16	Uang Logam Indonesia Rp. 10	1971	19	0	19
17	Uang Logam Indonesia Rp. 10	1974	29	0	29
18	Uang Logam Indonesia Rp. 25	1971	15	0	15
19	Uang Logam Indonesia Rp. 50	1971	21	0	21
20	Uang Logam Indonesia Rp. 100	1973	7	0	7
21	Uang Logam Indonesia Rp. 100	1978	6	0	6
22	Uang Logam Indonesia Rp. 100	-	1	0	1
23	Uang Logam Gulden Nederlanch Indie 1/4 Gulden	1901	1	0	1
24	Uang Logam Gulden Nederlanch Indie 1/4 Gulden	1917	1	0	1
25	Uang Logam Gulden Nederlanch Indie 1/4 Gulden	1930	1	0	1
26	Uang Logam Gulden Nederlanch Indie 1/10 Gulden	1913	1	0	1
27	Uang Logam Gulden Nederlanch Indie 1/10 Gulden	1915	1	0	1
28	Uang Logam Gulden Nederlanch Indie 1/10 Gulden	1928	1	0	1
29	Uang Logam Gulden Nederlanch Indie 1/2 Gulden	1921	1	0	1
30	Uang Kertas Indonesia Rp. 1	1964	1	0	1
31	Uang Kertas Indonesia Rp. 5		6	0	6
32	Uang Kertas Indonesia Rp. 10		7	0	7
33	Uang Kertas 10 Gulden		25	0	25
34	Uang Kertas 5 Gulden		8	0	8
35	Uang Kertas 1 Gulden	1940	1	0	1
36	Uang Kertas 1 Gulden		3	2	5
37	Uang Kertas 1/2 Gulden		22	0	22
38	Uang Kertas 5 Cen		1	0	1
39	Uang Kertas 1 Cen		1	0	1
42	Tombak		1	0	1
43	Tempayan		2	0	2
57	Bendera Jepang		-	1	1
58	Bendera Indonesia		-	1	1
	Jumlah		442	4	446

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitong Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.105.

Benda Sejarah Koleksi Museum Buding Kabupaten Belitong Timur Tahun 2017

No.	No. Registrasi	Nama Koleksi	Deskripsi
1	01/L/MSM/BDG	Al Qur'an Kecil	Kepunyaan Raja Buding
2	02/L/MSM/BDG	Bulir Padi Besar	Kepunyaan Raja Buding
3	03/L/MSM/BDG	Bokor	Kepunyaan Raja Buding
4	04/L/MSM/BDG	Dulang Tembaga	Kepunyaan Raja Buding
5	05/L/MSM/BDG	Pahar	Kepunyaan Raja Buding
6	06/L/MSM/BDG	Tempayan Air Kuningan	Kepunyaan Raja Buding
7	07/L/MSM/BDG	Pahar	Kepunyaan Raja Buding
8	08/L/MSM/BDG	Keminangan	Kepunyaan Raja Buding
9	09/L/MSM/BDG	Cupu Kapor	Kepunyaan Raja Buding
10	10/L/MSM/BDG	Cupu Pinang	Kepunyaan Raja Buding
11	11/L/MSM/BDG	Cupu Garu	Kepunyaan Raja Buding
12	12/L/MSM/BDG	Cupu Rukuk	Kepunyaan Raja Buding
13	13/L/MSM/BDG	Cupu Gambir	Kepunyaan Raja Buding
14	14/L/MSM/BDG	Tutup Cupu	Kepunyaan Raja Buding
15	15/L/MSM/BDG	Tutup Cupu	Kepunyaan Raja Buding
16	16/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
17	17/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
18	18/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
19	19/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
20	20/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
21	21/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
22	22/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
23	23/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
24	24/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
25	25/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
26	26/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
27	27/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
28	28/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
29	29/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
30	30/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
31	31/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
32	32/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
33	33/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
34	34/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
35	35/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
36	36/L/MSM/BDG	Keris	Kepunyaan Raja Buding
37	37/L/MSM/BDG	Pedang Raja Balok	Kepunyaan Raja Buding
38	38/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No.	No. Registrasi	Nama Koleksi	Deskripsi
39	39/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
40	40/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
41	41/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
42	42/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
43	43/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
44	44/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
45	45/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
46	46/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
47	47/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
48	48/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
49	49/L/MSM/BDG	Pedang Kayu	Kepunyaan Raja Buding
50	50/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
51	51/L/MSM/BDG	Pedang	Kepunyaan Raja Buding
52	52/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
53	53/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
54	54/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
55	55/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
56	56/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
57	57/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
58	58/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
59	59/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
60	60/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
61	61/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
62	62/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
63	63/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
64	64/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
65	65/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
66	66/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
67	67/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
68	68/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
69	69/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
70	70/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
71	71/L/MSM/BDG	Badik	Kepunyaan Raja Buding
72	72/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
73	73/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
74	74/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
75	75/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
76	76/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
77	77/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
78	78/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
79	79/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No.	No. Registrasi	Nama Koleksi	Deskripsi
80	80/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
81	81/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
82	82/U/MSM/BDG	Cupu Keminang	Kepunyaan Raja Buding
83	83/U/MSM/BDG	Tombak	Kepunyaan Raja Buding
84	84/U/MSM/BDG	Tombak	Kepunyaan Raja Buding
85	85/U/MSM/BDG	Tombak	Kepunyaan Raja Buding
86	86/U/MSM/BDG	Tombak	Kepunyaan Raja Buding
87	87/U/MSM/BDG	Tombak	Kepunyaan Raja Buding
88	88/U/MSM/BDG	Tombak	Kepunyaan Raja Buding
89	89/U/MSM/BDG	Tombak	Kepunyaan Raja Buding
90	90/U/MSM/BDG	Gong	Kepunyaan Raja Buding
91	91/U/MSM/BDG	Gong	Kepunyaan Raja Buding
92	92/U/MSM/BDG	Gong	Kepunyaan Raja Buding
93	93/U/MSM/BDG	Pemukul Gong	Kepunyaan Raja Buding
94	94/U/MSM/BDG	Jubah Arab	Kepunyaan Raja Buding
95	95/U/MSM/BDG	Jubah Arab	Kepunyaan Raja Buding
96	96/U/MSM/BDG	Jubah Arab	Kepunyaan Raja Buding
97	97/U/MSM/BDG	Syal Jubah Arab	Kepunyaan Raja Buding
98	98/U/MSM/BDG	Dayung	Kepunyaan Raja Buding
99	99/U/MSM/BDG	Dayung	Kepunyaan Raja Buding
100	100/U/MSM/BDG	Dayung	Kepunyaan Raja Buding
101	101/U/MSM/BDG	Kantib	Kepunyaan Raja Buding
102	102/U/MSM/BDG	Kantib	Kepunyaan Raja Buding
103	103/U/MSM/BDG	Kantib	Kepunyaan Raja Buding
104	104/U/MSM/BDG	Kantib	Kepunyaan Raja Buding
105	105/U/MSM/BDG	Tempat Perhiasan Keramik	Kepunyaan Raja Buding
106	106/U/MSM/BDG	Mangkuk Keramik	Kepunyaan Raja Buding
107	107/U/MSM/BDG	Sumpit	Kepunyaan Raja Buding
108	108/U/MSM/BDG	Kotak Perhiasan Logam	Kepunyaan Raja Buding
109	109/U/MSM/BDG	Kotak Besi Pakaian	Kepunyaan Raja Buding
110	110/U/MSM/BDG	Pisau Lipat	Kepunyaan Raja Buding
111	111/U/MSM/BDG	Pahar	Kepunyaan Raja Buding
112	112/U/MSM/BDG	Jamang	Kepunyaan Raja Buding
113	113/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
114	114/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
115	115/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
116	116/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
117	117/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
118	118/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
119	119/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
120	120/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

No.	No. Registrasi	Nama Koleksi	Deskripsi
121	121/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
122	122/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
123	123/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
124	124/U/MSM/BDG	Uang Logam	Kepunyaan Raja Buding
125	125/U/MSM/BDG	Puncak Kubah Masjid Kerajaan Buding	Kepunyaan Raja Buding
126	126/U/MSM/BDG	Puncak Kubah Masjid Kerajaan Buding	Kepunyaan Raja Buding
127	126/U/MSM/BDG	Puncak Kubah Masjid Kerajaan Buding	Kepunyaan Raja Buding
128	127/U/MSM/BDG	Puncak Kubah Masjid Kerajaan Buding	Kepunyaan Raja Buding

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitong Timur, 2018

Tabel 2.106.

Penambahan Koleksi Museum Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2017

No	Nama Koleksi	Jenis/Bahan	Jumlah
1	Pecahan Keramik	Stoneware/Gerabah	20 buah
2	Peci/Songkok	Kain dan kulit binatang	1 buah
3	Keris	Kayu, logam	5 buah
4	Lukisan	Kanvas	2 buah
5	Alat Masak Obat	Stoneware	1 unit
6	Alat Rumah Tangga (Cupu Keminangan dan Kantip)	Logam	10 Buah
	Jumlah		39 buah

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitong Timur, 2018

Q. Urusan Perpustakaan

Tabel 2.107.

Capaian Indikator Urusan Perpustakaan

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,11	0,15	0,19	0,22	1,76
2	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	7.928	7.928	8.720	9.482	9.270
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,34	1,5	1,46	1,4	1,36
4	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	9.490	12.507	7.350	13.820	18.279
5	Persentase pengunjung perpustakaan/tahun	100	100	100	100	100
6	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	17	17	17	11	25
7	Jumlah Perpustakaan Desa (unit)	12	19	19	19	19

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitong Timur, 2018

a. Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

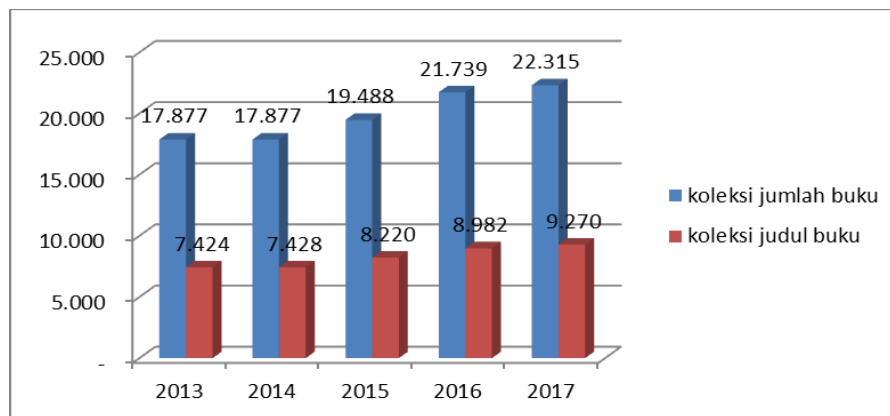
Untuk mengukur rasio pengunjung perpustakaan per tahun diperoleh dengan menghitung jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun yang

dibandingkan dengan jumlah orang dalam populasi yang dilayani. Klasifikasi usia yang dipakai untuk menghitung jumlah orang dalam populasi yang dilayani adalah usia 10-59 th sesuai data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.

b. Koleksi Judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Pengukuran Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah diperoleh dengan menghitung jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang dibandingkan dengan jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sampai dengan lima tahun terakhir sebanyak 9.270 judul dan sebanyak 22.315 eksemplar. Peningkatan penambahan koleksi buku di perpustakaan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 2.
Koleksi Buku



c. Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk diperoleh dengan menghitung jumlah seluruh perpustakaan di Kabupaten Belitung Timur yang dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Peran perpustakaan dalam Sistem Pendidikan Nasional yaitu mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-44 tahun melalui penyediaan sumber informasi dan pengetahuan agar warga masyarakat memiliki budaya gemar membaca. keberadaan jenis perpustakaan di Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.108.

Data Perkembangan Jenis Perpustakaan di Kabupaten Belitung Timur

Jenis Perpustakaan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah Perpustakaan Nasional	-	-	-	-	-
2. Jumlah Perpustakaan Umum	17	24	24	24	24
1. Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi	-	-	-	-	-
2. Jumlah Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
3. Jumlah Perpustakaan Umum Kecamatan	3	3	3	3	3
4. Jumlah Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	12	19	19	19	19
5. Jumlah Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat	-	-	-	-	-
6. Jumlah Perpustakaan Keliling	1	1	1	1	1
3. Jumlah Perpustakaan Sekolah	143	143	143	143	143
1. Jumlah Perpustakaan Taman Kanak-Kanak	-	-	-	-	-
2. Jumlah Perpustakaan Sd/Sederajat	105	105	105	105	105
3. Jumlah Perpustakaan Sltip/Sederajat	24	24	24	24	24
4. Jumlah Perpustakaan Slta/Sederajat	14	14	14	14	14
4. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
5. Jumlah Perpustakaan Khusus	-	-	-	-	-
1. Jumlah Perpustakaan Departemen Dan Lembaga Negara Non Departemen	-	-	-	-	-
2. Jumlah Perpustakaan Bank	-	-	-	-	-
3. Jumlah Perpustakaan Surat Kabar Dan Majalah	-	-	-	-	-
4. Jumlah Perpustakaan Industry Dan Badan Komersial	-	-	-	-	-
5. Jumlah Perpustakaan Lembaga Penelitian Dan Ilmiah	-	-	-	-	-
6. Jumlah Perpustakaan Militer	-	-	-	-	-
6. Jumlah Perpustakaan Online/Digital	-	-	-	-	-
1. Jumlah Perpustakaan Nasional	-	-	-	-	-
2. Jumlah Perpustakaan Umum	-	-	-	-	-
3. Jumlah Perpustakaan Sekolah	-	-	-	-	-
4. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
5. Jumlah Perpustakaan Khusus	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur, 2018

d. Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun

Untuk mendapat jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dengan cara membagi jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun dibagi dengan jumlah bulan. Berdasarkan Tabel 2. 95 diatas, maka rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya peran pemerintah dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai sehingga terwujudnya peningkatan minat baca di Kabupaten Belitung Timur.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

e. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Optimalisasi SDM pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat masih perlu ditingkatkan mengingat tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan perpustakaan sangat beranekaragam. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bidang teknis dan fungsional perpustakaan, penyelenggaraan diklat teknis kepastakawanan dan diklat fungsional kepastakawanan. Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur telah melakukan upaya peningkatan kualitas SDM dengan melaksanakan kegiatan magang di Perpustnas bagi tenaga pengelola perpustakaan.

f. Jumlah Perpustakaan Desa

Menunjukkan keberadaan/jumlah perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Keberadaan perpustakaan desa memiliki banyak nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat, namun demikian, nilai-nilai dimaksud masih perlu diungkapkan secara lebih nyata dalam kehidupan masyarakat. Perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa memiliki banyak nilai manfaat bagi banyak aspek kehidupan manusia di desa. Beberapa di antaranya adalah nilai sosial, nilai sejarah, nilai dokumentasi, dan nilai-nilai lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Jumlah perpustakaan desa di Kabupaten Belitung Timur sampai dengan tahun 2017 masih sebanyak 19 perpustakaan dan belum ada peningkatan sejak tahun 2014.

R. Urusan Kearsipan

Tabel 2.109.
Capaian Indikator Urusan Kearsipan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	-	-	8	11	12
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	-	-	18	32	24
Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	-	1	3	5	7

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur, 2018

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku diukur dengan menghitung jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah dikali dengan seratus persen, dalam hal ini jumlah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. Peningkatan pengelolaan arsip secara baku tidak hanya ditentukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dalam hal ini Dinas Perpustakaan yang mengemban amanat untuk pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar bidang urusan kearsipan, tetapi instansi pemerintah, swasta, perorangan dan masyarakat masyarakat luas pun turut serta berperan dalam pengelolaan arsip.

Pengukuran yang menunjukkan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Optimalisasi sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisis, telaahan, dan kajian penyelenggaraan kearsipan untuk membantu perumusan kebijakan kearsipan yang tepat, terarah, dan dapat dilaksanakan. Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional melalui pengembangan manajemen arsip/dokumen negara yang modern perlu dilaksanakan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Dengan meningkatnya tenaga pengelola kearsipan sangat membantu dalam penyelenggaraan kearsipan daerah. Selain itu kapasitas Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses penyelenggaraan kearsipan secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem kearsipan. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) harus semakin mampu menjadi pembina dalam mengarahkan proses penyelenggaraan kearsipan daerah secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan sektoral dan kedaerahan.

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.110.
Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi perikanan Tangkap (ton)	40.545,30	41.619,01	41.612,10	43.570,87	35.853,20
Produksi perikanan Budidaya (ton)					
Konsumsi ikan per tahun (Kg/kapita/thn)	45,81	46,6	47,64	47,97	44,6
Cakupan bina kelompok nelayan	128,6	73,3	116,2	89,19	158,82
Produksi perikanan kelompok nelayan (Persen)	20,3	94,5	91,28	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

a. Produksi Perikanan

Secara umum produksi perikanan Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan produksi. Produksi perikanan antara lain mencakup produksi hasil tangkapan nelayan, pembudidaya ikan dan produk-produk olahan hasil perikanan lainnya. Namun apabila dilihat dari capaian target yang ditetapkan belum terpenuhi dikarenakan capaian-capaian penentu produksi perikanan dari sektor perikanan budidaya dan pengolahan mengalami penurunan, sedangkan sektor perikanan tangkap mengalami surplus produksi dari yang ditargetkan. Terjadinya penurunan realisasi produksi perikanan pada tahun 2013 dan 2017 lebih disebabkan oleh faktor pencapaian produksi perikanan budidaya yang belum mencapai target dikarenakan musim kemarau panjang terjadi di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang mengakibatkan ketersediaan air terbatas guna kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan. Pencapaian produksi perikanan yang belum sesuai dengan target juga dialami sektor perikanan pengolahan. Pasokan ikan untuk bahan baku pengolahan mengalami ketersendatan. Musim timur dengan kondisi gelombang tinggi, mengakibatkan nelayan tidak banyak yang bisa melaut sehingga ketersediaan ikan di pasar atau pengepul sedikit. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu *stakeholder* mengupayakan peningkatan produksi perikanan dengan berbagai kegiatan pendukung antara lain dengan memberikan bantuan sarana prasarana penangkapan, budidaya perikanan dan pengolahan perikanan kepada masyarakat nelayan. Dengan berbagai kegiatan pendukung diharapkan produksi perikanan Kabupaten Belitung Timur ke depan akan mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Konsumsi ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur. Adapun jumlah konsumsi ikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,37% dari tahun sebelumnya. Upaya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur untuk mencapai target konsumsi ikan di Kabupaten Belitung Timur, antara lain adalah dengan pelaksanaan kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Berbagai acara dilaksanakan demi mengkampanyekan Gemarikan, dengan lomba masak serba ikan tingkat kabupaten, sosialisasi produk-produk hasil olahan ikan ke siswa-siswi dari tingkat TK sampai dengan tingkat SLTA dengan harapan budaya makan ikan sudah tumbuh dari usia muda.

c. Cakupan Pembinaan Kelompok Nelayan

Indikator kinerja untuk cakupan pembinaan kelompok nelayan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pembinaan kelompok nelayan dilaksanakan secara merata ke setiap kecamatan di wilayah Kabupaten



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Belitung Timur sesuai dengan jumlah nelayan wilayah laut dan pesisir. Pembinaan kelompok merupakan upaya pembinaan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelatihan, sosialisasi penyuluhan dan bantuan sarana penangkapan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur. Cakupan pembinaan dilaksanakan terhadap kelompok-kelompok dari berbagai sektor, antara lain kelompok dari sektor perikanan tangkap, kelompok dari sektor pengawasan, kelompok dari sektor perikanan budidaya dan kelompok dari sektor pengolahan perikanan. Pada tahun 2012, tahun 2014 dan tahun 2016 cakupan bina kelompok nelayan realisasinya menurun lebih disebabkan karena program bantuan sarana penangkapan bagi kelompok nelayan tidak banyak di berikan. Program yang digalakkan lebih kepada pelatihan dan pendampingan penyuluhan kepada kelompok-kelompok yang sudah melaksanakan kegiatan perikanan.

d. Produksi perikanan kelompok nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan terdiri dari produksi perikanan kelompok nelayan perikanan tangkap, produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan dan produksi perikanan kelompok pengolahan. Realisasi Capaian Produksi Perikanan Kelompok Nelayan pada tahun 2015 adalah 91,28%.

B. Urusan Pariwisata

Tabel 2.111.

Capaian Indikator Urusan Pariwisata

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase kontribusi PDRB sektor Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman	2,28	2,29	2,28	2,32	2,33
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	41.755	81.752	167.680	232.921	250.326
Rata-rata lama tinggal Wisatawan (hari)	1	1	1	2	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, 2018

Berdasarkan capaian indikator kinerja diatas secara umum capaian urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

a. Persentase kontribusi PDRB sektor Penyediaan akomodasi, makanan dan minum

Pada tahun 2017 kategori penyediaan akomodasi, makanan dan minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Belitung Timur sebesar 2,33%. Sebagai lapangan usaha pendukung pariwisata, perkembangan lapangan usaha ini sangat bergantung pada kemajuan pariwisata daerah.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

b. Jumlah Kunjungan Wisatawan;

Dalam pelaksanaan kinerja sasaran tahun 2017 dibanding tahun 2016 terjadi peningkatan capaian kunjungan wisata domestik sebesar 7,5%, hal ini disebabkan meningkatnya pengembangan destinasi melalui meningkatnya kualitas objek wisata salah satunya Objek Wisata Ngenjungak di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, Objek Wisata Open Pit dan Objek Wisata Alam Gunong Lumut.

Secara keseluruhan terjadi tren kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung Timur hal ini disebabkan meningkatnya pengembangan destinasi melalui penataan objek wisata salah satunya menata Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu objek wisata yang telah dikunjungi oleh wisatawan. Efektifitas pelaksanaan program promosi melalui media promosi dan kerjasama promosi dengan para pelaku pariwisata, media massa baik tingkat lokal maupun regional, pelaksanaan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)* serta pelaksanaan even-even promosi melalui festival yang dilaksanakan sepanjang tahun.

c. Rata-rata lama tinggal (*length of stay*) wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2013 hanya 1 (satu) hari dan tidak mengalami peningkatan sampai tahun 2015, hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan lama tinggal wisatawan, baik dari sarana transportasi maupun akomodasi dibandingkan dengan kabupaten Belitung yang telah memiliki fasilitas, sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi yang cukup baik dalam mendukung aktifitas wisatawan, hal ini ditambah dengan kurang beragamnya pilihan wisata yang dapat dinikmati selain mengunjungi destinasi wisata yang berupa destinasi alam.

Kedepan akan diupayakan berbagai hal untuk dapat meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan dengan melakukan penataan objek wisata, pembinaan terhadap pelaku pariwisata dalam penyediaan sarana penunjang dan memberikan pelayanan yang baik dan mengembangkan produk-produk wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan.

C. Urusan Pertanian

Tabel 2.112.

Capaian Indikator Urusan Pertanian pada Fokus Layanan Urusan Pilihan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian/Kehutanan/Perikanan terhadap PDRB	24,86	25,54	25,49	25,85	24,50
Persentase peningkatan produksi padi (%)	-0,37	0,14	100	-20,11	-4,92



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase peningkatan tanaman karet (%)	0,27	0,07	100	-27,32	-26,87
Persentase peningkatan tanaman Lada (%)	0,59	0,25	100	-10,44	-25,31
Persentase peningkatan populasi sapi	-0,22	-0,08	100	1,59	-10,85

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Belitung Timur, 2018

a. Kontribusi Sektor Pertanian/Kehutanan/Perikanan terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai parameter tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. PDRB sektor pertanian adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di sektor pertanian. Sektor pertanian meliputi Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan dan Hasil-hasilnya, Kehutanan, Perikanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di sektor pertanian sendiri yang berkontribusi terhadap PDRB yaitu tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari tanaman pangan, buah-buahan dan rempah, tanaman perkebunan dan peternakan. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Belitung Timur secara keseluruhan meningkat, naik turunnya jumlah produksi sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan curah hujan. Permasalahan yang menonjol dalam upaya pengembangan hortikultura ialah produktivitas yang masih tergolong rendah, hal ini merupakan refleksi dari rangkaian berbagai faktor yang ada, antara lain: pola usahatani yang tidak teratur, mutu bibit rendah yang ditunjang oleh keragaman jenis/varietas, serta rendahnya penerapan teknologi budidaya. Hal ini dikarenakan komoditi tanaman hortikultura bukan menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat. Di bidang perkebunan sebagai komoditi unggulan adalah karet dan lada. Produksi tanaman karet pada Tahun 2013-2017 di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan hasil yang baik. Bahkan di Tahun 2015 bisa mencapai mencapai 861.477,37kg dari target yang ingin dicapai sebesar 399.116kg dan luas areal tanaman terus meningkat sampai dengan tahun 2017 seluas 3.223,63 ha.

Lada merupakan komoditi unggulan dari bidang perkebunan dimana luas areal tanaman lada pada Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan tetapi produksi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan luasan tanaman belum menghasilkan yang bertambah, tanaman belum menghasilkan yaitu tanaman dengan umur 0-2 tahun, tanaman menghasilkan 3-6 tahun, tanaman tidak menghasilkan adalah tanaman yang telah melewati umur ekonomis diatas 6 tahun dan tanaman rusak. Pada tahun 2017 luas areal tanaman lada seluas 3.627,83 Ha, permasalahan yang dihadapi dalam perluasan areal tanaman lada adalah keterbatasan lahan sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam budidaya lada adanya penyakit yang menyerang tanaman lada.

Dari bidang peternakan ada dua jenis ternak yang diusahakan masyarakat yaitu ayam dan sapi. Populasi ternak ayam dari Tahun 2013-2017 mengalami



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

peningkatan dan penurunan, hal ini dipengaruhi oleh pemasukan bibit ternak, jumlah pemotongan, ternak yang afkir dan harga pakan ternak. Populasi ternak sapi berbeda setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi jumlah pemotongan untuk pemenuhan konsumsi sementara pemasukan bibit dari luar belum dilakukan. Produksi daging sapi secara keseluruhan dari tahun ke tahun meningkat. Produksi sapi di Kabupaten Belitung Timur dihitung berdasarkan hasil dari sapi potong yang dipotong untuk memenuhi permintaan konsumsi daging sapi. Sapi potong rata-rata didatangkan dari luar pulau Belitung dengan tujuan untuk konsumsi daging sapi. Produksi sapi pada Tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan karena kelangkaan sapi bakalan yang tersedia di pedagang/peternak lokal. Kelangkaan bakalan di Kabupaten Belitung Timur lebih disebabkan menipisnya jumlah pasokan ternak sapi bakalan dari daerah-daerah sumber bibit, terutama di Pulau Madura yang berimbas kepada terbatasnya penyediaan sapi bakalan di Kabupaten Belitung Timur.

b. Persentase peningkatan produksi padi

Peningkatan produksi padi di Kabupaten Belitung Timur secara keseluruhan meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan bertambahnya luas areal persawahan melalui kegiatan cetak sawah, kegiatan optimasi lahan persawahan, pemenuhan sarana produksi berupa benih, pupuk, obat-obatan pertanian. Secara keseluruhan produktivitas padi dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau karena sebagian besar persawahan di Kabupaten Belitung Timur bersifat tadah hujan, kondisi tanah persawahan, penggunaan benih padi unggul, ketersediaan pupuk dan obat-obatan, penerapan teknologi budidaya padi dan pola tanam.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran peningkatan produksi padi tahun 2018 telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Kegiatan penerapan teknologi budidaya jajar legowo dimulai pada tahun 2016 pada sentra tanaman padi di Kecamatan Gantung, penerapan jajar legowo selain meningkatkan populasi pertanaman, juga mampu menambah kelancaran sirkulasi sinar matahari dan udara di sekeliling tanaman pinggir sehingga tanaman dapat berfotosintesa lebih baik. Selain itu, tanaman yang berada di pinggir diharapkan memberikan produksi yang lebih tinggi dan kualitas gabah yang lebih baik, mengingat pada sistem tanam jajar legowo terdapat ruang terbuka seluas 25-50%, sehingga tanaman dapat menerima sinar matahari secara optimal yang berguna dalam proses fotosintesis
- Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi) adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia (existing). Dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian akan fokus pada upaya penanganan masalah terkait: pengelolaan tanah, penggunaan benih bermutu, penanaman, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pemanenan dan kegiatan selama pascapanen serta inovasi teknologi. Pada



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

tahun 2017 upaya peningkatan produktivitas melalui kegiatan optimasi lahan pada areal cetak sawah tahun 2015 dan 2016 seluas 565 hektar, dilakukan bantuan sarana produksi berupa pupuk, benih dan penyempurnaan infrastruktur. Tahun 2018 melakukan penambahan sarana produksi pertanian berupa jaringan irigasi, embung, jalan usahatani, benih padi, pupuk dan obat-obatan.

- Perluasan areal sawah adalah upaya untuk menambah luas areal persawahan melalui pembukaan lahan seluas 326,28 hektar pada tahun 2017 dilanjutkan dengan pengolahan lahan sawah pada tahun 2018.

Upaya peningkatan produksi padi melalui kegiatan:

- Peningkatan luas areal sawah, peningkatan luas tanam, peningkatan produktivitas melalui teknik budidaya dan penggunaan benih padi yang sesuai, penyediaan sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk dan obat-obatan, pembangunan infrastruktur sarana air untuk pertanian, pembangunan jalan usaha tani sebagai akses sarana produksi menuju lahan persawahan. Program perlindungan lahan dan sertifikasi lahan pertanian.
- Meningkatkan fungsi kelembagaan petani, melanjutkan pembinaan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan mutu hasil panen, meningkatkan penyuluhan, sekolah lapang dan bimbingan dalam budidaya tanaman padi dan penerapan teknologi pertanian tepat guna.

Revitalisasi kesuburan tanah, pembenah tanah (*soil conditioner-soil reparation*) disebagian besar wilayah pertanian dengan menggunakan metode segera meninggalkan pemupukan kimia anorganik dan kembali membudayakan penggunaan pupuk organik yang lebih alami serta yang bersifat memperbaiki jasad renik lahan pertanian untuk mengembalikan kepada potensi tanah yang subur

c. Persentase peningkatan tanaman karet

Persentase peningkatan produksi tanaman karet pada Tahun 2013-2018 di Kabupaten Belitong Timur menunjukkan hasil yang baik. Bahkan di Tahun 2015 bisa mencapai mencapai 861.477,37kg dari target yang ingin dicapai sebesar 399.116kg dan luas areal tanaman terus meningkat, tahun 2017 seluas 3.223,63 ha, tahun 2018 seluas 3.233,53 ha.

Secara umum tanaman karet dapat tumbuh dengan baik pada kisaran curah hujan 1500 – 3000 mm/tahun dengan distribusi merata. Curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada penyadapan, dan meningkatkan serangan penyakit. Serangan penyakit gugur daun *Collectrichum* yang berat terjadi pada wilayah dengan curah hujan diatas 3000 mm/tahun, kekeringan sebaliknya akan menekan pertumbuhan, dan produksi tanaman karet tetapi pada daerah yang kering (<1500 mm/th) juga sangat mengganggu pertumbuhan tanaman karet, karena akan terjadi defisit air yang tidak mencukupi bagi kebutuhan tanaman



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

akibat evapotranspirasi yang tinggi. Oleh karena itu pemilihan klon dapat dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik resistensi klon dengan kondisi lingkungan tumbuh di daerah penanamannya.

Standar produktivitas karet alam dalam wujud karet kering adalah 750 kg/ha/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa produksi karet di Kabupaten Belitung Timur sudah mencapai standar produksi yang diinginkan. Peningkatan produksi karet dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu curah hujan, bibit dan pemeliharaan. Bibit unggul yang disebar pada tahun 2006 dan 2007 sudah mulai menghasilkan, dari data yang diterima menunjukkan ada peningkatan di jumlah tanaman menghasilkan seluas 87,09 ha. Selain faktor bibit, peningkatan produksi didukung oleh curah hujan yang tidak terlalu tinggi dan kegiatan pemeliharaan yang intensif dikarenakan harga karet yang membaik. Semakin membaiknya harga karet di pasaran dikarenakan tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut dari negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti China, India, dan Asia Pasifik sehingga komoditi karet kembali banyak diusahakan oleh masyarakat. Pada tahun 2017 produksi karet menurun hal ini dikarenakan harga karet di pasaran menurun sehingga petani menunda penyiapan karet.

Produksi tanaman karet dan kualitas produk perlu ditingkatkan lagi melalui:

- pelatihan budidaya karet,
- penanganan pascapanen dengan meningkatkan teknologi pengolahan karet untuk meningkatkan efisiensi, dengan demikian output (latex) yang dihasilkan dari input (getah) bisa lebih banyak dan menghasilkan material sisa yang sedikit.
- sistem kelembagaan dan informasi pasar mengenai komoditi karet
- pemeliharaan kebun entres sebagai sumber bibit unggul tanaman karet, hal ini diperlukan karena penurunan produksi dapat disebabkan oleh kualitas bibit yang rendah, pemanfaatan lahan perkebunan yang tidak optimal, dan pemeliharaan tanaman yang buruk dan berdampak pada penurunan nilai tambah. Kualitas bibit yang rendah menjadi masalah utama untuk perkebunan karet yang ditunjukkan dengan rentang produktif tanaman karet yang kurang dari 30 Tahun,
- Penanaman kembali dengan bibit unggul berproduktivitas lebih tinggi dan pengaturan jarak yang optimal, hal ini juga terkait dengan kendala perluasan lahan perkebunan.

d. Persentase peningkatan tanaman Lada

Lada merupakan komoditi unggulan dari bidang perkebunan, produksi lada mengalami fluktuatif dimana luas areal tanaman lada pada Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan tetapi produksi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan budidaya lada di Kabupaten Belitung Timur mempunyai umur tanaman yang tidak seragam dimana petani membuka lahan dan mengolah lahan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

secara bertahap hal ini disebabkan karena tanaman lada memerlukan perawatan intensif. Oleh karena itu untuk menghitung produktivitas tanaman harus memperhatikan umur tanaman lada. Luas areal dibedakan berdasarkan tanaman belum menghasilkan yaitu tanaman dengan umur 0-2 tahun, tanaman menghasilkan dengan umur 3-6 tahun, tanaman tidak menghasilkan adalah tanaman yang telah melewati umur ekonomis diatas 6 tahun dan tanaman rusak.

Budidaya lada yang secara tradisi turun temurun sebagai komoditas pokok dan diusahakan pada lahan milik sendiri secara monokultur. Tanaman lada agar dapat menghasilkan buah yang banyak, harus melalui perawatan yang optimal. Kendala utama yang dialami petani lada adalah serangan hama penyakit berupa busuk pangkal batang dan penyakit kuning. Tanaman lada di kabupaten Belitang Timur rata-rata berumur ekonomis 6 tahun dihitung mulai dari 0 tahun. Hal tersebut dikarenakan sifat budidaya lada menggunakan tajar mati dan tanpa naungan, kelebihan budidaya lada tanpa naungan adalah produksi tinggi tetapi umur ekonomis lebih rendah dari tanaman dengan naungan. Produksi tanaman lada dimulai pada umur tanaman 3 tahun dan mencapai puncak produksi pada umur tanaman 4 tahun, mulai mengalami penurunan produksi pada umur tanaman 5 dan 6 tahun. Untuk menghitung produktivitas tanaman lada per hektar dipengaruhi oleh jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM), Tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman rusak atau tanaman tua (TR/TT), selain pengaruh faktor produksi lainnya. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam perluasan areal tanaman lada adalah keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya lada.

Upaya peningkatan produksi lada:

- Penyediaan bibit unggul lada untuk lebih meningkatkan produksi lada,
- Pembangunan kebun induk tanaman lada sebagai sumber bibit unggul tanaman lada,
- Penanganan penyakit tanaman lada, penerapan pengendalian hama terpadu
- Pola tanam ramah lingkungan yang menjadi standar pasar internasional dan menjaga kualitas produk.
- Penerapan teknologi pengolahan hasil yang disertai diversifikasi produk-produk setengah jadi dan produk siap pakai untuk meraih nilai tambah. Pengolahan produk yang higienis agar mampu bersaing di pasar bebas.
- Pelatihan-pelatihan baik budidaya lada maupun pengolahan pasca panen untuk meningkatkan keterampilan dan informasi pasar agar produk yang dihasilkan tidak mengalami permasalahan dalam pemasaran
- Penerapan pengelolaan budi daya yang baik,
- Mendorong perkembangan penangkaran lada dan fasilitasi sarana produksi penangkar bibit lada.
- Memperkenalkan teknologi ramah lingkungan kepada petani, di antaranya menanam lada dengan menggunakan tiang panjat hidup dari pohon gamal serta penggunaan pupuk dari bahan organik.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

- Melakukan rehabilitasi terhadap tanaman lada yang rusak dan replanting bagi tanaman lada yang telah melewati umur ekonomis.

e. Persentase peningkatan populasi sapi

Persentase peningkatan populasi sapi berbeda setiap tahunnya dan bersifat fluktuatif, hal ini dipengaruhi jumlah kelahiran sapi, kematian sapi, pemotongan untuk pemenuhan konsumsi sementara pemasukan bibit dari luar belum dilakukan. Populasi sapi yang dihitung adalah total dari sapi bibit untuk indukan, sapi potong dan anak sapi. Populasi ternak sapi di Kabupaten Belitong Timur dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

- Angka kelahiran sapi yang rendah.
- Angka kematian ternak sapi
- Jumlah populasi induk siap kawin yang masih rendah.
- Pengadaan bibit indukan
- Jumlah pemotongan sapi.

Angka kelahiran sapi yang rendah berkaitan dengan jumlah indukan yang ada, jika jumlah indukan rendah maka angka kelahiran juga rendah. Sapi bibit adalah sapi-sapi yang disiapkan sebagai calon induk untuk pengembangbiakan sapi. Pengadaan sapi bibit dilakukan untuk menambah jumlah indukan dengan tujuan penambahan populasi sapi, kelahiran anak sapi mempunyai rasio 50:50 antara jantan dan betina, untuk anak sapi jantan bisa digunakan untuk sapi potong sedangkan anak sapi betina di gunakan sebagai bibit indukan, karena itu sapi bibit sebaiknya tidak digunakan untuk konsumsi kecuali sudah tidak produktif lagi.

Sapi potong digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging terutama pada saat hari raya, sapi potong didatangkan dari luar Pulau Belitong dengan tujuan untuk digemukkan dan dipotong, hal ini menyebabkan populasi sapi bersifat fluktuatif karena adanya jumlah sapi yang masuk dan jumlah sapi yang dipotong

D. Urusan Perdagangan

Tabel 2.113.
Capaian Indikator Urusan Perdagangan
pada Fokus Layanan Urusan Pilihan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	-	-	-	-	58,92
Persentase barang dalam kemasan tertutup (BDKT) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan jumlah BDKT yang diuji	-	-	-	-	-
Persentase stok bahan pokok strategi di distributor berdasarkan kebutuhan konsumsi	-	-	-	-	-
Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	-	-	152.625.583	122.869.741,87	154.848.047,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Belitong Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Pengukuran memegang peran penting dalam setiap melakukan transaksi jual beli. Selaras dengan perkembangan dan pesatnya kemajuan produksi dan perdagangan, maka barang-barang dagangan dalam keadaan terbungkus mempunyai peranan dalam memberikan kemudahan pelaku usaha dalam hal penjualan dan transport (pendistribusian) barang. Konsumenpun dapat mudah membeli dan mengkonsumsi sesuai kebutuhannya. Namun dalam perkembangannya Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) berpotensi menimbulkan permasalahan baru bagi konsumen, jika tidak mencantumkan label yang memberikan keterangan produk barang tersebut. Informasi pada label adalah penentu bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau tidak produk tersebut. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atas klaimnya. BDKT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Ada pembatasan dan pengecualian dalam BDKT sebagaimana tercantum dalam pasal 22 yaitu yang dimaksud barang disini tidak termasuk makanan atau barang lain yang mudah basi atau tidak lebih dari 7 (tujuh) hari, sehingga bentuk dari perlindungan akan hak konsumen dalam transaksi perdagangan untuk barang yang mudah basi adalah melalui alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan pelaku usaha dalam bertransaksi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan peralatan UTTP dan BDKT ini merupakan aplikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya

Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dalam urusan perdagangan untuk memenuhi hal tersebut sejak tahun 2017 telah melakukan pelayanan Tera dan Tera Ulang, untuk memastikan peralatan UTTP pelaku usaha telah memenuhi standar. Untuk memenuhi hak konsumen terhadap BDKT yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengetahui stok bahan pokok strategis di distributor berdasarkan kebutuhan konsumsi, urusan perdagangan baru menetapkan target dan melakukan pengukuran melalui kegiatan pengawasan dan pengujian akan BDKT pada tahun 2019 serta pengukuran stok bahan pokok strategis melalui aplikasi Simonhar (Sistem Monitoring Harga) yang dikembangkan oleh DPMPSTPP tahun 2019.

Untuk menjaga laju inflasi, urusan perdagangan juga berperan dengan selalu memonitor harga bahan pokok strategis dan menjaga stok bahan pokok strategis agar selalu tersedia dan cukup. Salah satu ciri inflasi di Indonesia, khususnya komoditas



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

pangan adalah karena kurangnya pasokan yang disebabkan oleh gangguan produksi, distribusi, dan perubahan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2017 sebagai penyumbang PDRB Kabupaten Belitung Timur setelah pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, dan pertambangan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Belitung Timur dalam meningkatkan peranan perdagangan dalam PDRB diantaranya, peningkatan infrastruktur perdagangan lokal dimana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan sebagai perangkat daerah yang mengurus bidang perdagangan telah melakukan pengerjaan Revitalisasi maupun pengembangan Pasar Tradisional dan Pemeliharaan Pasar se-Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan APBD maupun Dana Alokasi Khusus. Untuk pemenuhan aspek legalitas hukum dan usaha pedagang/pelaku usaha telah dilakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan perdagangan, dan untuk menjaga stabilitas harga barang pokok strategis yang beredar khususnya pada saat hari besar keagamaan, Pemerintah Daerah selalu melakukan monitoring harga-harga dan operasi pasar.

E. Urusan Perindustrian

Tabel 2.114.
Capaian Indikator Urusan Perindustrian
pada Fokus Layanan Urusan Pilihan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan industri kecil dan menengah (persen)	9,27	2,88	4,90	11	12,21
Cakupan bina kelompok pengrajin (persen)	69,23	86,67	80	72,73	70,97
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan Harga Berlaku (HB) (persen) *)	19,38	19,05	20,02	20,02	19,38

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, 2018

*) Badan Pusat Statistik Kab. Belitung Timur, 2018

Secara umum urusan perindustrian di Kabupaten Belitung Timur lebih dominan melakukan pendampingan dan pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah ada maupun penumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) baru. Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan industri pengolahan yang di dominasi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan, diantaranya: Industri Produk Roti dan Kue, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya, Industri Air Minum dan Air Mineral, kemudian Industri Kecil Menengah (IKM) Kerajinan, Logam dan Kimia yang tersebar di 7 Kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Industri pengolahan pada tahun



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

2017 sebagai penyumbang kategori distribusi terbesar ke-empat setelah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Belitung Timur.

Kendala yang dihadapi oleh pelaku industri adalah pemasaran yang belum efektif, kemasan produk yang belum menarik, dan ketersediaan bahan baku yang tergantung pada musim. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan sebagai perangkat daerah teknis yang menangani urusan perindustrian terus berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan serta berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis lainnya dalam mengatasi bahan baku. Berikut data persebaran Industri Kecil Menengah (IKM) beserta serapan tenaga kerja Kabupaten Belitung Timur tahun 2017.

Untuk lebih mengoptimalkan, dalam proses perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta pembangunan infrastruktur pendukung industri, pemerintah daerah telah menetapkan sentra industri kecil dan menengah Kabupaten Belitung Timur dalam suatu Keputusan Bupati Belitung Timur Industri Kecil Menengah nomor: 188.45-345 Tahun 2018 tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2.115.
Data Industri Kecil Menengah Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah IKM (Unit)	Klasifikasi Industri					Jumlah Tenaga Kerja
			Pangan	Sandang	Kimia dan Bangunan	Kerajinan Umum	Logam dan elektronik	
1	Manggar	960	802	34	75	26	23	1876
2	Damar	316	273	4	8	26	5	439
3	Kelapa Kampit	403	312	17	29	29	16	565
4	Gantung	406	300	14	42	38	12	647
5	Simpang Renggiang	171	65	5	13	77	11	257
6	Simpang Pesak	192	135	8	27	20	2	326
7	Dendang	97	37	7	14	23	16	174
JUMLAH		2545	1924	89	208	239	85	4284

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, 2018

*) Badan Pusat Statistik Kab. Belitung Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITANG TIMUR TAHUN 2016-2021

2.4.4. Layanan Penunjang Urusan A. Urusan Perencanaan

Tabel 2.116.
Capaian Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase keselarasan program antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPd)	-	-	-	85	100
Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan RKPd	-	-	-	-	-
Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan Renstra	-	-	-	-	-
Persentase rata-rata capaian program terhadap RKPd	-	-	-	90,21	95,49
Persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan	-	-	-	100	100
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitang Timur, 2018

Urusan perencanaan di Kabupaten Belitang Timur menjadi tanggungjawab dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dirubah nomenklatur pada Tahun 2016 dimana sebelumnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu tanggungjawabnya adalah penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek atau tahunan, atau yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD dan RKPd. Selain itu Bapelitbangda juga bertanggungjawab mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Dalam menyusun dokumen perencanaan daerah maupun OPD, salah satu asas yang perlu dipenuhi adalah perencanaan *Top down* dan *Bottom up*, artinya bahwa harus ada harmonisasi dan sinkronisasi antar perencanaan dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Oleh karena itu hal ini menjadi indikator penting yang menunjukkan keberhasilan dan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan. Untuk menyikapi hal tersebut pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur bekerjasama dengan Universitas Darma Persada Jakarta menyusun aplikasi perencanaan (*e-planning*), melalui aplikasi ini harmonisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan dapat terjaga dengan baik. Namun, tahun-tahun sebelumnya harmonisasi ini belum dapat dilakukan dengan baik, karena masih dilakukan manual.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Dokumen-dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ataupun melalui Peraturan Kepala Daerah adalah :

- a. Dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Timur ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008-2025
- b. Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur ditetapkan melalui:
 1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015
 2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015;
 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.
- c. Dokumen RKPD Kabupaten Belitung Timur merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, meliputi:
 1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013.
 2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014.
 3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015.
 4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016.
 5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD merupakan persentase jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan, dimana realisasi mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 belum mencapai target yang ditetapkan, dimana salah satu faktornya adalah belum terintegrasinya sistem perencanaan. Akan tetapi pada tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur mulai menerapkan aplikasi e-planning dalam proses perencanaan sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi sehingga program-program yang tertuang dalam RKPD pada setiap tahunnya merupakan program yang terdapat dalam dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

B. Urusan Keuangan

Tabel 2.117.
Capaian Urusan Penunjang Keuangan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Ketepatan waktu penetapan persetujuan bersama APBD	-	-	-	Tepat	Tepat
Ketepatan waktu penetapan persetujuan bersama APBD Perubahan	-	-	-	Tepat	Tepat
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	Tidak	Tidak
Persentase OPD dengan penyerapan anggaran sesuai target	-	-	-	0	0
Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	-	-	-	0	0
Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	-	-	-	57	61,5
Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	-	-	-	69	76
Persentase Pencapaian Pajak Daerah	-	-	-	92,37	125,22
Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	-	-	-	45,53	61,97
<i>Tax Ratio</i> (Ratio Pajak terhadap Penerimaan Daerah)	-	-	-	5,45	8,05
Persentase Sumber Pajak Daerah yang didata per Tahun	-	-	-	21,52	11,64
Persentase Data Wajib Pajak PBB P2 yang dimutakhirkan	-	-	-	40,47	36,8
Peningkatan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	TW	WDP	WDP	WDP
Persentase SILPA terhadap APBD	20.62	20.98	12.83	4,67	9,03
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	31.80	30.54	32.99	27.85	28.73
Persentase Belanja Kesehatan (10%)	11.40	12.83	13.01	14,95	19.43
Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung					
- Belanja Tidak Langsung	45.49	45.1	44.82	44,00	48,99
- Belanja Langsung	54.51	54.9	55.18	56,00	51,01

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitong Timur, 2018

C. Urusan Kepegawaian

Tabel 2.118.
Capaian Urusan Kepegawaian

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil daerah di SKPD (%)	85,77	89,83	95	0	93,07
Persentase PNS yang belatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi	98,91	56,6	100	63,98	104,08
Persentase PNS yang dapat naik pangkat dan pejabat yang dilantik.	100	100	100	72,71	135,87
Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian.	0,07	0,87	0,1	0,26	0,41
Persentase pemenuhan pengurusan PNS yang pensiun	100	100	100	63	100
Pemenuhan pengurusan gaji berkala (%)	100	100	100	103,8	115
Persentase PNS fungsional yang telah ditetapkan	-	-	-	20	21
Persentase PNS yang datanya diupdate dalam sistem informasi kepegawaian	100	100	100	100	100
Persentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian	159	80	93	100	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitong Timur, 2018

Sesuai dengan analisis jabatan, ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belitong Timur masih kurang. Untuk disiplin pegawai, pada tahun 2015 PNS Kabupaten Belitong Timur mulai menggunakan instrumen *scan* wajah sebagai alat kontrol kehadiran pegawai. Instrumen ini telah digunakan di Kompleks Perkantoran Terpadu, Kecamatan Manggar, Gedung Olah Raga (GOR), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dan UPTD Pendidikan Kecamatan Manggar. Sampai dengan Tahun 2018 sudah seluruh unit kerja di Kabupten Belitong Timur menggunakan instrumen scan wajah. Diusulkan agar alat ini juga bisa di gunakan di setiap kantor kecamatan dan UPTD. Hal ini berakibat meningkatnya disiplin pegawai terutama berkaitan dengan jam masuk dan pulang kerja.

Kebutuhan pejabat fungsional (pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan) terhitung mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 terdapat 137 orang pejabat fungsional. Adapun kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah sebagai berikut:

1. Pertanian dan Kehutanan

Berdasarkan Analisis Beban Kerja bidang pertanian dan ketahanan pangan idealnya memiliki 85 pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional yang ada saat ini 3 orang sehingga masih dibutuhkan 55 pejabat fungsional tertentu bidang pertanian.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

2. Perikanan

Berdasarkan Analisis Beban Kerja bidang perikanan idealnya memiliki 12 pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional yang ada saat ini 6 orang sehingga masih dibutuhkan 6 pejabat fungsional tertentu bidang perikanan.

3. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Analisis Beban Kerja bidang perikanan idealnya memiliki 15 Pejabat fungsional tertentu, Pejabat fungsional yang ada saat ini 3 orang sehingga masih dibutuhkan 12 pejabat fungsional tertentu bidang lingkungan hidup.

4. Kesehatan

Berdasarkan Analisis Beban Kerja bidang kesehatan idealnya memiliki 742 Pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional yang ada saat ini 337 orang sehingga masih dibutuhkan 405 pejabat fungsional tertentu bidang kesehatan.

5. Pendidikan

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti tugas/izin belajar merupakan kewenangan Bupati, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Izin Belajar diberikan dengan ketentuan:

- Telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai;
- bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- Perguruan Tinggi tempat mengikuti pendidikan telah mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian yang membidangi pendidikan, khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta, program studi yang menjadi pilihan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
- telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

b. Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan:

- telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- untuk bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Dokter Spesialis serta untuk bidang pendidikan lainnya yang sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

- setiap unsur atau aspek penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik;
- tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai;
- pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi sebagaimana terdapat dalam Standar Kompetensi Jabatan;
- program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
- berumur setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun untuk kejenjang Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Sarjana (S.1), 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk kejenjang Pasca Sarjana (S.2)/Dokter Spesialis, 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang Doktor (S.3), kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi.

D. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.119.
Capaian Urusan Kepegawaian

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi	100	100	100	103,01	83,75
Persentase PNS jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan dan jabatan fungsional yang sudah mengikuti ujian kompetensi	104	97	60	100	100
Persentase CPNS yang mengikuti diklat prajabatan.	100	0	100	100	50
Persentase PNS yang berpendidikan diploma	29,45	29,64	48,94	23,31	17,15
Persentase PNS yang berpendidikan S1	51,46	50,58	55	54,97	57,29
Persentase PNS berpendidikan S2	1,04	1,17	2	1,46	0,48

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitang Timur, 2018

E. Urusan Penunjang Lainnya

Tabel 2.120.
Capaian Urusan Penunjang lainnya

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (desa)	39	39	39	39	39
Sistim Informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di kecamatan	75,95	78,55	79,88	80,01	81,64
Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Damar	100	100	100	100	100
Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di kecamatan Damar	100	100	100	100	100
Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Dendang	100	100	100	100	100
Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di kecamatan Dendang	100	100	100	100	100
Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Gantung	-	-	-	-	100
Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di kecamatan Gantung	100	100	100	100	100
Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Kelapa Kampit	70	70	70	70	75
Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di kecamatan Kelapa Kampit	80	80	80	80	100
Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Manggar	-	-	-	81,25	81,26
Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di kecamatan Manggar	-	-	-	-	11
Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Simpang Pesak	-	-	-	77,50	79,35
Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di kecamatan Simpang Pesak	-	-	-	-	100
Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Simpang Renggang	75,95	78,55	79,88	79,89	79,89
Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di kecamatan Simpang Renggang	100	100	100	100	100
Persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang difasilitasi	100	100	100	100	100
Persentase kebijakan di bidang sosial kesejahteraan sosial yang difasilitasi	100	100	100	100	100
Persentase pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100	100	100	100	100
Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	100	100	100	100	100
Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100	100	100	100	100
Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi	100	100	100	100	100
Persentase jumlah layanan pengadaan	100	100	100	100	100
Persentase SDM yang berkualitas dan profesional di bidang PBJ	100	100	100	100	100
Persentase penataan hukum	80	80	80	80	85
Persentase realisasi penetapan peraturan perundang-undangan	80	80	80	80	80
Persentase OPD yang tepat ukuran dan kaya fungsi	100	100	100	40	100
Persentase OPD Tata Laksana Yang Optimal	100	100	100	60	100
Persentase OPD dengan IKM baik	100	100	100	50	100
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitasi Rapat - Rapat Dewan Tepat Waktu	62,84	65,03	76,5	98,33	72,5



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	100	100	66,67	66,67

Sumber : Sekretariat DPRD, Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitong Timur, 2018
Kantor Kecamatan

1. Indikator sasaran Tahun 2017 yang berada di Sekretariat Daerah merupakan indikator baru. Dimana pada tahun sebelumnya terdapat banyak indikator, sehingga di tahun 2017 diringkaskan menjadi 15 indikator sasaran. Adapun untuk program dan kegiatan tidak ada perubahan.
2. Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dari tahun 2013 s.d 2017 realisasi capaiannya semua mencapai 100%. Hal ini karena semua aspirasi masyarakat yang masuk ke Sekretariat DPRD telah disampaikan ke Dewan dan ditindaklanjuti lebih lanjut.
3. Persentase Fasilitasi Rapat - Rapat Dewan Tepat Waktu. Pada indikator ini dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Namun pada tahun 2017 memang agak menurun menjadi 72,50%, hal ini dikarenakan kegiatan anggota DPRD pada tahun tersebut meningkat sehingga karena kesibukan dan bentrok jadwal kegiatan beberapa rapat ada yang tidak bisa terlaksana tepat waktu.
4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Terkait pemenuhan kebutuhan penunjang peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dari tahun 2013 s.d 2015 semua kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas dewan bisa terlaksana. Sedangkan pada tahun 2016 ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah. Pada tahun 2017 juga terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait adanya kesalahan dalam penempatan rekening objek belanja sehingga harus diubah pada saat APBD Perubahan 2017. Namun karena APBD-P 2017 mengalami keterlambatan, hal ini menyebabkan Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD tidak bisa dilaksanakan karena sempitnya waktu antara pelaksanaan kegiatan dan batas akhir tahun anggaran.

F. Urusan Pengawasan

Tabel 2.121.
Capaian Urusan Pengawasan lainnya

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan INSPEKTORAT (persen)	-	-	-	0	63,54
Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Level)	-	-	-	0	2
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	-	-	-	0	1
Meningkatnya OPD unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	-	-	-	0	0

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belitong Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

1. Salah satu keberhasilan inspektorat dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua OPD. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan tindak lanjut pemeriksaan. Persentase penyelesaian tindak lanjut dihitung dengan rumus rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menunjukkan kompetensi atau kemampuan APIP, yang akan memberikan jaminan atau keyakinan atau kualitas terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP. Prosedur wawancara dalam kegiatan penjaminan kualitas dilakukan dengan mereviu dokumen-dokumen, observasi sarana, prasarana, dan praktik professional, wawancara internal dan eksternal Inspektorat untuk meyakinkan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Belitung Timur. Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tkerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai *instrument evaluative* penyelenggaraan SPIP dan panduan generic untuk meningkatkan maturitas system pengendalian intern. Dari 5 (lima) level maturitas SPIP, hasil penilaian terhadap penyelenggaraan SPIP Kabupaten Belitung Timur menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level 2 (dua) atau kategori “berkembang”. Untuk meningkatkan maturitas ke level berikutnya, maka diperlukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai serta mengintegrasikan, menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat serta melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko.

G. Urusan Kelitbangan

Pada tahun 2017 persentase ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan kelitbangan merupakan jumlah publikasi data yang tersedia sebanyak 1 dokumen data dasar sedangkan jumlah publikasi data yang di butuhkan sebanyak 1 dokumen sehingga realisasinya 100%. Sedangkan pada tahun 2016 indikator Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk kebutuhan kelitbangan belum ada realisasinya dikarenakan bidang litbang baru mulai efektif pada ahun 2017.

Pada tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah belum melaksanakan kajian kelitbnagan sehingga tidak dapat diukur. Sedangkan pada tahun 2017 persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan jumlah kajian kelitbangan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti pihak terkait sebanyak 2 (dua) kajian terhadap jumlah kajian kelitbangan atau rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) kajian yaitu Masterplane Perikanan dan Rencana Induk Pembangunan sehingga realisasinya 100%.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Pengeluaran Per Kapita

Hasil analisis pengeluaran perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.122.

Angka Pengeluaran per Kapita Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga (Rupiah)	2.418.205	2.739.775	3.040.535	3.445.419	3.829.603
2.	Jumlah Rumah Tangga / Kepala Keluarga	-	-	-	-	38.343
3.	Rasio (1/2)	-	-	-	-	99,88

Sumber: BPS, 2018

B. Nilai Tukar Petani

Tabel 2.123.

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Belitong Timur

No	Uraia	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai Tukar Petani (Persen)	100,49	101,55	104,30	101,43	95,79
2.	Indeks yang diterima Petani (It)	129,05	112,62	121,95	120,77	116,94
3.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	128,41	110,89	116,46	119,09	122,09
4.	Rasio (2/3)	1,004	1,015	1,047	1,014	0,957

Sumber: BPS, 2018

C. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

Tabel 2.124.

Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Belitong Timur

No	Uraia	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Total Pengeluaran RT Non-Pangan	1.310.720	1.503.277	1.653.712	1.854.441	2.038.456
2.	Total Pengeluaran	2.418.205	2.739.775	3.040.535	3.445.419	3.829.603
3.	Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan (1/2)	54,20	54,87	54,39	53,82	53,23

Sumber: BPS, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 2.125.
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran RT Non-Pangan	Total Pengeluaran	Rasio
1.	Belitong Timur	2.038.456	3.829.603	0,532
2.	Belitong	2.581.067	4.940.930	0,522
3	Bangka Selatan	2.741.118	5.137.923	0,533
4	Bangka Barat	3.279.237	6.456.347	0,507
5	Bangka	4.423.122	8.424.151	0,525
6	Pangkal Pinang	3.126.794	5.984.948	0,537
7	Bangka Tengah	2.969.856	5.549.489	0,535

Sumber: BPS, 2018



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2013 - 2017

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

A. SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, dan pada akhir tahun anggaran akan diketahui realisasi penerimaan Belitong Timur sebesar Rp. 56.946.464.677,58 atau 9,74% dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sedangkan Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 453.388.834.011 atau 77,6% dari total realisasi Pendapatan Daerah yang merupakan penyumbang terbesar dari Pendapatan Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya sebesar Rp.43.158.501.750,41 atau 12,7% dari total realisasi Pendapatan Daerah. Pada tahun 2017, realisasi PAD sebesar Rp. 109.657.373.539,57 atau 14,85% dari total realisasi Pendapatan Daerah. Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 554.464.898.167 atau 75,11% dari total realisasi Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya sebesar Rp. 74.103.356.022,06 atau 10,4% dari total realisasi Pendapatan Daerah.

Gambaran realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2017 disajikan pada table berikut ini:



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

B.PENDAPATAN DAERAH

Tabel 3. 1

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014-2018

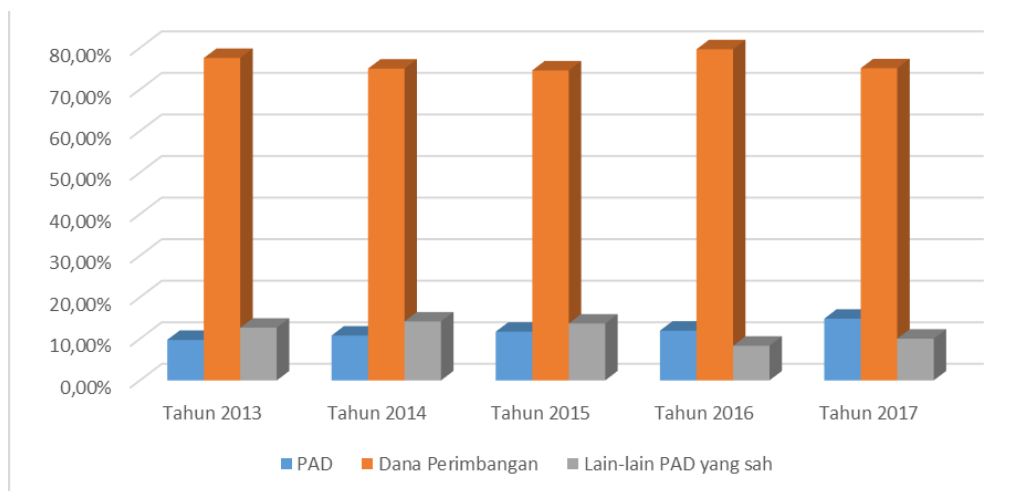
U R A I A N		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH		56.946.464.677,58	72.695.257.570,74	86.065.752.914,86	90.361.562.416,57	109.657.373.539,57	109.456.286.246,75
1.1	Pajak Daerah	27.732.506.147,43	34.906.633.360,23	41.260.081.182,28	41.142.233.274,16	58.184.542.887,62	73.974.198.776,22
1.2	Retribusi Daerah	13.700.129.170,57	17.480.708.684,43	4.779.381.892,13	3.973.362.829,68	3.313.249.717,13	4.376.000.772,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	2.163.737.280,28	255.383.191,66	3.262.986.439,99	3.418.085.907,96	3.201.397.365,67	3.026.753.743,26
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	13.350.092.079,30	20.052.532.334,42	36.763.303.400,46	41.827.880.404,77	44.958.183.569,15	28.079.332.955,27
2. DANA PERIMBANGAN		453.388.834.011,00	505.712.233.191,00	547.696.103.705,00	601.305.490.787,00	554.464.898.167,00	622.466.388.030,00
2.1	Bagi Hasil Pajak	25.984.138.516,00	24.031.153.973,00	79.546.580.705,00	21.540.987.631,00	14.450.034.497,00	20757361803
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	30.206.358.495,00	46.959.073.218,00		35.779.297.795,00	21.568.924.523,00	61.458.371.265,00
2.3	Dana Alokasi Umum	358.875.317.000,00	392.975.926.000,00	412.859.933.000,00	438.706.118.000,00	433.161.224.000,00	440.170.882.447,00
2.4	Dana Alokasi Khusus	38.323.020.000,00	41.746.080.000,00	55.289.590.000,00	105.279.087.361,00	85.284.715.147,00	100.079.772.515,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		74.126.391.882,06	95.654.227.506,23	100.532.642.906,54	62.982.936.432,38	74.103.356.022,06	92.516.813.811,41
3.1	Pendapatan Hibah	11.980.083.190,00	4.594.759.000,00	1.127.659.200,00	877.650.000,00	106.250.000,00	15.164.020.000,00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.263.403.692,06	20.863.513.406,23	30.751.275.706,54	15.781.503.112,38	34.881.082.022,06	26.008.799.251,11
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	22.708.442.000,00	42.955.980.000,00	53.952.974.000,00	27.099.065.000,00	34.088.724.000,00	35.618.320.000,00
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.174.463.000,00	27.239.975.100,00	14.700.734.000,00	19.224.718.320,00	5.027.300.000,00	15.725.674.560,30
TOTAL PENDAPATAN		584.461.690.570,64	674.061.718.267,97	734.294.499.526,40	754.649.989.635,95	738.225.627.728,63	824.439.488.088,16

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitong Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 3. 1 Proporsi Pendapatan Daerah
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2013-2017



B.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

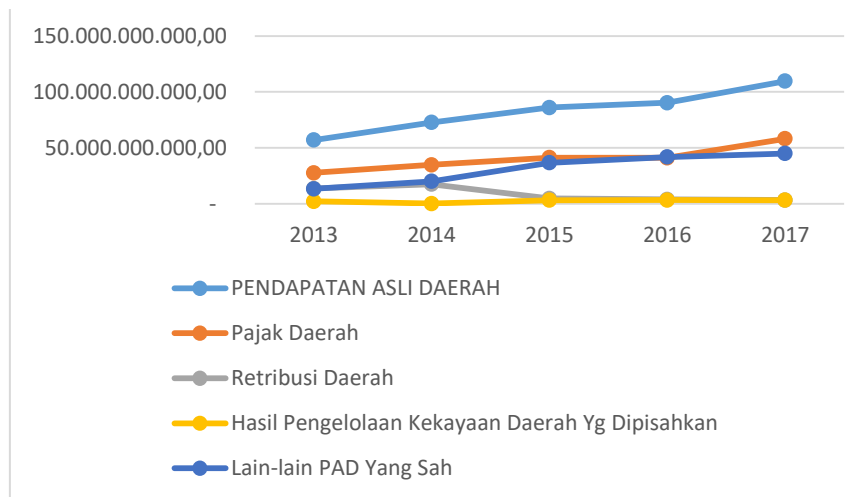
- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ;
- Lain-lain PAD yang Sah.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan. Namun, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, maka rata-rata pertumbuhannya adalah 17,8%. Dari sisi daya tumbuh sudah lumayan besar dan selalu melampaui target, tapi kontribusi terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 3. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2013-2017



B.2. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi Dana Perimbangan relatif besar terhadap total Pendapatan Kabupaten Belitong Timur selama lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, yaitu mencapai rata-rata 76,39%.

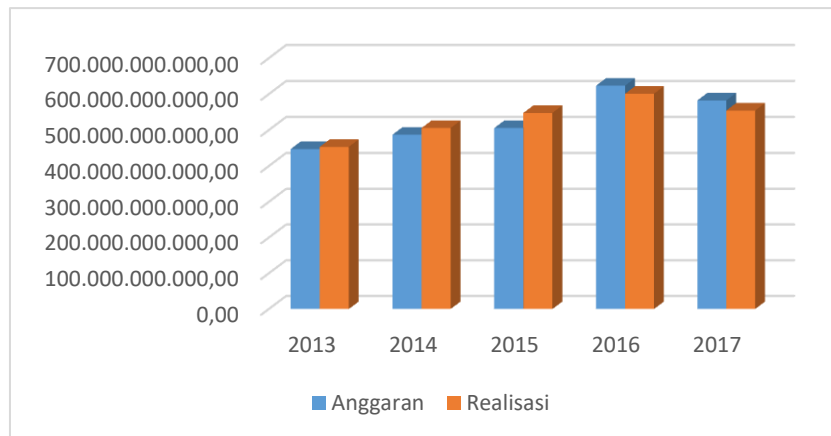
Terhadap target tahunan, realisasi Dana Perimbangan terjadi fluktuasi sebagaimana gambar dibawah ini:



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 3.3

Grafik target dan realisasi pencapaian Dana Perimbangan Tahun 2013-2017



Tabel 3. 2
Dana Perimbangan

No	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
1	2	3	4	$(5) = (4) : (3) \times 100\%$	$(6) = (3) - (4)$
1	2013	447.253.337.000,00	453.388.834.011,00	101,37	-6.135.497.011,00
2	2014	487.112.938.473,00	505.712.233.191,00	103,82	-18.599.294.718,00
3	2015	505.712.233.191,00	547.696.103.705,00	108,30	-41.983.870.514,00
4	2016	623.652.244.000,00	601.305.490.787,00	96,42	22.346.753.213,00
5	2017	582.517.944.000,00	554.464.898.167,00	95,18	28.053.045.833,00
	Jumlah	3.281.941.800.664,00	3.285.033.947.891,00	100,09	-3.092.147.227,00

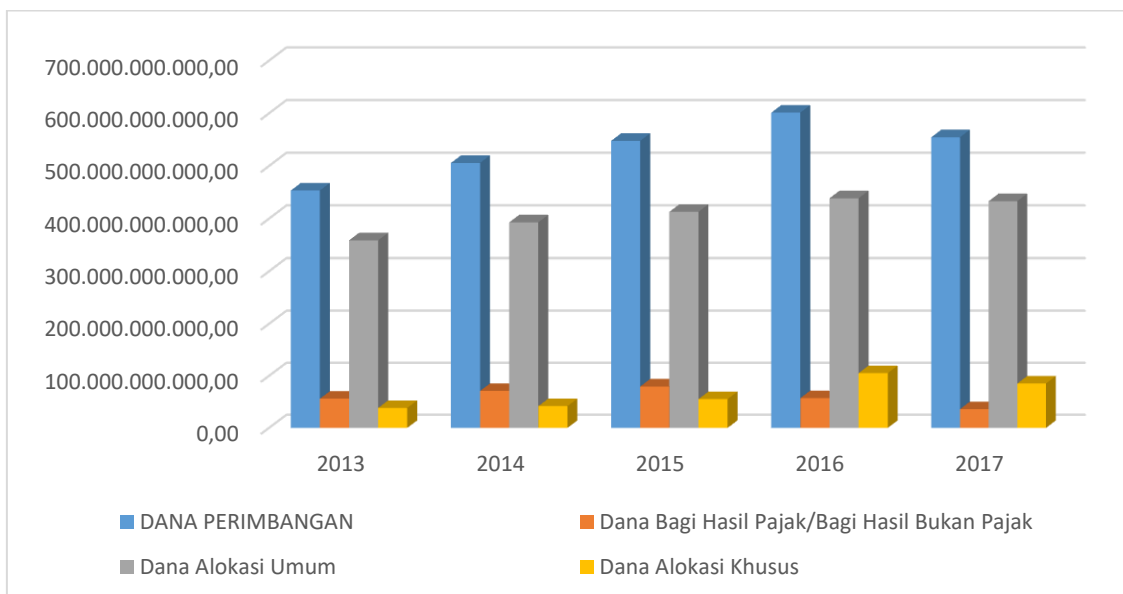
Dalam komponen Dana Perimbangan, porsi terbesar adalah berasal dari Dana Alokasi Umum, dimana menyumbang sebesar rata-rata 76,7%. Sebagaimana grafik berikut ini



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 3.4.

Proporsi komponen Dana Perimbangan Tahun 2013-2017



Tabel 3. 3
Realisasi Penerimaan

REK	URAIAN	REALISASI ANGGARAN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1. 2	DANA PERIMBANGAN	453.388.834.011,00	505.712.233.191,00	547.696.103.705,00	601.305.490.787,00	554.464.898.167,00
1. 2. 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.190.497.011,00	70.990.227.191,00	79.546.580.705,00	57.320.285.426,00	36.018.959.020,00
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	358.875.317.000,00	392.975.926.000,00	412.859.933.000,00	438.706.118.000,00	433.161.224.000,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	38.323.020.000,00	41.746.080.000,00	55.289.590.000,00	105.279.087.361,00	85.284.715.147,00

B.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pos lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dalam APBD di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Komponen ini rata-rata menyumbang 11,8% tiap tahunnya terhadap total Pendapatan Daerah. Dari sisi realisasi terhadap target tahunan, dari tahun 2013-2015 terjadi rentang capaian antara 76,37% dan yang tertinggi sebesar 104,59%, yang dapat dijelaskan pada table di bawah ini

Tabel 3. 4
Lain-lain Pendapatan yang sah

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1	2013	70.874.215.360,00	74.126.391.882,06	104,59
2	2014	103.786.986.600,00	95.654.227.506,23	92,16
3	2015	111.297.749.748,00	100.532.642.906,54	90,33
4	2016	26.322.441.000,00	20.102.368.320,00	76,37
5	2017	6.234.500.000,00	5.133.550.000,00	82,34
	Jumlah	351.509.492.708,00	326.438.875.175,13	92,87

B.4. Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Belanja Daerah terdiri dari:

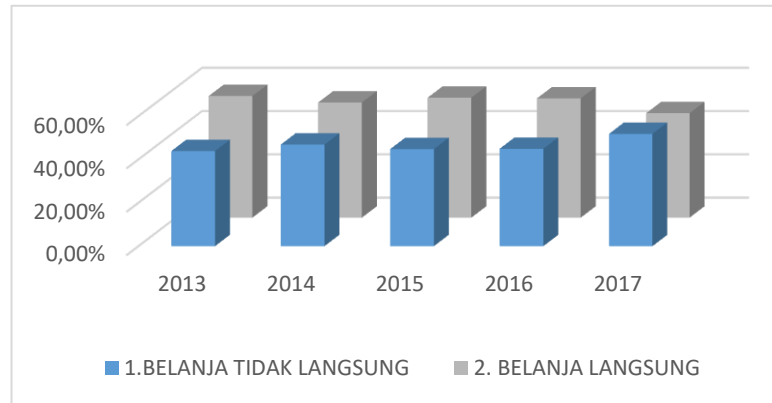
1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, dan (c) Belanja Modal.

Pada Tahun 2017 belanja Kabupaten Belitang Timur yang terealisasi mencapai Rp. 622.192.621.839,27 dari anggaran Rp. 705.058.645.239,00 atau terserap sebanyak 88,25%. Besaran belanja ini meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 1,04%/tahun. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan namun proporsi masing-masing pos belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan.

Berikut ini gambaran mengenai proporsi belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kab Belitang Timur Tahun 2013-2017.

Grafik 3.5

Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung



Dari gambar di atas, proporsi Belanja Langsung dijaga agar di atas 50% dengan rincian pada Tabel 3.6.

Pada komponen Belanja Tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes, Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemdes dan Parpol, dan Belanja Tidak Terduga, setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,90%, dimana proporsi terbesar digunakan untuk Belanja Pegawai. Pada Komponen Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Belanja Modal, juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,548%.

Tabel 3. 5

Total Belanja

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2013	722.432.043.529,47	596.878.359.473,16	82,62
2	2014	788.104.017.169,95	652.796.833.456,99	82,83
3	2015	913.160.317.385,66	775.507.580.042,05	84,93
4	2016	818.323.525.613,00	751.075.107.414,85	91,78
5	2017	705.058.645.239,00	622.192.621.839,27	88,25
	Jumlah	4.758.560.020.836,91	4.118.062.636.546,08	113,01

Sumber : BPKPD Kabupaten Belitang Timur



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 3. 6
Realisasi Belanja Kabupaten Belitong Timur

URAIAN		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG		261.744.737.343,16	305.744.413.585,79	346.659.495.513,05	373.657.921.552,35	368.119.424.372,91	381.122.829.581,18
1.1	Belanja Pegawai	198.504.363.534,00	229.778.358.823,00	252.648.319.949,00	279.132.958.615,37	262.981.953.802,00	272.845.327.513,00
1.2	Hibah	13.765.960.900,00	22.424.243.462,00	22.914.645.167,00	11.093.435.000,00	16.354.731.000,00	11.881.105.000,00
1.3	Bantuan Sosial	7.534.515.000,00	8.924.075.000,00	2.336.515.000,00	2.462.806.000,00	314.000.000,00	303.000.000,00
1.4	Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes	41.617.917.309,16	44.327.983.150,79	4.743.020.097,64	4.279.655.838,98	5.614.723.970,91	7.867.898.268,22
1.5	Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemdes dan Papol	299.980.600,00	289.753.150,00	64.016.995.299,41	76.686.216.098,00	82.854.015.600,00	88.225.498.799,96
1.6	Belanja Tidak Terduga	22.000.000,00	0	0	2.850.000,00	0	0
2. BELANJA LANGSUNG		335.133.622.130,00	347.052.419.871,20	428.848.084.529,00	458.383.057.799,48	342.541.937.037,27	434.582.701.788,76
2.1	Belanja Pegawai	45.733.783.770,00	47.984.975.975,00	67.816.282.489,00	80.925.132.725,00	72.873.224.121,00	81.293.224.604,00
2.2	Barang dan Jasa	111.938.164.263,00	130.281.531.994,00	148.085.743.283,00	164.984.225.827,15	162.562.967.893,00	179.608.336.650,43
2.3	Belanja Modal	177.461.674.097,00	168.785.911.902,20	212.946.058.757,00	212.473.699.247,33	107.105.745.023,27	173.681.140.534,33
TOTAL BELANJA		596.878.359.473,16	652.796.833.456,99	774.585.673.405,05	832.040.979.351,83	710.661.361.410,18	815.705.531.369,94

sumber : BPKPD Kabupaten Belitong Timur



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

3.1.2. NERACA KEUANGAN

Neraca keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat tertentu. Neraca keuangan daerah akan memberikan informasi penting kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti Kepala Daerah, Kepala SKPD, DPRD, dan pihak lain sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah adalah aset daerah, kewajiban dan ekuitas dana.

A. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 5.507.399.462,83. Peningkatan utang jangka pendek ini didorong adanya peningkatan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 3.7
Neraca Keuangan Kabupaten Belitong Timur

KEWAJIBAN		2013	2014	2015	2016	2017
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Kepada Pihak Ke tiga	1.563.878.800,00	459.223.363,00	110.124.289,00	110.124.289,00	110.124.289,00
	Utang Perhitungan Pihak Ke tiga (PFK)	3.670.604,27	45.924.757,27	4.975.565,27	5.071.784,27	216.195.807,27
	Hutang Jangka Pendek Lainnya	1.796.198.602,64	3.421.019.849,30	4.735.875.916,10	1.985.935.845,00	726.251.410,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.363.748.006,91	3.926.167.969,57	4.850.975.770,67	2.101.131.918,27	4.454.827.956,56
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					-	
JUMLAH KEWAJIBAN		3.363.748.006,91	3.926.167.969,57	4.850.975.770,67	4.202.263.836,54	5.507.399.462,83
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	148.966.282.346,95	165.359.387.392,93	-	-	-
	Cadangan Piutang	16.247.441.597,97	11.316.622.199,71	-	-	-
	Cadangan Persediaan	10.121.173.995,28	12.023.964.390,61	-	-	-
	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-3.360.007.402,64	-3.880.243.212,30	-	-	-
	Pendapatan Yang Ditangguhkan	24.500,00	1.602.327,00	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	171.974.915.037,56	184.821.333.097,95	-	-	-
	EKUITAS DANA INVESTASI			-	-	-



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

KEWAJIBAN		2013	2014	2015	2016	2017
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	25.000.000.000,00	42.153.279.295,00	-	-	-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.236.859.846.934,04	870.148.824.097,28	-	-	-
	Dinvestasikan dalam Aset Lainnya	10.475.803.381,00	11.633.323.429,00	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.272.335.650.315,04	923.935.426.821,28	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA		1.444.310.565.352,60	1.108.756.759.919,23	1.386.269.115.922,62	1.467.159.728.562,91	1.375.277.694.537,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.447.674.313.359,51	1.112.682.927.888,80	1.391.120.091.693,29	1.472.276.145.996,92	1.379.732.522.494,36

Sumber : DPPKAD Kabupaten Belitong Timur



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

B. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antar aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi *merupakan* selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kab. Belitung Timur tahun 2013 mencapai Rp 1.444.310.565.352,60 sedangkan Tahun 2017 mencapai Rp 1.375.277.694.537,80.

3.1.3. ASET

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Pada tahun 2017 Kabupaten Belitung Timur memiliki aset senilai Rp. 1.294.458.541.241,00. Pertumbuhan rata-rata aset dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tercatat 7,71%/tahun.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, di jual atau di pakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2015 mencapai Rp143.111.107.906,30 turun sebesar Rp45.636.393.161,22 dari tahun 2014. Rata-rata dalam 5(lima) tahun, dari tahun 2011 sampai tahun 2015 aset lancar mengalami penurunan sebesar 4,25%/tahun.

Investasi Jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kabupaten Belitung Timur, investasi jangka panjang bertumbuh dengan rata-rata 32,29%/tahun. Pada tahun 2011, invetasi jangka panjang baru sebesar Rp 16.500.000.000,00 namun pada tahun 2015 mencapai Rp48.153.279.295,00.

Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada tahun 2017, nilai aset tetap di Kabupaten Belitung Timur mencapai Rp.1.180.908.348.108,99 dimana nilai tertinggi adalah aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 3.8
Neraca Keuangan Kabupaten Belitong Timur

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	148.967.377.107,22	165.360.482.153,20	114.621.495.610,55	32.243.440.619,82	52.802.264.743,04
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.575.844,00	46.432.314,00	1.577.645,00	1.002.889,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	24.500,00	10	5,00	30.000,00	-
Kas di BLUD dan lainnya	0	0	2.507.557.406,00	9.015.304.595,85	914.861.834,08
Piutang Pajak dan Bukan Pajak	7.537.050.029,55	965.978.053,00	14.983.152.801,06		
Piutang Restribusi	3.323.627.659,42	3.546.544.168,21			
Piutang Lain-lain	5.386.763.909,00	6.804.099.978,50	0,00	-	43.414.100,00
Persediaan	10.121.173.995,28	12.023.964.390,61	10.930.844.986,75	12.426.400.386,42	10.575.739.804,29
Jumlah Aset Lancar	175.338.593.044,47	188.747.501.067,52	143.111.107.906,30	53.686.178.491,09	64.336.280.481,41
Investasi Jangka Panjang					
Jumlah Investasi Jangka Panjang	25.000.000.000,00	42.153.279.295,00	48.153.279.295,00	47.347.453.151,00	39.472.978.508,05
ASET TETAP					
Tanah	44.532.417.797,00	41.919.452.196,00	147.606.048.519,00	188.424.148.005,00	187.538.817.353,00
Peralatan dan Mesin	175.822.674.058,89	91.298.100.305,49	269.374.571.410,24	284.533.634.661,57	285.276.739.529,44
Gedung dan Bangunan	420.560.558.602,96	379.447.094.223,38	539.635.800.217,11	562.894.664.995,81	549.858.920.846,34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	559.775.236.377,66	427.676.951.567,87	756.166.112.703,59	887.135.265.001,81	922.376.516.898,85
Aset Tetap Lainnya	29.405.455.459,53	15.336.466.372,97	32.388.273.158,88	32.628.356.014,88	31.626.076.328,88
Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)	6.763.504.638,00	329.100.000,00	1.279.828.027,00	10.164.883.027,00	1.279.828.027,00
Akumulasi Penyusutan		(85.858.340.568,43)	(565.542.285.926,83)	(669.967.636.799,50)	(753.847.217.305,59)
Jumlah Aset Tetap	1.236.859.846.934,04	870.148.824.097,28	1.180.908.348.108,99	1.295.813.314.906,57	1.224.109.681.677,92
ASET LAINNYA					
Tagihan Pemberian Pinjaman	2.441.637.936,00	2.345.042.484,00	5.630.467.800,00	3.126.460.300,00	3.126.460.300,00
Tuntutan Ganti Rugi	448.959.042,00	448.959.042,00	969.408.873,00	969.408.873,00	969.408.873,00
Aset Tak Berwujud	3.307.328.776,00	3.629.368.776,00	3.532.097.148,00	3.838.563.148,00	362.973.001,67



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Lain-lain	4.277.877.627,00	5.209.953.127,00	8.815.382.562,00	36.584.352.348,88	1.553.736.907,00
Jumlah Aset Lainnya	10.475.803.381,00	11.633.323.429,00	18.947.356.383,00	44.518.784.669,88	6.012.579.081,67
JUMLAH ASET	1.422.674.243.359,51	1.070.529.648.593,80	1.342.966.812.398,29	1.394.018.278.067,54	1.294.458.541.241,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Belitong Timur



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 - 2017

3.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018, memuat beberapa hal terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi
2. penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang
3. mempengaruhi terhadap penerimaan masing-masing jenis PAD;
4. Menetapkan kebijakan dalam bentuk regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
5. yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat ;
6. Penyusunan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah;
7. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi dalam bentuk
8. sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
9. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah;
10. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
11. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara:
 - Optimalisasikan kegiatan pendataan wajib pajak;
 - Memperluas basis penerimaan pajak daerah;
 - Melakukan penagihan aktif dan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan daerah;
 - Mengupayakan pencarian sumber-sumber PAD yang baru
12. Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

3.2.2 KEBIJAKAN BELANJA

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang mana dalam azasnya adalah Efisiensi, efektifitas dan transparansi yang merupakan salah satu hal selalu diutamakan, terutama jikakeadaan keuangan (APBD) defisit. Efisiensi anggaran merupakan Kebijakan Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melakukan penghematan belanja daerah. Berikut inilangkah-langkah penghematan yang telah dilakukan adalah:

1. Pembahasan APBD tahun berikutnya dibahas dengan lebih selektif dan disesuaikan dengan
2. prioritas program serta berdasarkan kebutuhan yang menyentuh kepada masyarakat;



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

3. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan dan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa;
4. Melakukan perhitungan yang real terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan dengan membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), Survey harga, dan menyusun Kerangka Acuan Kerja;
5. Efektivitas dan efisiensi dalam pengeluaran belanja.

3.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk dapat diminimalkan sehingga pembiayaan dianggarkan dapat untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Dalam Kebijakan umum pembiayaan, bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah, serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun kedepan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada kurun waktu 5 tahun mendatang kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belitong Timur diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah di proyeksikan sedikit mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

3.3.1 REALISASI DAN PROYEKSI DATA TAHUN 2016-2021

Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terlaksana apabila dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Pajak daerah meningkat tiap tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2015, dengan peningkatan rata-rata 13,90%/tahun. Stabilitas ekonomi akan terus di jaga melalui pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan fiskal yang memberikan prioritas utama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan daerah secara umum diarahkan kepada peningkatan alokasi anggaran yang seimbang dan memantapkan kesinambungan fiskal. Untuk mencapai kebijakan tersebut dapat dilakukan strategi antara lain :

- a) Menetapkan kebijakan belanja yang efektif dan efisien;
- b) Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*) dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*);



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

- c) Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan;
- d) Meningkatkan pengelolaan dan penilaian aset daerah untuk menentukan nilai ekonomi dan nilai potensi aset daerah;
- e) Optimalisasi pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan pembiayaan anggaran dan pengendalian resiko di dukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan APBD;
- b) Perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah;
- c) Perumusan kebijakan pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
- d) Perumusan pengelolaan pinjaman.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai peningkatan dan optimalisasi pajak daerah antara lain :

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola pajak daerah;
- b) Melakukan evaluasi dan restrukturisasi struktur organisasi yang ada saat ini dengan mempertimbangkan analisa beban tugas, kondisi daerah serta pertimbangan objektif lainnya sejalan dengan penambahan fungsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran basis data wajib pajak daerah dan retribusi daerah secara bertahap supaya perhitungan potensi dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah bisa maksimal;
- d) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan SKPD yang mengelola penerimaan pendapatan daerah;
- e) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang ketentuan perpajakan daerah untuk menggugah kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
- f) Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menyediakan fasilitas dan regulasi yang mendukung penyediaan obyek sumber retribusi.

Untuk penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah permasalahannya adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat serta penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari provinsi.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

3.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan data keuangan tahun 2013-2018, maka disusunlah perkiraan atau prediksi pendapatan dan belanja daerah untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Perkiraan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 sampai dengan 2021 tersaji secara lengkap pada tabel dibawah ini.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 3.9

Perkiraan/Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun Anggaran 2016 – 2021

REK	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	6	7
1	PENDAPATAN	810.908.300.804,00	757.788.418.018,67	837.113.577.170,07	902.045.842.460,67	1.014.817.378.905,00	1.070.308.823.651,00
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.146.013.501,00	105.362.274.946,67	102.408.553.170,07	107.962.523.760,67	106.190.542.563,00	115.397.262.605,00
01.01.01	Hasil Pajak Daerah 1)	33.274.500.000,00	46.467.044.131,00	60.000.000.000,00	61.522.158.000,00	46.403.443.148,00	50.426.621.669,00
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah 1)	3.836.720.250,00	3.983.263.250,00	4.278.274.995,00	4.108.576.195,00	5.350.554.630,00	5.814.447.717,00
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.250.000.000,00	3.201.397.365,67	3.026.753.743,26	3.201.397.365,67	4.532.335.280,00	4.925.288.749,00
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.784.793.251,00	51.710.570.200,00	35.103.524.431,81	39.130.392.200,00	49.904.209.505,00	54.230.904.470,00
01.02	DANA PERIMBANGAN	631.941.346.933,00	591.305.805.000,00	635.693.104.000,00	697.832.137.100,00	805.936.657.758,00	846.233.490.648,00
01.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	95.657.788.933,00	57.814.014.000,00	81.650.248.000,00	81.650.248.000,00	91.657.215.472,00	96.240.076.246,00
01.02.02	Dana Alokasi Umum	438.706.118.000,00	433.161.224.000,00	440.265.288.000,00	440.265.288.000,00	533.250.028.343,00	559.912.529.761,00
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	97.577.440.000,00	100.330.567.000,00	11.377.756.800,00	175.916.601.100,00	181.029.413.943,00	190.080.884.641,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.820.940.370,00	61.120.338.072,00	99.011.920.000,00	96.251.181.600,00	102.690.178.584,00	108.678.070.398,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	2.943.074.298,00	1.000.000.000,00	15.993.600.000,00	14.566.215.200,00	2.943.074.298,00	2.943.074.298,00
01.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.797.114.072,00	20.797.114.072,00	30.400.000.000,00	29.066.646.400,00	25.279.022.138,00	26.542.973.245,00
01.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79.080.752.000,00	34.088.724.000,00	35.618.320.000,00	35.618.320.000,00	36.189.965.049,00	39.000.000.000,00
01.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.234.500.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	38.278.115.073,00	40.192.020.827,00
2	BELANJA	960.016.061.437,00	802.573.586.806,80	911.471.369.026,65	982.005.638.358,99	1.075.861.097.597,00	1.121.164.250.798,91



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

REK	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	6	7
02.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	427.204.076.625,00	388.896.470.267,80	398.275.377.608,82	441.335.392.327,50	561.225.473.307,00	612.798.500.048,00
02.01.01	Belanja Pegawai	326.230.729.500,00	291.316.829.852,80	288.619.900.877,00	336.289.756.708,00	451.897.484.098,00	497.087.232.508,00
02.01.04	Belanja Hibah	10.131.980.000,00	6.821.870.000,00	12.006.505.000,00	8.295.209.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	2.471.900.000,00	316.000.000,00	322.000.000,00	916.000.000,00	2.471.900.000,00	2.471.900.000,00
02.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.471.900.000,00	6.480.698.015,00	8.555.618.531,82	6.563.073.419,50	5.175.399.778,00	5.624.106.939,00
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	3.711.122.025,00	83.761.072.400,00	88.271.353.200,00	88.271.353.200,00	98.680.689.431,00	104.615.260.601,00
20.108	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
02.02	BELANJA LANGSUNG	532.811.984.812,00	413.677.116.539,00	513.195.991.417,83	540.670.246.031,49	514.635.624.290,00	508.365.750.750,91
02.02.01	Belanja Pegawai	81.988.648.250,00	84.650.975.639,00	93.035.029.666,05	65.630.378.600,00	88.588.180.540,00	89.474.062.346,00
02.02.02	Belanja Barang Dan Jasa	183.970.264.812,00	186.444.533.638,00	220.562.718.293,71	185.118.126.533,99	193.726.671.610,00	195.663.938.327,00
02.02.03	Belanja Modal	266.853.071.750,00	142.581.607.262,00	199.598.243.458,07	289.921.740.897,50	232.320.772.140,00	223.227.750.077,91
SURPLUS / (DEFISIT)			-44.785.168.788,13	-74.357.791.856,58	-79.959.795.898,32	-61.043.718.692,00	-50.855.427.147,91
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	153.107.760.633,00	45.896.387.837,40	76.073.987.663,85	80.999.795.898,32	66.043.720.718,00	55.588.439.175,91
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.107.760.633,00	42.085.387.837,40	71.762.987.663,85	79.495.049.498	61.879.338.121	556.115.101
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	4.311.000.000,00	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000,00	38.110.000.000,00	0,00	1.504.746.400	4.164.382.597	4.289.314.074,91



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

REK	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	6	7
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	1.111.219.049,27	1.716.195.807,27	1.040.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
03.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000.000	1.000.000.000
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.040.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
03.02.05	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	110.124.289,00				
03.02.06	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.094.760,27	216.195.807,27	0	0	
PEMBIAYAAN NETTO			44.785.168.788,13	74.357.791.856,58	79.959.795.898,32	61.043.720.718,00	50.855.429.175,91
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			0,00	0,00	0,00	2.026,00	2.028,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Belitung Timur



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

A. Pendapatan

A.1. Pendapatan Asli Daerah

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada Kemampuan Keuangan 5 Tahunan periode 2017 s/d 2021 diasumsikan mengalami Kenaikan sebesar 8,67% di setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan potensi pendapatan dan perhitungan persentase rata-rata berdasarkan realisasi PAD tahun sebelumnya dari Tahun 2011 s/d 2015, serta mengantisipasi pengalihan kewenangan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi terhadap SKPD yang memiliki kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

A.2. Dana Perimbangan

Proyeksi Dana Perimbangan pada Kemampuan Keuangan 5 Tahunan periode 2017 s/d 2021 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 5% di setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan Realisasi Dana Perimbangan tahun sebelumnya dari Tahun 2011 s/d 2015 bersifat fluktuatif, ada yang mengalami penurunan dan peningkatan, sehingga tidak dapat diukur dengan real tergantung dari kemampuan pemerintah pusat dalam penentuan besaran dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terutama Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

A.3. Lain-lain pendapatan yang sah

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah diperkirakan cenderung tetap disetiap tahunnya dilihat dari potensi pendapatan hibah yang tergantung pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima yang tidak dapat diprediksikan.

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Kemampuan Keuangan 5 Tahunan periode 2017 s/d 2021 diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5% di setiap tahunnya dipertimbangkan dari realisasi tahun – tahun sebelumnya namun juga tetap tergantung pada penentuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang tidak dapat diprediksikan.

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Proyeksi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Perolehan Dana Desa dari APBN diasumsikan meningkat dengan bertahap, yang diperkirakan sampai dengan Tahun 2021 mencapai sebesar Rp. 39.000.000.000,00 dengan asumsi kebijakan Pemerintah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Pusat yang merencanakan penyaluran dana kepada pemerintah desa sebesar 1 Milyard per desa.

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Perhitungan Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Kemampuan Keuangan 5 Tahunan periode 2017 s/d 2021 meningkat sebesar 5 %, yang bersifat fluktuatif dilihat dari realisasi tahun sebelumnya ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan bertahap, yang diperkirakan sampai dengan Tahun 2021 mencapai sebesar Rp. 39.000.000.000,00 dengan asumsi kebijakan Pemerintah Pusat yang merencanakan penyaluran dana kepada pemerintah desa sebesar 1 Milyard per desa.

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Perhitungan Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Kemampuan Keuangan 5 Tahunan periode 2017 s/d 2021 meningkat sebesar 5 %, yang bersifat fluktuatif dilihat dari realisasi tahun sebelumnya ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan

B. Belanja

B.1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai diperhitungkan mengalami peningkatan sebesar 10% disetiap tahunnya dengan asumsi 2,5% untuk kenaikan gaji berkala PNSD yang diamanatkan pada permendagri tentang pedoman penyusunan APBD dan 7,5% mengantisipasi kenaikan gaji PNSD serta kemungkinan adanya pengangkatan CPNS melalui seleksi CPNS secara umum maupun pengangkatan dengan K2 menjadi PNSD serta mengantisipasi kebijakan penerapan Tunjangan Kinerja.

b. Belanja hibah

Alokasi Belanja Hibah harus di minimalkan sehingga di alokasikan sebesar Rp 2.000.000.000,00 tiap tahunnya yang diprioritaskan untuk BOS sekolah swasta dan Daba Provinsi.

B.2. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial harus diminimalkan yang dialokasikan sebesar Rp.2.471.900.000,- hanya diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan berobat masyarakat miskin.

B.3. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Perhitungan Belanja Bagi Hasil Kepada Desa dihitung sebesar 10% dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah yang dipengaruhi oleh penerimaan atas pajak dan retribusi dari desa.

- B.4. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik

Perhitungan Belanja Bagi Hasil Kepada Desa dihitung sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus dan ditambahkan dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Perhitungannya dipengaruhi jumlah penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

- B.5. Belanja tidak terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 setiap Tahun untuk mengantisipasi terjadinya pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak direncanakan seperti terjadinya bencana alam atau pengembalian kelebihan transfer pemerintah pusat atau keperluan mendesak/darurat lainnya.

- B.6. Belanja Langsung

- a. Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa

Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa rata-rata meningkat dari Tahun 2011 s/d 2015 sebesar 12%, tetapi pada Kemampuan Keuangan 5 Tahunan periode 2017 s/d 2021 hanya dialokasikan meningkat sebesar 1% dengan harapan pemerintah kabupaten belitong timur dapat mengurangi keperluan-keperluan yang bersifat tidak mendesak diantaranya dalam memberikan Honorarium Kegiatan dan biaya operasional harus lebih mempertimbangkan

- b. Belanja Modal

Kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

C. Pembiayaan Daerah

- C.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Silpa ditargetkan mengalami penurunan secara bertahap dimulai dari tahun 2017 sebesar 10%, tahun 2018 sebesar 9%, tahun 2019 sebesar 7%, tahun 2020 sebesar 6% dan tahun 2021 sebesar 5% dengan harapan pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja khususnya pelaksanaan pekerjaan dan serapan anggaran dimaksimalkan di setiap tahunnya.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman diasumsikan meningkat sebesar 3% dengan mempertimbangkan penyaluran pemberian pinjaman kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

C.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar Rp 1.000.000.000,00 disetiap tahunnya pada Kemampuan Keuangan 5 Tahunan periode 2017 s/d 2021, hal ini jika pemenuhan anggaran untuk urusan wajib sudah tercapai.

b. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah dialokasikan sebesar Rp 4.000.000.000,00 disetiap tahunnya pada Kemampuan Keuangan Tahunan periode 2017 s/d 2021 yang diperuntukan untuk UMKM dan Petani, hal ini jika pemenuhan anggaran untuk urusan wajib sudah tercapai.

c. Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya

Pada Kemampuan Keuangan 5 Tahunan periode 2017 s/d 2021 belum mengalokasikan dikarenakan hutang daerah dapat diketahui setelah disesuaikan dengan audit dari BPK RI untuk pembayaran Hutang tersebut.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan menjadi agenda utama untuk ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Pendidikan

- 1) Masih rendahnya APM PAUD;
- 2) Masih adanya angka putus sekolah untuk SD dan SMP;
- 3) Angka melanjutkan sekolah belum optimal;
- 4) Masih rendahnya kualitas pendidik pada jenjang pendidikan PAUD dan SD/MI;
- 5) Masih adanya guru yang belum memiliki kualifikasi S1/DIV
- 6) Belum adanya dukungan tenaga kependidikan (tenaga administrasi) dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (Hampir seluruh SD belum memiliki tenaga administrasi);
- 7) Belum meratanya distribusi tenaga guru (PNS) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

b. Kesehatan

- 1) Tingginya kasus kematian bayi;
- 2) Tingginya Angka Kematian Ibu;
- 3) Meningkatnya prevalensi penyakit TB/ HIV-AIDS/ Hipertensi
- 4) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- 5) Masih rendahnya warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar;
- 6) Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belum optimalnya sistem drainase;
- 2) Belum semua rumah tangga terlayani air minum;
- 3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang;



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

- 4) Kurangnya ketersediaan air baku baik air irigasi maupun air industri.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Penanganan permukiman kumuh menghadapi tantangan peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh;
- 2) Rendahnya pembiayaan perumahan karena terdapat beberapa kendala diantaranya adalah: (1) masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) masih rendahnya daya beli atau kemampuan (*affordability*) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni; (3) relatif masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*); dan 4) terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan, akibat relatif sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*);
- 3) Permasalahan dan tantangan dalam penyediaan perumahan yang meliputi: (1) dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai; (2) peran kontrol Pemerintah Daerah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal; (3) efisiensi proses dan mahal biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal; (4) terbatasnya dan mahal biaya bahan bangunan untuk pembangunan perumahan; (5) pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal; (6) masih tingginya *backlog* kepemilikan rumah; dan (7) pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1) Masih Tingginya tingkat kriminalitas;
- 2) Masih tingginya tingkat kriminal;
- 3) Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat.

f. Sosial

- 1) Banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS;
- 2) Perlunya panti/rumah singgah guna menampung PMKS yang membutuhkan rehabilitasi;
- 3) Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas;
- 4) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensi) dan disabilitas perempuan.

g. Tenaga Kerja

- 1) Masih rendahnya kesempatan kerja
- 2) Masih rendahnya kompetensi pencari kerja
- 3) Masih rendahnya persentase penempatan pencari kerja



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Meningkatnya KDRT;
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan perempuan dan anak;
- 3) Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan;
- 4) Belum optimalnya peran forum anak dan pelaksanaan kab/kota layak anak;
- 5) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan.

i. Lingkungan Hidup

- 1) Infrastruktur persampahan yang belum memadai/mencukupi
- 2) Masih perlunya gambaran tentang kualitas lingkungan hidup yang baik (tanah, air dan udara)

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
- 2) Belum optimalnya informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan
- 3) Belum Optimalnya pendataan dan perizinan terhadap warga pendatang yang bekerja di sektor informal di Kabupaten Belitong Timur

k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih rendahnya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan dan belum efektifnya pembinaan kelembagaan masyarakat;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan pembentukan BUMDes dan masih rendahnya penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi dikalangan masyarakat desa;
- 3) Rendahnya Pemanfaatan Hasil Karya Teknologi Tepat Guna, Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

l. Perhubungan

- 1) Belum optimalnya konektivitas di dalam dan luar wilayah Kabupaten Belitong Timur;
- 2) Meningkatkan Keselamatan Transportasi (Transportasi Safety);
- 3) Tingginya angka kecelakaan;
- 4) Belum optimalnya pelayanan angkutan di wilayah Kabupaten Belitong Timur;

m. Koperasi, UMKM

- 1) Rendahnya Tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi
- 2) Rendahnya Kapasitas SDM KUMKM
- 3) Akses pembiayaan bagi KUMKM;
- 4) Akses pemasaran produk KUMKM;
- 5) Iklim usaha yang mendukung KUMKM;
- 6) Daya saing produk KUMKM.
- 7) Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dan teknologi informasi
- 8) Masih rendahnya pertumbuhan koperasi
- 9) masih rendahnya usaha mikro yang mempunyai ijin usaha



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

n. Perikanan

- 1) Belum beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan, sebagai salah satu cara mengatasi inflasi;
- 2) Belum adanya industri perikanan yang terintegrasi;
- 3) Ketersediaan benih ikan yang kurang, sehingga menghambat peningkatan jumlah produksi budidaya;

o. Pariwisata

- 1) Rata-rata lama tinggal wisatawan yang belum meningkat;
- 2) Masih rendahnya kontribusi penyediaan akomodasi makanan dan minuman terhadap PDRB;
- 3) Belum ditetapkan pulau Belitong sebagai UNESCO Global Geopark

Ditetapkan pulau Belitong sebagai bagian dari bagian DPN (Destinasi Pariwisata Nasional) telah mendorong dua pemerintah daerah di Pulau Belitong untuk menjadikan pulau Belitong sebagai destinasi wisata kelas dunia sebagaimana program pemerintah pusat 10 Bali Baru yang dimulai tahun 2018 ini, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan geopark.

Pengembangan geopark memberikan kontribusi nyata antara lain, untuk pengembangan wilayah, peningkatan ketahanan masyarakat dari bencana, mendidik masyarakat pada kehidupan yang baik dengan menghormati budaya yang beragam, pemberdayaan perempuan untuk memperoleh tambahan sumber pendapatan, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat dengan adanya wisata geopark, serta terjalinnya kerjasama antar daerah dan negara dalam mendayagunakan keragaman geologi, keragaman hayati dan budaya, serta jasa lingkungan (amenities) secara berkelanjutan.

Sebaran lokasi geosite menyebar di Kabupaten Belitong dan Kabupaten Belitong Timur, masing-masing mewakili bagian keanekaragaman geologis, ekologis, dan budaya setempat, menjadi potensi pengembangan wisata yang merata.

Berikut Geosite Prioritas pengembangan Geopark Pulau Belitong di Kabupaten Belitong Timur:

1. Open Pit Nam Salu, lokasi Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit;
2. Pantai Batu Pulas, Kampung Mengguru dan Pulau Keran, lokasi Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit;
3. Hutan Kerangas, lokasi Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit;
4. Pantai Burong Mandi, lokasi Desa Burong Mandi Kecamatan Damar; dan
5. Gunung Lumut, lokasi Desa Limbongan Kecamatan Gantung

p. Pertanian

- 1) Menjadi salah satu komoditas penyebab tingginya tingkat inflasi
- 2) Rendahnya nilai tambah/jual komoditas hasil perkebunan seperti lada dan karet
- 3) Pemanfaatan pengelolaan lahan pertanian yang belum optimal
- 4) Diversifikasi pertanian
- 5) Belum maksimalnya penerapan teknologi dalam budidaya padi.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

q. Inspektorat Daerah

- 1) Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (PD);
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawasan belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya;
- 3) Belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing PD.

r. Keuangan Daerah

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan.
- 2) Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- 3) Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset / barang milik daerah.
- 4) Belum tercapainya opini BPK dengan kategori WTP atas pelaporan keuangan daerah.

s. Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan sektoral yang memadai;
- 2) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 3) Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan penganggarannya;
- 4) Inefisiensi anggaran akibat dari adanya program/ kegiatan di OPD yang output, obyek dan outcomenya sama;
- 5) Perencanaan dari OPD tidak ada perencanaan barang dan jasa, dalam perencanaan diharapkan sudah ada kejelasan RAB dan KAK nya, sebelum dibahas di RUP sudah ada PPK nya, PPK sudah memiliki kompetensi sesuai Regulasi.

t. Sekretariat Daerah

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan PATEN di masing masing kecamatan;
- 2) Masih ada sengketa batas wilayah antar desa yang belum terselesaikan ;
- 3) Belum semua unit-unit pelayanan PD memiliki pedoman standar pelayanan publik (SPP); dan melaksanakan evaluasi pelayanan publik (pengukuran IKM) secara berkala;
- 4) Belum semua unit aktifitas PD telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP (standar operasional prosedur).

u. Satpol PP

- 1) Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kejahatan;
- 2) Belum optimalnya penanganan tindak pidana kriminal dan penanganan kasus penyakit masyarakat;
- 3) Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP;
- 4) Masih terbatasnya jumlah anggota Satpol PP;
- 5) Memudarnya pelaksanaan Siskamling pada masing-masing desa;
- 6) Masih terbatasnya jumlah pembinaan politik daerah.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

v. Kepegawaian

- 1) Belum optimalnya rekrutment dan penempatan ASN dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya.
- 2) Belum optimalnya pengembangan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat.
- 3) Belum optimalnya pemberian kompensasi yang adil dan layak sesuai dengan kinerja ASN.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

Kegiatan dan indikator:

1. Perencanaan kebutuhan ASN dilaksanakan berdasarkan Anjab dan ABK
2. Pengadaan PNS dan PPPK dilakukan secara transparan, terbuka dan kompetitif
3. Pengembangan Karir dilakukan dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja dan rencana suksesi.
4. Promosi dan mutasi dilakukan secara objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja berdasarkan pemetaan talenta.
5. Manajemen kinerja dilakukan dengan penetapan target kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif serta menggunakannya untuk pertimbangan promosi, mutasi, demosi serta diklat.
6. Penggajian, Penghargaan dan disiplin sudah dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja dan disiplin.
7. Perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dilakukan secara tersistem dengan program yang jelas.
8. Sistem informasi digunakan untuk pelaksanaan manajemen ASN berbasis merit sistem.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. PENERAPAN SPM

Tingkat keyakinan atau kepercayaan pemerintah pusat terhadap berjalannya pembangunan di daerah masih dianggap belum optimal. Ukuran kepercayaan ini tergambarkan dari kinerja daerah dalam melaksanakan urusan wajib khususnya berkenaan dengan pelayanan dasar. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penekanan pelaksanaan urusan wajib dipisahkan antara yang bersifat pelayanan dasar dan yang non dasar. Bisa jadi pemisahan ini agar terlihat keseriusan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Begitu pentingnya pembangunan berbasis SPM ini, mengingat masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dan keterjangkauan atas pelayanan dasar. Keberhasilan pemerintah daerah memberikan akses terhadap pelayanan dasar warganya dapat mengungkit nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kepala Daerah terpilih diharapkan cerdas mengarahkan belanja pembangunan bagi kemakmuran rakyat.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga, pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian integral dari pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
2. Diberlakukan untuk seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.
4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis dan ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berpedoman pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memprioritaskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan terkait pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun standar pelayanan minimal (SPM) yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan wajib pelayanan dasar, antara lain: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan rakyat, bidang



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang pekerjaan umum dan bidang sosial

Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen pelayanan publik tersebut, maka pemerintah daerah tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam (Internal organisasi) tetapi justru ke luar (masyarakat) melalui akuntabilitas publik (transparansi), pemerintah akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan masuk kedalam dokumen RPJMD, dan memberikan ruang (mekanisme) di mana masyarakat (publik) dapat secara terbuka mengawasi dan berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan SPM di daerahnya.

Meskipun Pemerintah telah menetapkan jenis-jenis pelayanan dalam tingkat minimal seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri untuk setiap bidang pelayanan yang ada, sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Belitong Timur melalui kreatifitas dan inovasi semaksimal dan seprofesional mungkin.

Dalam pelaksanaan penerapan SPM di Belitong timur, hal yang masih menjadi fokus perhatian adalah:

1. Di bidang Kesehatan antara lain:
 - a. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2017 adalah 71,37 dan pada tahun 2016 adalah 71,30. Angka tersebut meningkat sebesar 0,07. Apabila dibandingkan dengan AHH Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 69,95, AHH Kabupaten Belitong Timur jelas lebih tinggi. Kecenderungan peningkatan AHH tersebut dapat mencerminkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan AHH tersebut harusnya daerah bisa mengantisipasi pertambahan jumlah lansia serta mengoptimalkan peran layanan kesehatan pada lansia. Tersedianya layanan kesehatan ramah lansia berikut standarisasi layanan ramah lansia. Poli ramah lansia idealnya dimiliki oleh Puskesmas dan Rumah Sakit, yang saat ini belum dimiliki oleh unit pelayanan kesehatan kita.
 - b. Secara angka, pencapaian SPM kesehatan khususnya angka kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke fasilitas kesehatan sangat baik, dengan angka diatas 85%. Namun, jumlah kematian ibu pada triwulan pertama tahun 2019 sudah mencapai 6 kasus kematian, menjadi yang tertinggi se Provinsi Kep. Bangka Belitung. Secara Angka, jumlah tersebut telah melebihi angka nasional. Banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka kematian



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

ibu tersebut antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, transportasi dan faktor kesehatan ibu itu sendiri. Penyebab kematian ibu terdiri dari penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu antara lain karena komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas seperti: pendarahan, eklamsia atau gangguan tekanan darah tinggi saat kehamilan, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi (Kemenkes, 2009). Secara implisit juga bisa karena 3 T, terlambat mengambil keputusan merujuk ke fasilitas kesehatan, terlambat menjangkau fasilitas kesehatan dan terlambat mendapat pelayanan tenaga kesehatan. Belum lagi ketika kita fokus pada mutu dari Sumber Daya Manusia Kesehatan tersebut. Standar ketenagaan terkait pendidikan dari Tenaga Kesehatan yang melayani, mulai dari Dokter, perawat, serta bidan. Kompetensi yang mereka miliki. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan standar pelayanan terhadap tenaga kesehatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan harusnya juga melibatkan organisasi profesi terkait. Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan komplikasi dan menurunkan risiko bagi ibu dan bayi antara lain; pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, manajemen persalinan yang cepat, tepat, serta memilih cara persalinan yang aman (Kemenkes, 2015).

- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan adalah bahwa seluruh tenaga kesehatan di Indonesia harus meningkatkan jenjang pendidikannya, jika sebelumnya minimal lulusan SMA sederajat maka kedepan harus menempuh pendidikan minimal lulusan Diploma III (D3). Kementerian Kesehatan fokus melakukan program percepatan pendidikan bagi tenaga kesehatan hingga 2020 mendatang, selanjutnya kedepan daerah harus mampu memfasilitas dan mengantisipasi kekurangan tenaga kesehatan saat para tenaga kesehatan tersebut sedang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lanjutan (RPL). Walau tenaga kesehatan yang mengikuti program tersebut tidak meninggalkan tugas secara penuh namun tentu saja akan berimbas pada pelayanan karena ada saat mereka meninggalkan jam pelayanan untuk tugas kuliah.
- d. Pemenuhan Gizi dan status gizi yang merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status Gizi juga berkaitan erat dengan *Human Development Indeks* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena gizi merupakan salah satu element pembentukan otak yang menjadi ukuran dalam menentukan kualitas manusia. Balita Gizi buruk dan Stunting juga masih di temui di Kabupaten Belitong Timur. Dari 39 desa, ada dua desa yang menjadi prioritas penanganan stunting dengan jumlah penderita stunting melebihi 20% persen.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

- e. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif juga masih rendah, bila dilihat dari indikator askes masyarakat pada kepemilikan jamban sehat, perilaku merokok serta pemberian ASI Eksklusif. Penerapan dan pengawasan sanksi amanat Perda No. 16 tahun 2016 tentang kawasan tanpa asap rokok harus mendapat perhatian karena selama ini Perda tersebut baru secara aktif di terapkan pada fasilitas layanan kesehatan saja tidak pada fasilitas publik lainnya. Penyediaan ruang menyusui pada fasilitas publik juga harus segera mendapat perhatian karena saat ini belum semua fasilitas publik menyediakan ruang menyusui untuk mendukung gerakan ASI Eksklusif.
 - f. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular maupun penyakit tidak menular termasuk penyakit degeneratif masih merupakan permasalahan yang butuh penanganan secara serius. Trend penyakit tidak menular sepanjang dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
2. Bidang pendidikan

SPM Bidang Pendidikan salah satunya bertujuan untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan sehingga kesenjangan mutu antar wilayah dapat dipersempit. Tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif menjadi indikator SPM, yang dapat memberikan gambaran besaran sasaran SPM yang dapat dipenuhi. Penerapan kebijakan SPM bidang pendidikan juga memerlukan kesiapan SDM. SDM yang ada di daerah mampu menjadi aparatur yang memberi penguatan pada proses pencapaian SPM bidang pendidikan. Kesiapan kinerja aparatur SDM dan dapat bersinergi secara maksimal dalam proses belajar mengajar, yang selanjutnya mampu menjembatani pencapaian mutu pendidikan secara nasional.
 3. Bidang Sosial

Untuk jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan pengemis di dalam panti. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dan kabupaten/kota.

Kendala/ Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Sosial antara lain :

 - a. Keterbatasan ketersediaan pembiayaan untuk pelaksanaan Program/ Kegiatan guna pemenuhan indikator SPM;
 - b. Beban Perangkat daerah dengan 3 (tiga) Urusan Wajib Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bidang Pemberdayaan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Perempuan/ Perlindungan Anak belum disertai dengan dukungan SDM dan Sarana Prasarana yang memadai;

- c. Belum optimalnya koordinasi lintas Perangkat daerah untuk penanganan masalah – masalah sosial melalui Kebijakan Pemanfaatan Satu Data (BDT) yang sudah dimiliki oleh daerah

4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Isu yang harus yang harus diselesaikan dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- 1) masih kurangnya ketersediaan kapasitas produksi air minum dalam mengantisipasi perkembangan kota di Kawasan Perkotaan Kabupaten Belitong Timur.
- 2) Akses sanitasi di kabupaten Belitong Timur masih perlu ditingkatkan terutama di kecamatan yang memiliki persentase nilai akses sanitasi terendah.
- 3) Rendahnya persentase penerbitan IMB diantaranya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB.
- 4) Persentase yang harus dicapai berdasarkan target pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang sampai dengan tahun 2019 adalah 70 %, yaitu PKLP Dendang, Kawasan Strategis Burung Mandi, Kawasan Strategis Pantai Punai, PPK Simpang Renggang, PPK Simpang Pesak, PPK Damar dan PPK Buding.
- 5) Persentase target pencapaian SPM Penyediaan RTH Publik di tingkat kabupaten dan kota adalah 50% pada Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2017, kabupaten Belitong Timur telah menyediakan RTH publik sebanyak 29,18 % dari 50% yang ditargetkan pada tahun 2019.

5. Bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembagian urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur bahwa kewenangan provinsi terkait bidang perumahan adalah rehabilitasi bencana provinsi, dan relokasi program pemda provinsi. Begitu pula kewenangan kabupaten/ kota adalah rehabilitasi bencana kabupaten/ kota dan relokasi program pemda kabupaten/ kota.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Sedangkan untuk kawasan permukiman adalah penataan dan peningkatan kawasan permukiman 10 – 15 ha, di atas 15 ha adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan untuk kabupaten/ kota seluas dibawah 10 ha. Untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU), pemerintah provinsi menangani PSU permukiman sedangkan kabupaten/kota menangani PSU perumahan. Untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam hal perumahan adalah kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan keswadayaan masyarakat juga masih rendah. Sedangkan permasalahan di lingkungan perumahan umum yaitu: genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, rumah sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum optimal, pelaksanaan pembangunan atau pengembangan lebih mementingkan cluster (persil) sehingga PSU tidak terpadu antar sistem.

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada maka kedepan harus meningkatkan kualitas pelayanan perumahan, mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan rumah layak huni, penguatan peran kelembagaan perumahan, penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan air bersih dan sanitasi dan peningkatan koordinasi dengan provinsi maupun pemerintah pusat dalam penyelesaian perumahan.

6. Bidang Ketertiban Umum

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Belitong Timur. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dari sisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat permasalahan yakni belum optimalnya implementasi peraturan daerah. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yakni 1) dampak sosial adanya pertumbuhan dan perpindahan penduduk, 2) adanya pembangunan maupun usaha yang mengesampingkan perizinan, 3) makin tingginya kuantitas maupun kualitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkara dengan variasi pelanggaran yang makin beragam. Kenaikan jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana maupun SDM yang ada. Keterbatasan jumlah personil maupun PPNS menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan penegakan peraturan perda.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan Partai Politik yang ada di lingkungan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal, masih banyak organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum sangat mungkin terjadi dengan adanya peluang investasi yang semakin terbuka. Kejadian kriminalitas tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/ peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung, menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik serta peran aktif masyarakat. Sehingga kekhawatiran timbulnya dampak meningkatnya kerawanan dan gangguan ketertiban umum dapat diantisipasi dengan merencanakan program dan kegiatan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan masyarakat.

4.2.2. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL's (SDG's)

Pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan dalam berbagai skema yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara global. Pembangunan berkelanjutan sampai saat ini terus menjadi kata kunci bagi pembangunan dan pengelolaan lingkungan (Eliot 2006). Lebih jauh lagi pembangunan berkelanjutan kini dinyatakan sebagai tujuan kebijakan prinsip dari berbagai institusi dalam pembangunan mulai dari pada saat yang paling awal. Sampai saat ini berbagai skema tujuan pembangunan berkelanjutan telah diinisiasi, beberapa diantaranya memberikan hasil yang cukup menggembirakan pada level global maupun nasional, diantaranya adalah Millenium Development Goals.

Skema Millenium Development Goals (MDGs) dari deklarasi millennial yang sudah dicanangkan dari mulai tahun 2000, dan dinyatakan berakhir pada tahun 2015, pada level global, secara keseluruhan selain telah memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penurunan jumlah masyarakat miskin dan peningkatan kesehatan masyarakat, serta menyelamatkan kehidupan jutaan orang di dunia, juga meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Target MDGs yang belum selesai diantaranya adalah tidak adanya progress target biodiversitas, pendidikan dasar dan kesehatan reproduksi. Pada level nasional, MDGs juga masih meninggalkan target yang belum selesai dalam hal target kematian ibu melahirkan dan anak, malnutrisi, akses air bersih, akses sanitasi dan anak dengan pertumbuhan kurang (stunting).

Perkembangan global menunjukkan adanya keinginan dari seluruh negara di dunia untuk mengembangkan skema MDGs menjadi lebih komprehensif, dengan memperkenalkan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Dengan SDGs, setidaknya melahirkan solusi berkelanjutan untuk peningkatan akses pangan dan produksi pertanian, sehingga menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi bagi semua orang khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi disepanjang tahun.

Kebijakan serta komitmen untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk untuk penurunan stunting dan gizi buruk pada balita, mengatasi kebutuhan gizi remaja, perempuan, wanita hamil dan menyusui serta lansia.

SDGs harus mampu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia. Dengan fokus kegiatan yang bertujuan untuk penurunan AK, AKBa dan AKN, penurunan prevalensi penderita HIV/AIDS, TB, malaria, peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB dan ASFR). Menjadi perhatian baru untuk menuntaskan kejadian kematian akibat PTM, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, penurunan angka kecelakaan lalu lintas, terciptanya Universal Health Coverage yang memberi manfaat bagi masyarakat secara nyata dalam hal pelayanan kesehatan, penurunan angka kontaminasi dan polusi air, udara, tanah serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

Isu pengendalian tembakau dan pengendalian PTM kedalam indikator pencapaian SDGs. Penerapan kawasan bebas rokok sebagai amanat Perda No, 2 Kabupaten Belitung Timur tahun 2016 tentang kawasan bebas rokok. Klaim BPJS tahun 2014 untuk 4,8 juta secara nasional. Kasus penyakit jantung mencapai 8,189 triliun. Tahun 2015 hingga triwulan III terdapat 3,9 juta kasus dengan total klaim 5,462 triliun. Klaim nBPJS tahun 2014 untuk 894 kasus penyakit kanker mencapai 2 Triliun (894.000 kasus). Tahun 2015 terdapat 724.000 kasus dengan total klaim 1,3 triliun. Didasarkan biaya kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa PTM menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan program JKN.

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah terkait pelaksanaan SDGs salah satunya adalah bahwa siapapun leader yang memimpin daerah, SDGs tetaplah harus tercapai. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memberantas kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan bagi semua. Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan harus turun. Ketika jumlah penduduk miskin didaerah justru bertambah artinya konsentrasi pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan imbas yang positif dalam pemerataan kesejahteraan. Kunci utama yang hendaknya dilakukan dalam pencapaian SDGs adalah mampu membangun keadilan ekonomi bersama. Kerjasama lintas sektor dalam pencapaian SDGs, terbentuknya tim pelaksana SDGs , tersusunnya peta jalan pencapaian SDGs, tersedianya data terpilah beserta dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs, juga keterlibatan seluruh kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Kedepan perencanaan pembangunan daerah sudah harus memiliki arah dan kebijakan yang jelas terkait pelaksanaan SDGs. Merangkai pendanaan dan pembiayaan SDGs sesuai dengan tusi masing – masing OPD, memajukan kemitraan multi pihak dalam pelaksanaan SDGs, serta memastikan keterlibatan kelompok rentan dan tertinggal dalam pelaksanaan SDGs. SDGs yang secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

kelaparan, mengurangi ketimpangan/ kesenjangan yang terjadi. Memperbaiki manajemen air dan energi dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja) dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan.

Isu strategis lain terkait pelaksanaan SDGs adalah perencanaan pembangunan sektor kesehatan. Sektor kesehatan dalam SDGs memegang peranan yang cukup besar. Setidaknya ada empat goals, 19 target dan 31 indikator yang harus dicapai yakni terkait gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan reproduksi, KB serta sanitasi dan air bersih.

4.2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI

Tidak dipungkiri bahwa sampai dengan tahun 2017 ini, perekonomian dunia belum bisa dikatakan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang rendah di sejumlah negara maju memicu rendahnya permintaan komoditas yang berujung pada melemahnya harga komoditas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya perekonomian di berbagai negara. Tidak terkecuali dengan Indonesia, juga terkena imbas dari melemahnya pasar komoditas dunia. Perekonomian Kabupaten Belitong Timur selama ini didorong oleh sektor pertambangan dan penggalan dari sisi produksi dan didorong oleh ekspor dari sisi pengeluaran. Kabupaten Belitong Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki andil terhadap volume ekspor komoditas lada dan bijih timah di level nasional. Tidak heran, lemahnya harga sejumlah komoditas ekspor unggulan seperti lada dan karet, serta melesunya produksi timah menjadi pemicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di “Negeri Laskar Pelangi” ini.

Perlu digaris bawahi, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini bukan berarti perekonomian di Belitong Timur tidak tumbuh. Angka perekonomian tetap tumbuh, hanya saja melambat dari tahun ke tahun. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang positif mampu mengindikasikan kinerja perekonomian wilayah. Oleh karenanya, perlambatan pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa terjadi kelesuan di bidang perekonomian Kabupaten Belitong Timur.

Berdasarkan grafik, terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitong Timur periode 2012-2016 menunjukkan tren yang menurun. Hal ini hampir menyerupai pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga cenderung menurun. Namun, di tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya sedikit peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan Kabupaten Belitong Timur belum menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Belitong Timur pada tahun 2016 (4,19 persen) masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setelah beberapa tahun perekonomian sempat mengalami perlambatan, kabar baik terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dimana pada tahun tersebut perekonomian di



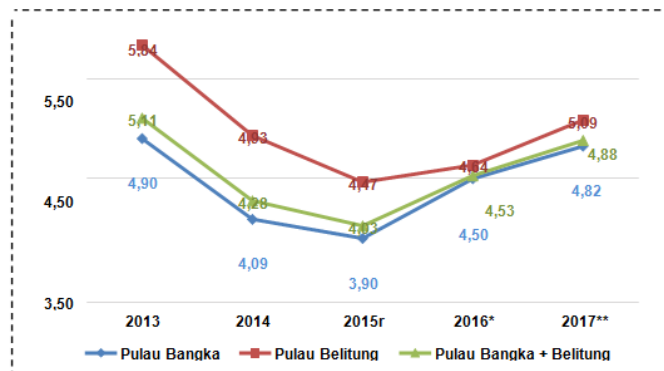
RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Pulau Bangka, Pulau Belitong dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian global yang semakin membaik pasca krisis yang sempat terjadi tahun 2013 mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas lokal seperti timah, karet dan kelapa sawit.

Apabila dilihat secara spasial, pola pertumbuhan ekonomi antara Pulau Bangka, Pulau Belitong dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat sejalan. Pada tahun 2013, perekonomian Pulau Bangka tumbuh 4,90 persen, dan terus melambat hingga pada tahun 2015 menjadi 3,90 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 perekonomian Pulau Bangka kembali membaik menjadi 4,50 persen dan 4,82 persen. Sementara perekonomian Pulau Belitong yang pada tahun 2013 tumbuh 5,84 persen juga mengalami perlambatan hingga pada tahun 2015 menjadi 4,47 persen dan kemudian membaik di tahun 2016 dan 2017 menjadi 4,64 persen dan 5,09 persen. Hal tersebut tentunya berdampak pada total PDRB 7 kabupaten/ kota yang pada tahun 2013 tumbuh 5,11 persen dan semakin melambat dari tahun ketahun hingga pada tahun 2015 menjadi 4,03 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 perekonomian total Kepulauan Bangka Belitung kembali membaik menjadi 4,53 persen dan 4,88 persen.

Grafik 4.1.

Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Bangka, Pulau Belitong
dan Pulau Bangka-Belitung (persen), 2013-2017



Catatan: r Angka revisi
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sumber:

Angin segar datang dari produsen dalam negeri, PT Timah Tbk, yang menyatakan adanya target peningkatan volume produksi dan penjualan. Optimisme ini didasari oleh menguatnya tren harga timah sejak tahun 2016 yang lalu. Selain itu, diperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan dari pasar dunia untuk komoditas timah ini karena sebelumnya sempat mengalami pembatasan produksi dalam rangka misi penyelamatan lingkungan.

Optimisme sektor pertambangan dan penggalan di tahun 2017 ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian Kabupaten Belitong Timur. Karena, net ekspor perdagangan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi

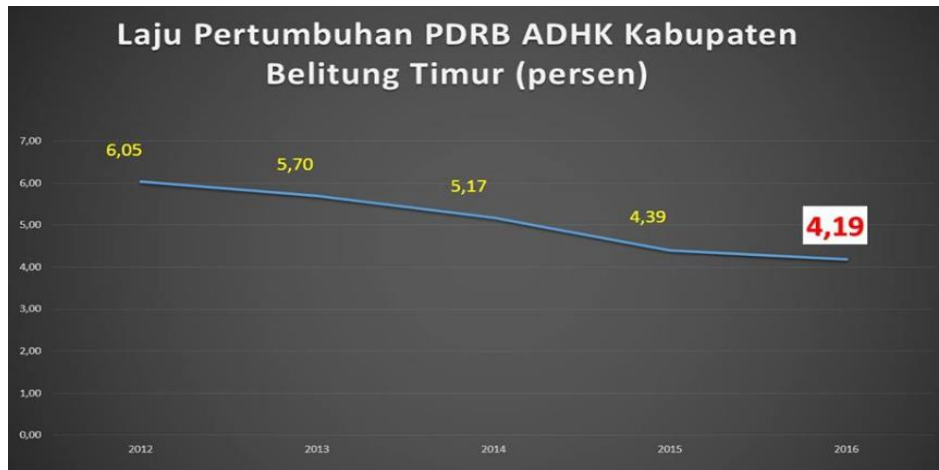


RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

di Kabupaten Belitung Timur. Semua pihak berharap, kondisi pasar dunia akan stabil dan memiliki dampak positif ke produsen komoditas ekspor seperti Kabupaten Belitung Timur.

Grafik 4.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur

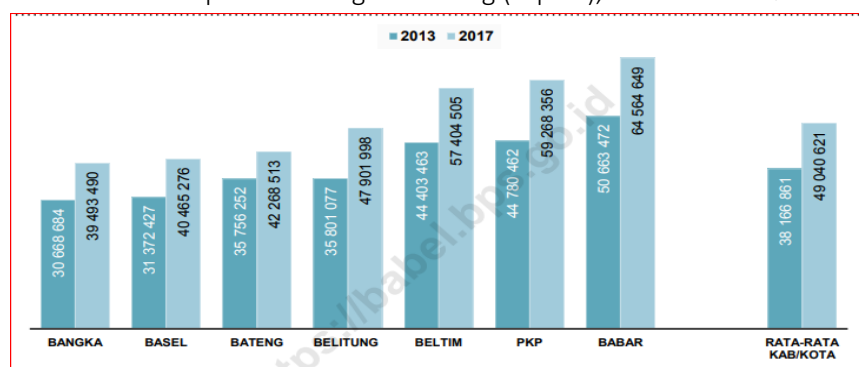


Sumber: BPS, 2018

Pada tahun 2017, PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar Rp49,04 juta. Nilai ini naik 6,17 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meningkat sebesar 28,49 persen, dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 6,93 persen. Jika dibandingkan antar pulau, PDRB per kapita ADHB di Pulau Belitung pada tahun 2017 sebesar Rp51,76 juta lebih tinggi dibandingkan di Pulau Bangka yang sebesar Rp48,30 juta. Masing-masing meningkat sebesar 31,73 persen dan 27,57 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dengan rata-rata peningkatan di Pulau Belitung lebih tinggi dibandingkan Pulau Bangka yaitu 7,67 persen untuk Pulau Belitung dan 6,72 persen untuk Pulau Bangka.

Grafik 4.3.

PDRB per Kapita Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (rupiah), 2013 dan 2017





RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Jika kita mengamati besaran PDRB kabupaten/kota, sebanyak 3 kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita diatas rata-rata pada tahun 2017, yakni Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan besarnya PDRB ADHB per kapita yang ada, Kabupaten Bangka Barat adalah kabupaten yang memiliki PDRB per kapita tertinggi di Pulau Bangka maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2013 hingga 2017. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp64,56 juta. Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PDRB per kapitanya menempati urutan ke-2 dengan nilai sebesar Rp59,27 juta. Sebagai ibu kota provinsi, dengan jumlah penduduk sebagai pembagi cukup tinggi diiringi dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, menghasilkan PDRB per kapita yang tinggi juga. Urutan terbesar ke-3 ditempati oleh Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp57,40 juta. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Belitung Timur adalah yang paling kecil, namun karena jumlah penduduknya juga yang paling sedikit sehingga menghasilkan PDRB per kapita yang tinggi.

4.2.4. PERUMAHAN

Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Belitung Timur sangat tinggi, mengingat masih banyaknya penduduk yang belum memiliki rumah yang layak ditempati serta kepemilikan pemukiman yang belum tertata. Pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang belum tinggal dirumah layak huni karena rendahnya keterjangkauan mereka untuk membangun maupun membeli rumah.

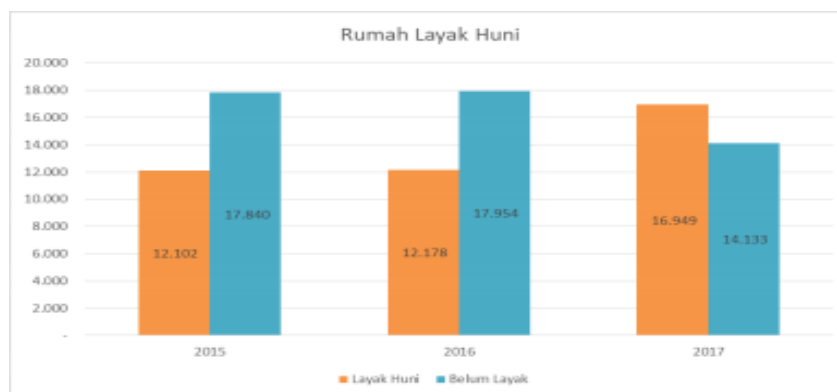
Pada tahun 2017 terdapat jumlah rumah layak huni di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 16.949 rumah dari 31.282 rumah terbangun, meningkat sebanyak 4.771 rumah dari sebelumnya berjumlah 12.178 rumah di tahun 2016. Perubahan yang cukup besar ini mempengaruhi rasio rumah layak huni dari 40,4 persen di tahun 2016 menjadi 54,2 persen pada tahun 2017.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 4.4.

Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2015-2017

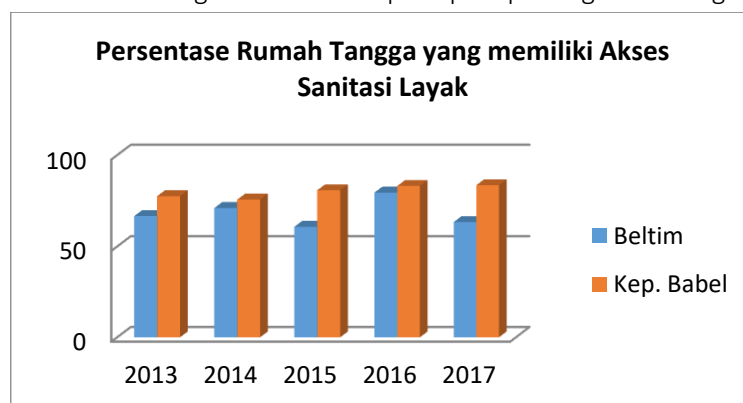


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur, 2018

Pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat juga harus memperhatikan akses air minum dan sanitasi layak. Pada Tahun 2016 Kabupaten Belitung Timur menduduki peringkat terendah dalam penggunaan sanitasi layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Persentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak di Kabupaten Belitung Timur sebesar 63,56% di bawah rata-rata provinsi sebesar 79,66% dan Nasional 67,8%. Selama Tahun 2011-2014 rumah tangga di Kabupaten Belitung Timur yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, (Gambar 4.6). Jumlah rumah tangga dengan kelayakan sanitasi di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan berada diatas rata-rata provinsi pada tahun 2014, yaitu sebesar 71,06%. Sementara itu jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2011-2014 hanya mengalami sedikit peningkatan dari 10,51 persen menjadi 12,90 persen dan masih jauh dibawah rata-rata Nasional.

Grafik 4.5.

Persentase Rumah Tangga Layak Sanitasi
Kab. Belitung Timur Terhadap Prop. Kep. Bangka Belitung



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur, 2018



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tantangan terbesar dalam meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi di Kabupaten Belitung Timur adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun pendanaan, serta penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Serta, belum terdapat kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat di lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk pengelolaan air limbah domestik (baik *grey water* maupun *black water*) yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup tapi hanya sebatas retribusi pelayanan sedot wc saja.

Indikator lain dalam pembangunan perumahan sanitasi dan air minum adalah berkurangnya kawasan kumuh, dan penerangan rumah tangga dengan listrik PLN. Tahun 2017 teridentifikasi 4 desa yang memiliki kawasan kumuh, meskipun luasannya berkurang dari tahun sebelumnya, jumlah desa ini mengalami peningkatan dimana tahun 2016 teridentifikasi sejumlah 3 desa. Untuk luasannya berkurang dari 124,56 ha (SK Bupati No 188.45-609 tahun 2014 tanggal 11 September 2014) menjadi 55,78 ha (SK Bupati No 188.45-400 tahun 2018 tanggal 20 April 2018)

Tabel 4.1.

Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Belitung Timur

No	Lingkup Administrasi			Luas (ha)	Legalitas lahan	prioritas
	Kecamatan	Desa	RT			
1	Manggar	Baru 1 Baru 2	001,002,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014,017,019,020,021,022,023,024,031,032	28,90	legal	
2	Gantung	Lenggang		3,4	legal	
		Gantung	018,019,020,021,022,023	13,86	legal	
		Selinsing		9,62	legal	
Luas Total				55,78		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur, 2018

Dari 4 desa yang menjadi lokasi permukiman kumuh, satu desa yaitu Desa Baru termasuk kedalam Desa Penanganan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan program nasional sebagai upaya nasional dalam melakukan pengurangan luasan kumuh di Indonesia. Program Kotaku ini telah dilaksanakan dari tahun 2016 sehingga pengurangan luasan kumuh di Desa Baru cukup signifikan. Namun yang perlu



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah kedepan yaitu pelaksanaan pengurangan luasan kumuh di 3 Desa yang terdapat di Kecamatan Gantung yaitu Desa Gantung, Desa Lenggang dan Desa Selinsing, hal ini dikarenakan selain tidak menjadi wilayah penanganan dalam Program Kotaku juga karena belum adanya program khusus dari daerah yang ditujukan untuk pengurangan luasan kumuh di wilayah tersebut.

Pada tahun 2017 persentase rumah tangga dengan penerangan listrik PLN sebesar 32.063 rumah tangga dengan daya terpasang pembangkit sebesar 18.080 kW dan kapasitas tersambung sebesar 54.243 kVA. Untuk Sedangkan untuk daya terpasang pembangkit tenaga listrik (PLTD) sebesar 8.700 kW dengan jumlah pelanggan 11.700 RT. Hal ini masih perlu untuk lebih di tingkatkan lagi guna menjamin investasi di Kabupaten Belitong Timur.

4.5. ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Penetapan pembangunan sektor unggulan di Kabupaten Belitong Timur sudah tertuang pada peraturan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014 – 2034, kawasan strategis di Kabupaten Belitong Timur diantaranya sebagai berikut:

1. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Industri Air Kelik (KIAK), Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang, Pelabuhan Dendang, Kawasan Kota Terpadu Mandiri, Pelabuhan Terpadu Teluk Asam, Pelabuhan Perikanan Pantai Manggar, Kawasan Wisata Terpadu sepanjang Pantai Nyiur Melambai - Kuale Tambak - Burung Mandi, Kawasan Pengembangan Hatchery perikanan laut dan wisata bahari di Kecamatan Manggar, Kawasan Pengembangan Energi PLTU Kecamatan Damar, dan Kawasan Marina Bandoeng River, Kawasan Wisata Pantai Punai, dan Kawasan Minapolitan;
2. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Desa Wisata Sejuta Pelangi di Desa Lenggang Kecamatan Gantung, dan Kawasan Pelestarian Budaya Gunung Samak dan Gusong Cine; dan
3. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seluas 1.116 (seribu seratus enam belas) yaitu Kawasan Gunung Kematang Panjang (Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar), Kawasan Gunung Malang Lepau (Kecamatan Damar), dan Kawasan Gunung Mangkro dan Gunung Badau (Kecamatan Dendang).

Dalam penetapan kawasan pengembangan sektor unggulan sebagaimana disebutkan diatas untuk pengembangan sektor unggulannya sebagai berikut:

4.5.1 PENGEMBANGAN SEKTOR PANGAN

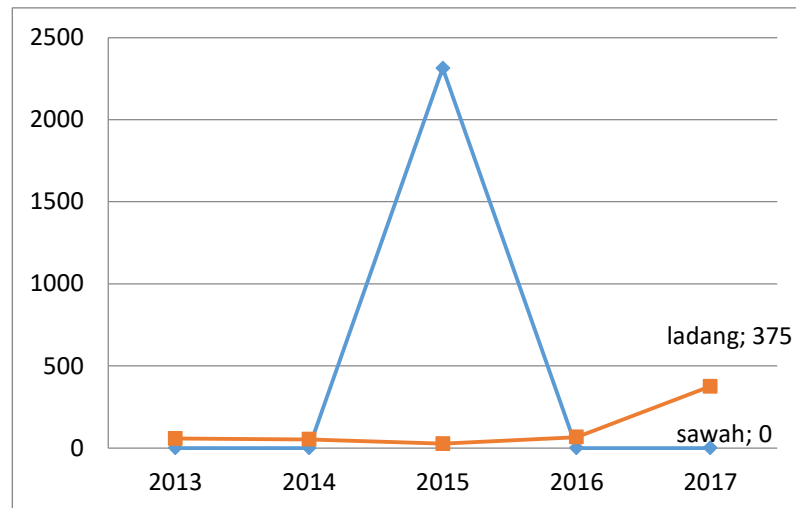
Terwujudnya kedaulatan pangan merupakan salah satu cerminan kemandirian ekonomi nasional. Pertanian di Kabupaten Belitong Timur tidak memproduksi tanaman bahan pangan dalam jumlah yang tinggi. Komoditas hasil pertanian di Kabupaten Belitong Timur adalah padi, lada, karet dan sawit. Untuk sumber pangan lokal di Kabupaten Belitong Timur banyak didatangkan dari luar daerah. Walaupun hasil produksinya kecil, produksi padi di Kabupaten Belitong Timur tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan mencapai sekitar 3.876 ton. Peningkatan produksi ini disebabkan karena



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

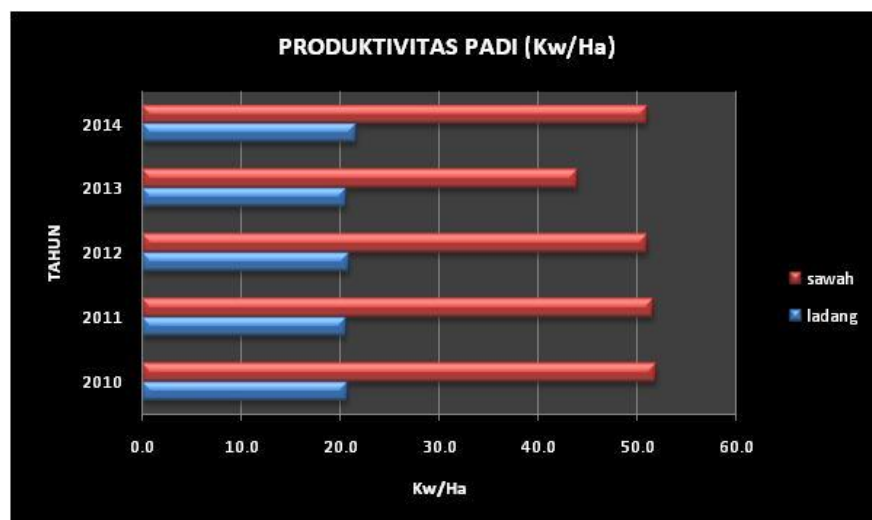
bertambahnya luas panen seluas 1.370 hektar. Produksi padi pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu dari 5.009,25 ton menjadi 5.961,6 ton. Dari sisi target yang ingin dicapai maka produksi padi pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 4.6.
Jumlah Produksi Padi



Sumber: Bappeda Belitong Timur, 2018

Grafik 4.7.
Jumlah Produktivitas Padi

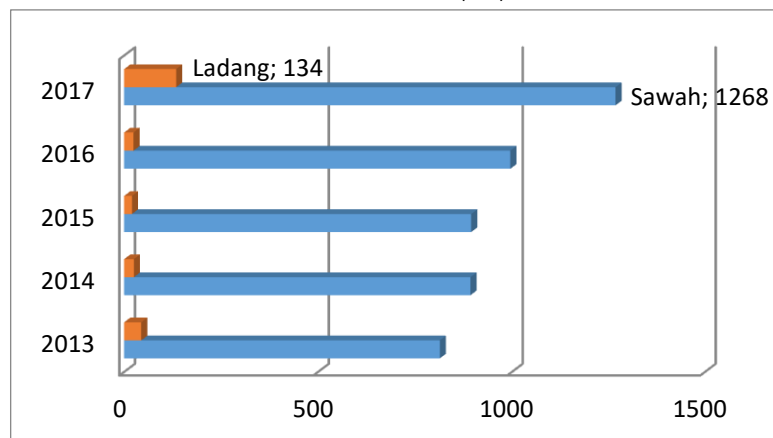


Sumber: Bappeda Belitong Timur, 2015



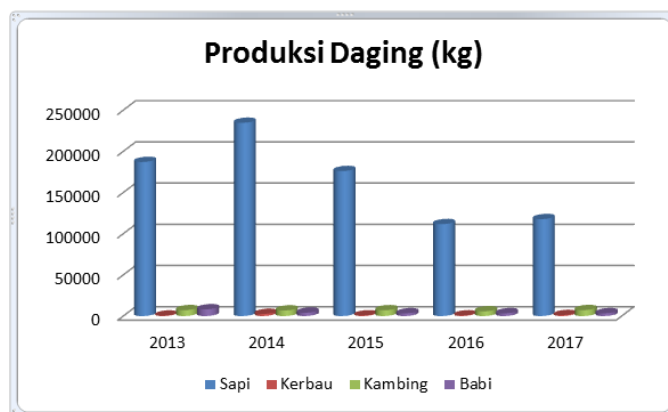
RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 4.8.
Luas Panen Padi (Ha)



Sumber: Bappeda Belitong Timur, 2018

Grafik 4.9.
Jumlah Produksi Daging



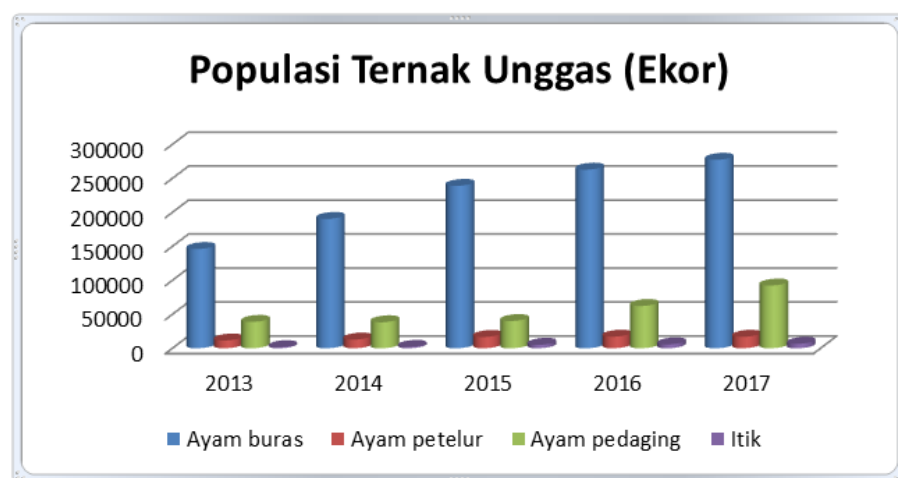
Sumber: Bappeda Belitong Timur, 2018

Kebutuhan bahan pangan selain bersumber dari pertanian juga berasal dari peternakan. Kebutuhan konsumsi daging di Kabupaten Belitong Timur dipenuhi dari produksi sendiri dan pasokan daerah lain. Produksi daging di Kabupaten Belitong Timur didominasi oleh daging sapi yang terus mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya. Namun apabila dilihat dari jumlah populasi ternak besar menurut jenis ternak terjadi penurunan jumlah populasi, dimana untuk ternak sapi untuk tahun 2017 berjumlah 1.625 ekor menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 1.633 ekor, ternak kambing 306 ekor menurun dari Tahun 2016 yang berjumlah 576 ekor. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun produksi daging ternak besar meningkat, namun terjadi penurunan jumlah populasi ternak tersebut.

Peternakan unggas di Kabupaten Belitong Timur selama kurun waktu 2010 – 2017 tidak mengalami peningkatan populasi dan produksi yang signifikan, kecuali untuk populasi ayam petelur terjadi penurunan populasi yang cukup signifikan dari jumlah 17.128 ekor pada tahun 2016 menurun menjadi 6.157 ekor pada tahun 2017. Hal ini perlu menjadi

perhatian dari OPD terkait. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya untuk tahun 2017 jumlah populasi ternak unggas terbesar di belitung timur adalah ayam pedaging/broiler yaitu sebanyak 1.106.570 ekor pada tahun 2017, jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah produksi dan populasi unggas didukung adanya pemberian bantuan bibit ternak, bantuan pakan ternak, serta pengobatan ternak dari pemerintah. Kebutuhan pakan ternak di Kabupaten Belitung Timur sebagian besar didatangkan dari luar pulau Belitung karena produksi bahan utama pembuat pakan ternak masih terbatas.

Grafik 4.10.
Populasi Ternak Unggas



Sumber: Bappeda Belitung Timur, 2014

Untuk mencapai kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Kabupaten Belitung Timur diperlukan adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha tani tanaman pangan, usaha tani hortikultura, usaha peternakan, dan usaha perkebunan yang mampu memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan peternak. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah lahan pertanian dengan memfungsikan kembali lahan sawah untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai sesuai dengan musimnya. Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan khususnya padi terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan cukup luas setiap tahunnya.

Dalam pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah petani perlu mendapatkan pembinaan dan didampingi secara intensif baik dalam pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen oleh penyuluh pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi. Dinas Pertanian dan Pangan perlu memantau penyaluran benih dan pupuk agar lahan sawah bisa diusahakan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Petani juga perlu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam mengakses sarana produksi, sumber permodalan, pengolahan hasil serta pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahterannya.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.

4.5.2 PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

Sektor pariwisata dan industri merupakan salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan pariwisata dan industri harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam tatanan pariwisata berkelanjutan harus memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat. Secara aspek lingkungan, pariwisata berkelanjutan memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses ekologi dan turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata. Secara ekonomi, pariwisata berkelanjutan memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada semua *stakeholder* dengan adil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan (membuka usaha) dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta membantu mengurangi kemiskinan. Dan dilihat secara sosial budaya pariwisata berkelanjutan menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang mereka bangun, dan berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar-budaya. Arah kebijakan dalam pengembangannya sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

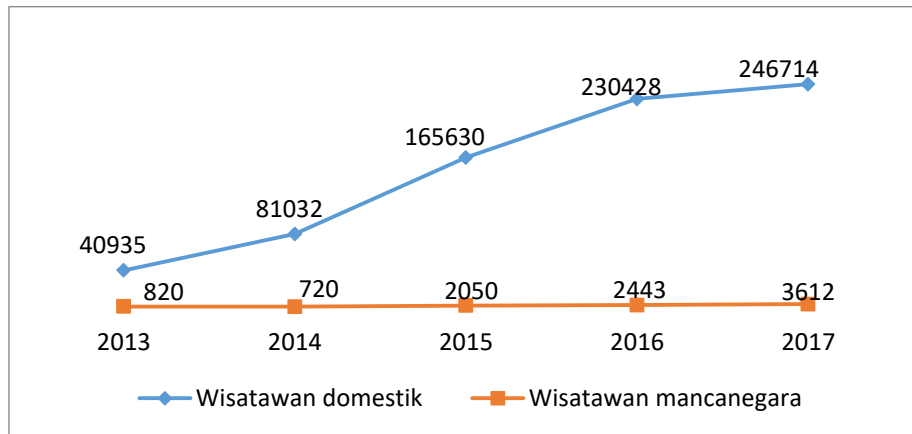
Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Belitong Timur masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Meskipun Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Kabupaten Belitong Timur meningkat setiap tahunnya. Jumlah tamu asing dan domestik pada hotel dan akomodasi lain di



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan terutama pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya.

Grafik 4.11.
Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Domestik dan Mancanegara (Orang)



Sumber: Disbudpar, 2018(diolah) >>> tabel di update

Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi *multiplier effect* untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Potensi wisata di Kabupaten Belitung Timur diantaranya meliputi wisata sastra, wisata sejarah dan wisata pantai/bahari, salah satu objek wisata pantai yang menarik di Kabupaten Belitung Timur adalah Kawasan Punai dan sekitarnya, Pantai Nyiur Melambai, Pantai Serdang, Kawasan Wisata Warung Kopi Manggar, Gubok Berangsai/Bukit Samak, Bukit Pangkuan, Kawasan Wisata Sastra Desa Lenggang, Museum Kata, Pantai Burung Mandi dan masih banyak potensi pantai lainnya yang belum dimanfaatkan untuk pariwisata.

Rata-rata lama tinggal wisatawan baik domestik maupun mancanegara juga merupakan masih menjadi tantangan bagi daerah untuk meningkatkannya. Hal ini dikarenakan selain Kabupaten Belitung Timur yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belitung yang menyebabkan banyaknya fasilitas wisata juga belum adanya konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Belitung Timur yang membuat para wisatawan untuk bermalam di Kabupaten Belitung Timur.

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan melalui pengembangan destinasi pariwisata, kelembagaan dan industri pariwisata yang bertujuan untuk mempersiapkan destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan mengembangkan promosi dan pemasaran wisata melalui fasilitasi dan kerjasama promosi serta meningkatkan kunjungan wisatawan.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

4.5.3 PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI

Untuk sektor industri, salah satu tantangan yang dihadapi industri saat ini adalah daya saing yang rendah di pasar nasional. Faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing tersebut antara lain adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu.

Potensi sumberdaya alam Kabupaten Belitung Timur yang besar dalam perekonomian harus berimbang pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti keberadaan industri rakyat. Sektor industri usaha mikro, kecil, dan menengah perannya tidak begitu besar dalam pembentukan ekonomi Kabupaten Belitung Timur, namun berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di Kabupaten Belitung Timur. Pelatihan dan ketrampilan berwirausaha perlu diberikan kepada masyarakat di wilayah ini untuk meningkatkan daya saing saat memiliki industri mandiri.

Grafik 4.12.

Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja di IKM



Sumber: Disnakerkop Belitung Timur, 2018 (diolah)

Pada tahun 2017 jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Belitung Timur berjumlah 2.545 unit. Sesuai dengan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-345 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tentang sentra industri kecil dan menengah Kabupaten Belitung Timur, strategi perwilayahan pengembangan industri unggulan daerah dan lokasinya adalah sebagai berikut:

1. Sentra Industri Kecil dan Menengah anyaman di Desa Nyuruk Kecamatan Dendang
2. Sentra Industri Kecil dan Menengah anyaman di Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang
3. Sentra Industri Kecil dan Menengah rajutan di Desa Burung Mandi Kecamatan Damar
4. Sentra Industri Kecil dan Menengah rajutan di Desa Sukamandi Kecamatan Damar
5. Sentra Industri Kecil dan Menengah pembuatan minyak kelapa di Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

6. Sentra Industri Kecil dan Menengah kerupuk ikan di Desa Baru Kecamatan Manggar
7. Sentra Industri Kecil dan Menengah keripik sukun di Desa Lalang Kecamatan Manggar
8. Sentra Industri Kecil dan Menengah dodol di Desa Lalang Kecamatan Manggar

Pada tahun 2017 Kabupaten Belitong Timur telah melaksanakan seleksi dan Forum Koordinasi OVOP (FKO OVOP). Kriteria produk OVOP diantaranya adalah merupakan unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah, unik, memiliki keaslian dan kekhasan budaya lokal, bermutu baik dan berpenampilan menarik, berpotensi pasar domestik dan ekspor serta diproduksi secara konsisten dan berkesinambungan.

Terdapat 3 (tiga) produk Kabupaten Belitong Timur yang masuk seleksi OVOP tingkat nasional yaitu 1). Perusahaan Mandiri Usaha Bersama (produk pilus ikan); 2). Perusahaan KM Bungan Seroja (produk peletek telur cumi); 3). Perusahaan mandiri (produk kerupuk ikan tenggiri). Permasalahan/kendala yang dihadapi yaitu penggunaan mesin/peralatan masih manual sehingga berpengaruh terhadap produktivitas dan mutu produk, kemasan produk pangan dan kerajinan masih sederhana, pemasaran produk hanya mengandalkan wisatawan yang berkunjung ke Belitong Timur serta keterbatasan kemampuan dalam memenuhi permintaan konsumen dan kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.

4.2.5. PEMERINTAHAN

1. Belum semua unit-unit pelayanan PD memiliki Pedoman Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Melaksanakan evaluasi Pelayanan Publik (Pengukuran IKM) secara berkala :

Penyusunan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik dengan tahapan :

- Penyusunan rancangan
- Pembahasan rancangan Standar Pelayanan dengan masyarakat melalui FGD
- Penetapan Standar Pelayanan
- Penerapan Standar Pelayanan dan internalisasi
- Penetapan Maklumat layanan sebagai janji dan komitmen penyelenggara layanan

Dari tahapan tersebut tergambar bahwa proses penyusunan Standar Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan urusanya melalui 5 tahapan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam penyelesaian penyusunan Standar Pelayanan Publik, antara lain :

- a. Masih rendahnya kesadaran pengampu jabatan bahwa Standar Pelayanan Publik merupakan hal wajib untuk disusun dengan melibatkan masyarakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
- b. Rendahnya respon pengampu jabatan dari Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Standar Pelayanan Publik ;
- c. Tidak semua Opd menganggarkan kegiatan FGD Standar Pelayanan sebagai proses kesepakatan standar pelayanan dengan masyarakat.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk menghasilkan Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) pelaksanaannya di fokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan langsung secara periodik sebagai bahan evaluasi dan hasil nilai indek digunakan sebagai dasar evaluasi SPP (Standar Pelayanan Publik).

2. Belum semua unit aktifitas PD telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP (Standar Oprasional Prosedur):

Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan ;
- Penilaian Kebutuhan SOP AP ;
- Pengembangan SOP AP ;
- Penerapan SOP AP ;
- Monitoring dan Evaluasi SOP AP.

Dari 5 (lima) tahapan tersebut yang paling menjadi kendala adalah di pada proses persiapan dan penilaian kebutuhan SOP yang prosesnya adalah megindetifikasi kebutuhan SOP Berdasarkan Tugas dan fungsi pada tiap Oganisasi Perangkat Daerah, yang informasinya harus disusun oleh pengampu jabatan , pada kenyataannya para pengampu jabatan tidak antusias untuk menguraikan tahapan-tahapan proses pekerjaan pad bidang tugasnya untuk di jadikan Standar Oprasional Prosedur bahkan sebagian belum mampu menguraikan tugas dan fungsinya dan output (hasil kerja) apa saja yang harus di dihasilkan dari jabatan yang di dudukinya.

4. belum optimalnya kinerja pemerintahan karena masih adanya inefesiensi dan inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
5. belum optimalnya pelaksanaan *e-Gov*
6. belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima
7. masih perlunya penguatan dan pembinaan SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
8. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah.
9. Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana pemerintahan daerah.
10. Belum memadainya kualitas SDM dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
11. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
12. Belum memadainya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif.
13. Perlunya pemeliharaan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum
14. Belum optimalnya ketersediaan produk hukum daerah dan penegakan supremasi hukum.
15. Dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilu presiden, dan pilkukada.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

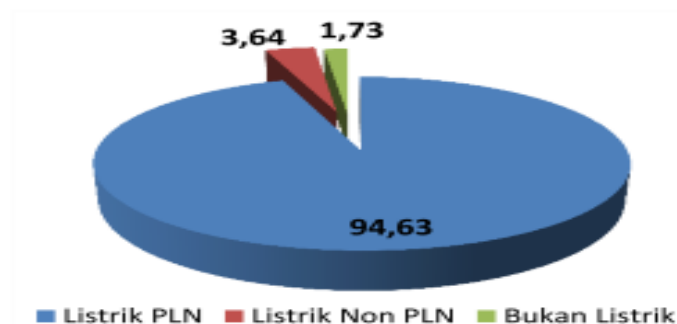
4.5.4 PENGEMBANGAN SEKTOR ENERGI

Sumberdaya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum dominan karena masih didominasi penggunaan bahan bakar fosil.

Rumah tangga di Kabupaten Belitong Timur hampir semuanya sudah menggunakan sumber penerangan listrik (baik PLN maupun non PLN seperti tenaga surya dan mesin diesel) dengan persentase sebesar 98,27 persen, sisanya 1,73 persen menggunakan sumber penerangan bukan listrik. Sementara itu rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 94,63 persen dan Non PLN sebesar 3,64 persen. Penyediaan kebutuhan listrik selain untuk meningkatkan ketersediaan listrik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat membantu kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitong Timur.

Grafik 4.13.

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama (Persen), 2017





RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

4.5.5 PENGEMBANGAN SEKTOR KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Perhubungan laut merupakan transportasi yang strategis bagi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, secara khusus Belitong Timur yang strategis secara geografis, yaitu berada di Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I), serta berada di antara tiga pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Keterhubungan tersebut diharapkan dapat mendukung transportasi sabuk tengah Indonesia, dan akan menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan sehingga menimbulkan dampak ekonomi signifikan terhadap seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah kunjungan kapal dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas suatu pelabuhan karena data jumlah kunjungan kapal di suatu pelabuhan menunjukkan tingkat kesibukan aktivitas pelabuhan. Semakin rendahnya aktivitas pelabuhan, biaya logistik semakin tinggi sehingga biaya operasional kurang efisien. Transportasi laut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan menekan angka inflasi karena disparitas harga antarwilayah makin rendah.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan wilayah teritorial perairan yang luas, sekaligus memiliki potensi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Belitong Timur. Sebagian besar produksi perikanan di Kabupaten Belitong Timur merupakan perikanan tangkap laut (91%) dengan hasil produksi tahun 2015 sebesar 38.037 ton.

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya, dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis perikanan dan kelautan ini antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di desa pesisir, pelarangan aktivitas tambang konvensional disekitar perairan (pantai), dan pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk perikanan dipasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari produk olahan ikan.

Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4.6. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 2016 - 2021

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang memiliki kriteria yaitu: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berakumulasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Berdasarkan gambaran kinerja pembangunan wilayah, analisis pembangunan, serta identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, maka isu-isu strategis Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan pada sektor primer masih besar
2. Pertumbuhan ekonomi didorong konsumsi dan investasi
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
5. Kualitas belanja pemerintah daerah kurang mendukung pertumbuhan
6. Daya dukung lingkungan berkurang
7. Belum optimalnya penerapan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menciptakan sinergisitas dan keharmonisan dalam pembangunan

4.6.1 KETERGANTUNGAN PADA SEKTOR PRIMER MASIH BESAR

Salah satu sektor primer andalan di Kabupaten Belitung Timur adalah pertambangan timah, bijih timah adalah sumber daya alam yang paling bernilai di kabupaten ini, bahkan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Perusahaan BUMN terbesar untuk penambangan bijih timah adalah PT Timah Tbk, dan satu perusahaan asing, PT Koba Tin. BUMN ini juga memiliki areal KP darat di Pulau Belitung seluas 126.455 ha atau $\pm$ 30% dari luas daratan Pulau Belitung. Untuk PT Koba Tin, diberikan sekitar 41.000 Ha. Di luar area kuasa pertambangan PT Timah Tbk dan Kontrak Karya (KK) PT Koba Tin, kegiatan penambangan juga diusahakan oleh pengusaha tambang inkonvensional dan masyarakat secara tradisional yang juga memberikan nilai ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Selain pertambangan, komoditas primer pertanian yang menjadi unggulan di Belitung Timur adalah tanaman perkebunan memiliki peran yang strategis untuk menunjang pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Komoditas unggulan perkebunan rakyat yang telah dikembangkan secara turun-temurun adalah lada dan karet. Sedangkan kelapa sawit merupakan komoditas baru dan banyak diusahakan oleh perusahaan besar swasta.

Struktur perekonomian Belitung Timur tahun 2014 didominasi oleh kontribusi sektor pertanian sebesar 25,6%, sektor industri pengolahan sebesar 19,2%, sektor pertambangan dan penggalan sebesar 18,80% dan sektor perdagangan sebesar 10,07%.

Tabel 4.2.
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017

LAPANGAN USAHA	Distribusi Persentase(%)	
	ADHB	ADHK
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,65	24,50
2. Pertambangan dan Penggalan	18,80	17,60
3. Industri Pengolahan	19,29	20,02
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	0,02	0,02



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

LAPANGAN USAHA		Distribusi Persentase(%)	
		ADHB	ADHK
6.	Konstruksi	7,82	7,91
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,07	10,85
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,88	1,98
9.	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	2,30	2,33
10.	Informasi dan Komunikasi	1,06	1,21
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	0,48
12.	Real Estat	2,91	2,83
13.	JasaPerusahaan	0,26	0,27
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,53	5,70
15.	Jasa Pendidikan	2,16	2,54
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	1,31
17.	Jasa lainnya	0,51	0,53

Sumber: BPS, 2013

Sektor pertanian perlu dikembangkan untuk mendukung kedaulatan pangan sesuai dengan agenda prioritas pembangunan. Upaya mencapai kedaulatan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian sekaligus menggerakkan usaha industri pengolahan hasil- hasil pertanian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja. Di Kabupaten Belitong Timur terdapat potensi pengolahan lada dan karet dengan luas penanaman yang terus bertambah

4.6.2 PERTUMBUHAN EKONOMI DIDORONG KONSUMSI DAN INVESTASI

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2010-2014 adalah pada konsumsi rumah tangga dan ekspor. Peningkatan penjualan komoditas pertambangan timah dan hasil perkebunan (lada putih) pendorong utama peningkatan ekspor di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Jika terjadi penurunan produksi, hal ini tentunya akan berdampak langsung terhadap kinerja ekspor impor dan mempengaruhi perekonomian daerah. Perekonomian daerah memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor produk sektor primer pertambangan dan perkebunan. Besarnya kontribusi ekspor, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah mendominasi struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan investasi yang dinilai dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah kontribusinya berada di bawah ketiga sektor tersebut. Investasi berperan meningkatkan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi.

Tabel 4.3.
Struktur PDRB kabupaten Belitung Timur Menurut Pengeluaran tahun 2017

Lapangan Usaha	Kontribusi (%)	
	ADHB	ADHK2010
1. Konsumsi RumahTangga	53,55	48,03
2. KonsumsiLembaga Nirlaba	0,71	0,64
3. Konsumsi Pemerintah	13,30	11,88
4. PMTB	30,48	25,50
5. PerubahanStok	1,79	1,82
6. Ekspor	57,38	65,09
7. Impor	57,21	52,96
Total	100	100

Sumber: BP Kabupaten Belitung TimurS, 2018

Sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan investasi perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi wilayah, meliputi sumber daya alam dengan kandungan timah, dan gas, kandungan mineral logam, sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu daerah.

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apa bila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Rasio pinjaman terhadap simpanan diKep.BangkaBelitung nilainya kurang dari satu, menunjukkan tingginya tabungan yang dihimpun bank dibandingkan pinjaman yang disalurkan. Hal ini juga menunjukkan banyaknya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif melalui fungsi intermediasi perbankan. Rasio tersebut berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0.92. Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*costoffund*) di daerah. Dengan kondisi tingginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antar daerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah adalah mengembangkan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

Tabel 4.4.

Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2014

Wilayah	Posisi Pinjamandi Bank Umum dan BPR (MilyarRp)	Posisi Simpanandi bankUmum dan BPR (MilyarRp)	Rasio Pinjaman terhadap simpanan	Rasio PMTB terhadap simpanan
Kep Bangka Belitung	13.981,39	14.317,78	0,98	0,91
Nasional	3.707.916,34	4.013.816,57	0,92	0,85

Sumber : BPS, 2014

Rasio investasi terhadap simpanan masyarakat di wilayah Kep. Bangka Belitung sebesar 0,91 (RasioPMTB<1), menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Provinsi Kep. Bangka Belitung bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat.

4.6.3 RENDAHNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DAERAH

Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Kabupaten Belitong Timur dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 571,27km. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Kerapatan jalan yang menunjukkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 4.5.
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2013

No	Provinsi	PDRB Per Kapita (ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	136.407,58	1068,36
2	D.I Yogyakarta	21.873,72	136,19
3	Bali	29.666,48	133,20
4	Jawa Tengah	22.858,32	90,56
5	Jawa Timur	32.703,80	89,03
6	Banten	29.961,85	70,84
7	Sulawesi Selatan	27.760,65	69,98
8	Jawa Barat	24.961,05	69,55
9	Kepulauan Riau	76.753,11	60,40
10	Lampung	23.648,76	56,85
11	Sumatera Barat	25.963,24	54,57
12	Sumatera Utara	30.482,59	50,41
13	Sulawesi Utara	27.804,68	49,14
14	Nusa Tenggara Barat	15.351,54	43,52
15	Bengkulu	19.631,40	43,06
16	Gorontalo	18.627,37	42,76
17	Nusa Tenggara Timur	10.742,42	42,10
18	Sulawesi Barat	19.211,14	41,93
19	Aceh	23.199,49	39,86
20	Sulawesi Tenggara	27.898,88	31,32
21	Sulawesi Tengah	25.316,32	30,38
22	Kalimantan Selatan	27.230,80	30,16
23	Kep Bangka Belitung	32.868,70	29,62
24	Riau	72.331,01	28,27
25	Jambi	36.088,33	26,65
26	Maluku Utara	16.872,31	19,39
27	Sumatera Selatan	30.627,55	18,71
28	Maluku	14.230,08	16,61
29	Kalimantan Timur	123.985,45	12,13
30	Kalimantan Barat	22.707,79	10,42
31	Kalimantan Tengah	30.220,97	9,93
32	Papua Barat	59.156,84	8,40
33	Papua	38.891,99	5,26

Sumber: BPS(2012), Statistik Kementerian PU (2013)



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Tabel 4.6.
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Belitong Timur
Tahun 2010 – 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
PDRB per Kapita	7.003.866,00	7.249.231,00	7.533.223,00	7.747.969,00
Kerapatan Jalan	22,85	22,83	22,83	22,79

Sumber: BPS (2014), diolah

Dengan membandingkan kerapatan jalan antarprovinsi dengan tingkat pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan. Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Kepulauan Bangka Belitung relatif tidak lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan pendapatan perkapita tinggi, posisi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

Dengan membandingkan kerapatan jalan antarprovinsi dengan tingkat pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan. Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Kepulauan Bangka Belitung relatif tidak lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan pendapatan perkapita tinggi, posisi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

Berdasarkan asumsi diatas, maka diperoleh gambaran bahwa tingkat kerapatan jalan di Belitong Timur masih di bawah rata-rata kerapatan jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal tersebut menunjukkan bahwa Belitong Timur mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

Secara kualitas, kondisi jalan di Belitong Timur terdapat sekitar 15% yang belum beraspal. Jalan beraspal tentu memiliki daya dukung berkali lipat dibandingkan jalan non aspal terhadap pergerakan barang antardaerah. Jika dilihat dari kondisi permukaannya, maka masih terdapat 23% jaringan jalan dalam kondisi tidak baik (sedang atau rusak). Kondisi jaringan jalan daerah ini relatif baik bila dibandingkan dengan rata-rata daerah lain. Namun demikian untuk memacu investasi dan daya saing daerah, kualitas jalan wilayah masih perlu ditingkatkan. Kondisi jaringan jalan yang rusak tentu mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh distribusi barang, mempercepat kerusakan armada transportasi, dan meningkatkan risiko kerusakan komoditas selama pengiriman, dan sebagai akibatnya biaya distribusi menjadi tinggi.

Grafik 4.14.

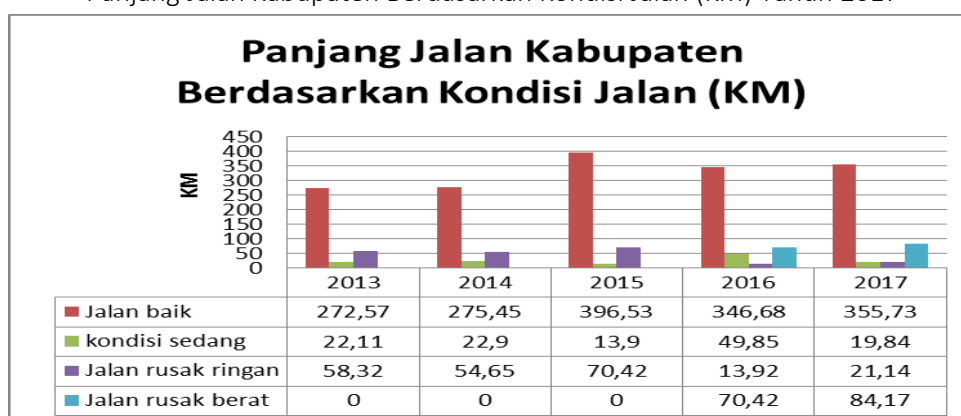
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan (KM) Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Belitong Timur, 2018

Grafik 4.15.

Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan (KM) Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Belitong Timur, 2018

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2017 mencapai 1:98,81 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak kurang lebih 99 kendaraan. Dari tabel dibawah ini dapat tergambar terdapat trend kenaikan jumlah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

kendaraan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat yang seharusnya disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi lainnya.

Tabel 4.7.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kab. Belitong Timur
Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan	501,4	566,4	694,3	898,76	898,76
Jumlah Kendaraan	73.256	78.885	83.746	83.147	88.814
Rasio	1 : 146,1	1 : 139,3	1 : 120,6	1 : 92,5	1 : 98,81

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

4.6.4 RENDAHNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Faktor kualitas sumber daya manusia tidak bisa diabaikan dalam upaya percepatan pertumbuhan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memfasilitasi inovasi dan kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian. Kemajuan teknologi inilah yang menjadi penentu keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitong Timur yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai IPM dari tahun 2011 – 2014, walaupun demikian nilai tersebut masih berada dibawah rata-rata provinsi. Angka IPM Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat 14 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 74,29. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 70,88 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,03 tahun pada tahun 2014, indikator ini berada diatas rata-rata provinsi. Rata-rata lama sekolah Belitong Timur meningkat dari 6,96 menjadi 7,89 di tahun 2014, akan tetapi kenaikan tersebut masih berada dibawah rata-rata provinsi. Perbaikan kualitas angkatan kerja merupakan modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alam setempat.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 4.16.
Perbandingan Nilai IPM Belitong Timur Terhadap
Prop.Kep. Bangka Belitung



Sumber : BPS, 2014

4.6.5 KUALITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KURANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN

Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah menuntut peran pemerintah dalam pembiayaan prasarana publik. Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2015, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 44 persen, sementara porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung besarnya 16 persen.

Kondisi diatas dirasa belum cukup untuk memacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM secara tepat dan berkelanjutan, dengan alokasi alokasi anggaran yang memadai.

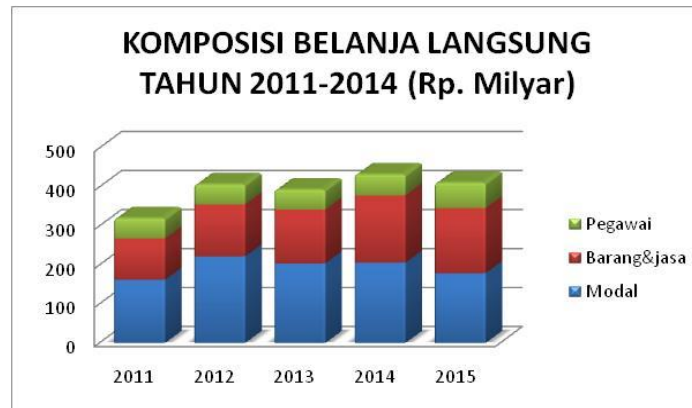
Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 4.17.

Komposisi Belanja Langsung Tahun 2011 - 2014



Sumber : BPS, 2014

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tercapainya realisasi keuangan di Belitong Timur adalah karena belum terlaksananya sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan SKPD, dan beberapa faktor alam yang menghambat pelaksanaan program kegiatan. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya dalam pengelolaan kegiatan, sehingga akan meningkatkan nilai sisa lebih perhitungan (SiLPA) dalam pengelolaan keuangan. Proporsi dana otonomi khusus Belitong Timur dialokasikan untuk berbagai belanja pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah, mencakup pembangunan infrastruktur, pembangunan sektoral, belanja modal dan belanja rutin dalam memacu pembangunan di Kabupaten Belitong Timur dan berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di Belitong Timur.

4.6.6 DAYA DUKUNG LINGKUNGAN BERKURANG

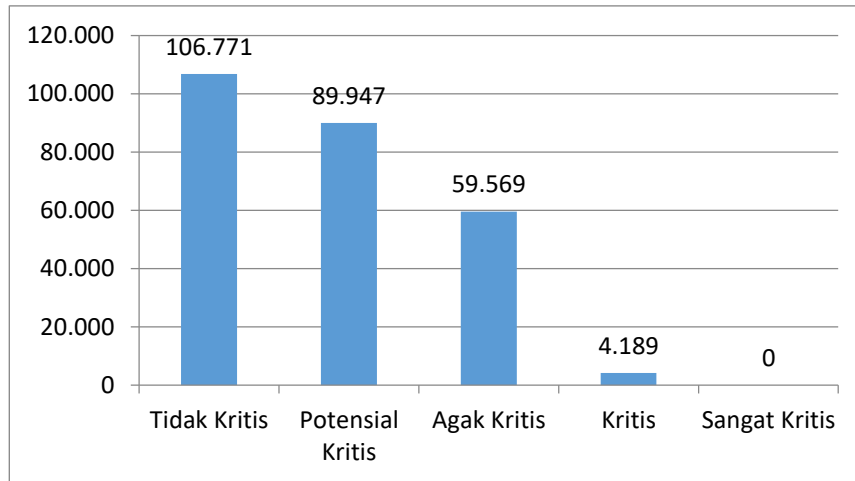
Pertumbuhan daerah yang berbasis pada sektor pertambangan ternyata diiringidengan memburuknya daya dukung lingkungan. Terlebih lagi dengan perkembangan pesat perkebunan sawit dalam sepuluh tahun terakhir. Tingkat kerusakan lingkungan diBelitong Timur berada diatas rata-rata provinsi, yang pada tahun 2012 mencapai 43% sedangkan provinsi presentase lahan kritisnya adalah sebesar 40% (Gambar 4.15). Karakter wilayah kepulauan menuntut upaya ekstra untuk mempertahankan daya dukung lingkungan mengingat kerentanannya yang relatif tinggi.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Grafik 4.18.

Luas Kelas Lahan (Ha) Belitong Timur Tahun 2018



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur, 2018 (diolah)

Rendahnya daya dukung lingkungan mengancam keberlanjutan pertumbuhan, apalagi untuk perekonomian yang masih bertumpu pada sumberdaya alam dan jasa lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas yang meliputi penurunan tingkat kesuburan tanah, menurunnya keragaman hayati, meningkatnya kerentanan bencana alam, pendangkalan daerah aliran sungai, dan berkurangnya kualitas sumberdaya air wilayah. Diperlukan rehabilitasi dan konservasi sepanjang daerah aliran untuk mencegah sedimentasi berlebihan dan mengurangi risiko bencana tanah longsor dan banjir.

4.6.7 BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN KONSEP KETATAPEMERINTAHAN YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN SINERGISITAS DAN KEHARMONISAN DALAM PEMBANGUNAN

Pada RPJMN 2015-2019, yang khusus membahas tentang Agenda pembangunan Bidang, terdapat permasalahan dan isu strategis terkait pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dimana penerapan *good governance* belum mampu : Pertama, membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kedua, belum mampu memperkuat kapasitas pemerintahan (birokrasi) dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Walau disatu sisi, pemerintah tetap berupaya untuk mendorong perluasan partisipasi warga melalui skema kolaborasi akan semakin ditingkatkan, salah satunya dengan menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana terdapat peran khusus pejabat pemerintah di segala level dalam mengelola informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hanya saja, rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID, keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi, sarana dan prasarana komunikasi, diakui oleh pemerintah masih menjadi kendala utama efektifitas PPID.

Terakhir, Perlunya adanya perbaikan orientasi pelayanan dari OPD yang memberikan pelayanan publik, dari yang semula berorientasi pada pengelola pelayanan menjadi



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan (*customer driven government*). Pada paradigma pertama masyarakat sebagai pengguna layanan tidak memiliki kemampuan apapun untuk berkreasi, mereka harus tunduk kepada pengelola layanan. Seharusnya pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang lebih supportif dimana lebih menfokuskan diri pada kepentingan masyarakat pengguna layanan, pengelola harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani bukan dilayani.

Di Kabupaten Belitong Timur, dapat dicermati dan dimaknai permasalahan dan isu strategis terkait pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, **pertama**, tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, lengkap dan utuh kepada publik baik melalui media resmi Pemerintah Daerah atau media komunikasi publik yang lain tentang pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil pengawasan maupun evaluasi. Pemerintah Daerah Belitong Timur belum pernah membentuk forum komunikasi publik termasuk menunjuk PPID serta belum ada pusat layanan pengaduan/keluhan masyarakat seperti : *crisis center*, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website, serta cara lain yang bersifat cepat tanggap atas masalah masyarakat. Selain itu, pelibatan secara resmi partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan hanya terbatas pada proses usulan perencanaan melalui musrenbang, belum sampai pelibatan pada proses pengawasan dan evaluasi yang formal dan legal dimana sampai saat ini belum tersedia juga mekanisme dan ketentuan legal tentang tatacara publik dalam menyampaikan aspirasi atas kebijakan publik yang dirumuskan dan dilaksanakan Pemerintah Daerah Belitong Timur. Seperti pembuatan kotak saran, pembentukan forum konsultasi dan komunikasi, jaring aspirasi dll.

Kedua, Perubahan kebijakan pembangunan strategis daerah tanpa melalui prosedur dan tatacara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tanpa memperhatikan skala prioritas yang tercantum dalam perencanaan strategis. Selain itu, belum ada akuntabilitas publik seperti dalam urusan akuntabilitas administrasi, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik (antara eksekutif dengan legislatif) yang menggunakan sistem dan prosedur tertentu yang menguraikan tentang tanggungjawab atas kinerja seperti: SOP, NSPK atau konsekwensi atas dilakukannya kontrak layanan (*citizen charter*) termasuk dalam hal ini akuntabilitas profesional (seperti penggunaan metode dan tehnik tertentu). Masih belum ada kebijakan yang terstruktur untuk penegakan hukum atau komitmen dalam memberantas kriminalisasi kewenangan baik pencegahan, penindakan serta peningkatan kesadaran hukum antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seperti misalnya kebijakan bantuan hukum bagi ASN yang di duga melakukan KKN dalam pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah Daerah, termasuk dalam hal ini, MoU dengan pihak kejaksaan dan kepolisian. Kemudian juga belum ada pengukuran dan penilaian secara legal-formal atas efisiensi pengelolaan dana pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dan efektifitas yang dirumuskan antara target/sasaran dengan output, misal: penilaian pengelolaan anggaran seluruh belanja Pemerintah Daerah hanya dilihat dari daya serap.

Ketiga, Belum dijalankannya kebijakan penataan ASN secara objektif seperti kesesuaian antara jabatan dengan spesifikasi pendidikan dan formasi kepegawaian, pembagian tupoksi antara struktural dan fungsional, pemberdayaan jabatan fungsional



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

serta diklat peningkatan kompetensi yang efisien dan efektif (seperti pembebanan pembiayaan serta jenis dan bentuk diklat yang dibutuhkan). Selanjutnya dalam penataan organisasi juga dalam hal pembagian tugas, fungsi, urusan dan tanggungjawab antar struktur di unit OPD dan antar OPD belum jelas, tumpang tindih dan in-efisien. Salah satu contohnya adalah tidak berfungsinya jabatan struktural dalam penilaian kinerja akibat tatacara penilaian yang serupa dengan penilaian jabatan fungsional, rangkap jabatan struktural dengan jabatan fungsional terutama dalam pengelolaan anggaran karena syarat, ketentuan, prosedur dan tatacara pengadaannya yang terpisah, masih terdapat pengeluaran tambahan pembayaran bagi pejabat struktural yang rangkap jabatan fungsional dalam bentuk pembayaran honor/tunjangan tersendiri diluar gaji dan tunjangan tetap jabatan.

Keempat, dalam kaitan hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta belum ada kemitraan yang jelas antara Pemerintah Daerah dengan swasta, misal dalam hal pengadaan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok sehingga kebutuhan tersebut terjamin jumlah/pasokan, kualitas serta harga. Masuknya pihak swasta melalui pola kemitraan dengan pemerintah memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

- 1) Tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan;
- 2) Pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat;
- 3) Berkurangnya beban (APBN/APBD) dan risiko pemerintah;
- 4) Infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak;
- 5) Kinerja layanan masyarakat semakin baik;
- 6) Akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan;
- 7) Swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial.

Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan. Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolaannya. Pendekatan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan dimana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha/layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusifitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak; sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan dan teknologi baru.

Kelima, belum kuatnya komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan baik kesenjangan kesejahteraan maupun perlakuan, seperti misalnya: kesenjangan pemenuhan kebutuhan dasar antara masyarakat di daratan dengan di kepulauan



BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5. VISI

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka visi Kabupaten Belitong Timur yang merupakan tahap keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Belitong Timur tahun 2005-2025, yaitu pada periode 2016-2021 adalah :

***“BELITUNG TIMUR YANG MAJU DAN UNGGUL DENGAN BERBASISKAN
SUMBERDAYA LOKAL”***

Makna dari visi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belitong Timur Maju dan Unggul
 - Maju dari sisi kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*);
 - Unggul dari sisi kuantitas dan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat; dan
 - Unggul sebagai daerah yang bersendikan akar budaya.
2. Berbasis Sumber Daya Lokal, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
 - Pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan dikelola dan dikoordinasikan oleh SDM lokal;
 - SDA yang berasal dan diproduksi dari lokal.



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

5.2.MISI

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi ini juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis dalam pembangunan daerah berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik itu secara internal maupun eksternal.

Dengan memperhatikan visi serta mencermati latar belakang di atas, maka misi yang disusun adalah :

1. Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitong Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan.
2. Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan.
3. Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitong Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

Makna dari masing-masing misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menerapkan Konsep Ketatapemerintahan yang Baik antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Belitong Timur Agar Tercipta Sinergitas dan Keharmonisan Dalam Pembangunan.

Hal ini merujuk pada percepatan peningkatan indeks reformasi birokrasi yang mana digambarkan menjai 8 program, yaitu:

- a. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
 - b. Penataan Jumlah dan Distribusi ASN
 - c. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
 - d. Peningkatan Profesionalisasi ASN
 - e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
 - f. Peningkatan Pelayanan Publik
 - g. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
 - h. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
 - i. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
2. Membangun dan Membenahi Infrastruktur Daerah untuk Memperbaiki Kinerja Pelayanan.

Paradigma pemerintahan kontemporer menuntut peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan mediator, serta fungsi pelayanan. Peran yang lainnya ada pada masyarakat serta pihak swasta /pelaku usaha. Oleh karena itu, intisari dari *New Public Manajemen* (NPM) maupun *New Public Service* (NPS) di arahkan sebesar-besarnya pada



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

penguatan peran diatas. Diantara faktor-faktor yang menentukan gagal atau berhasilnya peran pemerintah, maka peran infrastruktur daerah menjadi sangat dominan. Ketersediaan prasarana jalan darat, laut, udara, pelabuhan, air, listrik dan lain- lain infrastruktur menjadi tuntutan yang sangat mendasar agar dapat dipenuhi oleh pemerintah di level manapun.

3. Diversifikasi Lapangan Usaha dan Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Kabupaten Belitong Timur untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Hidup, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan.

Maju mundurnya perekonomian, secara sederhana di lihat dari penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, diversifikasi usaha dan lapangan pekerjaan menjadi agenda wajib yang harus dipertahankan dan dipertahankan oleh pemerintahan dimanapun dan di level manapun.

5.3.TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Belitong Timur yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah,.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Menerapkan Konsep Ketatapemerintahan yang Baik Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Belitong Timur agar Tercipta Sinergitas dan Keharmonisan dalam Pembangunan, misi ini memiliki tujuan :

- a. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi; dan
 - 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

Misi 2: Membangun dan Membenahi Infrastruktur Daerah untuk Memperbaiki Kinerja Pelayanan, misi ini memiliki tujuan :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) Persentase akses sanitasi masyarakat;
 - 2) Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh;
 - 3) Akses air bersih masyarakat;
 - 4) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik; dan
 - 5) Jumlah lintas pelayanan angkutan.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah, dengan sasaran:
 - 1) Pembangunan infrastruktur kawasan strategis;
 - 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - 3) Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW; dan
 - 4) Penanggulangan dan penanganan bencana.

Misi 3: Diversifikasi Lapangan Usaha dan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Belitong Timur untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Hidup, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, misi ini memiliki tujuan :

- a. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman;
 - 2) Menurunnya angka pengangguran;
 - 3) Meningkatnya nilai investasi daerah;
 - 4) Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat local; dan
 - 5) Penurunan laju inflasi.
- b. Penurunan Angka Kemiskinan, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat; dan
 - 2) Perlindungan Sosial.
- c. Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah;
 - 2) Meningkatnya angka usia harapan hidup;
 - 3) Meningkatnya ketahanan keluarga; dan
 - 4) Pengendalian Penduduk.

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja sasaran dengan target-target terukur. Kinerja sasaran disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun yaitu dari tahun 2016 – 2021, target-target sasaran diuraikan pada tabel dibawah ini:



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

Tabel 5. 1 Tabel Indikator Kinerja Sasaran di Misi 1

Misi 1 : Menerapkan Konsep Ketatapemerintahan yang Baik Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Belitong Timur agar Tercipta Sinergitas dan Keharmonisan dalam Pembangunan

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Professional		Indeks tata kelola Pemerintah		-	-	-	-	B	B	B	B
	1.1.1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	-	-	50,62	51,5	52,5	55	60	60
			Jumlah unit kerja yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Unit kerja	0	0	0	0	0	2	2	2
	1.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan Keuangan Daerah	Kategori	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021

Tabel 5. 2 Tabel Indikator Kinerja Sasaran di Misi 2

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung Timur

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.1	Meningkatkan Infrastruktur Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		<i>Indeks Kualitas Infrastruktur</i>	Skala (1-10)	-	-	-	-	5	6	7	7
2.1.1		Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase akses sanitasi masyarakat	Persen	-	64,58	62,88	81,02	82	89	100	100
			Luas kawasan kumuh	Hektar	-	120,61	118,27	29,66	24,66	14,66	0	0
			Rasio Rumah Layak Huni	Persen	39,69	38,21	51,82	53	56	58	61	61
			Akses air bersih masyarakat	Persen	-	74,41	81,12	83,89	93,66	100	100	100
			Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	79,86	80,64	78,10	70,1	80	80	80	80
			Jumlah lintas pelayanan angkutan	Trayek	-	6	2	0	5	7	7	7



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.2.	Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Pemerintah Daerah		<i>indeks kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah</i>	Skala (1-10)	-	-	-	-	5	6	7	7
	2.2.1	Pembangunan infrastruktur kawasan strategis	Persentase kawasan strategis daerah dengan infrastruktur baik	Persen	16	16	16	16	16	16	33,3	33,3
	2.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	64,255	64,45	64,65	64,85	64,85
	2.2.3	Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW	Ketaatan tata ruang	Persen	-	65	65	65	75	80	85	85
	2.2.4	Penanggulangan dan penanganan bencana	Tingkat resiko bencana	Persen	-	-	-	-	50	75	90	90



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2016-2021

Tabel 5. 3 Tabel Indikator Kinerja Sasaran di Misi 3

Misi 3 : Diversifikasi Lapangan Usaha dan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Belitang Timur untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Hidup, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,4	4,25	4,85	4,85 - 5,0	5,0 – 5,25	5,25 – 5,5	5,5 – 6,0	5,5 – 6,0
	3.1.1	Meningkatnya PDRB sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persentase Kontribusi PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen		25,85	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
			Persentase Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Persen		19,05	20,02	20,03	20,04	20,05	20,06	20,06
			Persentase Kontribusi PDRB Sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen		2,32	2,33	2,34	2,35	2,36	2,37	2,37



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2016-2021

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	3.1.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,55	2,29	2,62	1,5	1,45	1,40	1,35	1,35
	3.1.3	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Rupiah	514.219.561.226	211.051.631.894	472.918.842.124	475.283.436.335	478.848.062.107	483.636.542.728	489.681.999.512	2.400.368.882.806
	3.1.4	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat lokal	Indeks daya saing UMKM	kategori	-	-	-	-	cukup	cukup	cukup	cukup
			Indeks daya saing Koperasi	kategori	-	-	-	-	cukup	cukup	cukup	cukup
	3.1.5	Penurunan laju inflasi	Laju Inflasi	Persen	-	3,02	3,61	3,5	2,4-4,5	2,4-4,5	2,4-4,5	2,4-4,5
3.2	Penurunan Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,33	6,99	6,81	7,06	6,71	6,35	6	6
	3.2.1.	Meningkatnya PDRB perkapita	Angka PDRB Perkapita	Ribua Rupiah		54.145	57.405	60.665	63.925	67.185	70.445	70.445
	3.2.2.	Perlindungan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial kesehatan	Persen		75	80	85	90	95	98	98



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2016-2021

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial	Persen		75	61	64	78	82	90,8	90,8
			Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial pendidikan (KIP dan Beasiswa)	Persen	23,55	33,42	24,21	82,23	84	87	90	90
3.3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup		Angka IPM		68,83	69,30	69,57	-	69,97	70,2	70,3	70,3
			Indeks Ketahanan Keluarga	Kategori	-	-	-	-	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
	3.3.1	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,91	7,95	8	8,05	8,15	8,18	8,20	8,20
	3.3.2	Meningkatnya usia harapan hidup	Usia harapan hidup	Tahun	71,23	71,30	71,37	71,45	71,52	71,61	71,68	71,68
	3.3.3	Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	Kategori	-	-	-	-	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
	3.3.4	Pengendalian Penduduk	Pengendalian penduduk	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

Tabel 5. 4 Tabel Persandingan Sasaran RPJPD dengan RPJMD Perubahan

RPJPD 2005 - 2025	RPJMD-P 2016 - 2021
1. Terwujudnya Kabupaten Belitong Timur yang unggul di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan investasi di sektor industri Rp 548.162,15 juta, jasa Rp 1.856.038,66 juta, pariwisata Rp 71.922,81 juta, kelautan Rp 760.350,54 juta, dan pertanian Rp 38.009,89 juta; pengembangan klaster industri dan rantai nilai produk berbagai jenis industri, jasa, pariwisata, kelautan, pertanian, dan produk-produk lainnya.	1. Meningkatnya PDRB sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman (3.1.1) 2. Meningkatnya PDRB perkapita (3.2.1)
2. Terwujudnya kapabilitas masyarakat Kabupaten Belitong Timur yang tinggi ditandai dengan terwujudnya percepatan nilai-nilai luhur budaya dan agama, pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan, pengembangan inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (2.1.1) 2. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (3.3.1) 3. Meningkatnya usia harapan hidup (3.3.2) 4. Meningkatnya ketahanan keluarga (3.3.3) 5. Pengendalian Penduduk (3.3.4)
3. Terwujudnya pelayanan pemerintah Kabupaten Belitong Timur yang prima ditunjukkan dengan terwujudnya dinamisasi pelaksanaan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> , fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem kepegawaian daerah, penanggulangan KKN, serta terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.	1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi (1.1.1) 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (1.1.2)



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

RPJPD 2005 - 2025	RPJMD-P 2016 - 2021
4. Terwujudnya suasana Kabupaten Belitong Timur yang tertib, aman, damai, adil, dan demokratis diindikasikan dengan terwujudnya dinamisasi penegakan supremasi hukum dan penegakan HAM, penurunan tingkat kriminalitas, konflik sosial, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan keyakinan dan partisipasi masyarakat..	1. Penanggulangan dan penanganan bencana (2.2.4) 2. Perlindungan Sosial (3.2.2)
5. Terwujudnya stabilitas pembangunan ekonomi makro daerah yang berkelanjutan diindikasikan dengan terwujudnya upaya-upaya lanjutan menggenjot pertumbuhan ekonomi dan penciptaan dinamisasi pembangunan ekonomi makro daerah secara berkelanjutan.	1. Menurunnya angka pengangguran (3.1.2) 2. Meningkatnya nilai investasi daerah (3.1.3) 3. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat local(3.1.4) 4. Penurunan laju inflasi (3.1.5)
6. Terwujudnya prasarana dan sarana wilayah yang berdaya saing ditandai dengan terwujudnya pemerataan jaringan dan aksesibilitas prasarana dan sarana wilayah, baik transportasi, listrik, air bersih, perumahan dan permukiman, maupun telematika	1. Pembangunan infrastruktur kawasan strategis (2.2.1) 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (2.2.2) 3. Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW (2.2.3)



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

Tabel 5. 5 Tabel Persandingan Sasaran RPJMD dengan RPJMD Perubahan

Misi 1 : Menerapkan Konsep Ketatapemerintahan yang Baik Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Belitong Timur agar Tercipta Sinergitas dan Keharmonisan dalam Pembangunan

RPJMD 2016 - 2021	PERSANDINGAN	RPJMD-P 2016 - 2021
1. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien (1.1.1) 2. Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan, pemantapan ideologi negara, politik dan demokrasi (1.1.2) 3. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (1.1.3) 4. Meningkatnya pelayanan publik (1.1.4) 5. Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat dengan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan di level daerah (1.1.5) 6. Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dan swasta (1.1.6) 7. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government (1.1.7)		1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi (1.1.1) 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (1.1.2)



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2016-2021

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitang Timur

RPJMD 2016 - 2021	PERSANDINGAN	RPJMD-P 2016 - 2021
- Memperlancar akses dari dan ke kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten serta mendorong percepatan dan peningkatan kualitas layanan perdesaan (2.1.1) - Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (2.1.2) - Pembangunan infrastruktur kawasan strategis (2.2.1) - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (2.2.2) - Terwujudnya sistem transportasi baik darat ajpun laut dalam rangka pelayanan distribusi barang dan penumpang (2.2.3) - Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW (2.2.4)		- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (2.1.1) - Pembangunan infrastruktur kawasan strategis (2.2.1) - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (2.2.2) - Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW (2.2.3) - Penanggulangan dan penanganan bencana (2.2.4*)

*) Sasaran Baru



RPJMD Perubahan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2016-2021

Misi 3 : Diversifikasi Lapangan Usaha dan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Belitang Timur untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Hidup, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan

RPJMD 2016 - 2021	PERSANDINGAN	RPJMD-P 2016 - 2021
1. Meningkatnya produksi pertanian, perikanan (3.1.1)		1. Meningkatnya PDRB sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman (3.1.1)
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara (3.1.2)		
3. Meningkatnya nilai investasi daerah (3.1.3)		2. Menurunnya angka pengangguran (3.1.2)
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat (3.2.1)		3. Meningkatnya nilai investasi daerah (3.1.3)
5. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat lokal (3.2.2)		4. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat lokal (3.1.4)
6. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan kesenjangan sosial (3.3.1)		5. Penurunan laju inflasi (3.1.5)
7. Menurunnya angka pengangguran (3.3.2)		6. Meningkatnya PDRB perkapita (3.2.1)
8. Meningkatnya pelayanan pendidikan (3.4.1)		7. Perlindungan Sosial (3.2.2)
9. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (3.4.2)		8. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (3.3.1)
10. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk (3.5.1)		9. Meningkatnya usia harapan hidup (3.3.2)
11. Terjaminnya perlindungan perempuan dan anak (3.5.2)		10. Meningkatnya ketahanan keluarga (3.3.3)
12. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya (3.5.3)		11. Pengendalian Penduduk (3.3.4)
13. Meningkatnya pemuda berprestasi melalui peran serta aktif kepemudaan dan olahraga (3.5.4)		



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Strategi pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro yang ada di daerah. Oleh karena itu, sebelum masuk pada strategi pembangunan, perlu diuraikan dan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021

VISI : BELITUNG TIMUR YANG MAJU DAN UNGGUL DENGAN BERBASISKAN SUMBERDAYA LOKAL

Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan		
1.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	1.1.1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi ASN 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Peningkatan Profesionalisasi ASN 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITANG TIMUR Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi
	1.1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi 2. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah dan optimalisasi sumber pendapatan daerah lainnya secara akuntabel
Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitang Timur		
2.1. Meningkatkan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitang Timur	2.1.1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan, sanitasi, dan lingkungan yang sehat 2. Pembangunan infrastruktur jalan yang baik
2.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah	2.2.1. Pembangunan infrastruktur kawasan strategis	Penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pemerintah yang memadai sampai ke tingkat desa
	2.2.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 2. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
	2.2.3. Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW	Peningkatan kinerja perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien
	2.2.4. Penanggulangan dan penanganan bencana	Mengurangi dampak bencana
Misi 3 : Diversifikasi Lapangan Usaha dan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Belitang Timur untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Hidup, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan		
3.1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	3.1.1. Meningkatnya PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman	1. Meningkatkan usaha kepariwisataan 2. Meningkatkan produk pangan daerah 3. Meningkatkan produk unggulan daerah
	3.1.2. Menurunnya angka pengangguran	Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pencari kerja
	3.1.3. Meningkatnya nilai investasi daerah	1. Mempermudah proses perizinan 2. Optimalisasi potensi investasi daerah
	3.1.4. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat lokal	Penguatan lembaga dan usaha, kapasitas sumberdaya UKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi UKM



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3.1.5. Penurunan Laju Inflasi	Mengembangkan potensi-potensi sumber daya lokal
3.2. Penurunan Angka Kemiskinan	3.2.1. Meningkatnya PDRB Perkapita	Meningkatkan ekonomi masyarakat lokal
	3.2.2. Perlindungan Sosial	Memberi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan
3.3. Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup	3.3.1. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	Peningkatan mutu pendidikan
	3.3.2. Meningkatnya usia harapan hidup	Perencanaan dan program kesehatan masyarakat melalui germas dan program lainnya
	3.3.3. Meningkatnya Angka Pengeluaran Perkapita	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat
	3.3.4. Meningkatnya ketahanan keluarga	Peningkatan kualitas keluarga
	3.3.5. Pengendalian Penduduk	Optimalisasi pengendalian penduduk yang efektif

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Revitalisasi manajemen pemerintahan, kesejahteraan rakyat (pengentasan Kemiskinan), pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Sinergitas pembangunan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder	Peningkatan kualitas/ keterampilan sumberdaya manusia lokal dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Pelayanan Dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong investasi dan peningkatan produktivitas barang jasa	Menumbuhkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi kerakyatan	Peningkatan kualitas hidup dan kebutuhan hidup manusia yang adil dan beradab



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR Tahun 2016-2021

Tabel 6.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2016-2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Misi 1 : Menerapkan Konsep Ketatapemerintahan yang Baik Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar Tercipta Sinergitas dan Keharmonisan dalam Pembangunan																		
		Tujuan 1.1 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Professional																		
		Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi																		
		Kesehatan																		
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Kelancaran Operasional Pelayanan Rumah Sakit	%	-	75	10.069.301.459,00	80,000	19.145.812.394	85,000	21.962.557.823	85,500	15.145.002.362	86,000	33.027.725.361	86,500	24.381.612.648	86,500	113.662.710.588	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Kepuasan Pelanggan	%	-	73,48	20.258.000.000,00	77,650	33.324.904.596	80,880	27.718.453.474	83,350	25.899.444.205	85,020	23.424.892.518	86,720	24.048.368.919	86,720	134.416.063.712	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan sesuai Standar Rumah Sakit	%	0	100	560.166.000,00	100,000	457.350.000	100,000	0	100,000	128.000.000	100,000	577.180.000	100,000	316.920.000	100,000	1.479.450.000	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
		Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	%	-	100	167.967.572,00	100,000	0	100,000	0	100,000	188.277.092	100,000	232.879.392	100,000	197.947.483	100,000	619.103.967	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Beredarnya Makanan Yang Sehat DiLingkungan Masyarakat	%	94%	30	-	0,000	24.000.000	50,000	23.985.000	50,000	100.000.000	52,000	55.000.000	55,000	70.340.000	55,000	273.325.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	Persen	100	80	6.972.061.000,00	81,000	10.503.480.250	82,000	12.793.022.980	84,000	12.217.935.000	85,000	7.920.265.797	86,000	7.074.659.036	86,000	50.509.363.063	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	60	11.644.741.700,00	70,000	11.212.106.493	80,000	19.198.380.000	85,000	22.066.680.000	90,000	21.658.251.000	90,000	22.266.680.000	90,000	96.402.097.493	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	%	50	80	1.221.498.000,00	80,000	3.613.847.500	82,000	5.403.052.500	85,000	1.235.727.880	87,000	8.051.170.500	90,000	8.094.327.500	90,000	26.398.125.880	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Tersedianya obat dan vaksin di puskesmas	%	68	68	3.563.740.000,00	70,000	2.882.980.975	72,000	2.164.585.000	75,000	3.763.340.000	77,000	6.128.242.000	80,000	3.715.720.000	80,000	18.654.867.975	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh kesehatan dasar	Persen	50	80	-	82,000	99.857.500	85,000	100.700.000	87,000	315.850.000	90,000	134.140.000	95,000	151.500.000	95,000	802.047.500	Puskesmas Dendang
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas,Puskesmas Pembantu,Poskesdes/Polindes yang dilengkapi fasilitas kesehatannya	unit	100%	0	3.500.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	11,000	205.000.000	11,000	220.000.000	11,000	425.000.000	Puskesmas Dendang
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	Persen	50	80	37.200.000,00	82,000	18.000.000	0,000	0	87,000	132.500.000	90,000	232.500.000	92,000	255.500.000	92,000	638.500.000	Puskesmas Gantung
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/Poskesdes Yang Dilengkapi Fasilitas Kesehatannya	Unit	100%	0	235.000.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	150.000.000	12,000	130.000.000	12,000	130.000.000	8,000	410.000.000	Puskesmas Gantung
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	persen	50	80	7.500.000,00	82,000	116.600.000	85,000	30.000.000	87,000	270.185.000	90,000	264.000.000	92,000	290.000.000	92,000	970.785.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes yang dilengkapi fasilitas kesehatannya	Unit	80%	0	250.725.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	9,000	120.000.000	9,000	140.000.000	9,000	260.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	Persen	50	80	97.754.000,00	82,000	159.416.000	85,000	142.125.000	87,000	391.416.000	90,000	315.280.000	92,000	347.493.000	92,000	1.355.730.000	Puskesmas Manggar
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes yang dilengkapi fasilitas kesehatannya	Unit	80%	0	20.000.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	11,000	190.000.000	11,000	190.000.000	11,000	380.000.000	Puskesmas Manggar
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	Persen	50	80	18.980.000,00	82,000	133.014.000	85,000	0	87,000	134.139.900	90,000	147.553.890	92,000	157.434.934	92,000	572.142.724	Puskesmas Mengkubang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar	Persen	90	80	-	82,000	160.384.000	84,000	19.240.000	86,000	117.305.000	88,000	146.640.500	90,000	166.304.550	90,000	609.874.050	Puskesmas Simpang Pesak
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes yang dilengkapi Fasilitas Kesehatannya	Unit	90%	0	62.900.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	9,000	220.000.000	9,000	240.000.000	9,000	460.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar	Persen	50	80	-	82,000	198.009.000	85,000	20.000.000	87,000	50.000.000	90,000	219.000.000	92,000	233.000.000	92,000	720.009.000	Puskesmas Simpang Renggiang
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas,Puskemas Pembantu, Poskesdes/Polindes Yang Dilengkapi Fasilitas Kesehatannya	Unit	60%	0	115.000.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	6,000	80.000.000	6,000	80.000.000	6,000	160.000.000	Puskesmas Simpang Renggiang
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	Persen	-	0	560.166.000,00	14,000	509.407.000	28,000	842.545.000	57,000	160.000.000	85,000	476.130.000	100,000	545.000.000	100,000	2.533.082.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/Poskesdes Yang Dilengkapi Fasilitas Kesehatan	Unit	1	0	75.050.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	6,000	80.000.000	6,000	80.000.000	6,000	160.000.000	Puskesmas Mengkubang
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik																		
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat partisipasi peserta dalam peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	persen															Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan yang representatif	persen															Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pembinaan Ormas, LSM, OKP	Persentase pembinaan Ormas, LSM, OKP	persen															Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan	persentase															Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

6.6 Strategi dan Arah Kebijakan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program pendidikan politik masyarakat	persen		70	74327000	70,000	104.050.000	80,000	122.000.000	85,000	315.000.000	95,000	320.000.000	100,000	325.000.000	86,000	1.186.050.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Tingkat pengawasan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu	persen		80		0,000	785.605.000	85,000	0	85,000	900.000.000	60,000	500.000.000	90,000	100.000.000	90,000	2.285.605.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Tingkat ketercapaian kapabilitas aparaturnya dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik	persen		100		100,000	674.360.000	100,000	624.000.000	100,000	1.371.000.000	100,000	1.725.000.000	100,000	1.745.000.000	100,000	6.139.360.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Pengembangan dan Profesionalisme Kemampuan Aparatur Polisi Pamong Praja (POLPP)	Jumlah Anggota Pol PP mengikuti Magang, Gelar Pasukan, dan Jambore SATPOLPP	orang		30		50,000	162.925.000	75,000	274.932.927	125,000	377.000.000	150,000	400.000.000	200,000	420.000.000	600,000	1.634.857.927	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Persentase penegakan Perda	persen		0,8		0,450	341.242.000	1,000	472.532.000	0,400	395.443.238	0,350	2.057.775.000	0,500	1.709.275.000	0,540	4.976.267.238	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah tenaga Keamanan Lingkungan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Lingkungan Masyarakat	orang		314		0,000	0	390,000	1.696.500.000	390,000	3.380.099.000	390,000	4.285.000.000	390,000	4.590.000.000	390,000	13.951.599.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Lingkungan hidup																		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan	Persen	0%	0	-43100000	100,000	7.500.000	100,000	15.200.000	100,000	15.200.000	100,000	6.078.000	100,000	10.000.000	100,000	53.978.000	Gantung
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan	%	0	0	-43100000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	200.000.000	100,000	50.000.000	100,000	250.000.000	Dendang
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Persen	0	0	-43100000	100,000	0	100,000	0	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	35.000.000	100,000	95.000.000	Kelapa Kampit
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Persentase	0	0	-43100000	100,000	8.250.000	100,000	52.000.000	100,000	10.000.000	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	100,000	190.250.000	Mangga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	%	0	0	-43100000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	100.000.000	Simpang Pesak
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan	%	0	0	-43100000	100,000	8.000.000	100,000	8.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	166.000.000	Simpang Renggiang
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah	%	0	32	-43100000	34,000	2.491.875.000	45,260	4.485.983.000	49,000	2.901.357.000	53,080	4.820.000.000	56,590	4.820.000.000	56,590	19.519.215.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan dan Akses Informasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	persen	0	81,73	0	84,000	74.953.000	87,000	495.140.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	85,500	570.093.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Aturan legal formal penyelenggara n administrasi kependudukan	Jumlah	0	6	0	4,000	59.242.000	3,000	55.128.500	2,000	177.852.000	2,000	0	1,000	0	12,000	292.222.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	persen	0	83,4	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	530.000.000	100,000	535.000.000	100,000	1.065.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketertiban tata kelola administrasi kependudukan	persen	0	91,8	0	100,000	1.194.777.200	100,000	1.312.993.200	100,000	2.128.561.000	100,000	585.000.000	100,000	585.000.000	100,000	5.806.331.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan administrasi kependudukan	Persen	0	81,73	0	0,000	0	0,000	0	91,000	611.710.000	0,000	0	0,000	0	91,000	611.710.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	persen	0	79,57	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	87,500	170.000.000	90,000	180.000.000	90,000	350.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	persentase ketersediaan sarana prasarana yang mutakhir	persen	0	75	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	2.225.000.000	100,000	1.860.000.000	100,000	4.085.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penanaman Modal																		
		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan Perizinan	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tepat waktu	persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	70.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat perdesaan	Desa	39	329.449.000,00	39,000	437.397.000	39,000	780.786.000	39,000	897.190.000	39,000	920.204.000	39,000	921.321.000	39,000	3.956.898.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pesentase penyusunan dan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	Persen (%)	100	308.970.000,00	40,000	191.600.000	67,000	329.000.000	70,000	457.740.000	80,000	457.740.000	87,000	527.470.000	68,800	1.963.550.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terlatihnya Aparatur Pemerintahan Desa	100	-	81.200.000,00	45,000	141.450.000	65,000	215.850.000	70,000	250.920.000	75,000	500.920.000	80,000	537.500.000	67,000	1.646.640.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi Keuangan	%	100	0	-	0,000	13.000.000	100,000	13.000.000	100,000	20.000.000	100,000	24.000.000	100,000	24.000.000	80,000	94.000.000	Damar
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi	%	0 dokumen	0	-	100,000	20.000.000	100,000	16.000.000	100,000	42.000.000	100,000	44.000.000	100,000	44.000.000	100,000	166.000.000	Dendang
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi keuangan	Persen	0	0	-	100,000	45.600.000	100,000	10.762.500	100,000	10.762.500	100,000	48.500.000	100,000	53.500.000	100,000	169.125.000	Gantung
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi	Persentase	0	0	-	0,000	17.160.000	100,000	17.160.000	100,000	42.000.000	100,000	42.000.000	100,000	42.000.000	100,000	160.320.000	Kelapa Kampit
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi Keuangan	Persentase	100	0	-	100,000	29.000.000	100,000	36.690.000	100,000	36.690.000	100,000	219.500.000	100,000	219.500.000	100,000	541.380.000	Manggar
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	%	0	0	-	100,000	17.875.000	100,000	20.400.000	100,000	20.400.000	100,000	40.400.000	100,000	40.400.000	100,000	139.475.000	Simpang Pesak
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	%	0	0	-	0,000	15.774.650	100,000	16.175.000	100,000	15.700.000	100,000	16.775.000	100,000	16.775.000	80,000	81.199.650	Simpang Renggiang
		Statistik																		
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral daerah yang dimuktahirkan	%	100	0	572.500.000,00	0,000	0	20,000	130.600.000	60,000	260.480.500	0,000	0	0,000	0	0,000	391.080.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral daerah yang dimuktahirkan	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	1.465.000.000	100,000	1.400.000.000	100,000	2.865.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kearsipan																		
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelolaan arsip secara elektronik	%	20 dokumen	20	96.600.000,00	0,000	94.540.000	0,000	243.745.000	0,000	298.200.000	80,000	298.200.000	100,000	310.000.000	100,000	1.244.685.000	Dinas Perpustakaan
			Tingkat pengelolaan arsip secara elektronik	dokumen		20		30,000		40,000		50,000		0,000		0,000		24,000		
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen/arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	10	20	510.420.000,00	0,000	485.840.000	0,000	213.550.000	0,000	258.904.000	80,000	256.835.000	90,000	330.000.000	90,000	1.545.129.000	Dinas Perpustakaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah	%		20		40,000		50,000		60,000		0,000		0,000		30,000		
	Komunikasi dan Informatika																		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase diseminasi informasi	%	39 SKPD	0	2.220.465.000,00	40,000	3.672.125.000	50,000	6.908.560.000	75,000	1.406.740.000	80,000	1.252.000.000	85,000	1.342.000.000	85,000	14.581.425.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	Persentase Sistem Informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan	%	0	0	-	3,000	264.880.000	5,000	478.400.000	10,000	491.116.000	20,000	350.000.000	30,000	350.000.000	30,000	1.934.396.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase masyarakat desa yang memiliki kompetensi TIK	%	0	0	172.695.000,00	10,000	288.985.000	20,000	287.745.000	30,000	400.000.000	60,000	363.990.000	100,000	366.122.000	100,000	1.706.842.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi TIK	%		0		19,000		29,000		30,000		60,000		100,000		100,000		
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase infrastruktur TIK yang terintegrasi	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	72,000	5.209.064.500	86,000	5.984.160.000	100,000	7.180.992.000	100,000	18.374.216.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah Web Site SKPD yang menunjang pelayanan publik	Buah	0 website	0	-	4,000	299.986.000	4,000	766.875.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	8,000	1.066.861.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah dokumen Tata Kelola TIK Pemerintah Daerah	Dokumen	5	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Perpustakaan																		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan	%	20	20	486.860.000,00	40,000	334.495.000	50,000	759.477.000	60,000	776.500.000	80,000	1.468.700.000	90,000	1.765.000.000	90,000	5.104.172.000	Dinas Perpustakaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat siswa dalam minat membaca dan berkunjung ke perpustakaan sekolah	%	100	55	43.550.000,00	60,000	0	65,000	43.965.000	70,000	0	80,000	50.000.000	85,000	50.000.000	76,667	143.965.000	Dinas Pendidikan
	Persandian																		
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tingkat keamanan informasi	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	529.503.450	100,000	510.000.000	100,000	1.039.503.450	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Perencanaan																		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan RKPD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dak Kewilayahan	%	100	0	180.350.000,00	0,000	666.855.000	0,000	0	0,000	775.000.000	100,000	1.350.000.000	100,000	1.100.000.000	100,000	3.891.855.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	%		100		100,000		0,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
			persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan Renstra bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
			Persentase keselarasan program antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD) bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan RKPD bidang perekonomian , SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0	597.325.000,00	0,000	493.989.000	0,000	303.100.000	0,000	905.000.000	100,000	2.005.000.000	100,000	1.525.000.000	100,000	5.232.089.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan Renstra bidang perekonomian , SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
			Persentase keselarasan program antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD) bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilavahan	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
					100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000			
		Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan antar daerah	%	100	75	152.550.000,00	0,000	125.800.000	0,000	219.800.000	85,000	250.000.000	90,000	260.000.000	95,000	300.000.000	95,000	1.155.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya kerjasama pembangunan antar daerah	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		60,000		
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program OPD dengan dokumen perencanaan	%	100	0	2.438.465.000,00	0,000	2.151.333.000	0,000	1.815.228.900	0,000	925.000.000	100,000	1.890.000.000	100,000	1.410.000.000	100,000	8.191.561.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya dan terkendalinya perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
		Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan RKPD bidang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	0	539.575.000,00	0,000	440.510.000	0,000	535.150.000	0,000	695.000.000	100,000	665.000.000	100,000	825.000.000	100,000	3.160.660.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan Renstra bidang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
			Terlaksananya perencanaan pembangunan sosial budaya	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
			Persentase keselarasan program antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	persentase aparatur perencana yang difasilitasi	%	100	0	112.350.000,00	0,000	130.100.000	0,000	142.000.000	90,000	30.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	302.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	0	100	1.388.213.756	100,000	817.000.000	100,000	62.000.000	100,000	128.200.000	100,000	113.000.000	100,000	116.000.000	100,000	1.236.200.000	Dendang
		Program Penataan Adminitrasi Wilayah Pemerintah	Persentase permohonan legalitas pertanahan yang disetujui	Persen	0	0	-	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0,000	0	Gantung
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Desa yang berprestasi, Peningkatan IKM, Persentase usulan Musrenbang kecamatan yang diakomodir	Persen	0	0	1.000.000.000	100,000	715.000.000	100,000	55.000.000	100,000	55.000.000	100,000	64.559.000	100,000	62.070.000	100,000	951.629.000	Gantung
		Program Penataan Adminitrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang disetujui	Persentase	0 Paket	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	80.000.000	100,000	80.000.000	100,000	80.000.000	100,000	240.000.000	Kelapa Kampit
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase	100	0	1.030.000.000	80,000	749.750.000	80,000	69.750.000	80,000	153.600.000	100,000	170.000.000	100,000	170.000.000	100,000	1.313.100.000	Kelapa Kampit
		Program Penataan Adminitrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang disetujui	Persentase	100	0	-	100,000	0	100,000	45.100.000	100,000	19.095.000	100,000	145.050.000	100,000	145.050.000	100,000	354.295.000	Manggar
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase desa yang berprestasi, Peningkatan IKM, Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir	Persentase	100	0	1.015.000.000	100,000	755.935.000	100,000	77.850.000	100,000	118.450.000	100,000	258.680.000	100,000	261.680.000	100,000	1.472.595.000	Manggar
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	0	100	1.016.349.670	100,000	794.885.000	100,000	122.710.000	100,000	284.400.000	100,000	97.400.000	100,000	97.400.000	100,000	1.396.795.000	Simpang Pesak
		Program Penataan Adminitrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang di Setujui	%	0 Jumlah Tapal	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	10.000.000	Simpang Renggiang
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	100	80	1.271.825.000	81,000	729.940.000	81,300	70.408.000	81,500	100.040.000	81,700	116.650.000	82,000	139.100.000	81,500	1.156.138.000	Simpang Renggiang
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Pembahasan Produk Hukum yang difasilitasi	persen	100	78,95	6.587.876.000	0,000	8.034.101.000	0,000	8.442.606.000	100,000	7.959.306.000	100,000	8.667.050.000	100,000	8.910.000.000	60,000	42.013.063.000	Sekretariat DPRD
			Peningkatan Kualitas Lembaga DPRD	persen		65,13		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		40,000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase Kegiatan Pembahasan Anggaran yang difasilitasi	persen		100		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		60,000		
		Persentase Kegiatan Monitoring yang difasilitasi	persen		0		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		60,000		
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tercapainya peningkatan capacity building SDM APIP	%	100	0	-	0,000	273.050.000	100,000	329.035.000	100,000	395.000.000	100,000	385.000.000	100,000	290.000.000	100,000	1.672.085.000	Inspektorat
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengawasan secara optimal	%	100	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	105.000.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	persentase pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	%	100	100	608.674.000	100,000	990.650.000	100,000	1.743.737.000	100,000	1.585.000.000	100,000	2.250.000.000	100,000	1.985.000.000	100,000	8.554.387.000	Inspektorat
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat tercapainya penyelenggara n kegiatan pengawasan	%	100	0	-	0,000	49.750.000	100,000	37.350.000	100,000	55.000.000	100,000	60.000.000	100,000	165.000.000	100,000	367.100.000	Inspektorat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi kantor	%	100	80	1.850.759.400	85,000	1.392.740.000	90,000	7.689.270.000	95,000	7.334.530.000	100,000	7.725.000.000	100,000	8.875.000.000	94,000	33.016.540.000	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	100	80	50.000.000	82,000	40.000.000	83,000	40.000.000	85,000	50.000.000	90,000	70.000.000	95,000	80.000.000	95,000	280.000.000	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	75	379.825.000	80,000	295.000.000	85,000	1.292.825.000	87,000	541.300.000	90,000	2.100.000.000	95,000	2.450.000.000	87,400	6.679.125.000	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	%	100	65	-	70,000	0	75,000	0	80,000	0	85,000	110.500.000	90,000	0	90,000	110.500.000	Dinas Pendidikan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	100	100	2.193.620.000	100,000	2.319.620.000	100,000	2.292.918.000	100,000	2.268.798.000	100,000	2.293.798.000	100,000	2.293.798.000	100,000	11.468.932.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Pesrsen	100	100	8.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	100.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	100	1.213.890.000	100,000	463.015.000	100,000	603.400.000	100,000	465.000.000	100,000	3.205.000.000	100,000	2.005.000.000	100,000	6.741.415.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dava Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen	100	100	12.500.000	100,000	0	100,000	25.000.000	100,000	22.000.000	100,000	22.000.000	100,000	22.000.000	100,000	91.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur	Persen (%)	100	100	352.372.000	100,000	314.730.000	100,000	1.326.975.000	100,000	612.350.000	100,000	2.314.950.000	100,000	1.386.700.000	100,000	5.955.705.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi	persen (%)	-	100	10.000.000	100,000	13.995.000	100,000	110.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	60.000.000	100,000	283.995.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	persen (%)	100	100	1.416.162.400	100,000	1.790.199.500	100,000	2.084.320.000	100,000	2.222.740.000	100,000	2.222.740.000	100,000	2.393.920.000	100,000	10.713.919.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian	persen (%)	100	100	-	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	200.000.000	100,000	200.000.000	100,000	400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pencapaian Kinerja Perencanaan	persen (%)	-	100	-	0,000	0	0,000	0	100,000	0	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	100	100	1.390.280.000	100,000	1.629.835.000	100,000	1.868.497.000	100,000	1.901.450.000	100,000	2.095.000.000	100,000	2.160.000.000	100,000	9.654.782.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Penanganan Kasus-kasus Disiplin ASN	Persen	100	100	-	100,000	0	100,000	0	100,000	1.145.095.500	100,000	1.969.318.500	100,000	2.221.648.125	100,000	5.336.062.125	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	100	1.448.825.000	100,000	468.725.000	100,000	1.655.070.000	100,000	1.903.100.000	100,000	5.010.000.000	100,000	5.800.000.000	100,000	14.836.895.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kompetensi Teknis Pegawai	Orang	100	272	1.946.280.800	194,000	0	309,000	0	356,000	0	442,000	0	492,000	0	0,000	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	100	1.269.199.966	100,000	124.385.000	100,000	532.444.792	100,000	407.420.000	100,000	464.881.000	100,000	625.134.000	100,000	2.154.264.792	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	10.674.335.000	100,000	8.445.695.000	100,000	9.160.850.000	100,000	11.381.040.293	100,000	13.588.130.000	100,000	14.123.630.000	100,000	56.699.345.293	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	30	100	4.250.000	100,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	80	191.087.000	80,000	484.537.000	85,000	1.777.617.000	90,000	1.095.000.000	95,000	1.595.000.000	95,000	1.345.000.000	95,000	6.297.154.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	100	30	50.000.000	10,000	50.000.000	10,000	112.100.000	10,000	200.000.000	30,000	200.000.000	40,000	250.000.000	100,000	812.100.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	100	90	1.454.400.000	90,000	2.431.586.000	92,000	3.347.510.000	94,000	4.328.863.000	96,000	3.511.760.000	100,000	3.900.801.504	100,000	17.520.520.504	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	95.000.000	100,000	95.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	85	10.039.375.000	85,000	5.707.555.000	90,000	6.571.860.000	95,000	9.580.700.000	95,000	11.264.100.000	95,000	11.533.000.000	92,000	44.657.215.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian	%	15 Pegawai	100	-	0,000	61.050.000	0,000	200.000.000	0,000	340.000.000	100,000	340.000.000	100,000	380.000.000	40,000	1.321.050.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	11.230.638.000	100,000	11.464.920.000	100,000	12.668.970.000	100,000	11.796.156.000	100,000	13.279.380.000	100,000	13.475.000.000	100,000	62.684.426.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	100	0	67.725.000	80,000	350.000.000	85,000	538.400.000	90,000	569.475.000	95,000	810.000.000	100,000	830.000.000	100,000	3.097.875.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
		Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan Daerah	Persentase Keikutsertaan Bimtek Pimpinan Daerah	%	0	100	-	0,000	0	0,000	0	100,000	100.000.000	100,000	150.000.000	100,000	170.000.000	100,000	420.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi yang difasilitasi	%	100	100	570.700.000	100,000	100.000.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	100.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Kebijakan Kewilayahan yang difasilitasi	%	34 OPD	100	113.140.000	20,000	50.000.000	40,000	150.000.000	60,000	99.550.000	80,000	0	100,000	0	100,000	299.550.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website JDIH	%	-	80	-	85,000	0	85,000	0	90,000	0	90,000	85.000.000	95,000	90.000.000	92,500	175.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
		Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Organisasi Peningkatan Daerah	Jumlah unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPD	0	32	86.675.000	7,000	40.000.000	7,000	100.000.000	6,000	76.800.000	6,000	0	6,000	0	6,000	216.800.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Pembentukan Produk Hukum Daerah	%	-	80	976.692.600	85,000	0	85,000	0	90,000	0	90,000	825.000.000	95,000	852.500.000	92,500	1.677.500.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Program Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase penyelesaian kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah	%	-	80	192.225.000	80,000	0	85,000	0	85,000	0	90,000	175.000.000	90,000	185.000.000	90,000	360.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial	
		Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Aktif	Kegiatan	0 Jabatan	2	-	2,000	80.000.000	2,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	80.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum	
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	%	-	75	-	75,000	0	80,000	0	80,000	0	85,000	125.000.000	90,000	130.000.000	87,500	255.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial	
		Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Jumlah Monitoring Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0 laporan	0	-	2.200.000.000,000	0	2.200.000.000,000	0	3.500.000.000,000	2.200.000.000	3.500.000.000,000	0	3.500.000.000,000	0	3.500.000.000,000	2.200.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja dan Pengembangan Layanan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Paket Pekerjaan	0	0	10.039.375.000	300.000.000,000	0	300.000.000,000	0	300.000.000,000	300.000.000	300.000.000,000	0	200.000.000,000	0	300.000.000,000	300.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan Serta Peningkatan kompetensi, Keahlian dan Kapasitas Aparatur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0	0	275.000.000	300.000.000,000	0	300.000.000,000	0	300.000.000,000	300.000.000	200.000.000,000	0	200.000.000,000	0	300.000.000,000	300.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Program Penyusunan Kebijakan Pengembangan/Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan Serta Peningkatan Peran Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0	0	-	100.000.000,000	0	200.000.000,000	0	200.000.000,000	100.000.000	200.000.000,000	0	250.000.000,000	0	200.000.000,000	100.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Program Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Rumusan Peraturan, Pengendalian Standar Layanan (SOP), Penanganan Pengaduan dan Advokasi	Kegiatan	0	0	-	150.000.000,000	0	300.000.000,000	0	300.000.000,000	150.000.000	200.000.000,000	0	150.000.000,000	0	300.000.000,000	150.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Program Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan	0%	80	-	275.000.000,000	0	400.000.000,000	373.950.000	825.000.000,000	279.600.000	1.550.000.000,000	0	1.750.000.000,000	0	612.500.000,000	653.550.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/important/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	10 Buku, 1 Laporan	100	-	100,000	138.861.000	100,000	145.060.000	100,000	140.780.000	100,000	150.000.000	100,000	260.000.000	100,000	834.701.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Aktif	%	0 dokumen	100	55.032.000	100,000	45.000.000	100,000	48.100.000	100,000	72.160.000	100,000	160.000.000	100,000	112.632.000	100,000	437.892.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi	%	0	100	-	100,000	174.675.000	100,000	229.750.000	100,000	145.590.000	100,000	210.000.000	100,000	184.000.000	100,000	944.015.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kebijakan kewilayahan yang difasilitasi	%	0	100	165.000.000	100,000	0	100,000	207.260.000	100,000	94.200.000	100,000	65.000.000	100,000	55.000.000	100,000	421.460.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kebijakan Kepala Daerah yang difasilitasi di bidang pemerintahan	%	0	100	-	100,000	0	100,000	48.320.000	100,000	16.870.000	100,000	0	100,000	0	100,000	65.190.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor	%	100	100	794.900.000	100,000	453.530.000	100,000	889.500.000	100,000	1.032.500.000	100,000	609.200.000	100,000	1.035.100.000	100,000	4.019.830.000	Inspektorat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	0	-	0,000	0	0,000	75.000.000	100,000	75.000.000	100,000	190.000.000	100,000	165.000.000	100,000	505.000.000	Inspektorat
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat ketersediaan layanan administrasi	%	100	100	859.200.000	100,000	976.850.000	100,000	1.148.500.000	100,000	1.046.352.000	100,000	1.045.000.000	100,000	1.085.000.000	100,000	5.301.702.000	Inspektorat
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	%	0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	50.000.000	100,000	75.000.000	100,000	125.000.000	Inspektorat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	persen	100	20	50.000.000	30,000	30.000.000	40,000	20.000.000	70,000	50.059.000	80,000	65.800.000	100,000	64.928.000	100,000	230.787.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	866.420.000	100,000	869.550.000	100,000	871.130.000	100,000	866.886.000	100,000	1.009.218.000	100,000	1.040.409.000	100,000	4.657.193.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase pegawai yang disiplin berpakaian	persen	100	100	30.395.000	100,000	0	100,000	0	100,000	153.219.000	100,000	152.798.000	100,000	168.535.000	100,000	474.552.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	50.000.000	100,000	235.050.000	100,000	219.725.000	100,000	673.010.000	100,000	1.101.174.000	100,000	1.158.587.000	100,000	3.387.546.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kompetensi pegawai	%	100	100	18.000.000	100,000	23.000.000	100,000	40.000.000	100,000	35.000.000	100,000	61.319.000	100,000	62.500.000	100,000	221.819.000	Dinas Perikanan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	%	100	100	18.000.000	100,000	1.999.025.000	100,000	2.003.265.100	100,000	2.063.805.000	100,000	2.153.531.000	100,000	2.192.413.000	100,000	10.412.039.100	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	85,000	250.000.000	100,000	150.000.000	100,000	400.000.000	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai selama 12 bulan	%	100	100	405.320.000	100,000	361.300.000	100,000	690.926.000	100,000	798.310.000	100,000	1.632.517.000	100,000	1.600.200.000	100,000	5.083.253.000	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	100	770.355.000	100,000	610.310.000	100,000	1.002.935.000	100,000	1.319.000.000	100,000	1.240.000.000	100,000	1.265.000.000	100,000	5.437.245.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	2.178.380.000	100,000	2.101.965.000	100,000	2.270.992.500	100,000	2.246.600.000	100,000	2.355.000.000	0,000	2.357.000.000	0,000	11.331.557.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	%	0	75	-	0,000	0	0,000	0	0,000	123.500.000	95,000	135.000.000	100,000	140.000.000	100,000	398.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian	%	100	100	25.000.000	100,000	40.000.000	100,000	30.000.000	100,000	40.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	180.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Komunikasi Kehumasan	Tersedianya Sarana Penyebarluasan Informasi dari Pemerintah Daerah	%	2 Kegiatan	0	66.625.000	100,000	37.500.000	100,000	52.430.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	89.930.000	Dinas Komunikasi dan Informatika/HUMAS
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sinergisitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan lembaga Pemerintahan Lainnya	Laporan	22 rapat koordinasi	0	-	0,000	0	1,000	122.820.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	1,000	122.820.000	Dinas Komunikasi dan Informatika/UMUM
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	4.769.825.000	100,000	5.093.146.000	100,000	5.192.302.000	100,000	4.966.525.000	100,000	4.404.960.000	100,000	5.945.000.000	100,000	25.601.933.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	0 stel	90	13.755.000	90,000	80.000.000	92,000	440.450.000	95,000	0	98,000	500.000.000	100,000	0	93,333	1.020.450.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	0	100	630.160.000	100,000	667.661.500	100,000	911.201.800	100,000	1.060.770.000	100,000	2.120.000.000	100,000	1.118.500.000	100,000	5.878.133.300	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	100	100.000.000	100,000	30.000.000	100,000	45.000.000	100,000	92.871.000	100,000	120.000.000	100,000	150.000.000	100,000	437.871.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan															Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian	persen	0	-	0,000	0	0,000	0	50,000	100.000.000	75,000	200.000.000	90,000	200.000.000	90,000	500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	persen	0	-	0,000	0	50,000	416.185.000	55,000	1.280.000.000	60,000	2.100.000.000	65,000	3.300.000.000	65,000	7.096.185.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	persen	0	-	0,000	0	600,000	175.000.000	75,000	100.000.000	80,000	150.000.000	85,000	200.000.000	85,000	625.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksanannya Pelayanan administrasi perkantoran	persen	0	-	0,000	0	60,000	525.094.000	65,000	1.675.000.000	70,000	2.080.000.000	75,000	2.750.000.000	75,000	7.030.094.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	1.394.830.000	100,000	1.436.530.000	100,000	1.535.510.000	100,000	1.613.540.000	0,000	1.720.000.000	0,000	1.877.000.000	0,000	8.182.580.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%			0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000			
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	90,000	200.000.000	0,000	0	0,000	100.000.000	90,000	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	470.825.000	0,000	383.086.000	0,000	506.599.000	0,000	970.000.000	100,000	1.295.000.000	100,000	685.000.000	100,000	3.839.685.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%		100	100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	10.000.000	100,000	20.000.000	100,000	30.000.000	100,000	120.000.000	100,000	270.000.000	100,000	270.000.000	100,000	710.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%		100	100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000			
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	100.000.000	0,000	0	0,000	100.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	0	477.228.400	100,000	379.778.400	100,000	563.070.000	100,000	2.820.447.952	100,000	765.000.000	100,000	972.500.000	100,000	5.500.796.352	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	22.500.000	100,000	25.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	225.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	1.919.710.000	100,000	1.898.960.000	100,000	2.132.160.000	100,000	2.395.375.000	100,000	2.381.000.000	100,000	2.433.500.000	100,000	11.240.995.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	100	80	-	0,000	0	0,000	0	85,000	77.000.000	90,000	112.000.000	100,000	112.000.000	100,000	301.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	100	100	560.350.000	100,000	499.200.000	100,000	783.850.000	100,000	915.491.450	100,000	3.060.000.000	100,000	1.125.000.000	100,000	6.383.541.450	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	16,67	3.000.000	8,000	9.000.000	17,390	11.000.000	25,000	33.000.000	35,710	33.000.000	35,710	33.000.000	35,710	119.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	1.231.545.300	100,000	1.277.396.000	100,000	1.371.236.000	100,000	1.642.214.400	100,000	1.753.372.000	100,000	1.754.372.000	100,000	7.798.590.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	0	0	-	100,000	2.146.780.000	100,000	4.098.380.000	100,000	4.982.219.000	100,000	5.400.459.500	100,000	5.737.432.476	100,000	22.365.270.976	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	104.000.000	100,000	104.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	0	-	100,000	716.144.000	100,000	582.760.000	100,000	1.090.295.000	100,000	881.607.000	100,000	948.537.000	100,000	4.219.343.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	0	0	-	35,000	30.000.000	50,000	70.000.000	75,000	75.000.000	80,000	100.000.000	80,000	100.000.000	64,000	375.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	931.252.000	90,000	3.872.430.000	90,000	4.242.000.000	90,000	4.382.960.000	90,000	5.558.000.000	90,000	5.558.000.000	90,000	23.613.390.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	70	754.848.000	90,000	557.275.000	90,000	754.800.000	90,000	453.050.000	90,000	1.020.000.000	90,000	1.020.000.000	90,000	3.805.125.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase meningkatnya kapasitas aparatur	%	100	50	10.000.000	70,000	110.000.000	70,000	50.000.000	80,000	40.000.000	90,000	50.000.000	90,000	50.000.000	80,000	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	1.261.297.275	100,000	3.224.805.000	100,000	3.465.400.000	100,000	3.346.700.000	100,000	3.614.670.000	100,000	3.656.280.000	100,000	17.307.855.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang disiplin Berpakaian		100 Stel	0	-	0,000	0	0,000	0	90,000	250.000.000	0,000	0	90,000	0	90,000	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	70	342.860.425	75,000	517.743.700	80,000	813.478.700	85,000	1.316.478.700	90,000	1.512.000.000	95,000	1.636.000.000	95,000	5.795.701.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	-	100	50.000.000	100,000	40.000.000	100,000	50.000.000	100,000	0	100,000	50.000.000	100,000	60.000.000	100,000	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.261.297.275	100,000	2.600.586.900	100,000	2.764.700.000	0,000	2.884.510.000	0,000	2.875.000.000	0,000	2.888.000.000	40,000	14.012.796.900	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen		100		0,000		0,000		80,000		80,000		80,000		80,000			
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	persen	100	0	-	80,000	0	82,500	0	85,000	0	87,500	90.000.000	90,000	80.000.000	90,000	170.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	-	100,000	324.105.000	100,000	1.144.930.000	0,000	966.968.600	0,000	1.533.000.000	0,000	598.000.000	0,000	4.567.003.600	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen		0		0,000		0,000		85,000		90,000		90,000		90,000			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	0	-	10,000	12.500.000	13,000	30.000.000	13,000	29.500.000	15,000	65.000.000	15,000	70.000.000	15,000	207.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	12 bulan	100	2.430.635.000	100,000	4.237.384.000	100,000	4.582.397.500	100,000	4.880.484.000	100,000	5.314.000.000	100,000	5.513.000.000	100,000	24.527.265.500	Dinas Perhubungan	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin dalam berpakaian	Persen	72 pegawai	70	-	70,000	0	75,000	229.055.000	75,000	0	80,000	300.000.000	80,000	0	80,000	529.055.000	Dinas Perhubungan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	12 bulan	100	1.103.945.000	100,000	864.286.000	100,000	1.705.100.000	100,000	1.599.032.000	100,000	1.750.000.000	100,000	1.550.000.000	100,000	7.468.418.000	Dinas Perhubungan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	65 kali	50	57.000.000	55,000	45.000.000	64,000	55.000.000	64,000	85.000.000	90,000	97.000.000	90,000	85.000.000	72,600	367.000.000	Dinas Perhubungan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran	%	100	100	1.082.430.000	100,000	1.050.370.000	100,000	1.012.770.000	100,000	1.041.070.000	0,000	1.201.535.000	0,000	1.475.000.000	60,000	5.780.745.000	Dinas Perpustakaan	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%		100		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	85.000.000	95,000	45.000.000	95,000	130.000.000	Dinas Perpustakaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.030.964.000	100,000	438.389.000	100,000	466.973.000	100,000	580.796.000	0,000	690.125.000	0,000	910.000.000	60,000	3.086.283.000	Dinas Perpustakaan
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%		100		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	65	50.000.000	0,000	50.000.000	0,000	50.000.000	0,000	50.000.000	80,000	50.000.000	80,000	50.000.000	80,000	250.000.000	Dinas Perpustakaan
			Jumlah Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		60,000		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian	persen	0	100	-	100,000	0	100,000	0	100,000	175.000.000	100,000	180.000.000	100,000	185.000.000	100,000	540.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	100	100	548.865.000	100,000	1.045.095.000	100,000	2.174.775.000	100,000	1.456.567.000	100,000	1.860.000.000	100,000	3.460.000.000	100,000	9.996.437.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian	persen	100	100	50.000.000	100,000	42.500.000	100,000	35.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	377.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	0	1.615.060.000	100,000	1.871.930.000	100,000	1.828.540.000	100,000	1.747.440.000	100,000	1.777.000.000	100,000	1.963.000.000	100,000	9.187.910.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi kantor	persen	100	100	5.847.660.000	100,000	1.328.240.000	100,000	1.376.239.000	100,000	1.379.354.000	100,000	1.523.000.000	100,000	1.664.000.000	100,000	7.270.833.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	0	100	175.375.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	26.400.000	100,000	29.040.000	100,000	55.440.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	100	2.866.963.994	100,000	354.628.000	100,000	404.778.000	100,000	1.061.828.000	100,000	3.049.860.800	100,000	518.846.880	100,000	5.389.941.680	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian	orang	50	9	95.000.000	8,000	80.000.000	8,000	57.750.000	8,000	60.000.000	9,000	70.000.000	9,000	72.000.000	9,000	339.750.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Adminstrasi Perkantoran	%	100	55	-	55,000	1.632.340.000	63,000	1.654.920.000	65,000	2.203.668.000	68,000	2.244.800.000	70,000	2.291.000.000	64,200	10.026.728.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	%	100	80	-	0,000	0	0,000	0	85,000	90.750.000	90,000	135.000.000	95,000	140.000.000	95,000	365.750.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	55	-	55,000	280.600.000	58,000	591.580.000	60,000	1.018.437.000	63,000	1.303.000.000	68,000	1.290.000.000	60,800	4.483.617.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	50	-	50,000	25.000.000	53,000	40.000.000	58,000	43.500.000	60,000	50.000.000	65,000	55.000.000	57,200	213.500.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	865.231.492	90,000	931.200.650	90,000	1.022.240.000	90,000	1.233.237.200	90,000	1.339.831.593	90,000	1.493.500.000	90,000	6.020.009.443	Puskesmas Dendang
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	37.800.000	100,000	45.000.000	100,000	82.800.000	Puskesmas Dendang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai	Persen	100	82	864.875.000	82,000	335.620.000	85,000	266.425.000	90,000	380.280.000	92,000	520.000.000	95,000	660.000.000	95,000	2.162.325.000	Puskesmas Dendang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Dendang
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	46.500.000	100,000	50.000.000	100,000	96.500.000	Puskesmas Gantung
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor Yang Layak Pakai	Persen	100	80	266.600.000	82,000	167.545.000	85,000	250.000.000	90,000	440.490.000	92,000	417.668.000	95,000	505.500.000	88,800	1.781.203.000	Puskesmas Gantung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Gantung
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	1.186.426.000	90,000	1.174.976.240	90,000	1.237.380.000	90,000	1.462.580.000	90,000	1.629.508.000	90,000	1.742.580.000	90,000	7.247.024.240	Puskesmas Gantung
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	876.180.000	90,000	993.700.000	90,000	1.129.560.000	90,000	1.920.732.000	90,000	1.980.139.320	90,000	2.025.139.320	90,000	8.049.270.640	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	91,000	54.600.000	91,000	54.600.000	91,000	109.200.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang layak pakai	Persentase	100	80	310.095.000	82,000	304.450.000	85,000	796.900.000	90,000	535.000.000	92,000	700.000.000	95,000	795.000.000	95,000	3.131.350.000	Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	100	90	952.445.000	90,000	1.154.170.000	90,000	1.248.770.000	90,000	1.551.300.000	90,000	1.685.000.000	90,000	1.742.500.000	90,000	7.381.740.000	Puskesmas Manggar
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	54.000.000	90,000	54.000.000	90,000	108.000.000	Puskesmas Manggar
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	80	218.844.000	82,000	332.400.000	85,000	278.270.000	90,000	420.650.000	92,000	502.500.000	95,000	525.000.000	95,000	2.058.820.000	Puskesmas Manggar
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Manggar
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	80	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	95,000	45.000.000	100,000	45.000.000	100,000	90.000.000	Puskesmas Mengkubang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana kantor Yang Layak Pakai	Persentase	100	80	761.973.300	80,000	379.723.000	85,000	418.423.000	90,000	819.677.650	95,000	680.228.500	95,000	638.000.000	95,000	2.936.052.150	Puskesmas Mengkubang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Mengkubang
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	611.770.000	90,000	700.102.500	90,000	809.856.500	90,000	1.010.180.600	90,000	1.087.612.161	90,000	1.143.528.887	90,000	4.751.280.648	Puskesmas Mengkubang
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	766.879.996	90,000	899.765.000	90,000	943.800.000	90,000	1.036.530.000	90,000	1.123.250.000	90,000	1.234.475.000	90,000	5.237.820.000	Puskesmas Simpang Pesak
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	45.000.000	95,000	48.000.000	95,000	93.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai	Persen	100	80	581.190.000	82,000	234.630.000	85,000	307.807.000	90,000	479.300.000	92,000	551.000.000	95,000	612.000.000	95,000	2.184.737.000	Puskesmas Simpang Pesak
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	1.283.931.000	90,000	1.507.930.000	90,000	1.738.000.000	90,000	474.027.000	90,000	1.913.640.000	90,000	2.033.000.000	90,000	7.666.597.000	Puskesmas Simpang Renggiang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	30.000.000	100,000	44.000.000	100,000	74.000.000	Puskesmas Simpang Renggiang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kantor Yang Layak Pakai	Persen	100	80	582.530.000	82,000	733.750.000	85,000	520.000.000	90,000	787.297.000	92,000	470.000.000	95,000	495.000.000	95,000	3.006.047.000	Puskesmas Simpang Renggiang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mendapat Sertifikat Keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	25,000	75.000.000	30,000	75.000.000	27,500	150.000.000	Puskesmas Simpang Renggiang
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	0 Stel	0	64.900.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	200.000.000	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	100	100	3.217.350.000	100,000	2.404.350.000	100,000	1.667.350.000	100,000	2.108.164.000	100,000	2.085.000.000	100,000	2.150.000.000	100,000	10.414.864.000	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	0	580.000.000	100,000	321.000.000	100,000	581.000.000	100,000	421.000.000	100,000	320.000.000	100,000	350.000.000	100,000	1.993.000.000	Sekretariat DPRD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	7.354.992.000	100,000	10.241.860.000	100,000	11.941.840.000	100,000	9.512.200.000	100,000	11.650.000.000	100,000	11.760.000.000	100,000	55.105.900.000	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	100	0	-	90,000	0	92,000	19.950.000	95,000	30.000.000	98,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	109.950.000	Damar
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	0	473.000.000	100,000	375.000.000	100,000	367.000.000	100,000	785.000.000	100,000	1.482.000.000	100,000	1.264.000.000	100,000	4.273.000.000	Damar
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	7 ASN	100%	0	30.000.000	7,000	30.000.000	7,000	30.000.000	7,000	30.000.000	7,000	35.000.000	7,000	42.000.000	7,000	167.000.000	Damar
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan KebutuhanAdministrasi Kantor	Persen	100	0	513.650.000	100,000	619.500.000	100,000	680.500.000	100,000	603.000.000	100,000	681.000.000	100,000	713.000.000	100,000	3.297.000.000	Damar
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	0	100	500.600.000	100,000	506.800.000	100,000	521.200.000	100,000	838.366.000	100,000	857.000.000	100,000	927.000.000	100,000	3.650.366.000	Dendang
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	-	0	-	0,000	0	90,000	34.976.000	0,000	45.000.000	95,000	40.000.000	95,000	0	95,000	119.976.000	Dendang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	0	100	1.588.700.000	100,000	448.500.000	100,000	824.790.000	100,000	766.112.500	100,000	1.268.500.000	100,000	1.842.500.000	100,000	5.150.402.500	Dendang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%		100	30.000.000	100,000	29.000.000	100,000	30.000.000	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	100,000	239.000.000	Dendang
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	95,000	32.500.000	100,000	35.500.000	100,000	35.500.000	100,000	103.500.000	Simpang Renggiang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	0	505.268.000	100,000	214.421.905	100,000	517.000.000	100,000	844.137.000	100,000	1.313.500.000	100,000	1.327.500.000	100,000	4.216.558.905	Simpang Renggiang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	80	25.000.000	100,000	30.000.000	100,000	20.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	155.000.000	Simpang Renggiang
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	0	0	551.540.000	100,000	545.996.000	100,000	566.594.000	100,000	615.118.000	100,000	715.000.000	100,000	716.000.000	100,000	3.158.708.000	Simpang Renggiang
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	44.400.000	100,000	40.000.000	100,000	20.000.000	100,000	104.400.000	Simpang Pesak
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	100	548.620.000	100,000	481.100.000	100,000	1.515.950.000	100,000	954.445.000	100,000	835.000.000	100,000	810.000.000	100,000	4.596.495.000	Simpang Pesak
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	100	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	170.000.000	Simpang Pesak
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	626.391.000	100,000	628.500.000	100,000	670.700.000	100,000	678.640.000	100,000	699.740.000	100,000	699.740.000	100,000	3.377.320.000	Simpang Pesak
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	100	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	60.000.000	100,000	0	100,000	60.000.000	Manggar
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang layak Pakai	Persen	100	0	565.775.000	100,000	320.875.879	100,000	182.850.000	100,000	952.125.000	100,000	1.345.000.000	100,000	1.410.000.000	100,000	4.210.850.879	Manggar
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	100	0	20.000.000	100,000	40.000.000	100,000	20.000.000	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	180.000.000	Manggar
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan KebutuhanAdminist rasi Kantor	Persen	100	0	685.370.000	100,000	713.685.000	100,000	936.895.000	100,000	964.862.000	100,000	1.030.000.000	100,000	1.080.000.000	100,000	4.725.442.000	Manggar
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Bernakaian	Persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	36.000.000	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	116.000.000	Kelapa Kampit

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	100	348.262.000	100,000	304.808.000	100,000	509.000.000	100,000	1.310.000.000	100,000	785.000.000	100,000	440.000.000	100,000	3.348.808.000	Kelapa Kampit
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	100	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	25.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	145.000.000	Kelapa Kampit
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	683.770.000	100,000	740.000.000	100,000	773.000.000	100,000	899.000.000	100,000	945.000.000	100,000	980.000.000	100,000	4.337.000.000	Kelapa Kampit
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	0	649.312.254	100,000	696.872.254	100,000	739.062.500	100,000	739.062.500	100,000	804.680.000	100,000	814.680.000	100,000	3.794.357.254	Gantung
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian		0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	Gantung
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	100	0	388.249.000	100,000	376.275.000	100,000	530.175.000	100,000	530.175.000	100,000	1.140.300.000	100,000	1.033.000.000	100,000	3.609.925.000	Gantung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikasi keahlian	persen	100	0	20.000.000	0,000	27.000.000	0,000	35.000.000	0,000	35.000.000	0,000	30.000.000	0,000	35.000.000	0,000	162.000.000	Gantung
		Program Unit Layanan Pengadaan	Pelaksanaan Penataan Administrasi dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0 laporan	0	1.008.900.000	1.380.000.000,000	1.407.000.000	1.380.000.000,000	1.547.100.000	1.380.000.000,000	0	0,000	0	0,000	0	1.380.000.000,000	2.954.100.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	75.000.000	100,000	85.000.000	100,000	160.000.000	Dinas Perikanan
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin berpakaian	%	0	80	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	39.000.000	90,000	0	90,000	39.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Hibah dan Bantuan Sosial yang disalurkan	%	0	100	35.806.000	100,000	25.000.000	100,000	34.325.000	100,000	25.000.000	100,000	25.000.000	100,000	53.960.869	100,000	163.285.869	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
		Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Jenis Pembinaan Kesejahteraan Yang Dilaksanakan	%	0	0	-	100,000	0	100,000	0	100,000	129.458.000	100,000	350.000.000	100,000	800.000.000	100,000	1.279.458.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
		Program Perumusan dan Implementasi Kebijakan ekonomi	Persentase kebijakan ekonomi yang di implementasikan	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	275.000.000	0,000	280.000.000	0,000	280.000.000	0,000	835.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Paket Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	2.000.000.000	0,000	2.000.000.000	0,000	1.500.000.000	0,000	5.500.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Program Pembinaan dan Advokasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dibina	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	1.300.000.000	0,000	1.300.000.000	0,000	1.000.000.000	0,000	3.600.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dipenuhi	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	1.300.000.000	0,000	1.500.000.000	0,000	1.500.000.000	0,000	4.300.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang difasilitasi		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000			
		Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pelayanan Publik	Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik	-	0	-	0,000	0	0,000	130.000.000	0,000	353.100.000	0,000	590.300.000	0,000	650.000.000	0,000	1.723.400.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum	
		Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang efektif dan efisien	-	0	-	0,000	250.000.000	0,000	525.000.000	0,000	285.450.000	0,000	1.322.550.000	0,000	490.000.000	0,000	2.873.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum	
		Program Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan dan Perekonomian Daerah	Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah	%	0	910.116.100	0,000	366.100.000	0,000	0	0,000	488.750.000	0,000	1.350.000.000	0,000	1.350.000.000	0,000	3.554.850.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Program Penataan Adminitrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang disetujui	%	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	190.000.000	100,000	200.000.000	100,000	390.000.000	Simpang Pesak	
		Program Adminitrasi Keuangan	Persentase Terpenuhihya Administrasi Keuangan dan Perencanaan	%	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	80.000.000	100,000	80.000.000	100,000	160.000.000	100,000	320.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum	
		Kepegawaian																		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase aparatur yang naik pangkat, mutasi, peningkatan pendidikan dan promosi jabatan	Persen	75	1.396.736.400	80,000	2.246.809.000	85,000	1.912.881.500	90,000	2.038.665.000	95,000	2.000.000.000	100,000	2.350.000.000	100,000	10.548.355.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakaian	Persen	100	100	-	100,000	0	100,000	76.650.000	100,000	820.563.000	100,000	2.269.318.500	100,000	2.571.648.125	100,000	5.738.179.625	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penelitian dan Pengembangan																		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase hasil kajian kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan	%	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	1.750.000.000	100,000	1.600.000.000	100,000	3.350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase data dan informasi yang terbaharui	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	1.085.000.000	100,000	1.040.000.000	100,000	815.000.000	100,000	2.940.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya penyusunan data dan informasi kabupaten Belitung Timur	%		0	-	0,000		0,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
		Pendidikan dan Pelatihan																		
		Program Pendidikan Kedinasan	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan	Persen	39 Orang	70	-	75,000	1.391.388.700	80,000	1.335.545.000	85,000	1.255.888.000	90,000	3.612.320.450	100,000	4.200.000.000	100,000	11.795.142.150	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase kompetensi teknis pegawai	Persen	100	80	1.946.280.800	85,000	39.521.000	87,000	297.864.700	90,000	2.946.164.000	92,000	5.225.000.000	100,000	6.514.025.358	100,000	15.022.575.058	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sasaran 1.1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan pengelolaan keuangan daerah																				
Keuangan																				
		Program Penatausahaan Pertanggungjawabann Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	50,000	675.000.000	60,000	675.000.000	60,000	1.350.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	%		50		50,000		55,000		60,000		65,000		70,000		70,000		
		Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Kekayaan Daerah	Persentase Laporan BMD OPD yang tertib dan akuntabel	%	100	50	1.129.150.000	50,000	1.300.000.000	55,000	1.219.000.000	60,000	1.405.000.000	0,000	1.550.000.000	0,000	1.550.000.000	0,000	7.024.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Jumlah Aplikasi Sistem Manajemen BMD yang digunakan	Aplikasi	1	1		1,000		2,000		2,000		3,000		3,000		3,000		
			Persentase OPD yang mengelola BMD yang tertib dan akuntabel	%	0 perbub	0		0,000		0,000		0,000		60,000		65,000		65,000		
		Program Ekstensifikasi dan Peningkatan Data/Informasi Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	700.000.000	0,000	700.000.000	0,000	1.400.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Pertumbuhan Sumber Objek Pajak Daerah	%		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
		Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	%	11,67	10	965.680.000	10,000	1.038.805.000	11,000	1.090.205.000	12,000	1.138.400.000	13,000	800.000.000	14,000	800.000.000	14,000	4.867.410.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase Peningkatan PAD dari Sektor PaiaK Daerah	%	Rp41.263.009.170,28	100		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD (Pengelola Keuangan) yang dibina dan dievaluasi	SKPD	50%	57	80.400.000	57,000	23.477.360	57,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	23.477.360	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Peningkatan Administrasi Belanja dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	85,000	550.000.000	85,000	550.000.000	85,000	1.100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan	%	-	60		70,000		75,000		85,000		90,000		95,000		95,000		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akuntabel	%	1=Tepat waktu, 0 = Tidak Tepat Waktu	50	1.967.783.000	50,000	1.689.853.000	55,000	1.760.690.000	60,000	2.585.000.000	65,000	1.215.550.000	70,000	1.310.000.000	70,000	8.561.093.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung Timur																				
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Infrastruktur Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Kabupaten Belitung Timur																				
Sasaran 2.1.1 Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat																				
PEKERJAAN UMUM																				
		Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan/dipelihara	%	82,56	164,6	-4628139000	13,000	26.529.131.000	18,000	67.163.236.102	32,000	44.469.398.896	33,000	47.994.483.000	33,000	47.652.094.000	129,000	233.808.342.998	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik			79,86	-	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		
		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data kondisi jalan dan jembatan yang perlu perbaikan	km	480,88	0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	1,000	500.000.000	1,000	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	74,64	74,41	-1700008000	0,000	2.411.922.000	76,660	14.661.969.000	80,020	7.667.829.000	82,870	10.093.883.000	84,990	11.010.570.000	84,990	45.846.173.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	57,53	64,58		0,000		82,000		89,000		93,000		100,000		100,000		
		Program Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	%	47,22	80	0	82,000	4.887.550.000	84,000	2.988.330.000	86,000	8.200.000.000	88,000	2.680.000.000	90,000	3.066.061.000	90,000	21.821.941.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	74	100		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
		Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase kapasitas air baku	%	45,33	61,39	-195212600	62,000	1.351.357.000	64,000	862.911.908	65,000	2.785.273.000	66,000	2.509.450.000	68,000	1.471.777.000	68,000	8.980.768.908	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam Kondisi Baik	%		90	0	92,000	959.115.000	94,000	528.317.000	95,000	983.762.000	97,000	1.950.762.000	100,000	1.913.492.000	100,000	6.335.448.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	persen	0	28		0,000	0	0,000	0	0,000	0	46,000	8.906.939.250	51,000	9.800.000.000	48,500	18.706.939.250	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah/ layak huni yang terjangkau	Persen	0	86		89,000	3.344.046.400	90,000	8.651.497.850	92,000	10.679.757.500	94,000	11.279.119.000	96,000	12.239.302.300	96,000	46.193.723.050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rasio cakupan lingkungan permukiman dengan fasilitas pencegahan bahaya kebakaran	persen	0	38		38,000	226.050.000	38,000	0	38,000	0	59,000	2.000.000.000	67,000	4.000.000.000	67,000	6.226.050.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	rasio	0	20017		19.500,000	0	19.000,000	0	18.500,000	0	18.000,000	220.000.000	17.600,000	1.550.000.000	17.600,000	1.770.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Rasio rumah terkena bencana alam/sosial yang dibantu	persen	0	100		0,000	0	100,000	0	0,000	0	100,000	400.000.000	100,000	400.000.000	100,000	800.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Perhubungan																		
	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Perhubungan	Persentase SDM Perhubungan yang bersertifikat	Orang	0	30	0	0,000	0	0,000	0	20,000	37.200.000	20,000	50.000.000	20,000	50.000.000	20,000	137.200.000	Dinas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana dan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	unit	1	100	0	100,000	107.000.000	100,000	306.656.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	413.656.000	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase fasilitas dan perlengkapan jalan yang terpenuhi	unit	0	40	-317253000	50,000	2.215.632.000	55,000	1.121.985.000	60,000	4.069.563.000	65,000	3.741.523.000	70,000	5.050.548.000	70,000	16.199.251.000	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan wilayah yang terlayani angkutan	orang	0	20	-3548000	30,000	680.182.500	35,000	417.349.000	40,000	272.368.000	45,000	870.000.000	50,000	870.000.000	50,000	3.109.899.500	Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	dokumen	0	50	0	50,000	238.300.000	50,000	0	70,000	293.770.000	80,000	70.000.000	80,000	70.000.000	80,000	672.070.000	Dinas Perhubungan
	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memiliki dokumen perencanaan	Persen		25	0	50,000	78.450.000	60,000	2.821.237.000	75,000	5.810.000	75,000	845.000.000	80,000	1.050.000.000	80,000	4.800.497.000	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian dan Pengamanan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persentase fasilitas pengendalian dan pengamanan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persen	0	9,1	0	9,100	0	36,400	0	38,800	304.200.000	40,500	310.000.000	42,100	395.000.000	42,100	1.009.200.000	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase peningkatan jumlah pengujian kendaraan bermotor	Persen	0	6	-283225000	6,000	92.164.000	7,000	90.772.000	8,400	274.576.000	10,000	4.235.000.000	12,000	1.040.000.000	12,000	5.732.512.000	Dinas Perhubungan
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pengujian Kendaraan Bermotor	Kategori	0	82	0	82,000		83,000		85,000		87,000		89,000		85,200		
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan	Persen	0	10	0	10,000	0	10,000	0	60,000	139.540.000	80,000	80.000.000	90,000	80.000.000	90,000	299.540.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persentase Pembangunan dan pedoman Sarana, Prasarana Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persen	0	20	0	20,000	0	46,700	0	60,000	330.850.000	66,700	660.000.000	73,300	850.000.000	73,300	1.840.850.000	Dinas Perhubungan
Tujuan 2.2 : Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Pemerintah Daerah																				
Sasaran 2.2.1 Pembangunan infrastruktur kawasan strategis																				
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Kawasan Cepat Tumbuh	kawasan	0	0		0,000	745.010.000	0,000	0	0,000	80.000.000	0,000	2.822.683.000	0,000	2.655.000.000	0,000	6.302.693.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Persentase jalan lingkungan yang di bangun	%	0	75		80,000	210.075.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	210.075.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perhubungan																		
Sasaran 2.2.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																				
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman	Persentase Sarana dan Pasarana Taman dengan Kondisi Baik	%	0	70		75,000	986.729.000	80,000	0	0,000	0	85,000	872.000.000	90,000	863.340.000	90,000	2.722.069.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan	Persentase Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan yang terpenuhi	%	0	100		0,000	0	0,000	31.475.000	100,000	0	0,000	318.585.000	100,000	194.633.000	100,000	544.693.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Gedung Negara	Persentase Gedung Negara Dalam Kondisi baik	%	0	0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	2,000	568.234.000	2,000	412.000.500	2,000	980.234.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase taman yang asri di Kabupaten Belitang Timur	%	0	80	1971150000	0,000	0	83,000	1.290.950.000	86,000	2.390.250.000	89,000	1.801.600.000	90,000	1.514.180.000	90,000	6.996.980.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			persentase Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0	100		0,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
		Program Penataan dan Pembangunan Baneuan Gedune	Persentase Bangunan yang Sesuai Standar	%	0	70		75,000	410.290.000	80,000	0	83,000	107.000.000	85,000	1.809.650.000	88,000	3.463.165.000	88,000	5.790.105.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase ketersediaan jaringan listrik perkantoran	%	0	90	95,000	456.550.000	0,000	0	97,000	435.625.000	0,000	0	0,000	0	0,000	892.175.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Lingkungan Hidup																		
		Program Penataan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Prosentase Ketaatan Perusahaan yang memiliki izin terhadap aturan	%	0	40	0	50,000	105.157.000	50,000	100.254.000	60,000	51.220.000	70,000	195.000.000	70,000	195.000.000	70,000	646.631.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Indeks Pencemaran Air	%	0	0	-81603000	0,000	161.500.000	49,170	210.520.000	49,370	180.000.000	49,570	220.000.000	49,770	220.000.000	49,770	992.020.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Pencemaran Udara	%	0	0		0,000		97,480		97,480		97,480		97,480		97,480		
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber	Meningkatnya lahan kritis yang terevegetasi	%	0	15	-11000000	20,000	444.368.000	25,000	461.065.000	35,000	525.847.000	35,000	535.000.000	35,000	535.000.000	35,000	2.501.280.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan SDA	%	0	40		40,000		50,000		50,000		60,000		60,000		60,000		
		Program Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Limbah	Perentase peningkatan upaya pengenalan ampak lingkungan an pengelolaan limbah oleh uaha an kegiatan untuk menjaga aya ukung an aya tampung lingkungan hiup	%	0	0	0	0,000	89.250.000	0,000	29.964.000	50,000	54.000.000	60,000	150.000.000	70,000	150.000.000	70,000	473.214.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Manajemen Mutu dan Teknis Laboratorium	Prosentase tercapainya dukungan akreditasi laboratorium	%	0	45	0	50,000	104.850.000	60,000	259.500.000	70,000	137.192.000	70,000	610.000.000	80,000	610.000.000	80,000	1.721.542.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan perlindungan dan konservasi	%	0	10	-61000000	10,000	122.215.000	20,000	644.285.000	30,000	1.218.710.000	40,000	1.958.000.000	50,000	1.158.000.000	50,000	5.101.210.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penataan kawasan konservasi sumber daya alam	%	0	50		50,000		50,000		70,000		80,000		80,000		80,000		
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tercapainya kota manggar sebagai Kota Adipura	%	0	55	0	65,000	515.133.000	65,000	318.730.000	75,000	424.965.000	75,000	485.000.000	80,000	485.000.000	80,000	2.228.828.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Sasaran 2.2.3 Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW																		
		Tata Ruang																		
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Kab. Belitung Timur	%	100	50	0	100,000	739.050.000	100,000	495.450.000	100,000	1.600.000.000	100,000	3.798.856.000	100,000	4.952.664.001	100,000	11.586.020.001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan tata Ruang	%	100	0	0	0,000	0	0,000	0	50,000	286.438.000	75,000	462.899.000	100,000	608.320.000	100,000	1.357.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Program Pengembangan Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan Lahan	Dokumen	0	0	0	0	0,000	0	0,000	500.000.000	1,000	598.090.000	1,000	418.900.000	1,000	1.516.990.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Ruang publik yang berubah peruntukan	%	0	0	0	0	0,000	100,000	39.960.000	100,000	80.000.000	100,000	120.000.000	100,000	125.000.000	100,000	364.960.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pertanahan																			
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Penyelesaian Tertib Administrasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	%	0	0	0	0	0,000	0	0,000	26.100.000	0,000	0	75,000	605.975.000	100,000	1.195.501.000	100,000	1.827.576.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2.2.4 Penanggulangan dan penanganan bencana																					
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
		Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong dengan kondisi baik	persentase turap,talud,bronjong dengan kondisi baik	m	0	100	0	100,000	908.650.000	100,000	567.600.000	100,000	618.000.000	100,000	500.000.000	100,000	540.789.000	100,000	3.135.039.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program pengendalian banjir	Persentase Kawasan Rawan Banjir yang ditangani	buah	2	100		100,000	1.513.400.000	100,000	1.169.950.000	100,000	5.150.000.000	100,000	4.659.703.000	100,000	3.996.268.000	100,000	16.489.321.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pembangunan/Peningkatan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud,bronjong yang dibangun	m	15,468,5	5000	0	3.000,000	5.024.400.000	1.000,000	2.778.377.673	1.000,000	6.695.000.000	1.000,000	2.114.987.000	1.000,000	2.567.987.000	7.000,000	19.180.751.673	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase desa yang memiliki akses embung/penampungan air	buah	0	0	0	0,000	214.550.000	33,330	596.200.000	66,660	2.895.500.000	66,660	3.438.577.000	99,990	2.787.089.000	99,990	9.931.916.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air	database sumber daya air	dokumen	0	3	0	1,000	98.672.000	0,000	0	2,000	615.000.000	0,000	0	0,000	0	3,000	713.672.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
		Penanggulangan Bencana Daerah																			
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase daerah rawan bencana yang dibantu dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persen	0	0	0	0	0,000	0	70,000	199.800.000	75,000	330.000.000	78,000	650.000.000	80,000	930.000.000	80,000	2.109.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Terpetakannya Kawasan Resiko Bencana	Persen	0	0	0,000	0	0,000	174.400.000	35,000	400.000.000	60,000	550.000.000	75,000	700.000.000	75,000	1.824.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		program penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	Persentase daerah rawan bencana yang di bantu dalam penanggulanga n bencana	Persen	0	0	0,000	0	60,000	220.000.000	65,000	210.000.000	70,000	550.000.000	80,000	750.000.000	80,000	1.730.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		program rehabilitasi/rekontruksi sarana dan prasarana pasca bencana	Persentase Daerah bencana yang di rehabilitasi dan rekonstruksi	Persen	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	50,000	2.000.000.000	75,000	3.000.000.000	75,000	5.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Misi 3 : Diversifikasi Lapangan Usaha dan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Belitung Timur untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kualitas Hidup, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan																		
		Tujuan 3.1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi																		
		Sasaran 3.1.1 Meningkatnya PDRB sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman																		
		Kebudayaan																		
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Tempat	tempat	2%	2	843.421.300,00	0,000	571.510.500	0,000	830.622.500	0,000	1.465.295.000	0,000	1.143.053.000	0,000	1.076.094.000	0,000	5.086.575.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Cakupan Kajian Seni	persen	53	53		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		
			Misi Kesenian antar daerah	kali	2	2		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		
			Cakupan Fasilitasi Seni	persen	87	85		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		
			Cakupan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian	kualifikasi	5	5		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
			Cakupan Gelar Seni	persen	100	100		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Tak Bendawi yang didaftarkan menjadi warisan tak benda Indonesia	buah	2	2	57.419.000,00	0,000	20.000.000	0,000	183.960.000	0,000	72.000.000	0,000	725.169.000	0,000	546.780.000	0,000	1.547.909.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah karya budaya daerah yang didokumentasikan	buah	0	0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	628	620		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
			persentase pengelolaan kekayaan budaya	persen		0		90,000		90,000		90,000		90,000		90,000		90,000		
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Aktualisasi Nilai budaya dan kearifan lokal	kali	0	3	172.400.000,00	3,000	184.650.000	3,000	188.880.000	4,000	700.000.000	4,000	536.562.000	4,000	605.000.000	3,600	2.215.092.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pangan																		
		Irigasi																		
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase luas irigasi yang dapat dialiri air irigasi	%	0	54	0	70,000	6.270.265.000	70,000	4.304.347.000	70,000	7.500.032.720	70,000	4.565.961.920	70,000	4.152.675.000	70,000	26.793.281.640	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Pertanian																		
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase petani yang mendapat pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan	persen	471 orang	0	473,412,000	36,530	110.145.000	42,930	495.497.000	76,270	271.760.000	84,800	513.000.000	100,000	610.000.000	100,000	2.000.402.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak dan produksi hasil peternakan	Persen	1.640 ekor sapi; 238.960 ekor ayam; 5.752 ekor itik	64,56	658.744.000	70,860	389.939.000	77,550	266.671.500	84,640	282.454.000	92,120	400.000.000	100,000	400.000.000	100,000	1.739.064.500	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	persen	25 kelompok	52,38	-	63,210	126.240.000	76,880	132.175.000	81,170	930.375.000	85,550	1.120.000.000	100,000	1.020.000.000	100,000	3.328.790.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	persentase penerapan teknologi peternakan dalam budidaya ternak	Persen	-	15	139.185.000	18,180	381.150.000	36,360	0	63,630	146.700.000	81,810	150.000.000	100,000	150.000.000	100,000	827.850.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Persentase Penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih dan terampil	persen	100	100	383.614.000	100,000	563.009.000	100,000	852.125.000	100,000	407.210.000	100,000	995.000.000	100,000	860.000.000	100,000	3.677.344.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penanganan kasus penyakit ternak	persen	500 kasus	100	198.328.000	100,000	379.340.000	100,000	835.050.000	100,000	419.437.000	100,000	350.000.000	100,000	250.000.000	100,000	2.233.827.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	meningkatnya persentase pemasaran hasil pertanian	persen	-	0	-	0,000	0	0,000	49.912.000	50,000	100.000.000	75,000	200.000.000	100,000	200.000.000	100,000	549.912.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura/perkebunan	persen	-	41,54	5.861.979.000	55,780	3.170.455.000	67,360	2.463.350.000	78,650	4.361.375.000	88,220	6.040.000.000	100,000	6.040.000.000	100,000	22.075.180.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pariwisata																		
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PersentasePeningkatan kunjungan wisatawan	persen	0	7	1.394.840.000	5,000	944.065.900	5,000	1.712.412.500	6,000	4.677.151.500	7,000	2.753.971.000	7,000	2.930.632.000	6,000	13.018.232.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan SDM Pariwisata yang profesional	persen	50	50	64.873.900	50,000	50.827.664	50,000	329.475.000	50,000	577.400.500	50,000	580.343.000	50,000	465.500.000	50,000	2.003.546.164	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase kondisi destinasi wisata yang Memadai	persen	46,03	52	1.503.329.500	50,000	2.523.475.937	50,000	3.580.485.000	50,000	5.983.700.000	50,000	6.995.229.000	50,000	7.135.022.000	50,000	26.217.911.937	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Industri																		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan	Persen	-	0	85.021.300	0,000	0	0,000	0	0,000	0	30,000	83.584.000	35,000	95.060.000	35,000	178.644.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
		Program Standarisasi Industri	Peningkatan produk IKM yang mendapatkan standarisasi produk	persen	0 IKM	0	38.252.100	10,000	0	10,000	60.000.000	10,000	79.506.000	0,000	0	0,000	0	30,000	139.506.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Wirausaha Industri Kecil Baru	wirausaha	0 IKM	0	83.690.100	132,000	94.660.500	196,000	508.355.500	0,000	685.000.000	0,000	1.738.000.000	0,000	1.773.500.000	0,000	4.799.516.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
			Industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan (IKM)	Persen		0		0,000		45,000		52,000		59,000		66,000		66,000		
		Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pengembangan produk	IKM	-	0	-	8,000	0	2,000	44.377.000	0,000	100.000.000	0,000	0	0,000	0	10,000	144.377.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
			Peningkatan IKM yang proses produksinya meningkat setelah mendapat fasilitasi	IKM		0		0,000		2,000		3,000		0,000		0,000		5,000		
		Program Pengembangan Industri Kerajinan	Peningkatan nilai produksi IKM Kerajinan	IKM	-	0	-	10,000	334.865.200	12,000	637.945.000	15,000	984.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	1.956.810.200	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri yang difasilitasi	sentra	-	0	-	1,000	50.400.000	1,000	97.730.000	0,000	368.218.000	0,000	502.000.000	0,000	654.000.000	2,000	1.672.348.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
			Pengembangan sentra IKM	Sentra		0		0,000		0,000		2,000		3,000		4,000		4,000		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan energi dan protein	(kg/thn/ 1000 penduduk)	100%	128454	332.800.000,00	131.769.000	458.025.000	135.169.000	553.255.000	138.656.000	1.085.000.000	142.234.000	1.170.000.000	145.904.000	1.170.000.000	145.904.000	4.436.280.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Sasaran 3.1.2 Menurunnya angka pengangguran																		
		Ketenagakerjaan																		
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (orang)	%	90 perusahaan	88,4	313.497.200,00	88,500	327.716.000	88,600	420.031.000	88,700	444.810.000	88,800	473.200.000	88,900	497.700.000	88,900	2.163.457.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%		0		0,000		0,000		0,000		65,000		67,000		67,000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Perencanaan Ketenagakerjaan	Tersedianya dokumen perencanaan ketenagakerjaan	Buku	30	0	-	95,000	49.924.000	95,000	0	95,000	50.000.000	0,000	60.000.000	0,000	70.000.000	0,000	229.924.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	-	0	59.840.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	275.000.000	70,000	360.000.000	75,000	490.000.000	75,000	1.125.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	131 orang	0	-	0,000	51.825.000	0,000	274.730.000	0,000	327.000.000	55,000	375.000.000	60,000	440.000.000	60,000	1.468.555.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan yang terserap dunia kerja	%	-	0	282.191.000,00	0,000	479.249.000	0,000	279.500.000	0,000	4.392.616.000	75,000	1.889.000.000	80,000	1.937.000.000	80,000	8.977.365.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 3.1.3 Meningkatnya nilai investasi daerah																				
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	58.000.000	82,000	55.000.000	82,000	113.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Rupiah	3.182.678.885.471	#####	-	472.918.842.124,000	87.860.000	475.283.436.335,000	45.940.000	0,000	426.872.000	0,000	126.530.000	0,000	124.000.000	0,000	811.202.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
			Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM	persen		0		0,000		0,000		50,000		55,000		60,000		60,000		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya pameran investasi	kali	18	5	91.508.000,00	2,000	169.100.000	3,000	561.580.000	2,000	534.332.000	0,000	250.000.000	0,000	250.000.000	7,000	1.765.012.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
			Peningkatan Investor baru yang berinvestasi (PMDN/PMA)	investor		5		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Informasi potensi investasi daerah	dokumen	9	0	-	0,000	20.000.000	0,000	23.825.000	1,000	24.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	67.825.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
			Tersedianya informasi peluang investasi	dokumen		0		1,000		1,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
Sasaran 3.1.4 Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat lokal																				
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																				
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Usaha mikro yang berkembang setelah mendapat pelatihan kewirausahaan	%	0,74	1,1	-	1,150	56.235.000	1,200	48.185.000	1,250	179.404.700	1,300	136.500.000	1,350	146.000.000	1,250	566.324.700	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang tertib pertanggungjawaban dan pelaporan	%	89	31,2	149.703.100,00	31,400	201.202.000	32,000	203.290.500	32,500	398.664.000	33,000	289.000.000	33,500	292.000.000	32,480	1.384.156.500	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Usaha mikro yang memperoleh akses permodalan	%	0	1,1	-	1,200	115.735.000	1,500	281.000.000	1,700	295.000.000	1,900	521.500.000	2,100	608.000.000	2,100	1.821.235.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program penciptaan iklim dan Pengembangan Industri Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	Jumlah koperasi dan ukm yang memperoleh akses permodalan	umkm	2.384 unit	2384	125.000.800,00	2.600,000	0	2.820,000	150.000.000	3.040,000	92.601.300	0,000	0	0,000	0	0,000	242.601.300	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Sasaran 3.1.5 Penurunan laju inflasi																		
		Kelautan dan Perikanan																		
		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	47,05	47,97	959.260.000	44,600	368.980.000	48,480	398.980.000	48,600	634.620.000	48,900	1.190.677.000	49,000	1.330.000.000	49,000	3.923.257.000	Dinas Perikanan
		Penyusunan Data Perikanan	Tersedianya Data Perikanan yang Akurat	Dokumen/Triwulan	0 dokumen	5	-	5,000	87.390.000	5,000	99.840.000	3,000	46.180.000	3,000	100.000.000	3,000	105.000.000	3,800	438.410.000	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Budidaya	Ton	-	98,56	-	53,460	1.391.414.500	111,820	2.433.453.400	111,280	1.165.388.000	119,220	1.803.105.000	126,400	1.876.053.000	104,436	8.669.413.900	Dinas Perikanan
		Pengembangan SDM, Peningkatan Manajemen Perikanan	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina	Kelompok/orang/tahun	43	0	308.678.000	185,000	239.270.000	570,000	210.728.000	630,000	309.125.000	690,000	0	700,000	0	461,667	759.123.000	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah Produksi Tangkap	Ton	38.037,10	39593,2	11.266.050.999	34.853,300	4.203.344.000	44.047,180	3.114.291.000	40.264,020	2.798.520.000	41.063,960	4.075.000.000	41.880,600	3.840.000.000	40.421,812	18.031.155.000	Dinas Perikanan
		Perdagangan																		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Daerah	kali	5	3	61.293.650	4,000	277.700.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	4,000	277.700.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang diselesaikan	pengaduan	0 Kasus	0	217.862.088	3,000	184.982.000	3,000	536.066.000	0,000	1.322.058.000	0,000	928.000.000	0,000	874.500.000	6,000	3.845.606.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
			Persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tertib ukur dan tertib niaga	persen		0		0,000		0,000		10,000		10,000		10,000		30,000		
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar berkondisi layak	unit	2	0	4.228.867.350	4,000	5.827.435.000	5,000	6.754.800.000	0,000	4.327.217.000	0,000	2.581.000.000	0,000	2.486.800.000	0,000	21.977.252.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
			Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)	persen		0		0,000		0,000		10,000		10,000		10,000		30,000		
		Tujuan 3.2 : Penurunan Angka Kemiskinan																		
		Sasaran 3.2.1 Meningkatnya PDRB perkapita																		
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	%	100	0	265.580.000,00	100,000	255.860.000	100,000	310.000.000	100,000	334.000.000	100,000	337.000.000	100,000	450.000.000	100,000	1.686.860.000	Damar

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	%	0	100	281.873.300,00	100,000	278.840.000	100,000	386.500.000	100,000	430.000.000	100,000	455.000.000	100,000	465.000.000	100,000	2.015.340.000	Dendang
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan	Persen	100	0	264.400.200,00	100,000	288.425.000	100,000	369.800.000	100,000	369.800.000	100,000	344.105.000	100,000	350.000.000	100,000	1.722.130.000	Gantung
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	Persentase	100	0	303.497.500,00	100,000	281.000.000	100,000	281.000.000	100,000	480.000.000	100,000	510.000.000	100,000	510.000.000	100,000	2.062.000.000	Kelapa Kampit
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	Persentase	100	0	245.920.000,00	100,000	222.275.000	100,000	329.780.000	100,000	420.000.000	100,000	425.000.000	100,000	435.000.000	100,000	1.832.055.000	Manggar
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	%	100	100	317.800.500,00	100,000	277.900.000	100,000	349.985.000	100,000	323.500.000	100,000	372.000.000	100,000	372.000.000	100,000	1.695.385.000	Simpang Pesak
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	%	100	0	-	100,000	272.200.000	100,000	263.800.000	100,000	239.700.000	100,000	260.000.000	100,000	255.000.000	100,000	1.290.700.000	Simpang Renggiang
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat	Persen (%)	100	100		100,000	448.845.000	100,000	472.470.000	100,000	492.330.000	100,000	920.430.000	100,000	573.000.000	100,000	2.907.075.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa (BUMDes)	Persen (%)	28	28		30,000	303.750.000	35,000	371.170.000	40,000	382.626.000	45,000	382.626.000	50,000	435.000.000	40,000	1.875.172.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Sasaran 3.2.2 Perlindungan Sosial																		
		Program pembinaan anak terlantar	Persentase Penanganan Anak Terlantar	jiwa	1.698	100	-20000000	100,000	97.375.000	100,000	34.250.000	100,000	70.580.000	100,000	43.500.000	100,000	75.000.000	100,000	320.705.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terwujudnya pembinaan anak terlantar	Jiwa		1698		1.698,000		1.698,000		1.698,000		1.698,000		1.698,000		1.698,000		
		Program Keluarga Harapan	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhdap pendidikan dan kesehatan bagi RTSM sasaran	Jiwa	2,202	2202	0	2.202,000	122.250.000	2.202,000	100.000.000	2.202,000	149.655.000	2.202,000	150.000.000	2.202,000	150.000.000	2.202,000	671.905.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan (PSPPK)	Tersedianya pelayanan dan rujukan bagi masyarakat penerima program kesejahteraan sosial	bulan	12	12	0	12,000	330.165.000	12,000	254.254.000	12,000	447.415.000	12,000	530.000.000	12,000	600.000.000	12,000	2.161.834.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase penyelenggara n panti jompo	bulan	12	100	79996000	100,000	15.600.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	15.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Peningkatan Kesadaran Terhadap Hari Besar Nasional	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat yang terlibat dalam peringatan Hari Besar Nasional	persen	0	80	0	85,000	39.825.000	88,000	60.000.000	90,000	68.600.000	95,000	70.000.000	100,000	80.000.000	100,000	318.425.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya honorium untuk 39 psm yang tersebar di setiap Desa	orang	39	39	55940000	39,000	604.655.000	39,000	753.500.000	39,000	767.585.000	39,000	785.000.000	39,000	845.000.000	39,000	3.755.740.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	orang	0	25	0	25,000	346.453.500	25,000	292.065.000	25,000	312.795.000	25,000	368.000.000	25,000	410.000.000	25,000	1.729.313.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Keluarga	Terwujudnya ketahanan keluarga dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan yang akan mempengaruhi psikososial keluarga	Jiwa	0	921	-5000000	921,000	127.081.000	921,000	94.750.000	921,000	118.250.000	921,000	132.500.000	921,000	155.000.000	921,000	627.581.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang dipenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	100	0	0	0	100,000	122.055.000	100,000	198.624.000	100,000	193.780.000	100,000	211.410.000	100,000	226.410.000	100,000	952.279.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Tersedianya Tenaga Pelatih dan pelatih dan Pendidik disabilitas yang terampil dan peropesional	orang	0	4		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		
		Program Satu Hati Bangun Negeri (Sinergi)	Meningkatnya Kapasitas dan Kesejahteraan Keluarga Sasaran	Orang	847	547		600,000	288.013.000	600,000	313.592.000	625,000	281.824.500	650,000	281.824.500	675,000	313.572.000	630,000	1.478.826.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial. (Eks Narapidana,PSK ,Narkoba dan penyakit sosial lainnya	Orang	0	29		29,000	19.580.000	29,000	99.300.000	29,000	131.020.000	29,000	252.500.000	29,000	280.000.000	29,000	782.400.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persen	0	100		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	persen	0	100	0	100,000	75.329.000	100,000	210.905.000	100,000	256.410.000	100,000	465.000.000	100,000	480.000.000	100,000	1.487.644.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kali	0	0		0,000	0	0,000	0	0,000	25.000.000	14,000	75.000.000	14,000	75.000.000	9,333	175.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial		
			buku laporann	0	0		0,000		0,000		0,000		1,000		1,000		0,667				
			Laporan	0	0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000				
			UKS	0	0		0,000		0,000		0,000		4,000		4,000		2,667				
		Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Sesuai Aturan	persen (%)	0	100	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	75.000.000	100,000	80.000.000	100,000	155.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		Tujuan 3.3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup																			
		Sasaran 3.3.1 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah																			
		Pendidikan																			
			Indeks Ketahanan Keluarga	Persen	0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000						
		Program Pendidikan Non Formal	Banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan non formal	Orang	100%	350	870.540.000,00	300,000	1.394.635.000	275,000	1.523.596.000	200,000	1.463.340.000	150,000	0	100,000	0	100,000	4.381.571.000	Dinas Pendidikan	
		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Angka rata rata lama sekolah	Tahun	157 orang	7,95	-	8,000	7.224.173.000	8,050	4.602.500.000	8,150	2.924.340.000	8,180	3.500.000.000	8,200	3.700.000.000	8,200	21.951.013.000	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya mutu pendidikan SMP dan APM	%	-	84,7	-	89,180	0	90,010	8.312.754.000	91,050	9.767.587.000	91,890	4.690.000.000	92,880	5.820.000.000	92,880	28.590.341.000	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) TK/PAUD	%	42,84%	57,5	1.220.420.000,00	60,000	1.481.600.000	61,000	3.648.451.000	62,000	6.057.354.000	63,000	0	64,000	0	61,000	11.187.405.000	Dinas Pendidikan	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu tenaga pendidik	%	100%	75	8.492.033.200,00	78,000	3.176.734.000	80,000	4.360.602.000	85,000	6.289.229.000	90,000	75.000.000	95,000	115.000.000	85,600	14.016.565.000	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar	%	-	90,88	-	93,750	0	93,800	10.167.164.240	94,050	10.633.427.000	94,250	4.940.000.000	94,820	6.300.000.000	94,820	32.040.591.240	Dinas Pendidikan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	%	50	16	747.862.000,00	15,900	572.623.000	15,750	563.252.000	15,500	3.165.484.000	15,250	1.892.231.505	15,000	1.444.091.600	15,000	7.637.682.105	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	%	88	88	-	90,000	19.894.000	91,000	18.192.000	92,000	23.385.000	92,000	30.000.000	93,000	23.385.000	93,000	114.856.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Angka Kematian Balita	per 1000 Kelahiran Hidup		25		23,000		20,000		18,000		15,000		10,000		10,000		
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif dengan strata	%	50	50	425.963.000,00	55,000	99.740.000	60,000	164.955.000	65,000	230.740.000	70,000	280.690.000	75,000	331.690.000	75,000	1.107.815.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar (SPM)	Persen	100	0	7.745.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	8.000.000	85,000	9.000.000	82,500	17.000.000	Puskesmas Dendang
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	85.000.000	0,000	105.000.000	0,000	190.000.000	Puskesmas Dendang
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan penyakit menular	Persen	100	16	3.780.000,00	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	22.000.000	12,000	32.000.000	12,000	54.000.000	Puskesmas Dendang
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar(SPM)	Persen	-	70	-	70,000	0	75,000	0	78,000	0	83,000	20.000.000	87,000	25.000.000	87,000	45.000.000	Puskesmas Dendang
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	Persen	50	50	5.850.000,00	55,000	20.000.000	60,000	0	65,000	13.582.000	70,000	41.000.000	75,000	52.000.000	75,000	126.582.000	Puskesmas Dendang
		Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	70.000.000	100,000	80.000.000	100,000	150.000.000	Puskesmas Dendang
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	Persen	-	0	-	0,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	15.000.000	80,000	19.000.000	80,000	34.000.000	Puskesmas Dendang
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usi 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ..(SPM)	Persen	89,86	25	-	35,000	47.550.000	45,000	0	55,000	70.000.000	60,000	77.000.000	65,000	85.000.000	65,000	279.550.000	Puskesmas Dendang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Persen	87	45	-	50,000	18.000.000	0,000	0	60,000	39.500.000	65,000	45.000.000	70,000	50.000.000	70,000	152.500.000	Puskesmas Gantung
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar (SPM)	Persen	18 balita	0	7.800.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	10.000.000	85,000	12.000.000	82,500	22.000.000	Puskesmas Gantung
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	132.500.000	0,000	142.500.000	0,000	275.000.000	Puskesmas Gantung
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persen	200	0	26.000.000,00	0,000	0	0,000	0	14,000	25.000.000	13,000	50.000.000	12,000	56.250.000	12,000	131.250.000	Puskesmas Gantung
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 Bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (SPM)	Persen	-	80	-	80,000	5.000.000	0,000	0	87,000	10.000.000	89,000	15.000.000	90,000	20.000.000	90,000	50.000.000	Puskesmas Gantung
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	50	50	23.700.000,00	55,000	1.750.000	0,000	0	0,000	0	70,000	105.000.000	75,000	117.500.000	75,000	224.250.000	Puskesmas Gantung
		Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	98,000	85.000.000	100,000	95.000.000	100,000	180.000.000	Puskesmas Gantung
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	40,000	42.500.000	60,000	52.000.000	60,000	94.500.000	Puskesmas Gantung
		Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit menular	Persen	-	16	-	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	58.000.000	12,000	66.500.000	12,000	124.500.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 Bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	Persen	-	80	-	80,000	0	85,000	0	87,000	0	89,000	25.000.000	90,000	30.000.000	90,000	55.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	50	50	-	55,000	29.000.000	60,000	0	65,000	97.500.000	70,000	130.000.000	75,000	145.000.000	75,000	401.500.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	90.000.000	100,000	95.000.000	100,000	185.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan															Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	Persen	-	0	-	20,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	37.500.000	70,000	45.000.000	70,000	82.500.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	88	50	-	50,000	63.600.000	55,000	0	60,000	155.000.000	65,000	165.000.000	70,000	175.000.000	70,000	558.600.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu hamil sesuai Standar (SPM)	Persen	-	0	13.180.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	15.000.000	85,000	20.000.000	82,500	35.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	122.000.000	0,000	140.000.000	0,000	262.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase penurunan penyakit menular	Persen	-	16	-	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	64.350.000	12,000	71.585.000	12,000	135.935.000	Puskesmas Manggar
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	Persen	-	80	-	80,000	0	85,000	0	87,000	0	89,000	15.000.000	90,000	17.500.000	90,000	32.500.000	Puskesmas Manggar
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	Persen	50	50	21.310.000,00	55,000	24.530.000	60,000	0	65,000	90.530.000	70,000	141.583.000	75,000	167.056.000	75,000	423.699.000	Puskesmas Manggar
		Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	85.000.000	100,000	95.000.000	100,000	180.000.000	Puskesmas Manggar
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa ODF	Persen	-	0	-	11,000	0	30,000	0	40,000	0	50,000	42.500.000	60,000	52.000.000	60,000	94.500.000	Puskesmas Manggar
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	87	50	-	50,000	72.310.000	55,000	0	60,000	121.400.000	65,000	133.540.000	70,000	146.000.000	70,000	473.250.000	Puskesmas Manggar
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM)	Persen	-	0	39.100.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	10.000.000	85,000	12.000.000	82,500	22.000.000	Puskesmas Manggar
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka balita gizi buruk	Persen	3	0	31.610.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	117.956.000	0,000	132.750.000	0,000	250.706.000	Puskesmas Manggar
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu hamil Sesuai standar (SPM)	Persen	0	90	24.440.000,00	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	10.000.000	90,000	12.000.000	90,000	22.000.000	Puskesmas Mengkubang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	100	0	68.030.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	22.468.000	0,000	53.591.400	0,000	59.770.970	0,000	135.830.370	Puskesmas Mengkubang	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persentase	-	16	-	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	62.000.000	12,000	69.000.000	12,000	131.000.000	Puskesmas Mengkubang	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan balita Sesuai Standar (SPM)	Persentase	-	88	-	90,000	0	91,000	0	92,000	0	92,000	20.000.000	93,000	25.000.000	93,000	45.000.000	Puskesmas Mengkubang	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	50	50	12.250.000,00	55,000	13.425.000	60,000	0	65,000	10.567.500	70,000	11.624.250	75,000	12.205.462	75,000	47.822.212	Puskesmas Mengkubang	
		Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persentase	-	90	-	90,000	0	92,000	0	94,000	0	96,000	90.000.000	100,000	98.000.000	100,000	188.000.000	Puskesmas Mengkubang	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	20,000	0	40,000	42.500.000	60,000	52.000.000	60,000	94.500.000	Puskesmas Mengkubang	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga Negara Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Persentase	90,44	0	-	0,000	99.600.000	45,000	0	80,000	63.410.000	85,000	69.751.000	90,000	73.238.550	90,000	305.999.550	Puskesmas Mengkubang	
			Pemberian PMT	persentase		90		90,000		0,000		0,000		90,000		90,000		67,500			
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	90	0	10.005.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	78,000	30.008.000	80,000	33.080.000	79,000	63.088.000	Puskesmas Simpang Pesak	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	75.000.000	0,000	90.000.000	0,000	165.000.000	Puskesmas Simpang Pesak	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	-	70	-	70,000	0	75,000	0	80,000	0	85,000	50.000.000	88,000	60.000.000	88,000	110.000.000	Puskesmas Simpang Pesak	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	20	50	-	55,000	17.039.000	60,000	0	65,000	16.780.000	70,000	38.458.000	75,000	45.303.800	75,000	117.580.800	Puskesmas Simpang Pesak	
		Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	70.000.000	100,000	80.000.000	100,000	150.000.000	Puskesmas Simpang Pesak	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	Persen	-	0	-	20,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	42.000.000	70,000	48.000.000	70,000	90.000.000	Puskesmas Simpang Pesak	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Sesuai Standar	Persen	90	50	-	50,000	13.440.000	55,000	0	60,000	35.940.000	65,000	39.534.000	70,000	43.487.400	70,000	132.401.400	Puskesmas Simping Pesak
		Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	80.000.000	100,000	90.000.000	100,000	170.000.000	Puskesmas Simping Renggiang
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	Persen	-	0	-	25,000	0	75,000	0	75,000	0	85,000	42.500.000	85,000	52.000.000	85,000	94.500.000	Puskesmas Simping Renggiang
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar(SPM)	Persen	85	50	-	50,000	57.400.000	55,000	0	60,000	0	65,000	80.000.000	70,000	90.000.000	70,000	227.400.000	Puskesmas Simping Renggiang
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar (SPM)	Persen	0	0	48.997.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	7.000.000	85,000	8.500.000	82,500	15.500.000	Puskesmas Simping Renggiang
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	40.000.000	0,000	100.000.000	0,000	115.000.000	0,000	255.000.000	Puskesmas Simping Renggiang
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persen	-	16	-	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	56.000.000	12,000	71.000.000	12,000	127.000.000	Puskesmas Simping Renggiang
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (SPM)	Persen	-	80	-	80,000	0	85,000	0	87,000	0	89,000	20.000.000	90,000	25.000.000	90,000	45.000.000	Puskesmas Simping Renggiang
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	50	50	-	55,000	25.705.000	60,000	0	65,000	0	70,000	85.400.000	75,000	98.940.000	75,000	210.045.000	Puskesmas Simping Renggiang
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persen	90	16	12.000.000,00	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	22.000.000	12,000	29.000.000	12,000	51.000.000	Puskesmas Simping Pesak
		Keperemudaan dan Olahraga																		
			Indeks Ketahanan Keluarga	Persen		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemakaian sarana olahraga terhadap kelayakan sarana prasarana olahraga	Persen	100	100	4.925.625.000,00	100,000	4.288.450.000	100,000	2.851.252.000	100,000	11.487.000.000	100,000	8.000.000.000	100,000	8.000.000.000	100,000	34.626.702.000	Dinas Keperemudaan dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
		Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Pemuda	Persentase Kelembagaan Pemuda Yang Berklasifikasi Baik	Persen	100	100	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	804.000.000	100,000	804.000.000	100,000	1.608.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi	Persentase pengembangan olahraga rekreasi dan kesegaran jasmani	Persen	100	100	-	100,000	150.000.000	100,000	170.950.000	100,000	580.000.000	100,000	580.000.000	100,000	580.000.000	100,000	2.060.950.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Persentase Pemunuhan Sarana dan Prasarana Pemuda Yang Layak Pakai	Persen	100	100	299.030.000,00	100,000	209.750.000	0,000	0	100,000	209.325.000	100,000	500.000.000	100,000	500.000.000	100,000	1.419.075.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda Aktif Dalam Kepeloporan	Persen	100	100	1.070.158.000,00	100,000	614.498.000	100,000	960.968.000	100,000	1.100.000.000	100,000	1.100.000.000	100,000	1.100.000.000	100,000	4.875.466.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program peningkatan produktivitas pemuda	persentase pemuda yang berkualitas yang memiliki pengetahuan dan jiwa kepemimpinan"	Persen	100	100	-	100,000	137.750.000	100,000	275.765.000	100,000	180.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	593.515.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase Olahraga Tradisional dan Kemasyarakatan Yang Dikembangkan	persen	-	100	2.115.175.000,00	100,000	816.710.000	100,000	1.289.450.000	100,000	1.005.000.000	100,000	1.275.000.000	100,000	1.325.000.000	100,000	5.711.160.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program pembinaan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan	PERSENTASE ATLET BERPRESTASI DALAM BIDANG OLAH RAGA	Persen	100	100	-	100,000	2.076.515.000	100,000	2.112.625.000	100,000	1.843.000.000	100,000	2.460.000.000	100,000	2.480.000.000	100,000	10.972.140.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda	Persentase kebijakan kepemudaan yang dikembangkan		100	100	148.368.000,00	0,000	0	0,000	0	100,000	120.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	120.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat	Persentase Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan tradisonal	Persen	100	0	-	100,000	291.195.000	100,000	323.225.000	100,000	630.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	1.244.420.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program pengembangan kelembagaan pemuda	Persentase kelembagaan pemuda yang berklasifikasi sehat dan baik	Persen	100	100	-	100,000	353.850.000	100,000	387.920.000	100,000	347.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	1.088.770.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Pengembangan Wirausaha Muda	Persen	100	100	-	100,000	177.000.000	100,000	181.450.000	100,000	177.000.000	100,000	227.000.000	100,000	227.000.000	100,000	989.450.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program peningkatan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Persentase Kebijakan dan Manajemen Olahraga Prestasi Yang Dikembangkan	Persen	100	100	49.999.000,00	0,000	0	0,000	0	100,000	250.000.000	100,000	150.000.000	100,000	150.000.000	100,000	550.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program pengembangan dan pemberdayaan pemuda	persentase pemuda yang berkualitas yang memiliki pengetahuan dan jiwa kepemimpinan	Persen	100	100	-	100,000	77.000.000	100,000	191.200.000	100,000	257.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	525.200.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/ Pembangunan Daerah	Indikator (Kinerja/ tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana olahraga yang layak pakai	Persentase	100	0	80.800.000,00	100,000	8.250.000	100,000	8.250.000	100,000	60.000.000	100,000	510.000.000	100,000	510.000.000	100,000	1.096.500.000	Manggar
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang layak pakai	%	0 kegiatan	0	-	100,000	170.650.000	100,000	23.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	45.000.000	100,000	308.650.000	Dendang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana Olah Raga yang layak pakai	Persen	100	0	207.125.000,00	100,000	40.000.000	100,000	85.000.000	100,000	85.000.000	100,000	120.000.000	100,000	85.000.000	100,000	415.000.000	Gantung
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana/prasarna olahraga yang layak pakai	Persentase	0	0	-	0,000	8.000.000	100,000	0	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	75,000	188.000.000	Kelapa Kampit
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana olahraga yang layak pakai	%	0	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	502.000.000	100,000	310.000.000	100,000	310.000.000	100,000	1.122.000.000	Simpang Pesak
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana Olah Raga yang Layak Pakai	%	0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	700.000.000	100,000	700.000.000	100,000	1.400.000.000	Simpang Renggiang
		Sasaran 3.3.3 Meningkatnya angka pengeluaran perkapita																		
		Sasaran 3.3.4 Meningkatnya ketahanan keluarga																		
			Indeks Ketahanan keluarga	Persen		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	Persen (%)	100	100	-	100,000	87.297.000	100,000	99.593.000	100,000	110.125.000	100,000	0	100,000	0	100,000	297.015.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Persentase penanganan anak korban kekerasan	Persen (%)	100	100	-	100,000	19.905.000	100,000	627.469.100	100,000	446.400.000	100,000	500.000.000	100,000	0	100,000	1.593.774.100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen (%)	46,7	46	151.098.000,00	48,000	360.099.000	48,500	250.927.600	49,000	392.220.000	50,500	464.235.000	60,000	545.000.000	51,200	2.012.481.600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rasio KDRT	Persen (%)	0,002	0,002	471.440.000,00	0,003	0	0,003	90.480.000	0,003	116.150.000	0,003	0	0,003	0	0,003	206.630.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Peserta	0	50	-	50,000	21.445.000	60,000	45.241.800	65,000	59.310.000	70,000	70.000.000	75,000	70.000.000	64,000	265.996.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Persen (%)	100	100	37.785.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	820.000.000	100,000	860.000.000	100,000	1.680.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Indeks Ketahanan Keluarga	Persen	0	0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				
		Program Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Belitung Timur	Terlaksananya bimbingan bagi pelajar dalam menghadapi dampak globalisas	kali	0	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	14,000	50.000.000	14,000	50.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Knerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					(2016)		(2017)		(2018)		(2019)		(2020)		(2021)					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Persen	2 KK	30	43.500.000,00	35,000	0	40,000	32.730.000	45,000	39.310.000	50,000	39.310.000	55,000	39.310.000	55,000	150.660.000	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	60	60	899.815.700,00	70,000	722.380.000	72,000	2.863.965.000	75,000	1.012.048.600	76,000	3.141.428.500	76,000	3.031.698.600	76,000	10.771.520.700	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Data dan Informasi	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	persen	-	100	1.321.275.200,00	100,000	1.122.244.000	100,000	163.920.000	100,000	163.920.000	100,000	760.600.000	100,000	173.920.000	100,000	2.384.604.000	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun kedepan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada kurun waktu 5 tahun mendatang kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah di proyeksikan sedikit mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

7.1.1 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan data keuangan masa lalu (tahun 2011 – 2015), maka disusunlah perkiraan atau prediksi pendapatan dan belanja daerah untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Perkiraan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 tersaji secara lengkap pada tabel dibawah ini.



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

Tabel 7. 1 Perkiraan/Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun Anggaran 2016 – 2021

REK	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	6	7
1	PENDAPATAN	810.908.300.804,00	757.788.418.018,67	837.113.577.170,07	902.045.842.460,67	1.014.817.378.905,00	1.070.308.823.651,00
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.146.013.501,00	105.362.274.946,67	102.408.553.170,07	107.962.523.760,67	106.190.542.563,00	115.397.262.605,00
01.01.01	Hasil Pajak Daerah 1)	33.274.500.000,00	46.467.044.131,00	60.000.000.000,00	61.522.158.000,00	46.403.443.148,00	50.426.621.669,00
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah 1)	3.836.720.250,00	3.983.263.250,00	4.278.274.995,00	4.108.576.195,00	5.350.554.630,00	5.814.447.717,00
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.250.000.000,00	3.201.397.365,67	3.026.753.743,26	3.201.397.365,67	4.532.335.280,00	4.925.288.749,00
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.784.793.251,00	51.710.570.200,00	35.103.524.431,81	39.130.392.200,00	49.904.209.505,00	54.230.904.470,00
01.02	DANA PERIMBANGAN	631.941.346.933,00	591.305.805.000,00	635.693.104.000,00	697.832.137.100,00	805.936.657.758,00	846.233.490.648,00
01.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	95.657.788.933,00	57.814.014.000,00	81.650.248.000,00	81.650.248.000,00	91.657.215.472,00	96.240.076.246,00
01.02.02	Dana Alokasi Umum	438.706.118.000,00	433.161.224.000,00	440.265.288.000,00	440.265.288.000,00	533.250.028.343,00	559.912.529.761,00
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	97.577.440.000,00	100.330.567.000,00	11.377.756.800,00	175.916.601.100,00	181.029.413.943,00	190.080.884.641,00
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.820.940.370,00	61.120.338.072,00	99.011.920.000,00	96.251.181.600,00	102.690.178.584,00	108.678.070.398,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	2.943.074.298,00	1.000.000.000,00	15.993.600.000,00	14.566.215.200,00	2.943.074.298,00	2.943.074.298,00
01.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.797.114.072,00	20.797.114.072,00	30.400.000.000,00	29.066.646.400,00	25.279.022.138,00	26.542.973.245,00
01.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79.080.752.000,00	34.088.724.000,00	35.618.320.000,00	35.618.320.000,00	36.189.965.049,00	39.000.000.000,00
01.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.234.500.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	38.278.115.073,00	40.192.020.827,00
2	BELANJA	960.016.061.437,00	802.573.586.806,80	911.471.369.026,65	982.005.638.358,99	1.075.861.097.597,00	1.121.164.250.798,91
02.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	427.204.076.625,00	388.896.470.267,80	398.275.377.608,82	441.335.392.327,50	561.225.473.307,00	612.798.500.048,00
02.01.01	Belanja Pegawai	326.230.729.500,00	291.316.829.852,80	288.619.900.877,00	336.289.756.708,00	451.897.484.098,00	497.087.232.508,00
02.01.04	Belanja Hibah	10.131.980.000,00	6.821.870.000,00	12.006.505.000,00	8.295.209.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

7.2 | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

REK	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	6	7
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	2.471.900.000,00	316.000.000,00	322.000.000,00	916.000.000,00	2.471.900.000,00	2.471.900.000,00
02.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.471.900.000,00	6.480.698.015,00	8.555.618.531,82	6.563.073.419,50	5.175.399.778,00	5.624.106.939,00
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	3.711.122.025,00	83.761.072.400,00	88.271.353.200,00	88.271.353.200,00	98.680.689.431,00	104.615.260.601,00
20.108	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
02.02	BELANJA LANGSUNG	532.811.984.812,00	413.677.116.539,00	513.195.991.417,83	540.670.246.031,49	514.635.624.290,00	508.365.750.750,91
02.02.01	Belanja Pegawai	81.988.648.250,00	84.650.975.639,00	93.035.029.666,05	65.630.378.600,00	88.588.180.540,00	89.474.062.346,00
02.02.02	Belanja Barang Dan Jasa	183.970.264.812,00	186.444.533.638,00	220.562.718.293,71	185.118.126.533,99	193.726.671.610,00	195.663.938.327,00
02.02.03	Belanja Modal	266.853.071.750,00	142.581.607.262,00	199.598.243.458,07	289.921.740.897,50	232.320.772.140,00	223.227.750.077,91
SURPLUS / (DEFISIT)			-44.785.168.788,13	-74.357.791.856,58	-79.959.795.898,32	-61.043.718.692,00	-50.855.427.147,91
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	153.107.760.633,00	45.896.387.837,40	76.073.987.663,85	80.999.795.898,32	66.043.720.718,00	55.588.439.175,91
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.107.760.633,00	42.085.387.837,40	71.762.987.663,85	79.495.049.498	61.879.338.121	556.115.101
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	4.311.000.000,00	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000,00	38.110.000.000,00	0,00	1.504.746.400	4.164.382.597	4.289.314.074,91
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	1.111.219.049,27	1.716.195.807,27	1.040.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
03.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000.000	1.000.000.000
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.040.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
03.02.05	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	110.124.289,00				
03.02.06	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.094.760,27	216.195.807,27	0	0	
PEMBIAYAAN NETTO			44.785.168.788,13	74.357.791.856,58	79.959.795.898,32	61.043.720.718,00	50.855.429.175,91
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			0,00	0,00	0,00	2.026,00	2.028,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Belitong Timu



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2016-2021

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah disusun berdasarkan tindak lanjut dari kebijakan yang memadukan antara isu strategis dan visi Bupati terpilih. Penyusunan program perangkat daerah juga disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah terkini. Program perangkat daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 7.2 dibawah ini.



Tabel 7.2
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Pendidikan																		
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup			Indeks Ketahanan Keluarga	Persen		0		0,000		0,000		0,000		0,000						
			Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	Program Pendidikan Non Formal	Banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan non formal	Orang	100%	350	870.540.000,00	300,000	1.394.635.000	275,000	1.523.596.000	200,000	1.463.340.000	150,000	0	100,000	0	100,000	Dinas Pendidikan	
				Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Angka rata rata lama sekolah	Tahun	157 orang	7,95	-	8,000	7.224.173.000	8,050	4.602.500.000	8,150	2.924.340.000	8,180	3.500.000.000	8,200	3.700.000.000	8,200	21.951.013.000	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya mutu pendidikan SMP dan APM	%	-	84,7	-	89,180	0	90,010	8.312.754.000	91,050	9.767.587.000	91,890	4.690.000.000	92,880	5.820.000.000	92,880	28.590.341.000	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) TK/PAUD	%	42,84%	57,5	1.220.420.000,00	60,000	1.481.600.000	61,000	3.648.451.000	62,000	6.057.354.000	63,000	0	64,000	0	61,000	11.187.405.000	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu tenaga pendidik	%	100%	75	8.492.033.200,00	78,000	3.176.734.000	80,000	4.360.602.000	85,000	6.289.229.000	90,000	75.000.000	95,000	115.000.000	85,600	14.016.565.000	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar	%	-	90,88	-	93,750	0	93,800	10.167.164.240	94,050	10.633.427.000	94,250	4.940.000.000	94,820	6.300.000.000	94,820	32.040.591.240	Dinas Pendidikan
				Kesehatan																		
	Memerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Kelancaran Operasional Pelayanan Rumah Sakit	%	-	75	10.069.301.459,00	80,000	19.145.812.394	85,000	21.962.557.823	85,500	15.145.002.362	86,000	33.027.725.361	86,500	24.381.612.648	86,500	113.662.710.588	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Kepuasan Pelayanan	%	-	73,48	20.258.000.000,00	77,650	33.324.904.596	80,880	27.718.453.474	83,350	25.899.444.205	85,020	23.424.892.518	86,720	24.048.368.919	86,720	134.416.063.712	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan sesuai Standar Rumah Sakit	%	0	100	560.166.000,00	100,000	457.350.000	100,000	0	100,000	128.000.000	100,000	577.180.000	100,000	316.920.000	100,000	1.479.450.000	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
				Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	%	-	100	167.967.572,00	100,000	0	100,000	0	100,000	188.277.092	100,000	232.879.392	100,000	197.947.483	100,000	619.103.967	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Beredarnya Makanan Yang Sehat Dilingkungan Masyarakat	%	94%	30	-	0,000	24.000.000	50,000	23.985.000	50,000	100.000.000	52,000	55.000.000	55,000	70.340.000	55,000	273.325.000	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	Persen	100	80	6.972.061.000,00	81,000	10.503.480.250	82,000	12.793.022.980	84,000	12.217.935.000	85,000	7.920.265.797	86,000	7.074.659.036	86,000	50.509.363.063	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	60	11.644.741.700,00	70,000	11.212.106.493	80,000	19.198.380.000	85,000	22.066.680.000	90,000	21.658.251.000	90,000	22.266.680.000	90,000	96.402.097.493	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	%	50	80	1.221.498.000,00	80,000	3.613.847.500	82,000	5.403.052.500	85,000	1.235.727.880	87,000	8.051.170.500	90,000	8.094.327.500	90,000	26.398.125.880	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Tersedianya obat dan vaksin di puskesmas	%	68	68	3.563.740.000,00	70,000	2.882.980.975	72,000	2.164.585.000	75,000	3.763.340.000	77,000	6.128.242.000	80,000	3.715.720.000	80,000	18.654.867.975	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	Persen	50	80	-	82,000	99.857.500	85,000	100.700.000	87,000	315.850.000	90,000	134.140.000	95,000	151.500.000	95,000	802.047.500	Puskesmas Denda
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas,Puskesmas Pembantu,Poskes des/Polindes yang dilengkapi fasilitas kesehatannya	unit	100%	0	3.500.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	11,000	205.000.000	11,000	220.000.000	11,000	425.000.000	Puskesmas Denda
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	Persen	50	80	37.200.000,00	82,000	18.000.000	0,000	0	87,000	132.500.000	90,000	232.500.000	92,000	255.500.000	92,000	638.500.000	Puskesmas Gantung

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/Poskesdes Yang Dilengkapi Fasilitas Kesehatannya	Unit	100%	0	235.000.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	150.000.000	12,000	130.000.000	12,000	130.000.000	8,000	410.000.000	Puskesmas Gantung
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	persen	50	80	7.500.000,00	82,000	116.600.000	85,000	30.000.000	87,000	270.185.000	90,000	264.000.000	92,000	290.000.000	92,000	970.785.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Poskesdes /Polindes yang dilengkapi fasilitas kesehatannya	Unit	80%	0	250.725.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	9,000	120.000.000	9,000	140.000.000	9,000	260.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	Persen	50	80	97.754.000,00	82,000	159.416.000	85,000	142.125.000	87,000	391.416.000	90,000	315.280.000	92,000	347.493.000	92,000	1.355.730.000	Puskesmas Manggar
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes yang dilengkapi fasilitas kesehatan	Unit	80%	0	20.000.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	11,000	190.000.000	11,000	190.000.000	11,000	380.000.000	Puskesmas Manggar
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	Persen	50	80	18.980.000,00	82,000	133.014.000	85,000	0	87,000	134.139.900	90,000	147.553.890	92,000	157.434.934	92,000	572.142.724	Puskesmas Mengkubang
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar	Persen	90	80	-	82,000	160.384.000	84,000	19.240.000	86,000	117.305.000	88,000	146.640.500	90,000	166.304.550	90,000	609.874.050	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes yang dilengkapi Fasilitas Kesehatannya	Unit	90%	0	62.900.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	9,000	220.000.000	9,000	240.000.000	9,000	460.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar	Persen	50	80	-	82,000	198.009.000	85,000	20.000.000	87,000	50.000.000	90,000	219.000.000	92,000	233.000.000	92,000	720.009.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas,Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes Yang Dilengkapi Fasilitas Kesehatannya	Unit	60%	0	115.000.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	6,000	80.000.000	6,000	80.000.000	6,000	160.000.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	Persen	-	0	560.166.000,00	14,000	509.407.000	28,000	842.545.000	57,000	160.000.000	85,000	476.130.000	100,000	545.000.000	100,000	2.533.082.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana BKJM, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/Poskesdes Yang Dilengkapi Fasilitas Kesehatan	Unit	1	0	75.050.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	6,000	80.000.000	6,000	80.000.000	6,000	160.000.000	Puskesmas Mengkubang
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitang Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup			Indeks Ketahanan Keluarga	Persen		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				
			Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup	Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Pusat Informasi Konsultasi (PIK) Remaja yang dibuka	Persen	100	52,77	-	55,550	89.455.000	55,550	102.134.000	55,550	172.078.000	72,220	200.000.000	72,220	172.078.000	72,220	735.745.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	%	0	0	198.868.000,00	0,000	53.320.000	25,000	131.365.000	44,000	280.520.000	69,000	213.570.000	90,000	524.903.000	90,000	1.203.678.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	87	87	-	0,000	0	92,000	163.543.000	94,000	85.061.000	96,000	78.446.000	98,000	95.061.000	98,000	422.111.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran hidup	95%	102	131.373.000,00	102,000	659.869.000	102,000	1.474.998.000	102,000	557.713.000	51,000	557.713.000	51,000	557.713.000	81,600	3.808.006.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka Kematian Bayi	per 1000 Kelahiran hidup		23		22,000		20,000		18,000		15,000		10,000		10,000		
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM)	%		95		95,000		95,000		96,000		96,000		97,000		97,000		
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	95 orang	0,04	205.650.000,00	0,130	173.200.000	0,100	173.200.000	0,090	160.437.000	0,080	150.000.000	0,070	190.000.000	0,070	846.837.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	%	50	16	747.862.000,00	15,900	572.623.000	15,750	563.252.000	15,500	3.165.484.000	15,250	1.892.231.505	15,000	1.444.091.600	15,000	7.637.682.105	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	%	88	88	-	90,000	19.894.000	91,000	18.192.000	92,000	23.385.000	92,000	30.000.000	93,000	23.385.000	93,000	114.856.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka Kematian Balita	per 1000 Kelahiran hidup		25		23,000		20,000		18,000		15,000		10,000		10,000		
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif dengan strategi	%	50	50	425.963.000,00	55,000	99.740.000	60,000	164.955.000	65,000	230.740.000	70,000	280.690.000	75,000	331.690.000	75,000	1.107.815.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM)	Persen	100	0	7.745.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	8.000.000	85,000	9.000.000	82,500	17.000.000	Puskesmas Dendang
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	85.000.000	0,000	105.000.000	0,000	190.000.000	Puskesmas Dendang
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan penyakit menular	Persen	100	16	3.780.000,00	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	22.000.000	12,000	32.000.000	12,000	54.000.000	Puskesmas Dendang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	Persen	-	70	-	70,000	0	75,000	0	78,000	0	83,000	20.000.000	87,000	25.000.000	87,000	45.000.000	Puskesmas Dendang
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	Persen	50	50	5.850.000,00	55,000	20.000.000	60,000	0	65,000	13.582.000	70,000	41.000.000	75,000	52.000.000	75,000	126.582.000	Puskesmas Dendang
				Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	70.000.000	100,000	80.000.000	100,000	150.000.000	Puskesmas Dendang
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa DUK	Persen	-	0	-	0,000	0	50,000	0	60,000	0	70,000	15.000.000	80,000	19.000.000	80,000	34.000.000	Puskesmas Dendang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usi 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	89,86	25	-	35,000	47.550.000	45,000	0	55,000	70.000.000	60,000	77.000.000	65,000	85.000.000	65,000	279.550.000	Puskesmas Dendang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Persen	87	45	-	50,000	18.000.000	0,000	0	60,000	39.500.000	65,000	45.000.000	70,000	50.000.000	70,000	152.500.000	Puskesmas Gantung
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar (SPM)	Persen	18 balita	0	7.800.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	10.000.000	85,000	12.000.000	82,500	22.000.000	Puskesmas Gantung
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	132.500.000	0,000	142.500.000	0,000	275.000.000	Puskesmas Gantung
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persen	200	0	26.000.000,00	0,000	0	0,000	0	14,000	25.000.000	13,000	50.000.000	12,000	56.250.000	12,000	131.250.000	Puskesmas Gantung

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 Bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita Sesuai Standar (SPM)	Persen	-	80	-	80,000	5.000.000	0,000	0	87,000	10.000.000	89,000	15.000.000	90,000	20.000.000	90,000	50.000.000	Puskesmas Gantung
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	50	50	23.700.000,00	55,000	1.750.000	0,000	0	0,000	0	70,000	105.000.000	75,000	117.500.000	75,000	224.250.000	Puskesmas Gantung
				Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	98,000	85.000.000	100,000	95.000.000	100,000	180.000.000	Puskesmas Gantung
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	40,000	42.500.000	60,000	52.000.000	60,000	94.500.000	Puskesmas Gantung
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit menular	Persen	-	16	-	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	58.000.000	12,000	66.500.000	12,000	124.500.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 Bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	Persen	-	80	-	80,000	0	85,000	0	87,000	0	89,000	25.000.000	90,000	30.000.000	90,000	55.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	50	50	-	55,000	29.000.000	60,000	0	65,000	97.500.000	70,000	130.000.000	75,000	145.000.000	75,000	401.500.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	90.000.000	100,000	95.000.000	100,000	185.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	Persen	-	0	-	20,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	37.500.000	70,000	45.000.000	70,000	82.500.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	88	50	-	50,000	63.600.000	55,000	0	60,000	155.000.000	65,000	165.000.000	70,000	175.000.000	70,000	558.600.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu hamil sesuai Standar (SPM)	Persen	-	0	13.180.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	15.000.000	85,000	20.000.000	82,500	35.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	122.000.000	0,000	140.000.000	0,000	262.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase penurunan penyakit menular	Persen	-	16	-	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	64.350.000	12,000	71.585.000	12,000	135.935.000	Puskesmas Manggar
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	Persen	-	80	-	80,000	0	85,000	0	87,000	0	89,000	15.000.000	90,000	17.500.000	90,000	32.500.000	Puskesmas Manggar
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	Persen	50	50	21.310.000,00	55,000	24.530.000	60,000	0	65,000	90.530.000	70,000	141.583.000	75,000	167.056.000	75,000	423.699.000	Puskesmas Manggar
				Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	85.000.000	100,000	95.000.000	100,000	180.000.000	Puskesmas Manggar
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa ODF	Persen	-	0	-	11,000	0	30,000	0	40,000	0	50,000	42.500.000	60,000	52.000.000	60,000	94.500.000	Puskesmas Manggar
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	87	50	-	50,000	72.310.000	55,000	0	60,000	121.400.000	65,000	133.540.000	70,000	146.000.000	70,000	473.250.000	Puskesmas Manggar
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar (SPM)	Persen	-	0	39.100.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	10.000.000	85,000	12.000.000	82,500	22.000.000	Puskesmas Manggar
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka balita gizi buruk	Persen	3	0	31.610.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	117.956.000	0,000	132.750.000	0,000	250.706.000	Puskesmas Manggar
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu hamil Sesuai Standar (SPM)	Persen	0	90	24.440.000,00	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	10.000.000	90,000	12.000.000	90,000	22.000.000	Puskesmas Mengkubang
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	100	0	68.030.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	22.468.000	0,000	53.591.400	0,000	59.770.970	0,000	135.830.370	Puskesmas Mengkubang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persentase	-	16	-	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	62.000.000	12,000	69.000.000	12,000	131.000.000	Puskesmas Mengkubang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan balita Sesuai Standar (SPAM)	Persentase	-	88	-	90,000	0	91,000	0	92,000	0	92,000	20.000.000	93,000	25.000.000	93,000	45.000.000	Puskesmas Mengkubang
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	50	50	12.250.000,00	55,000	13.425.000	60,000	0	65,000	10.567.500	70,000	11.624.250	75,000	12.205.462	75,000	47.822.212	Puskesmas Mengkubang
				Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPAM)	Persentase	-	90	-	90,000	0	92,000	0	94,000	0	96,000	90.000.000	100,000	98.000.000	100,000	188.000.000	Puskesmas Mengkubang
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa QdG	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	20,000	0	40,000	42.500.000	60,000	52.000.000	60,000	94.500.000	Puskesmas Mengkubang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase warga Negara Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Persentase	90,44	0	-	0,000	99.600.000	45,000	0	80,000	63.410.000	85,000	69.751.000	90,000	73.238.550	90,000	305.999.550	Puskesmas Mengkubang
					Pemberian PMT	Persentase	-	90	-	90,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	0	90,000	0	67,500	0	
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	90	0	10.005.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	78,000	30.008.000	80,000	33.080.000	79,000	63.088.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	75.000.000	0,000	90.000.000	0,000	165.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	-	70	-	70,000	0	75,000	0	80,000	0	85,000	50.000.000	88,000	60.000.000	88,000	110.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	20	50	-	55,000	17.039.000	60,000	0	65,000	16.780.000	70,000	38.458.000	75,000	45.303.800	75,000	117.580.800	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	70.000.000	100,000	80.000.000	100,000	150.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa QdG	Persen	-	0	-	20,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	42.000.000	70,000	48.000.000	70,000	90.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Sesuai Standar	Persen	90	50	-	50,000	13.440.000	55,000	0	60,000	35.940.000	65,000	39.534.000	70,000	43.487.400	70,000	132.401.400	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPAM)	Persen	-	90	-	92,000	0	94,000	0	96,000	0	98,000	80.000.000	100,000	90.000.000	100,000	170.000.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa QdG	Persen	-	0	-	25,000	0	75,000	0	75,000	0	85,000	42.500.000	85,000	52.000.000	85,000	94.500.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Persen	85	50	-	50,000	57.400.000	55,000	0	60,000	0	65,000	80.000.000	70,000	90.000.000	70,000	227.400.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar (SPAM)	Persen	0	0	48.997.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	7.000.000	85,000	8.500.000	82,500	15.500.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	40.000.000	0,000	100.000.000	0,000	115.000.000	0,000	255.000.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persen	-	16	-	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	56.000.000	12,000	71.000.000	12,000	127.000.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (SPAM)	Persen	-	80	-	80,000	0	85,000	0	87,000	0	89,000	20.000.000	90,000	25.000.000	90,000	45.000.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	50	50	-	55,000	25.705.000	60,000	0	65,000	0	70,000	85.400.000	75,000	98.940.000	75,000	210.045.000	Puskesmas Simpang Renggang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persen	90	16	12.000.000,00	16,000	0	15,000	0	14,000	0	13,000	22.000.000	12,000	29.000.000	12,000	51.000.000	Puskesmas Simping Pesak
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
	Membangun dan memperbaiki infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung Timur	memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan/diperbaiki	km		164,6	4.628.139.000,00	13,000	26.529.131.000	18,000	67.163.236.102	32,000	44.469.398.896	33,000	47.994.483.000	33,000	47.652.094.000	129,000	233.808.342.998	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%		79,86		80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		
				Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data kondisi jalan dan jembatan yang perlu perbaikan	Laporan		0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	1,000	500.000.000	1,000	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%		74,41		0,000	2.411.922.000	76,660	14.661.969.000	80,020	7.667.829.000	82,870	10.093.883.000	84,990	11.010.570.000	84,990	45.846.173.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase Rumah Tangga Bersantitas	%		64,58		0,000		82,000		89,000		93,000		100,000		100,000		
				Program Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi banjir	%		80		82,000	4.887.550.000	84,000	2.988.330.000	86,000	8.200.000.000	88,000	2.680.000.000	90,000	3.066.061.000	90,000	21.821.941.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%		100		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
				Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase kapasitas air baku	%		61,39	195.212.600,00	62,000	1.351.357.000	64,000	862.911.908	65,000	2.785.273.000	66,000	2.509.450.000	68,000	1.471.777.000	68,000	8.980.768.908	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam Kondisi Baik	%		90		92,000	959.115.000	94,000	528.317.000	95,000	983.762.000	97,000	1.950.762.000	100,000	1.913.492.000	100,000	6.335.448.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah	pembangunan infrastruktur pelayanan pemerintah daerah	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Kawasan Cepat Tumbuh	Hektar		0		0,000	745.010.000	0,000	0	0,000	80.000.000	0,000	2.822.683.000	0,000	2.655.000.000	0,000	6.302.693.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase jalan lingkungan yang dibangun	%		75		80,000	210.075.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	210.075.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman	Persentase Sarana dan Prasarana Taman dengan Kondisi Baik	%		70		75,000	986.729.000	80,000	0	0,000	0	85,000	872.000.000	90,000	863.340.000	90,000	2.722.069.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakarya	Persentase Sarana dan Prasarana Keciptakarya yang terpenuhi	%		100		0,000	0	0,000	31.475.000	100,000	0	0,000	318.585.000	100,000	194.633.000	100,000	544.693.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pembangunan Gedung Negara	Persentase Gedung Negara Dalam Kondisi baik	%		0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	2,000	568.234.000	2,000	412.000.500	2,000	980.234.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase taman yang asri di Kabupaten Belitung Timur	%		80	1971150000	0,000	0	83,000	1.290.950.000	86,000	2.390.250.000	89,000	1.801.600.000	90,000	1.514.180.000	90,000	6.996.980.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					persentase Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTHI)	%		100		0,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
				Program Penataan dan Pembangunan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang Sesuai Standar	%		70		75,000	410.290.000	80,000	0	83,000	107.000.000	85,000	1.809.650.000	88,000	3.463.165.000	88,000	5.790.105.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase ketersediaan jaringan listrik pemukiman	%		90		95,000	456.550.000	0,000	0	97,000	435.625.000	0,000	0	0,000	0	0,000	892.175.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemanfaatan lahan sesuai dengan RTW		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Kab. Belitung Timur	%		50		100,000	739.050.000	100,000	495.450.000	100,000	1.600.000.000	100,000	3.798.856.000	100,000	4.952.664.001	100,000	11.586.020.001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan tata ruang	%		0		0,000	0	0,000	0	50,000	286.438.000	75,000	462.899.000	100,000	608.320.000	100,000	1.357.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengembangan Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	Dokumen		0		0,000	0	0,000	0	0,000	500.000.000	1,000	598.090.000	1,000	418.900.000	1,000	1.516.990.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Ruang publik yang berubah penurutan	%		0		0,000	0	100,000	39.960.000	100,000	80.000.000	100,000	120.000.000	100,000	125.000.000	100,000	364.960.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penanggulangan dan penanganan bencana		Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong dengan kondisi baik	persentase turap,talud,bronjong dengan kondisi baik	100		100		100,000	908.650.000	100,000	567.600.000	100,000	618.000.000	100,000	500.000.000	100,000	540.789.000	100,000	3.135.039.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program pengendalian banjir	Persentase Kawasan Rawan Banjir yang di tangani	%		100		100,000	1.513.400.000	100,000	1.169.950.000	100,000	5.150.000.000	100,000	4.659.703.000	100,000	3.996.268.000	100,000	16.489.321.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
				Program Pembangunan/Peningkatan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	m		5000		3.000.000	5.024.400.000	1.000.000	2.778.377.673	1.000.000	6.695.000.000	1.000.000	2.114.987.000	1.000.000	2.567.987.000	7.000.000	19.180.751.673	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase desa yang memiliki akses embung/penampungan air	%		0		0,000	214.550.000	33,330	596.200.000	66,660	2.895.500.000	66,660	3.438.577.000	99,990	2.787.089.000	99,990	9.931.916.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air	database sumber daya air	dokumen		3		1,000	98.672.000	0,000	0	2,000	615.000.000	0,000	0	0,000	0	3,000	713.672.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase luas irigasi yang dapat dialiri air irigasi	%		54		70,000	6.270.265.000	70,000	4.304.347.000	70,000	7.500.032.720	70,000	4.565.961.920	70,000	4.152.675.000	70,000	26.793.281.640	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
	Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung Timur	memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	persen		28		0,000	0	0,000	0	0,000	0	46,000	8.906.939.250	51,000	9.800.000.000	48,500	18.706.939.250	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen		86		89,000	3.344.046.400	90,000	8.651.497.850	92,000	10.679.757.500	94,000	11.279.119.000	96,000	12.239.302.300	96,000	46.193.723.050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rasio cakupan lingkungan permukiman dengan fasilitas pencegahan bahaya kebakaran	persen		38		38,000	226.050.000	38,000	0	38,000	0	59,000	2.000.000.000	67,000	4.000.000.000	67,000	6.226.050.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	rasio		20017		19.500,000	0	19.000,000	0	18.500,000	0	18.000,000	220.000,000	17.600,000	1.550.000.000	17.600,000	1.770.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial yang dibantu	Rasio rumah terkena bencana alam/sosial yang dibantu	persen		100		0,000	0	100,000	0	0,000	0	100,000	400.000.000	100,000	400.000.000	100,000	800.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Sosial																		
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah	Penanggulngan dan penanganan bencana	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesiapsiagaan dan pencegahan dini terhadap Penanggulangan korban bencana	Persen (%)		60		70,000	310.037.600	75,000	332.038.000	80,000	331.299.000	85,000	583.400.000	90,000	625.000.000	80,000	2.181.774.600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Perlindungan Sosial	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Penanganan Anak Terlantar	Persen		100		100,000	97.375.000	100,000	34.250.000	100,000	70.580.000	100,000	43.500.000	100,000	75.000.000	100,000	320.705.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Terwujudnya pembinaan anak terlantar	Jiwa		1698		1.698,000		1.698,000		1.698,000		1.698,000		1.698,000		1.698,000		
				Program Keluarga Harapan	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap pendidikan dan kesehatan bagi RTSM sasaran	Jiwa		2202		2.202,000	122.250.000	2.202,000	100.000.000	2.202,000	149.655.000	2.202,000	150.000.000	2.202,000	150.000.000	2.202,000	671.905.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan (PSPPK)	Tersedianya pelayanan dan rujukan bagi masyarakat penerima program kesejahteraan sosial	bulan		12		12,000	330.165.000	12,000	254.254.000	12,000	447.415.000	12,000	530.000.000	12,000	600.000.000	12,000	2.161.834.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase penyelenggaraan panti jompo	persen		100		100,000	15.600.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	15.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Peningkatan Kesadaran Terhadap Hari Besar Nasional	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat yang terlibat dalam peringatan Hari Besar Nasional	persen		80		85,000	39.825.000	88,000	60.000.000	90,000	68.600.000	95,000	70.000.000	100,000	80.000.000	100,000	318.425.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya honorium untuk 39 psm yang tersebar di setiap Desa	orang		39		39,000	604.655.000	39,000	753.500.000	39,000	767.585.000	39,000	785.000.000	39,000	845.000.000	39,000	3.755.740.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	orang		25		25,000	346.453.500	25,000	292.065.000	25,000	312.795.000	25,000	368.000.000	25,000	410.000.000	25,000	1.729.313.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pemberdayaan Keluarga	Terwujudnya ketahanan keluarga dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan yang akan mempengaruhi psikososial keluarga	Jawa		921		921,000	127.081.000	921,000	94.750.000	921,000	118.250.000	921,000	132.500.000	921,000	155.000.000	921,000	627.581.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang dipenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	100		0		100,000	122.055.000	100,000	198.624.000	100,000	193.780.000	100,000	211.410.000	100,000	226.410.000	100,000	952.279.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Tersedianya Tenaga Pelatih dan pelatih dan Pendidik disabilitas yang terampil dan profesional	orang		4		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		
				Program Satu Hati Bangun Negeri (Sinegi)	Meningkatnya Kapasitas dan Kesejahteraan Keluarga Sasaran	Orang		547		600,000	288.013.000	600,000	313.592.000	625,000	281.824.500	650,000	281.824.500	675,000	313.572.000	630,000	1.478.826.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial. (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Orang		29		29,000	19.580.000	29,000	99.300.000	29,000	131.020.000	29,000	252.500.000	29,000	280.000.000	29,000	782.400.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persen		100		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KUBE yang Terfasilitasi	persen		100		100,000	75.329.000	100,000	210.905.000	100,000	256.410.000	100,000	465.000.000	100,000	480.000.000	100,000	1.487.644.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS	Kali		0		0,000	0	0,000	0	0,000	25.000.000	14,000	75.000.000	14,000	75.000.000	9,333	175.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
					Tersedianya data kepesertaan BPJS yang akurat	buku laporan		0		0,000		0,000		0,000		1,000		1,000		0,667		
					Terlaksananya amanat Pasal 40 aya (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD	Laporan		0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		
					Terlaksananya program TPAS	UKS		0		0,000		0,000		0,000		4,000		4,000		2,667		
				Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Sosial Sesuai Aturan	persen (%)		100		0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	75.000.000	100,000	80.000.000	100,000	155.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		
	Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat partisipasi peserta dalam peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	persen		100		100,000	0	100,000	0	100,000	170.000.000	100,000	700.000.000	100,000	728.000.000	100,000	1.598.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan yang representatif	persen		80		80,000	80.000.000	85,000	155.280.000	90,000	212.240.000	95,000	216.287.000	100,000	245.276.000	90,000	909.083.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pembinaan Ormas, LSM, OKP	Persentase pembinaan Ormas, LSM, OKP	persen		80		80,000	0	90,000	60.664.000	90,000	75.000.000	95,000	75.000.000	100,000	75.000.000	93,750	285.664.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan	persentase		100		100,000	117.961.000	100,000	653.330.600	100,000	1.095.000.000	100,000	1.288.000.000	100,000	1.323.000.000	100,000	4.477.291.600	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program pendidikan politik masyarakat	persentase Tingkat pembinaan politik daerah	persen		70		70,000	104.050.000	80,000	122.000.000	85,000	315.000.000	95,000	320.000.000	100,000	325.000.000	86,000	1.186.050.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Tingkat pengawasan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu	persen		80		0,000	785.605.000	85,000	0	85,000	900.000.000	60,000	500.000.000	90,000	100.000.000	90,000	2.285.605.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pemeliharaan Kantrantribas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik	persen		100		100,000	674.360.000	100,000	624.000.000	100,000	1.371.000.000	100,000	1.725.000.000	100,000	1.745.000.000	100,000	6.139.360.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Pengembangan dan Profesionalisme Kemampuan Aparatur Polisi Pamong Praja (POLPP)	Jumlah Anggota Pol PP mengikuti Magang, Gelar Pasukan, dan Jambore SATPOLPP	orang		30		50,000	162.925.000	75,000	274.932.927	125,000	377.000.000	150,000	400.000.000	200,000	420.000.000	600,000	1.634.857.927	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pemeliharaan Kantrantribas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Persentase penanganan Perda	persen		0,8		0,450	341.242.000	1,000	472.532.000	0,400	395.443.238	0,350	2.057.775.000	0,500	1.709.275.000	0,540	4.976.267.238	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah tenaga Keamanan Lingkungan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Lingkungan Masyarakat	orang		314		0,000	0	390,000	1.696.500.000	390,000	3.380.099.000	390,000	4.285.000.000	390,000	4.590.000.000	390,000	13.951.599.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Membangun dan memperbaiki infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah	Penanggulngan dan penanganan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase daerah rawan bencana yang di bantu dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persen		0		0,000	0	70,000	199.800.000	75,000	330.000.000	78,000	650.000.000	80,000	930.000.000	80,000	2.109.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Terpetaknya Kawasan Risiko Bencana	Persen		0		0,000	0	0,000	174.400.000	35,000	400.000.000	60,000	550.000.000	75,000	700.000.000	75,000	1.824.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				program penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	Persentase daerah rawan bencana yang di bantu dalam penanggulangan bencana	Persen		0		0,000	0	60,000	220.000.000	65,000	210.000.000	70,000	550.000.000	80,000	750.000.000	80,000	1.730.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				program rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	Persentase Daerah bencana yang di rehabilitasi dan rekonstruksi	Persen		0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	50,000	2.000.000.000	75,000	3.000.000.000	75,000	5.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup			Indeks Ketahanan Keluarga	Persen		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				
			Meningkatnya ketahanan keluarga	Program Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Belitung Timur	Terlaksananya bimbingan bagi pelajar dalam menghadapi dampak globalisasi	kali		0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	14,000	50.000.000	14,000	50.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
					Terlaksananya Bimbingan Keagamaan Bagi Lansia	kecamatan		0		0,000		0,000		0,000		0,000		7,000		7,000		
				Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%		100		100,000	384.050.000	100,000	524.625.000	100,000	4.451.425.000	100,000	7.292.200.970	100,000	6.982.641.726	100,000	19.634.942.696	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Peningkatan Iman dan Taqwa Masyarakat Beltim	Fasilitasi Jamaah Haji	%		0		100,000	2.836.410.000	100,000	3.688.692.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	6.525.102.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
					Terciptanya generasi muda yang mampu baca tulis Al-Quran	Kegiatan		0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		
					Tersedianya Qori dan Qoriah perwakilan Kab. Belitung Timur	Orang		0		26,000		10,000		26,000		10,000		26,000		18,000		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggungjawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat	persen		100		100,000	162.946.000	100,000	214.881.000	100,000	427.000.000	100,000	717.000.000	100,000	727.000.000	100,000	2.248.827.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, keindahan k3 yang tertarget	kasus		6		5,000	71.910.000	4,000	94.072.800	0,000	223.619.500	4,000	237.500.000	5,000	245.000.000	18,000	872.102.300	Satuan Polisi Pamong Praja
				Perhubungan																		
	Membangun dan memperbaiki infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan	Meningkatkan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung Timur	memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Perhubungan	Persentase SDM Perhubungan yang bersertifikat	Orang		30	73.520.000,00	0,000	0	0,000	0	20,000	37.200.000	20,000	50.000.000	20,000	50.000.000	20,000	137.200.000	Dinas Perhubungan
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana dan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	Persen		100	89.950.000,00	100,000	107.000.000	100,000	306.656.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	413.656.000	Dinas Perhubungan
				Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase fasilitas dan perlengkapan jalan yang terpelihara	Persen		40	977.325.000,00	50,000	2.215.632.000	55,000	1.121.985.000	60,000	4.069.563.000	65,000	3.741.523.000	70,000	5.050.548.000	70,000	16.199.251.000	Dinas Perhubungan
				Program peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan wilayah yang terlayani angkutan umum	Persen		20	196.672.000,00	30,000	680.182.500	35,000	417.349.000	40,000	272.368.000	45,000	870.000.000	50,000	870.000.000	50,000	3.109.899.500	Dinas Perhubungan
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen		50		50,000	238.300.000	50,000	0	70,000	293.770.000	80,000	70.000.000	80,000	70.000.000	80,000	672.070.000	Dinas Perhubungan
				Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memiliki dokumen perencanaan	Persen		25	649.150.000,00	50,000	78.450.000	60,000	2.821.237.000	75,000	5.810.000	75,000	845.000.000	80,000	1.050.000.000	80,000	4.800.497.000	Dinas Perhubungan
				Program Pengendalian dan Pengamanan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persentase fasilitas pengendalian dan pengamanan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persen		9,1		9,100	0	36,400	0	38,800	304.200.000	40,500	310.000.000	42,100	395.000.000	42,100	1.009.200.000	Dinas Perhubungan
				Program peningkatan kelancaran pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase peningkatan jumlah pengujian kendaraan bermotor	Persen		6	2.221.749.000,00	6,000	92.164.000	7,000	90.772.000	8,400	274.576.000	10,000	4.235.000.000	12,000	1.040.000.000	12,000	5.732.512.000	Dinas Perhubungan
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pengujian Kendaraan Bermotor	Kategori		82		82,000		83,000		85,000		87,000		89,000		85,200		
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan	Persen		10		10,000	0	10,000	0	60,000	139.540.000	80,000	80.000.000	90,000	80.000.000	90,000	299.540.000	Dinas Perhubungan
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah	pembangunan infrastruktur kawasan strategis	Program Pengembangan dan Pembangunan Sarana, Prasarana Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persentase Pembangunan dan pemenuhan Sarana, Prasarana Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persen		20		20,000	0	46,700	0	60,000	330.850.000	66,700	660.000.000	73,300	850.000.000	73,300	1.840.850.000	Dinas Perhubungan
				Lingkungan Hidup																		
	Memerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pertamanan	Persen		0	164.800.000,00	100,000	7.500.000	100,000	15.200.000	100,000	15.200.000	100,000	6.078.000	100,000	10.000.000	100,000	53.978.000	Gantung
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	%		0	164.800.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	200.000.000	100,000	50.000.000	100,000	250.000.000	Dendang
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Persen		0	164.800.000,00	100,000	0	100,000	0	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	35.000.000	100,000	95.000.000	Kelapa Kampit
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Persentase		0		100,000	8.250.000	100,000	52.000.000	100,000	10.000.000	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	100,000	190.250.000	Manggar

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Pemukiman	%		0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	100.000.000	Simpang Pesak
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pemukiman	%		0		100,000	8.000.000	100,000	8.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	166.000.000	Simpang Renggiang
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah	%		32		34,000	2.491.875.000	45,260	4.485.983.000	49,000	2.901.357.000	53,080	4.820.000.000	56,590	4.820.000.000	56,590	19.519.215.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Membangun dan memperbaiki infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Program Penataan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Prosentase Ketaatan Perusahaan yang memiliki izin berproduksi	%		40		50,000	105.157.000	50,000	100.254.000	60,000	51.220.000	70,000	195.000.000	70,000	195.000.000	70,000	646.631.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	%		0	650.230.000,00	0,000	161.500.000	49,170	210.520.000	49,370	180.000.000	49,570	220.000.000	49,770	220.000.000	49,770	992.020.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Pencemaran Udara	%		0		0,000		97,480		97,480		97,480		97,480		97,480		
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Meningkatnya lahan kritis yang tervegetasi	%		15	52.513.000,00	20,000	444.368.000	25,000	461.065.000	35,000	525.847.000	35,000	535.000.000	35,000	535.000.000	35,000	2.501.280.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan SDA	%		40		40,000		50,000		50,000		60,000		60,000		60,000		
				Program Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Limbah	Perentase peningkatan upaya pengendalian dampak lingkungan an pengelolaan limbah oleh uaha an kegiatan untuk menjaga aya ukung an aya tampung lingkungan hidup	%		0		0,000	89.250.000	0,000	29.964.000	50,000	54.000.000	60,000	150.000.000	70,000	150.000.000	70,000	473.214.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Manajemen Mutu dan Teknis Laboratorium	Prosentase tercapainya dukungan akreditasi laboratorium	%		45		50,000	104.850.000	60,000	259.500.000	70,000	137.192.000	70,000	610.000.000	80,000	610.000.000	80,000	1.721.542.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%		10		10,000	122.215.000	20,000	644.285.000	30,000	1.218.710.000	40,000	1.958.000.000	50,000	1.158.000.000	50,000	5.101.210.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatnya penataan kawasan konservasi sumber daya alam	%		50		50,000		50,000		70,000		80,000		80,000		80,000		
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tercapainya kota manggar sebagai Kota Adipura	%		55		65,000	515.133.000	65,000	318.730.000	75,000	424.965.000	75,000	485.000.000	80,000	485.000.000	80,000	2.228.828.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Pertanahan																		
			Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Penyelesaian Tertib Administrasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	%		0		0,000	0	0,000	26.100.000	0,000	0	75,000	605.975.000	100,000	1.195.501.000	100,000	1.827.576.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
	Menerapkan konsep ketatatpemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitang Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Mutu Pelayanan dan Akses Informasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	persen		81,73		84,000	74.953.000	87,000	495.140.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	85,500	570.093.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Kerjasama Kebijakan Kependudukan	Aturan legal formal penyelenggaraan administrasi kependudukan	Jumlah		6		4,000	59.242.000	3,000	55.128.500	2,000	177.852.000	2,000	0	1,000	0	12,000	292.222.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	persen		83,4		0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	530.000.000	100,000	535.000.000	100,000	1.065.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase keterlambatan tata kelola administrasi kependudukan	persen		91,8		100,000	1.194.777.200	100,000	1.312.993.200	100,000	2.128.561.000	100,000	585.000.000	100,000	585.000.000	100,000	5.806.331.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan administrasi kependudukan	Persen		81,73		0,000	0	0,000	0	91,000	611.710.000	0,000	0	0,000	0	91,000	611.710.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	persen		79,57		0,000	0	0,000	0	0,000	0	87,500	170.000.000	90,000	180.000.000	90,000	350.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	persentase ketersediaan sarana prasarana yang mutakhir	persen		75		0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	2.225.000.000	100,000	1.860.000.000	100,000	4.085.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitang Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup			Indeks Ketahanan Keluarga	Persen		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000					
				Meningkatkan ketahanan keluarga	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	Persen (%)	100	100	-	100,000	87.297.000	100,000	99.593.000	100,000	110.125.000	100,000	0	100,000	0	100,000	297.015.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Persentase penanganan anak korban kekerasan	Persen (%)	100	100	-	100,000	19.905.000	100,000	627.469.100	100,000	446.400.000	100,000	500.000.000	100,000	0	100,000	1.593.774.100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen (%)	46,7	46	151.098.000,00	48,000	360.099.000	48,500	250.927.600	49,000	392.220.000	50,500	464.235.000	60,000	545.000.000	51,200	2.012.481.600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rasio KDRT	Persen (%)	0,002	0,002	471.440.000,00	0,003	0	0,003	90.480.000	0,003	116.150.000	0,003	0	0,003	0	0,003	206.630.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Peserta	0	50	-	50,000	21.445.000	60,000	45.241.800	65,000	59.310.000	70,000	70.000.000	75,000	70.000.000	64,000	265.996.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Persen (%)	100	100	37.785.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	820.000.000	100,000	860.000.000	100,000	1.680.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
					Program Penyajian Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Terlatih	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	30,000	70.000.000	50,000	150.000.000	50,000	220.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengendalian Penduduk	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Siswa memahami tentang kes.Reproduksi (Siswa dan Siswi)/SMP/SMU/SMK Kog.Sepanjang Tahun/Bulan	Siswa	1.000	1000	53.388.000,00	300,000	59.100.000	400,000	0	200,000	0	300,000	60.868.000	300,000	70.868.000	1.500,000	190.836.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase wanita dengan usia kawin < 21 Tahun	Persen	0	58	-	57,500	168.900.000	57,950	146.519.000	57,890	146.519.000	55,330	149.020.000	52,970	162.410.000	52,970	773.368.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Program Ketahanan Keluarga	Persentase Tribina (Bina Kelompok Balita, Bina Kelompok Remaja, Bina Kelompok Lansia)	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	55,000	50.000.000	55,000	50.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Persen	2 KK	30	43.500.000,00	35,000	0	40,000	32.730.000	45,000	39.310.000	50,000	39.310.000	55,000	39.310.000	55,000	150.660.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	60	60	899.815.700,00	70,000	722.380.000	72,000	2.863.965.000	75,000	1.012.048.600	76,000	3.141.428.500	76,000	3.031.698.600	76,000	10.771.520.700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Program Pengelolaan Data dan Informasi	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	persen	-	100	1.321.275.200,00	100,000	1.122.244.000	100,000	163.920.000	100,000	163.920.000	100,000	760.600.000	100,000	173.920.000	100,000	2.384.604.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Ketenagakerjaan																			
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi		Menurunnya angka pengangguran	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jansostek (orang)	%	90 perusahaan	88,4	313.497.200,00	88,500	327.716.000	88,600	420.031.000	88,700	444.810.000	88,800	473.200.000	88,900	497.700.000	88,900	2.163.457.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%		0		0,000		0,000		0,000		65,000		67,000		67,000		
				Program Perencanaan Ketenagakerjaan	Tersedianya dokumen perencanaan ketenagakerjaan	Buku	30	0	-	95,000	49.924.000	95,000	0	95,000	50.000.000	0,000	60.000.000	0,000	70.000.000	0,000	229.924.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	-	0	59.840.000,00	0,000	0	0,000	0	0,000	275.000.000	70,000	360.000.000	75,000	490.000.000	75,000	1.125.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	131 orang	0	-	0,000	51.825.000	0,000	274.730.000	0,000	327.000.000	55,000	375.000.000	60,000	440.000.000	60,000	1.468.555.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta pelatihan yang terserap dunia kerja	%	-	0	282.191.000,00	0,000	479.249.000	0,000	279.500.000	0,000	4.392.616.000	75,000	1.889.000.000	80,000	1.937.000.000	80,000	8.977.365.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
				Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat lokal	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	%	0,74	1,1	-	1,150	56.235.000	1,200	48.185.000	1,250	179.404.700	1,300	136.500.000	1,350	146.000.000	1,250	566.324.700	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	%	89	31,2	149.703.100,00	31,400	201.202.000	32,000	203.290.500	32,500	398.664.000	33,000	289.000.000	33,500	292.000.000	32,480	1.384.156.500	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	%	0	1,1	-	1,200	115.735.000	1,500	281.000.000	1,700	295.000.000	1,900	521.500.000	2,100	608.000.000	2,100	1.821.235.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program penciptaan iklim dan Pengembangan Industri Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	umkm	2.384 unit	2384	125.000.800,00	2.600,000	0	2.820,000	150.000.000	3.040,000	92.601.300	0,000	0	0,000	0	0,000	242.601.300	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penanaman Modal																		
	Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan Perizinan	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tepat waktu	persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	70.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	58.000.000	82,000	55.000.000	82,000	113.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
				Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Rupiah	3.182.678.885.471	2,11052E+11	-	87.860.000	87.860.000	45.940.000	0,000	426.872.000	0,000	126.530.000	0,000	124.000.000	0,000	811.202.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
					Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian laporan UKPM	persen		0		0,000		0,000		50,000		55,000		60,000		60,000		
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya pameran investasi	kali	18	5	91.508.000,00	2,000	169.100.000	3,000	561.580.000	2,000	534.332.000	0,000	250.000.000	0,000	250.000.000	7,000	1.765.012.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
					Peningkatan investor baru yang berinvestasi (PMN/PMIA)	investor		5		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000		
				Program Penyipaan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Informasi potensi investasi daerah	dokumen	9	0	-	0,000	20.000.000	0,000	23.825.000	1,000	24.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	67.825.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
					Tersedianya informasi peluang investasi	dokumen		0		1,000		1,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
				Kebudayaan																		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggungjawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
			Meningkatkan PDR sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Tempat	tempat	2%	2	843.421.300,00	0,000	571.510.500	0,000	830.622.500	0,000	1.465.295.000	0,000	1.143.053.000	0,000	1.076.094.000	0,000	5.086.575.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Cakupan Kajian Seni	persen	53	53		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		
					Misi Kesenian antar daerah	kali	2	2		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		
					Cakupan Fasilitas Seni	persen	87	85		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		
					Cakupan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian	kualifikasi	5	5		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
					Cakupan Gelar Seni	persen	100	100		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang didaftarkan menjadi warisan tak benda Indonesia	buah	2	2	57.419.000,00	0,000	20.000.000	0,000	183.960.000	0,000	72.000.000	0,000	725.169.000	0,000	546.780.000	0,000	1.547.909.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah karya budaya daerah yang didokumentasikan	buah	0	0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
					Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diistarkan	buah	628	620		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
					persentase pengelolaan kekayaan budaya	persen		0		90,000		90,000		90,000		90,000		90,000		90,000		
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Aktualisasi Nilai budaya dan kearifan lokal	kali	0	3	172.400.000,00	3,000	184.650.000	3,000	188.880.000	4,000	700.000.000	4,000	536.562.000	4,000	605.000.000	3,600	2.215.092.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Kepemudaan dan Olahraga																		
			Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup		Indeks Ketahanan Keluarga	Persen		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				
			Meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemakaian sarana olahraga terhadap kelayakan sarana prasarana olahraga	Persen	100	100	4.925.625.000,00	100,000	4.288.450.000	100,000	2.851.252.000	100,000	11.487.000.000	100,000	8.000.000.000	100,000	8.000.000.000	100,000	34.626.702.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Pemuda	Persentase Kelembagaan Pemuda Yang Berkualitas Baik	Persen	100	100	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	804.000.000	100,000	804.000.000	100,000	1.608.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi	Persentase pengembangan olahraga rekreasi dan kesegaran jasmani	Persen	100	100	-	100,000	150.000.000	100,000	170.950.000	100,000	580.000.000	100,000	580.000.000	100,000	580.000.000	100,000	2.060.950.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Persentase Pemunahan Sarana dan Prasarana Pemuda Yang Layak Pakai	Persen	100	100	299.030.000,00	100,000	209.750.000	0,000	0	100,000	209.325.000	100,000	500.000.000	100,000	500.000.000	100,000	1.419.075.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda Aktif Dalam Kelembagaan	Persen	100	100	1.070.158.000,00	100,000	614.498.000	100,000	960.968.000	100,000	1.100.000.000	100,000	1.100.000.000	100,000	1.100.000.000	100,000	4.875.466.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program peningkatan produktivitas pemuda	persentase pemuda yang berkualitas yang memiliki pengetahuan dan jiwa kepemimpinan*	Persen	100	100	-	100,000	137.750.000	100,000	275.765.000	100,000	180.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	593.515.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase Olahraga Tradisional dan Kemasyarakatan Yang Dikembangkan	persen	-	100	2.115.175.000,00	100,000	816.710.000	100,000	1.289.450.000	100,000	1.005.000.000	100,000	1.275.000.000	100,000	1.325.000.000	100,000	5.711.160.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program pembinaan pengembangan olahraga prestasi dan pendidikan	PERSENTASE ATLET BERPRESTASI DALAM BIDANG OLAH RAGA	Persen	100	100	-	100,000	2.076.515.000	100,000	2.112.625.000	100,000	1.843.000.000	100,000	2.460.000.000	100,000	2.480.000.000	100,000	10.972.140.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Persentase kebijakan kepemudaan yang dikembangkan		100	100	148.368.000,00	0,000	0	0,000	0	100,000	120.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	120.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
				Program pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat	Persentase Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan tradisional	Persen	100	0	-	100,000	291.195.000	100,000	323.225.000	100,000	630.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	1.244.420.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program pengembangan kelembagaan pemuda	Persentase kelembagaan pemuda yang berklasifikasi sehat dan baik	Persen	100	100	-	100,000	353.850.000	100,000	387.920.000	100,000	347.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	1.088.770.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Pengembangan Wirausaha Muda	Persen	100	100	-	100,000	177.000.000	100,000	181.450.000	100,000	177.000.000	100,000	227.000.000	100,000	227.000.000	100,000	989.450.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program peningkatan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Persentase Kebijakan dan Manajemen Olahraga Prestasi Yang Dikembangkan	Persen	100	100	49.999.000,00	0,000	0	0,000	0	100,000	250.000.000	100,000	150.000.000	100,000	150.000.000	100,000	550.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program pengembangan dan pemberdayaan pemuda	Persentase pemuda yang berkwalitas yang memiliki pengetahuan dan jiwa kepemimpinan	Persen	100	100	-	100,000	77.000.000	100,000	191.200.000	100,000	257.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	525.200.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana olahraga yang layak pakai	Persentase	100	0	80.800.000,00	100,000	8.250.000	100,000	8.250.000	100,000	60.000.000	100,000	510.000.000	100,000	510.000.000	100,000	1.096.500.000	Manggar
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang layak pakai	%	0 kegiatan	0	-	100,000	170.650.000	100,000	23.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	45.000.000	100,000	308.650.000	Dendang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana Olah Raga yang layak pakai	Persen	100	0	207.125.000,00	100,000	40.000.000	100,000	85.000.000	100,000	85.000.000	100,000	120.000.000	100,000	85.000.000	100,000	415.000.000	Gantung
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana/prasarana olahraga yang layak pakai	Persentase	0	0	-	0,000	8.000.000	100,000	0	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	75,000	188.000.000	Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana olahraga yang layak pakai	%	0	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	502.000.000	100,000	310.000.000	100,000	310.000.000	100,000	1.122.000.000	Simpang Pesak
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana Olah Raga yang layak Pakai	%	0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	700.000.000	100,000	700.000.000	100,000	1.400.000.000	Simpang Renggiang
				Pangan																		
		Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan energi dan protein	kg/thn/1000 penduduk	100%	128454	332.800.000,00	131.769.000	458.025.000	135.169.000	553.255.000	138.656.000	1.085.000.000	142.234.000	1.170.000.000	145.904.000	1.170.000.000	145.904.000	4.436.280.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
	Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitang Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat perdesaan	Desa	39	39	329.449.000,00	39,000	437.397.000	39,000	780.786.000	39,000	897.190.000	39,000	920.204.000	39,000	921.321.000	39,000	3.956.898.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase penyusunan dan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	Persen (%)	100	40	308.970.000,00	40,000	191.600.000	67,000	329.000.000	70,000	457.740.000	80,000	457.740.000	87,000	527.470.000	68,800	1.963.550.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tertibnya Aparatur Pemerintahan Desa	100	-	45	81.200.000,00	45,000	141.450.000	65,000	215.850.000	70,000	250.920.000	75,000	500.920.000	80,000	537.500.000	67,000	1.646.640.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi Keuangan	%	100	0	-	0,000	13.000.000	100,000	13.000.000	100,000	20.000.000	100,000	24.000.000	100,000	24.000.000	80,000	94.000.000	Damar
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi	%	0 dokumen	0	-	100,000	20.000.000	100,000	16.000.000	100,000	42.000.000	100,000	44.000.000	100,000	44.000.000	100,000	166.000.000	Dendang
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi keuangan	Persen	0	0	-	100,000	45.600.000	100,000	10.762.500	100,000	10.762.500	100,000	48.500.000	100,000	53.500.000	100,000	169.125.000	Gantung
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi	Persentase	0	0	-	0,000	17.160.000	100,000	17.160.000	100,000	42.000.000	100,000	42.000.000	100,000	42.000.000	100,000	160.320.000	Kelapa Kampit
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi Keuangan	Persentase	100	0	-	100,000	29.000.000	100,000	36.690.000	100,000	36.690.000	100,000	219.500.000	100,000	219.500.000	100,000	541.380.000	Manggar
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	%	0	0	-	100,000	17.875.000	100,000	20.400.000	100,000	20.400.000	100,000	40.400.000	100,000	40.400.000	100,000	139.475.000	Simpang Pesak
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	%	0	0	-	0,000	15.774.650	100,000	16.175.000	100,000	15.700.000	100,000	16.775.000	100,000	16.775.000	80,000	81.199.650	Simpang Renggiang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya PDRB Perkapita	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	%	100	0	265.580.000,00	100,000	255.860.000	100,000	310.000.000	100,000	334.000.000	100,000	337.000.000	100,000	450.000.000	100,000	1.686.860.000	Damar
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	%	0	100	281.873.300,00	100,000	278.840.000	100,000	386.500.000	100,000	430.000.000	100,000	455.000.000	100,000	465.000.000	100,000	2.015.340.000	Dendang
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan	Persen	100	0	264.400.200,00	100,000	288.425.000	100,000	369.800.000	100,000	369.800.000	100,000	344.105.000	100,000	350.000.000	100,000	1.722.130.000	Gantung
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	Persentase	100	0	303.497.500,00	100,000	281.000.000	100,000	281.000.000	100,000	480.000.000	100,000	510.000.000	100,000	510.000.000	100,000	2.062.000.000	Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	Persentase	100	0	245.920.000,00	100,000	222.275.000	100,000	329.780.000	100,000	420.000.000	100,000	425.000.000	100,000	435.000.000	100,000	1.832.055.000	Manggar
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	%	100	100	317.800.500,00	100,000	277.900.000	100,000	349.985.000	100,000	323.500.000	100,000	372.000.000	100,000	372.000.000	100,000	1.695.385.000	Simpang Pesak
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kemasyarakatan	%	100	0	-	100,000	272.200.000	100,000	263.800.000	100,000	239.700.000	100,000	260.000.000	100,000	255.000.000	100,000	1.290.700.000	Simpang Reggiang
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat	Persen (%)	100	100		100,000	448.845.000	100,000	472.470.000	100,000	492.330.000	100,000	920.430.000	100,000	573.000.000	100,000	2.907.075.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa (BUMDes)	Persen (%)	28	28		30,000	303.750.000	35,000	371.170.000	40,000	382.626.000	45,000	382.626.000	50,000	435.000.000	40,000	1.875.172.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Statistik																		
	Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral daerah yang dimutakhirkan	%	100	0	572.500.000,00	0,000	0	20,000	130.600.000	60,000	260.480.500	0,000	0	0,000	0	0,000	391.080.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral daerah yang dimutakhirkan	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	80,000	1.465.000.000	100,000	1.400.000.000	100,000	2.865.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Kearsipan																		
				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelolaan arsip secara elektronik	%	20 dokumen	20	96.600.000,00	0,000	94.540.000	0,000	243.745.000	0,000	298.200.000	80,000	298.200.000	100,000	310.000.000	100,000	1.244.685.000	Dinas Perpustakaan
					Tingkat pengelolaan arsip secara elektronik	dokumen		20		30,000		40,000		50,000		0,000		0,000		24,000		
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen/arsip yang diselamatkan dan dipertarikan	%	10	20	510.420.000,00	0,000	485.840.000	0,000	213.550.000	0,000	258.904.000	80,000	256.835.000	90,000	330.000.000	90,000	1.545.129.000	Dinas Perpustakaan
					Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah	%		20		40,000		50,000		60,000		0,000		0,000		30,000		
				Komunikasi dan Informatika																		
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase diseminasi informasi	%	39 SKPD	0	2.220.465.000,00	40,000	3.672.125.000	50,000	6.908.560.000	75,000	1.406.740.000	80,000	1.252.000.000	85,000	1.342.000.000	85,000	14.581.425.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	Persentase Sistem Informasi untuk layanan pemerintahan dan pelayanan publik yang dikembangkan	%	0	0	-	3,000	264.880.000	5,000	478.400.000	10,000	491.116.000	20,000	350.000.000	30,000	350.000.000	30,000	1.934.396.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase masyarakat desa yang memiliki kompetensi TIK	%	0	0	172.695.000,00	10,000	288.985.000	20,000	287.745.000	30,000	400.000.000	60,000	363.990.000	100,000	366.122.000	100,000	1.706.842.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase ASN yang memiliki kompetensi TIK	%		0		19,000		29,000		30,000		60,000		100,000		100,000		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Infrastruktur TIK yang terintegrasi	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	72,000	5.209.064.500	86,000	5.984.160.000	100,000	7.180.992.000	100,000	18.374.216.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah Web Site SKPD yang menunjang pelayanan publik	Buah	0 website	0	-	4,000	299.986.000	4,000	766.875.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	8,000	1.066.861.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah dokumen Tata Kelola TIK Pemerintah Daerah	Dokumen	5	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Perpustakaan																		
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat minat dan budaya baca serta keberadaan perpustakaan	%	20	20	486.860.000,00	40,000	334.495.000	50,000	759.477.000	60,000	776.500.000	80,000	1.468.700.000	90,000	1.765.000.000	90,000	5.104.172.000	Dinas Perpustakaan
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat siswa dalam minat membaca dan berkunjung ke perpustakaan sekolah	%	100	55	43.550.000,00	60,000	0	65,000	43.965.000	70,000	0	80,000	50.000.000	85,000	50.000.000	76,667	143.965.000	Dinas Pendidikan
				Persandian																		
				Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tingkat keamanan informasi	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	529.503.450	100,000	510.000.000	100,000	1.039.503.450	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Perencanaan																		
				Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan RKPD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	0	180.350.000,00	0,000	666.855.000	0,000	0	0,000	775.000.000	100,000	1.350.000.000	100,000	1.100.000.000	100,000	3.891.855.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	%		100		100,000		0,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
					persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan Renstra bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
					Persentase keselarasan program antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD) bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
				Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan RKPD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0	597.325.000,00	0,000	493.989.000	0,000	303.100.000	0,000	905.000.000	100,000	2.005.000.000	100,000	1.525.000.000	100,000	5.232.089.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan Renstra bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
					Persentase keselarasan program antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD) bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
					Terlaksananya perencanaan pembangunan infrastruktur	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
				Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan antar daerah	%	100	75	152.550.000,00	0,000	125.800.000	0,000	219.800.000	85,000	250.000.000	90,000	260.000.000	95,000	300.000.000	95,000	1.155.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Terlaksananya kerjasama pembangunan antar daerah	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		60,000		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program OPD dengan dokumen perencanaan	%	100	0	2.438.465.000,00	0,000	2.151.333.000	0,000	1.815.228.900	0,000	925.000.000	100,000	1.890.000.000	100,000	1.410.000.000	100,000	8.191.561.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Terlaksananya dan terkendalinya perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
				Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan RKPD bidang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	0	539.575.000,00	0,000	440.510.000	0,000	535.150.000	0,000	695.000.000	100,000	665.000.000	100,000	825.000.000	100,000	3.160.660.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					persentase keselarasan program antar dokumen Renja dengan Renstra bidang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
					Terlaksananya perencanaan pembangunan sosial budaya	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
					Persentase keselarasan program antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
				Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	persentase aparat perencana yang difasilitasi	%	100	0	112.350.000,00	0,000	130.100.000	0,000	142.000.000	90,000	30.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	302.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Terlaksananya perencanaan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitang Timur	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		100,000		
					capaian SP4 kabupaten	%		62		70,000		100,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
				Program pengembangan data dan informasi	Terlaksananya penyusunan data dan informasi Kabupaten Belitang Timur	%	100	0	162.850.000,00	0,000	0	100,000	1.033.425.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	1.033.425.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program pengembangan data dan informasi	Persentase pemenuhan data dan informasi	%	-	80	-	85,000	0	85,000	0	90,000	0	90,000	125.000.000	95,000	125.000.000	92,500	250.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitang Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program pengembangan data dan informasi	Tersedianya Data dan Informasi rubabumi unsur alami dan unsur buatan	Laporan	1 laporan	7	81.920.000,00	7,000	74.975.000	7,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	7,000	74.975.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitang Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
					Tersedianya Informasi Tentang Nama-nama Ruasabumi	Kecamatan		0		7,000		7,000		0,000		0,000		0,000		7,000		
					Jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan	Laporan		40		40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		
				Program pengembangan data dan informasi	Persentase pemenuhan data dan informasi	%	1 dokumen	80	-	85,000	59.499.400	85,000	118.870.000	85,000	120.000.000	0,000	0	0,000	0	85,000	298.369.400	Sekretariat Daerah Kab. Belitang Timur Bidang Administrasi Umum
				Administrasi Pemerintahan																		
				Program Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legaltas Pertanahan yang di setujui	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	13.000.000	100,000	13.000.000	100,000	30.000.000	66,667	56.000.000	Damar

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase desa yang berprestasi, Peningkatan IKM, Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir	%	100	0	1.015.000.000	100,000	741.450.000	100,000	76.000.000	100,000	96.000.000	100,000	103.000.000	100,000	128.000.000	100,000	1.144.450.000	Damar
				Program Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang disetujui	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	40.000.000	100,000	30.000.000	100,000	20.000.000	100,000	90.000.000	Dendang
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	0	100	1.388.213.756	100,000	817.000.000	100,000	62.000.000	100,000	128.200.000	100,000	113.000.000	100,000	116.000.000	100,000	1.236.200.000	Dendang
				Program Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Persentase permohonan legalitas pertanahan yang disetujui	Persen	0	0	-	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0,000	0	Gantung
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Desa yang berprestasi, Peningkatan IKM, Persentase usulan Musrenbang kecamatan yang diakomodir	Persen	0	0	1.000.000.000	100,000	715.000.000	100,000	55.000.000	100,000	55.000.000	100,000	64.559.000	100,000	62.070.000	100,000	951.629.000	Gantung
				Program Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang disetujui	Persentase	0 Paket	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	80.000.000	100,000	80.000.000	100,000	80.000.000	100,000	240.000.000	Kelapa Kampit
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase	100	0	1.030.000.000	80,000	749.750.000	80,000	69.750.000	80,000	153.600.000	100,000	170.000.000	100,000	170.000.000	100,000	1.313.100.000	Kelapa Kampit
				Program Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang disetujui	Persentase	100	0	-	100,000	0	100,000	45.100.000	100,000	19.095.000	100,000	145.050.000	100,000	145.050.000	100,000	354.295.000	Manggar
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase desa yang berprestasi, Peningkatan IKM, Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir	Persentase	100	0	1.015.000.000	100,000	755.935.000	100,000	77.850.000	100,000	118.450.000	100,000	258.680.000	100,000	261.680.000	100,000	1.472.595.000	Manggar
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	0	100	1.016.349.670	100,000	794.885.000	100,000	122.710.000	100,000	284.400.000	100,000	97.400.000	100,000	97.400.000	100,000	1.396.795.000	Simpang Pesak
				Program Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang disetujui	%	0 Jumlah Tapal	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	10.000.000	Simpang Renggiang
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	100	80	1.271.825.000	81,000	729.940.000	81,300	70.408.000	81,500	100.040.000	81,700	116.650.000	82,000	139.100.000	81,500	1.156.138.000	Simpang Renggiang
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Pembahasan Produk Hukum yang difasilitasi	persen	100	78,95	6.587.876.000	0,000	8.034.101.000	0,000	8.442.606.000	100,000	7.959.306.000	100,000	8.667.050.000	100,000	8.910.000.000	60,000	42.013.063.000	Sekretariat DPRD
					Peningkatan Kualitas Lembaga DPRD	persen		65,13		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		40,000		
					Persentase Kegiatan Pembahasan Anggaran yang difasilitasi	persen		100		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		60,000		
					Persentase Kegiatan Monitoring yang difasilitasi	persen		0		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		60,000		
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tercapainya peningkatan capacity building – SOM APIP	%	100	0	-	0,000	273.050.000	100,000	329.035.000	100,000	395.000.000	100,000	385.000.000	100,000	290.000.000	100,000	1.672.085.000	Inspektorat
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengawasan secara optimal	%	100	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	105.000.000	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	%	100	100	608.674.000	100,000	990.650.000	100,000	1.743.737.000	100,000	1.585.000.000	100,000	2.250.000.000	100,000	1.985.000.000	100,000	8.554.387.000	Inspektorat
				Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan	%	100	0	-	0,000	49.750.000	100,000	37.350.000	100,000	55.000.000	100,000	60.000.000	100,000	165.000.000	100,000	367.100.000	Inspektorat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi kantor	%	100	80	1.850.759.400	85,000	1.392.740.000	90,000	7.689.270.000	95,000	7.334.530.000	100,000	7.725.000.000	100,000	8.875.000.000	94,000	33.016.540.000	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	100	80	50.000.000	82,000	40.000.000	83,000	40.000.000	85,000	50.000.000	90,000	70.000.000	95,000	80.000.000	95,000	280.000.000	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	75	379.825.000	80,000	295.000.000	85,000	1.292.825.000	87,000	541.300.000	90,000	2.100.000.000	95,000	2.450.000.000	87,400	6.679.125.000	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakai	%	100	65	-	70,000	0	75,000	0	80,000	0	85,000	110.500.000	90,000	0	90,000	110.500.000	Dinas Pendidikan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	100	100	2.193.620.000	100,000	2.319.620.000	100,000	2.292.918.000	100,000	2.268.798.000	100,000	2.293.798.000	100,000	2.293.798.000	100,000	11.468.932.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakai	Persen	100	100	8.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	100.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	100	1.213.890.000	100,000	463.015.000	100,000	603.400.000	100,000	465.000.000	100,000	3.205.000.000	100,000	2.005.000.000	100,000	6.741.415.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang memenuhi kompetensi	Persen	100	100	12.500.000	100,000	0	100,000	25.000.000	100,000	22.000.000	100,000	22.000.000	100,000	22.000.000	100,000	91.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen (%)	100	100	352.372.000	100,000	314.730.000	100,000	1.326.975.000	100,000	612.350.000	100,000	2.314.950.000	100,000	1.386.700.000	100,000	5.955.705.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen (%)	-	100	10.000.000	100,000	13.995.000	100,000	110.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	60.000.000	100,000	283.995.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen (%)	100	100	1.416.162.400	100,000	1.790.199.500	100,000	2.084.320.000	100,000	2.222.740.000	100,000	2.222.740.000	100,000	2.393.920.000	100,000	10.713.919.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin Berpakai	Persen (%)	100	100	-	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	200.000.000	100,000	200.000.000	100,000	400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pencapaian Kinerja Pencapaian	Persen (%)	-	100	-	0.000	0	0.000	0	100,000	0	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	100	100	1.390.280.000	100,000	1.629.835.000	100,000	1.868.497.000	100,000	1.901.450.000	100,000	2.095.000.000	100,000	2.160.000.000	100,000	9.654.782.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Pengantaraan Kasus-kasus Disiplin ASN	Persen	100	100	-	100,000	0	100,000	0	100,000	1.145.095.500	100,000	1.969.318.500	100,000	2.221.648.125	100,000	5.336.062.125	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	100	1.448.825.000	100,000	468.725.000	100,000	1.655.070.000	100,000	1.903.100.000	100,000	5.010.000.000	100,000	5.800.000.000	100,000	14.836.895.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kompetensi Teknis Pegawai	Orang	100	272	1.946.280.800	194,000	0	309,000	0	356,000	0	442,000	0	492,000	0	0,000	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	100	1.269.199.966	100,000	124.385.000	100,000	532.444.792	100,000	407.420.000	100,000	464.881.000	100,000	625.134.000	100,000	2.154.264.792	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	10.674.335.000	100,000	8.445.695.000	100,000	9.160.850.000	100,000	11.381.040.293	100,000	13.588.130.000	100,000	14.123.630.000	100,000	56.699.345.293	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakai	Persen	30	100	4.250.000	100,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	UPTD Dinas Kesehatan (RSUD)
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	80	191.087.000	80,000	484.537.000	85,000	1.777.617.000	90,000	1.095.000.000	95,000	1.595.000.000	95,000	1.345.000.000	95,000	6.297.154.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	100	30	50.000.000	10,000	50.000.000	10,000	112.100.000	10,000	200.000.000	30,000	200.000.000	40,000	250.000.000	100,000	812.100.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	100	90	1.454.400.000	90,000	2.431.586.000	92,000	3.347.510.000	94,000	4.328.863.000	96,000	3.511.760.000	100,000	3.900.801.504	100,000	17.520.520.504	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berakhlak	persen	0	0		0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	95.000,000	100,000	95.000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	85	10.039.375.000	85,000	5.707.555.000	90,000	6.571.860.000	95,000	9.580.700.000	95,000	11.264.100.000	95,000	11.533.000.000	92,000	44.657.215.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian	%	15 Pegawai	100		0,000	61.050.000	0,000	200.000.000	0,000	340.000.000	100,000	340.000.000	100,000	380.000.000	40,000	1.321.050.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	11.230.638.000	100,000	11.464.920.000	100,000	12.668.970.000	100,000	11.796.156.000	100,000	13.279.380.000	100,000	13.475.000.000	100,000	62.684.426.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berakhlak	Persen	100	0	67.725.000	80,000	350.000.000	85,000	538.400.000	90,000	569.475.000	95,000	810.000.000	100,000	830.000.000	100,000	3.097.875.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan Daerah	Persentase Keikutsertaan Bimtek Pimpinan Daerah	%	0	100		0,000	0	0,000	0	100,000	100.000.000	100,000	150.000.000	100,000	170.000.000	100,000	420.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi yang difasilitasi	%	100	100	570.700.000	100,000	100.000.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	100.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Kebijakan Kewilayahan yang difasilitasi	%	34 OPD	100	113.140.000	20,000	50.000.000	40,000	150.000.000	60,000	99.550.000	80,000	0	100,000	0	100,000	299.550.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui website	%	-	80		85,000	0	85,000	0	90,000	0	90,000	85.000.000	95,000	90.000.000	92,500	175.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Organisasi Peningkatan Daerah	Jumlah unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPD	0	32	86.675.000	7,000	40.000.000	7,000	100.000.000	6,000	76.800.000	6,000	0	6,000	0	6,000	216.800.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Pembentukan Produk Hukum Daerah	%	-	80	976.692.600	85,000	0	85,000	0	90,000	0	90,000	825.000.000	95,000	852.500.000	92,500	1.677.500.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase penyelesaian kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah	%	-	80	192.225.000	80,000	0	85,000	0	85,000	0	90,000	175.000.000	90,000	185.000.000	90,000	360.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Aktif	Kegiatan	0 Jabatan	2		2,000	80.000.000	2,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	80.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	%	-	75		75,000	0	80,000	0	80,000	0	85,000	125.000.000	90,000	130.000.000	87,500	255.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Jumlah Monitoring Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0 laporan	0		2.200.000.000,000	0	2.200.000.000,000	0	3.500.000.000,000	2.200.000.000	3.500.000.000,000	0	3.500.000.000,000	0	3.500.000.000,000	2.200.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja dan Pengembangan Layanan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Paket Pekerjaan	0	0	10.039.375.000	300.000.000,000	0	300.000.000,000	0	300.000.000,000	300.000.000	300.000.000,000	0	200.000.000,000	0	300.000.000,000	300.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan Serta Peningkatan Kompetensi, Keahlian dan Kapasitas Aparatur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0	0	275.000.000	300.000.000,000	0	300.000.000,000	0	300.000.000,000	300.000.000	200.000.000,000	0	200.000.000,000	0	300.000.000,000	300.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Penyusunan Kebijakan Pengembangan/Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan Serta Peningkatan Peran Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0	0	-	100.000.000.000	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	100.000.000	200.000.000.000	0	250.000.000.000	0	200.000.000.000	100.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Rumusan Peraturan, Pengendalian Standar Layanan (SOP), Penanganan Pengaduan dan Advokasi	Kegiatan	0	0	-	150.000.000.000	0	300.000.000.000	0	300.000.000.000	150.000.000	200.000.000.000	0	150.000.000.000	0	300.000.000.000	150.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan	0%	80	-	275.000.000.000	0	400.000.000.000	373.950.000	825.000.000.000	279.600.000	1.550.000.000.000	0	1.750.000.000.000	0	612.500.000.000	653.550.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	10 Buku, 1 Laporan	100	-	100.000	138.861.000	100.000	145.060.000	100.000	140.780.000	100.000	150.000.000	100.000	260.000.000	100.000	834.701.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Aktif	%	0 dokumen	100	55.032.000	100.000	45.000.000	100.000	48.100.000	100.000	72.160.000	100.000	160.000.000	100.000	112.632.000	100.000	437.892.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi yang difasilitasi	%	0	100	-	100.000	174.675.000	100.000	229.750.000	100.000	145.590.000	100.000	210.000.000	100.000	184.000.000	100.000	944.015.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kebijakan kewilayahan yang difasilitasi	%	0	100	165.000.000	100.000	0	100.000	207.260.000	100.000	94.200.000	100.000	65.000.000	100.000	55.000.000	100.000	421.460.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kebijakan Kepala Daerah yang difasilitasi di bidang pemerintahan	%	0	100	-	100.000	0	100.000	48.320.000	100.000	16.870.000	100.000	0	100.000	0	100.000	65.190.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor	%	100	100	794.900.000	100.000	453.530.000	100.000	889.500.000	100.000	1.032.500.000	100.000	609.200.000	100.000	1.035.100.000	100.000	4.019.830.000	Inspektorat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	0	-	0,000	0	0,000	75.000.000	100.000	75.000.000	100.000	190.000.000	100.000	165.000.000	100.000	505.000.000	Inspektorat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat ketersediaan layanan administrasi	%	100	100	859.200.000	100.000	976.850.000	100.000	1.148.500.000	100.000	1.046.352.000	100.000	1.045.000.000	100.000	1.085.000.000	100.000	5.301.702.000	Inspektorat
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin	%	0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100.000	50.000.000	100.000	75.000.000	100.000	125.000.000	Inspektorat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	persen	100	20	50.000.000	30.000	30.000.000	40.000	20.000.000	70.000	50.059.000	80.000	65.800.000	100.000	64.928.000	100.000	230.787.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	866.420.000	100.000	869.550.000	100.000	871.130.000	100.000	866.886.000	100.000	1.009.218.000	100.000	1.040.409.000	100.000	4.657.193.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin	persen	100	100	30.395.000	100.000	0	100.000	0	100.000	153.219.000	100.000	152.798.000	100.000	168.535.000	100.000	474.552.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	50.000.000	100.000	235.050.000	100.000	219.725.000	100.000	673.010.000	100.000	1.101.174.000	100.000	1.158.587.000	100.000	3.387.546.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kompetensi pegawai	%	100	100	18.000.000	100.000	23.000.000	100.000	40.000.000	100.000	35.000.000	100.000	61.319.000	100.000	62.500.000	100.000	221.819.000	Dinas Perikanan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	%	100	100	18.000.000	100.000	1.999.025.000	100.000	2.003.265.100	100.000	2.063.805.000	100.000	2.153.531.000	100.000	2.192.413.000	100.000	10.412.039.100	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	85.000	250.000.000	100.000	150.000.000	100.000	400.000.000	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai selama 12 bulan	%	100	100	405.320.000	100.000	361.300.000	100.000	690.926.000	100.000	798.310.000	100.000	1.632.517.000	100.000	1.600.200.000	100.000	5.083.253.000	Dinas Perikanan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	100	770.355.000	100,000	610.310.000	100,000	1.002.935.000	100,000	1.319.000.000	100,000	1.240.000.000	100,000	1.265.000.000	100,000	5.437.245.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	2.178.380.000	100,000	2.101.965.000	100,000	2.270.992.500	100,000	2.246.600.000	100,000	2.355.000.000	0,000	2.357.000.000	0,000	11.331.557.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakai	%	0	75	-	0,000	0	0,000	0	0,000	123.500.000	95,000	135.000.000	100,000	140.000.000	100,000	398.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat sertifikat keahlian	%	100	100	25.000.000	100,000	40.000.000	100,000	30.000.000	100,000	40.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	180.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Komunikasi Kehumasan	Tersedianya Sarana Penyebarluasan Informasi dari Pemerintah Daerah	%	2 Kegiatan	0	66.625.000	100,000	37.500.000	100,000	52.430.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	89.930.000	Dinas Komunikasi dan Informatika/HUMAS
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan lembaga Pemerintahan lainnya	Laporan	22 rapat koordinasi	0	-	0,000	0	1,000	122.820.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	1,000	122.820.000	Dinas Komunikasi dan Informatika/UMUM
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	4.769.825.000	100,000	5.093.146.000	100,000	5.192.302.000	100,000	4.966.525.000	100,000	4.404.960.000	100,000	5.945.000.000	100,000	25.601.933.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakai	Persen	0 stel	90	13.755.000	90,000	80.000.000	92,000	440.450.000	95,000	0	98,000	500.000.000	100,000	0	93,333	1.020.450.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	0	100	630.160.000	100,000	667.661.500	100,000	911.201.800	100,000	1.060.770.000	100,000	2.120.000.000	100,000	1.118.500.000	100,000	5.878.133.300	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	100	100.000.000	100,000	30.000.000	100,000	45.000.000	100,000	92.871.000	100,000	120.000.000	100,000	150.000.000	100,000	437.871.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin berpakai	persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	50,000	100.000.000	75,000	200.000.000	90,000	200.000.000	90,000	500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	persen	0	0	-	0,000	0	50,000	416.185.000	55,000	1.280.000.000	60,000	2.100.000.000	65,000	3.300.000.000	65,000	7.096.185.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya kompetensi sumber daya Aparatur	persen	0	0	-	0,000	0	600,000	175.000.000	75,000	100.000.000	80,000	150.000.000	85,000	200.000.000	85,000	625.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksanannya Pelayanan administrasi perkantoran	persen	0	0	-	0,000	0	60,000	525.094.000	65,000	1.675.000.000	70,000	2.080.000.000	75,000	2.750.000.000	75,000	7.030.094.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.394.830.000	100,000	1.436.530.000	100,000	1.535.510.000	100,000	1.613.540.000	0,000	1.720.000.000	0,000	1.877.000.000	0,000	8.182.580.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%		0		0,000		0,000		0,000		100,000		100,000		100,000		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berpakai	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	90,000	200.000.000	0,000	0	0,000	100.000.000	90,000	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	0	470.825.000	0,000	383.086.000	0,000	506.599.000	0,000	970.000.000	100,000	1.295.000.000	100,000	685.000.000	100,000	3.839.685.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	0	10.000.000	100,000	20.000.000	100,000	30.000.000	100,000	120.000.000	100,000	270.000.000	100,000	270.000.000	100,000	710.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%		100		100,000		100,000		100,000		0,000		0,000		0,000		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berakhlak	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	100.000.000	0,000	0	0,000	100.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	0	100	477.228.400	100,000	379.778.400	100,000	563.070.000	100,000	2.820.447.952	100,000	765.000.000	100,000	972.500.000	100,000	5.500.796.352	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	100	22.500.000	100,000	25.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	225.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	1.919.710.000	100,000	1.898.960.000	100,000	2.132.160.000	100,000	2.395.375.000	100,000	2.381.000.000	100,000	2.433.500.000	100,000	11.240.995.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berakhlak	Persen	100	80	-	0,000	0	0,000	0	85,000	77.000.000	90,000	112.000.000	100,000	112.000.000	100,000	301.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	100	100	560.350.000	100,000	499.200.000	100,000	783.850.000	100,000	915.491.450	100,000	3.060.000.000	100,000	1.125.000.000	100,000	6.383.541.450	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	16,67	3.000.000	8,000	9.000.000	17,390	11.000.000	25,000	33.000.000	35,710	33.000.000	35,710	33.000.000	35,710	119.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	1.231.545.300	100,000	1.277.396.000	100,000	1.371.236.000	100,000	1.642.214.400	100,000	1.753.372.000	100,000	1.754.372.000	100,000	7.798.590.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	0	0	-	100,000	2.146.780.000	100,000	4.098.380.000	100,000	4.982.219.000	100,000	5.400.459.500	100,000	5.737.432.476	100,000	22.365.270.976	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin Berakhlak	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	104.000.000	100,000	104.000.000	100,000	104.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	0	-	100,000	716.144.000	100,000	582.760.000	100,000	1.090.295.000	100,000	881.607.000	100,000	948.537.000	100,000	4.219.343.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	0	0	-	35,000	30.000.000	50,000	70.000.000	75,000	75.000.000	80,000	100.000.000	80,000	100.000.000	64,000	375.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	931.252.000	90,000	3.872.430.000	90,000	4.242.000.000	90,000	4.382.960.000	90,000	5.558.000.000	90,000	5.558.000.000	90,000	23.613.390.000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	70	754.848.000	90,000	557.275.000	90,000	754.800.000	90,000	453.050.000	90,000	1.020.000.000	90,000	1.020.000.000	90,000	3.805.125.000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas Aparatur	%	100	50	10.000.000	70,000	110.000.000	70,000	50.000.000	80,000	40.000.000	90,000	50.000.000	90,000	50.000.000	80,000	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	1.261.297.275	100,000	3.224.805.000	100,000	3.465.400.000	100,000	3.346.700.000	100,000	3.614.670.000	100,000	3.656.280.000	100,000	17.307.855.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang disiplin Berakhlak		100 Stel	0	-	0,000	0	0,000	0	90,000	250.000.000	0,000	0	90,000	0	90,000	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	70	342.860.425	75,000	517.743.700	80,000	813.478.700	85,000	1.316.478.700	90,000	1.512.000.000	95,000	1.636.000.000	95,000	5.795.701.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	-	100	50.000.000	100,000	40.000.000	100,000	50.000.000	100,000	0	100,000	50.000.000	100,000	60.000.000	100,000	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.261.297.275	100,000	2.600.586.900	100,000	2.764.700.000	0,000	2.884.510.000	0,000	2.875.000.000	0,000	2.888.000.000	40,000	14.012.796.900	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
					Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen		100		0,000		0,000		80,000		80,000		80,000		80,000			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab								
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berubah	persen	100	0		-	80,000		0	82,500		0	85,000		0	87,500	90.000.000	90,000		80.000.000	90,000		170.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur	persen	100	100		-	100,000	324.105.000	100,000		1.144.930.000	0,000		966.968.600	0,000		1.533.000.000	0,000		598.000.000	0,000		4.567.003.600	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen		0			0,000			0,000			85,000			90,000			90,000			90,000				
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	0		-	10,000	12.500.000	13,000		30.000.000	13,000		29.500.000	15,000		65.000.000	15,000		70.000.000	15,000		207.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	12 bulan	100	2.430.635.000		100,000	4.237.384.000	100,000		4.582.397.500	100,000		4.880.484.000	100,000		5.314.000.000	100,000		5.513.000.000	100,000		24.527.265.500	Dinas Perhubungan		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin dalam berubah	Persen	72 pegawai	70		-	70,000		0	75,000		229.055.000	75,000		0	80,000		300.000.000	80,000		0	80,000		529.055.000	Dinas Perhubungan	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	12 bulan	100	1.103.945.000		100,000	864.286.000	100,000		1.705.100.000	100,000		1.599.032.000	100,000		1.750.000.000	100,000		1.550.000.000	100,000		7.468.418.000	Dinas Perhubungan		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	65 kali	50	57.000.000		55,000	45.000.000	64,000		55.000.000	64,000		85.000.000	90,000		97.000.000	90,000		85.000.000	72,600		367.000.000	Dinas Perhubungan		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran	%	100	100	1.082.430.000		100,000	1.050.370.000	100,000		1.012.770.000	100,000		1.041.070.000	0,000		1.201.535.000	0,000		1.475.000.000	60,000		5.780.745.000	Dinas Perpustakaan		
					Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%		100			0,000		0,000		0,000			100,000			100,000			100,000			100,000			
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berubah	Persen	-	0		-	0,000		0	0,000		0	0,000		0	90,000		85.000.000	95,000		45.000.000	95,000		130.000.000	Dinas Perpustakaan	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.030.964.000		100,000	438.389.000	100,000		466.973.000	100,000		580.796.000	0,000		690.125.000	0,000		910.000.000	60,000		3.086.283.000	Dinas Perpustakaan		
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%		100			0,000		0,000		0,000			100,000			100,000			100,000			100,000			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	65	50.000.000		0,000	50.000.000	0,000		50.000.000	0,000		50.000.000	80,000		50.000.000	80,000		50.000.000	80,000		250.000.000	Dinas Perpustakaan		
					Jumlah Kapasitas Sumbendaya Aparatur	%		100			100,000		100,000		100,000			0,000			0,000			60,000			60,000			
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin berubah	persen	0	100		-	100,000		0	100,000		0	100,000		175.000.000	100,000		180.000.000	100,000		185.000.000	100,000		540.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	100	100	548.865.000		100,000	1.045.095.000	100,000		2.174.775.000	100,000		1.456.567.000	100,000		1.860.000.000	100,000		3.460.000.000	100,000		9.996.437.000	Dinas Pertanian dan Pangan		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian	persen	100	100	50.000.000		100,000	42.500.000	100,000		35.000.000	100,000		100.000.000	100,000		100.000.000	100,000		100.000.000	100,000		377.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	0	1.615.060.000		100,000	1.871.930.000	100,000		1.828.540.000	100,000		1.747.440.000	100,000		1.777.000.000	100,000		1.963.000.000	100,000		9.187.910.000	Dinas Pertanian dan Pangan		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	5.847.660.000		100,000	1.328.240.000	100,000		1.376.239.000	100,000		1.379.354.000	100,000		1.523.000.000	100,000		1.664.000.000	100,000		7.270.833.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berubah	Persen	0	100	175.375.000		0,000		0	0,000		0	0,000		0	100,000		26.400.000	100,000		29.040.000	100,000		55.440.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	100	2.866.963.994		100,000	354.628.000	100,000		404.778.000	100,000		1.061.828.000	100,000		3.049.860.800	100,000		518.846.880	100,000		5.389.941.680	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satu an	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungji awab		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan tambahan sertifikat keahlian	orang	50	9	95.000.000	8,000	80.000.000	8,000	57.750.000	8,000	60.000.000	9,000	70.000.000	9,000	72.000.000	9,000	339.750.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Keteresediaan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	55	-	55,000	1.632.340.000	63,000	1.654.920.000	65,000	2.203.668.000	68,000	2.244.800.000	70,000	2.291.000.000	64,200	10.026.728.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	%	100	80	-	0,000	0	0,000	0	85,000	90.750.000	90,000	135.000.000	95,000	140.000.000	95,000	365.750.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	55	-	55,000	280.600.000	58,000	591.580.000	60,000	1.018.437.000	63,000	1.303.000.000	68,000	1.290.000.000	60,800	4.483.617.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	50	-	50,000	25.000.000	53,000	40.000.000	58,000	43.500.000	60,000	50.000.000	65,000	55.000.000	57,200	213.500.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	865.231.492	90,000	931.200.650	90,000	1.022.240.000	90,000	1.233.237.200	90,000	1.339.831.593	90,000	1.493.500.000	90,000	6.020.009.443	Puskesmas Dendang
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	37.800.000	100,000	45.000.000	100,000	82.800.000	Puskesmas Dendang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai	Persen	100	82	864.875.000	82,000	335.620.000	85,000	266.425.000	90,000	380.280.000	92,000	520.000.000	95,000	660.000.000	95,000	2.162.325.000	Puskesmas Dendang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Dendang
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	46.500.000	100,000	50.000.000	100,000	96.500.000	Puskesmas Gantung
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Pakai	Persen	100	80	266.600.000	82,000	167.545.000	85,000	250.000.000	90,000	440.490.000	92,000	417.668.000	95,000	505.500.000	88,800	1.781.203.000	Puskesmas Gantung
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Gantung
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	1.186.426.000	90,000	1.174.976.240	90,000	1.237.380.000	90,000	1.462.580.000	90,000	1.629.508.000	90,000	1.742.580.000	90,000	7.247.024.240	Puskesmas Gantung
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	876.180.000	90,000	993.700.000	90,000	1.129.560.000	90,000	1.920.732.000	90,000	1.980.139.320	90,000	2.025.139.320	90,000	8.049.270.640	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	91,000	54.600.000	91,000	54.600.000	91,000	109.200.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak pakai	Persen	100	80	310.095.000	82,000	304.450.000	85,000	796.900.000	90,000	535.000.000	92,000	700.000.000	95,000	795.000.000	95,000	3.131.350.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Kelapa Kampit
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persen	100	90	952.445.000	90,000	1.154.170.000	90,000	1.248.770.000	90,000	1.551.300.000	90,000	1.685.000.000	90,000	1.742.500.000	90,000	7.381.740.000	Puskesmas Manggar
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	54.000.000	90,000	54.000.000	90,000	108.000.000	Puskesmas Manggar
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	80	218.844.000	82,000	332.400.000	85,000	278.270.000	90,000	420.650.000	92,000	502.500.000	95,000	525.000.000	95,000	2.058.820.000	Puskesmas Manggar
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Manggar

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	-	80	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	95,000	45.000.000	100,000	45.000.000	100,000	90.000.000	Puskesmas Mengkubang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana kantor yang layak pakai	Persentase	100	80	761.973.300	80,000	379.723.000	85,000	418.423.000	90,000	819.677.650	95,000	680.228.500	95,000	638.000.000	95,000	2.936.052.150	Puskesmas Mengkubang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mendapat Tambahan Sertifikat keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Mengkubang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	611.770.000	90,000	700.102.500	90,000	809.856.500	90,000	1.010.180.600	90,000	1.087.612.161	90,000	1.143.528.887	90,000	4.751.280.648	Puskesmas Mengkubang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	766.879.996	90,000	899.765.000	90,000	943.800.000	90,000	1.036.530.000	90,000	1.123.250.000	90,000	1.234.475.000	90,000	5.237.820.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	45.000.000	95,000	48.000.000	95,000	93.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang layak pakai	Persen	100	80	581.190.000	82,000	234.630.000	85,000	307.807.000	90,000	479.300.000	92,000	551.000.000	95,000	612.000.000	95,000	2.184.737.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Mendapat Tambahan Sertifikat Keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	20,000	75.000.000	25,000	75.000.000	22,500	150.000.000	Puskesmas Simpang Pesak
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	90	1.283.931.000	90,000	1.507.930.000	90,000	1.738.000.000	90,000	474.027.000	90,000	1.913.640.000	90,000	2.033.000.000	90,000	7.666.597.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	30.000.000	100,000	44.000.000	100,000	74.000.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kantor yang layak pakai	Persen	100	80	582.530.000	82,000	733.750.000	85,000	520.000.000	90,000	787.297.000	92,000	470.000.000	95,000	495.000.000	95,000	3.006.047.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Mendapat Sertifikat Keahlian	Persen	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	25,000	75.000.000	30,000	75.000.000	27,500	150.000.000	Puskesmas Simpang Renggang
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	0 Stel	0	64.900.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	200.000.000	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	persen	100	100	3.217.350.000	100,000	2.404.350.000	100,000	1.667.350.000	100,000	2.108.164.000	100,000	2.085.000.000	100,000	2.150.000.000	100,000	10.414.864.000	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	persen	100	0	580.000.000	100,000	321.000.000	100,000	581.000.000	100,000	421.000.000	100,000	320.000.000	100,000	350.000.000	100,000	1.993.000.000	Sekretariat DPRD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	100	7.354.992.000	100,000	10.241.860.000	100,000	11.941.840.000	100,000	9.512.200.000	100,000	11.650.000.000	100,000	11.760.000.000	100,000	55.105.900.000	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	100	0	-	90,000	0	92,000	19.950.000	95,000	30.000.000	98,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	109.950.000	Damar
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	Persen	100	0	473.000.000	100,000	375.000.000	100,000	367.000.000	100,000	785.000.000	100,000	1.482.000.000	100,000	1.264.000.000	100,000	4.273.000.000	Damar
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	7 ASN	100%	0	30.000.000	7,000	30.000.000	7,000	30.000.000	7,000	30.000.000	7,000	35.000.000	7,000	42.000.000	7,000	167.000.000	Damar
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan KebutuhanAdministrai Kantor	Persen	100	0	513.650.000	100,000	619.500.000	100,000	680.500.000	100,000	603.000.000	100,000	681.000.000	100,000	713.000.000	100,000	3.297.000.000	Damar
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	%	0	100	500.600.000	100,000	506.800.000	100,000	521.200.000	100,000	838.366.000	100,000	857.000.000	100,000	927.000.000	100,000	3.650.366.000	Dendang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	-	0	-	0,000	0	90,000	34.976.000	0,000	45.000.000	95,000	40.000.000	95,000	0	95,000	119.976.000	Dendang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	0	100	1.588.700.000	100,000	448.500.000	100,000	824.790.000	100,000	766.112.500	100,000	1.268.500.000	100,000	1.842.500.000	100,000	5.150.402.500	Dendang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%		100	30.000.000	100,000	29.000.000	100,000	30.000.000	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	100,000	60.000.000	100,000	239.000.000	Dendang
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	95,000	32.500.000	100,000	35.500.000	100,000	35.500.000	100,000	103.500.000	Simpang Renggiang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	0	505.268.000	100,000	214.421.905	100,000	517.000.000	100,000	844.137.000	100,000	1.313.500.000	100,000	1.327.500.000	100,000	4.216.558.905	Simpang Renggiang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	80	25.000.000	100,000	30.000.000	100,000	20.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	155.000.000	Simpang Renggiang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	0	0	551.540.000	100,000	545.996.000	100,000	566.594.000	100,000	615.118.000	100,000	715.000.000	100,000	716.000.000	100,000	3.158.708.000	Simpang Renggiang
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	44.400.000	100,000	40.000.000	100,000	20.000.000	100,000	104.400.000	Simpang Pesak
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	100	548.620.000	100,000	481.100.000	100,000	1.515.950.000	100,000	954.445.000	100,000	835.000.000	100,000	810.000.000	100,000	4.596.495.000	Simpang Pesak
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	100	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	35.000.000	100,000	170.000.000	Simpang Pesak
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	626.391.000	100,000	628.500.000	100,000	670.700.000	100,000	678.640.000	100,000	699.740.000	100,000	699.740.000	100,000	3.377.320.000	Simpang Pesak
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	100	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	60.000.000	100,000	0	100,000	60.000.000	Manggar
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang layak pakai	Persen	100	0	565.775.000	100,000	320.875.879	100,000	182.850.000	100,000	952.125.000	100,000	1.345.000.000	100,000	1.410.000.000	100,000	4.210.850.879	Manggar
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	Persen	100	0	20.000.000	100,000	40.000.000	100,000	20.000.000	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	180.000.000	Manggar
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persen	100	0	685.370.000	100,000	713.685.000	100,000	936.895.000	100,000	964.862.000	100,000	1.030.000.000	100,000	1.080.000.000	100,000	4.725.442.000	Manggar
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	0	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	36.000.000	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	116.000.000	Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	%	100	100	348.262.000	100,000	304.808.000	100,000	509.000.000	100,000	1.310.000.000	100,000	785.000.000	100,000	440.000.000	100,000	3.348.808.000	Kelapa Kampit
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikat keahlian	%	100	100	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	25.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	145.000.000	Kelapa Kampit
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	100	683.770.000	100,000	740.000.000	100,000	773.000.000	100,000	899.000.000	100,000	945.000.000	100,000	980.000.000	100,000	4.337.000.000	Kelapa Kampit
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	persen	100	0	649.312.254	100,000	696.872.254	100,000	739.062.500	100,000	739.062.500	100,000	804.680.000	100,000	814.680.000	100,000	3.794.357.254	Gantung
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi		0	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	Gantung

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggungjawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai jenis, lokasi, dan jumlah	persen	100	0	388.249.000	100,000	376.275.000	100,000	530.175.000	100,000	530.175.000	100,000	1.140.300.000	100,000	1.033.000.000	100,000	3.609.925.000	Gantung
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat tambahan sertifikasi keahlian	persen	100	0	20.000.000	0,000	27.000.000	0,000	35.000.000	0,000	35.000.000	0,000	30.000.000	0,000	35.000.000	0,000	162.000.000	Gantung
				Program Unit Layanan Pengadaan	Pelaksanaan Penataan Administrasi dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0 laporan	0	1.008.900.000	1.380.000.000,000	1.407.000.000	1.380.000.000,000	1.547.100.000	1.380.000.000,000	0	0,000	0	0,000	0	1.380.000.000,000	2.954.100.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	75.000.000	100,000	85.000.000	100,000	160.000.000	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin bereskrasi	%	0	80	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	90,000	39.000.000	90,000	0	90,000	39.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Hibah dan Bantuan Sosial yang disalurkan	%	0	100	35.806.000	100,000	25.000.000	100,000	34.325.000	100,000	25.000.000	100,000	25.000.000	100,000	53.960.869	100,000	163.285.869	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Jenis Pembinaan Kesejahteraan Yang Dilaksanakan	%	0	0	-	100,000	0	100,000	0	100,000	129.458.000	100,000	350.000.000	100,000	800.000.000	100,000	1.279.458.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Pemerintahan dan Sosial
				Program Perumusan dan Implementasi Kebijakan ekonomi	Persentase kebijakan ekonomi yang di implementasikan	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	275.000.000	0,000	280.000.000	0,000	280.000.000	0,000	835.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Paket Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi	-	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	2.000.000.000	0,000	2.000.000.000	0,000	1.500.000.000	0,000	5.500.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Pembinaan dan Advokasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dibina	-	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	1.300.000.000	0,000	1.300.000.000	0,000	1.000.000.000	0,000	3.600.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dipenuhi	-	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	1.300.000.000	0,000	1.500.000.000	0,000	1.500.000.000	0,000	4.300.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang difasilitasi			0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
				Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pelayanan Publik	Persentase unit layanan yang memiliki kelengkapan instrumen pelayanan publik	-	-	0	-	0,000	0	0,000	130.000.000	0,000	353.100.000	0,000	590.300.000	0,000	650.000.000	0,000	1.723.400.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang efektif dan efisien	-	-	0	-	0,000	250.000.000	0,000	525.000.000	0,000	285.450.000	0,000	1.322.550.000	0,000	490.000.000	0,000	2.873.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
				Program Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan dan Perekonomian Daerah	Persentase jenis monitoring perekonomian dan Pembangunan daerah	%	-	0	910.116.100	0,000	366.100.000	0,000	0	0,000	488.750.000	0,000	1.350.000.000	0,000	1.350.000.000	0,000	3.554.850.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Persentase Permohonan Legalitas Pertanahan yang disetujui	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	190.000.000	100,000	200.000.000	100,000	390.000.000	Simpang Pesak
				Program Administrasi Keuangan	Persentase Tergenuhnya Administrasi Keuangan dan Perencanaan	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	100,000	80.000.000	100,000	80.000.000	100,000	160.000.000	100,000	320.000.000	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Bidang Administrasi Umum
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup			Indeks Ketahanan Keluarga	Persen		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				
			Meningkatkan rata-rata lama sekolah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terusunnya laporan capaian kinerja dan IKM	buah		2	-	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	75.000.000	0,000	80.000.000	1,000	155.000.000	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan dan pelaporan keuangan	Persen		100	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	300.000.000	100,000	300.000.000	100,000	600.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satu an	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungj awab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	0	-	85,000	0	88,000	0	90,000	41.690.000	92,000	111.865.000	95,000	116.892.000	95,000	270.447.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Laporan Pertanggungjawaban	%	100	100	-	100,000	0	100,000	0	100,000	35.000.000	100,000	40.000.000	100,000	45.000.000	100,000	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Keuangan																		
	Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional	Meningkatn ya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Penastausahan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan LK Tepat Waktu	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	50,000	675.000.000	60,000	675.000.000	60,000	1.350.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Persentase OPD yang menyampaikan LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	%		50		50,000		55,000		60,000		65,000		70,000		70,000		
				Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Kekayaan Daerah	Persentase Laporan BMD OPD yang tertib dan akurat	%	100	50	1.129.150.000	50,000	1.300.000.000	55,000	1.219.000.000	60,000	1.405.000.000	0,000	1.550.000.000	0,000	1.550.000.000	0,000	7.024.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Jumlah Aplikasi Sistem Manajemen BMD yang digunakan	Aplikasi	1	1		1,000		2,000		2,000		3,000		3,000		3,000		
					Persentase OPD yang mengelola BMD yang tertib dan akurat	%	0 perub	0		0,000		0,000		0,000		60,000		65,000		65,000		
				Program Ekstensifikasi dan Peningkatan Data/Informasi Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	700.000.000	0,000	700.000.000	0,000	1.400.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Pertumbuhan Sumber Objek Pajak Daerah	%		0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
				Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	%	11,67	10	965.680.000	10,000	1.038.805.000	11,000	1.090.205.000	12,000	1.138.400.000	13,000	800.000.000	14,000	800.000.000	14,000	4.867.410.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah	%	=====	100		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD (Pengelola Keuangan) yang dibina dan diayakasi	SKPD	50%	57	80.400.000	57,000	23.477.360	57,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	23.477.360	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Program Peningkatan Administrasi Belanja dan Kas Daerah	Persentase Penertiban SP2D Tepat Waktu	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	85,000	550.000.000	85,000	550.000.000	85,000	1.100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Persentase administrasi belanja daerah OPD yang tertib dan sesuai aturan	%	-	60		70,000		75,000		85,000		90,000		95,000		95,000		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan RKA tepat waktu dan akurat	%	1-Tepat waktu, 0 = Tidak Tepat Waktu	50	1.967.783.000	50,000	1.689.853.000	55,000	1.760.690.000	60,000	2.585.000.000	65,000	1.215.550.000	70,000	1.310.000.000	70,000	8.561.093.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Kepegawalan																		
			Meningkatn ya indeks Reformasi Birokrasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang naik pangkat,mutasi, peningkatan pendidikan dan promosi jabatan	Persen	708 Orang	75	1.396.736.400	80,000	2.246.809.000	85,000	1.912.881.500	90,000	2.038.665.000	95,000	2.000.000.000	100,000	2.350.000.000	100,000	10.548.355.500	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pegawai yang Disiplin Berprestasi	Persen	100	100	-	100,000	0	100,000	76.650.000	100,000	820.563.000	100,000	2.269.318.500	100,000	2.571.648.125	100,000	5.738.179.625	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Penelitian dan Pengembangan																		
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase hasil kajian keltibangan yang digunakan dalam perencanaan	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	1.750.000.000	100,000	1.600.000.000	100,000	3.350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase data dan informasi yang terbaharui	%	-	0	-	0,000	0	0,000	0	0,000	1.085.000.000	100,000	1.040.000.000	100,000	815.000.000	100,000	2.940.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Terlaksananya penyusunan data dan informasi kabupaten kabupaten Belitung Timur	%		0	-	0,000		0,000		100,000		0,000		0,000		0,000		
				Pendidikan dan Pelatihan																		
				Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan keadilan	Persen	39 Orang	70	-	75,000	1.391.388.700	80,000	1.335.545.000	85,000	1.255.888.000	90,000	3.612.320.450	100,000	4.200.000.000	100,000	11.795.142.150	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase kompetensi teknis pegawai	Persen	100	80	1.946.280.800	85,000	39.521.000	87,000	297.864.700	90,000	2.946.164.000	92,000	5.225.000.000	100,000	6.514.025.358	100,000	15.022.575.058	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Pertanian																		
	Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Bantul Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase petani yang mendapat pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	persen	471 orang	0	473.412.000	36,530	110.145.000	42,930	495.497.000	76,270	271.760.000	84,800	513.000.000	100,000	610.000.000	100,000	2.000.402.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak dan produksi hasil peternakan	Persen	1.640 ekor sapi; 238.960 ekor ayam; 5.752 ekor itik	64,56	658.744.000	70,860	389.939.000	77,550	266.671.500	84,640	282.454.000	92,120	400.000.000	100,000	400.000.000	100,000	1.739.064.500	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	persen	25 kelompok	52,38	-	63,210	126.240.000	76,880	132.175.000	81,170	930.375.000	85,550	1.120.000.000	100,000	1.020.000.000	100,000	3.328.790.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	persentase penerapan teknologi peternakan dalam budidaya ternak	Persen	-	15	139.185.000	18,180	381.150.000	36,360	0	63,630	146.700.000	81,810	150.000.000	100,000	150.000.000	100,000	827.850.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Persentase Penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih dan terampil	persen	100	100	383.614.000	100,000	563.009.000	100,000	852.125.000	100,000	407.210.000	100,000	995.000.000	100,000	860.000.000	100,000	3.677.344.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penanganan kasus penyakit ternak	persen	500 kasus	100	198.328.000	100,000	379.340.000	100,000	835.050.000	100,000	419.437.000	100,000	350.000.000	100,000	250.000.000	100,000	2.233.827.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	meningkatnya persentase pemasaran hasil pertanian	persen	-	0	-	0,000	0	0,000	49.912.000	50,000	100.000.000	75,000	200.000.000	100,000	200.000.000	100,000	549.912.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura/perkebunan	persen	-	41,54	5.861.979.000	55,780	3.170.455.000	67,360	2.463.350.000	78,650	4.361.375.000	88,220	6.040.000.000	100,000	6.040.000.000	100,000	22.075.180.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pariwisata																		
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PersentasePeningkatan kunjungan wisatawan	persen	0	7	1.394.840.000	5,000	944.065.900	5,000	1.712.412.500	6,000	4.677.151.500	7,000	2.753.971.000	7,000	2.930.632.000	6,000	13.018.232.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan SDM Pariwisata yang profesional	persen	50	50	64.873.900	50,000	50.827.664	50,000	329.475.000	50,000	577.400.500	50,000	580.343.000	50,000	465.500.000	50,000	2.003.546.164	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase kondisi destinasi wisata yang memadai	persen	46,03	52	1.503.329.500	50,000	2.523.475.937	50,000	3.580.485.000	50,000	5.983.700.000	50,000	6.995.229.000	50,000	7.135.022.000	50,000	26.217.911.937	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Kelautan dan Perikanan																		
				Program Peningkatan Daya Saling Produk Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	47,05	47,97	959.260.000	44,600	368.980.000	48,480	398.980.000	48,600	634.620.000	48,900	1.190.677.000	49,000	1.330.000.000	49,000	3.923.257.000	Dinas Perikanan
		Penurunan laju inflasi		Penyusunan Data Perikanan yang akurat	Dokumen/Triwulan	0 dokumen	5	-	5,000	87.390.000	5,000	99.840.000	3,000	46.180.000	3,000	100.000.000	3,000	105.000.000	3,800	438.410.000	Dinas Perikanan	
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Budidaya	Ton	-	98,56	-	53,460	1.391.414.500	111,820	2.433.453.400	111,280	1.165.388.000	119,220	1.803.105.000	126,400	1.876.053.000	104,436	8.669.413.900	Dinas Perikanan
				Pengembangan SDM, Peningkatan Manajemen Perikanan	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina	Kelompok/orang/tahun	43	0	308.678.000	185.000	239.270.000	570.000	210.728.000	630.000	309.125.000	690.000	0	700.000	0	461.667	759.123.000	Dinas Perikanan
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah Produksi Tangkap	Ton	38.037,10	39593,2	11.266.050.999	34.853,300	4.203.344.000	44.047,180	3.114.291.000	40.264,020	2.798.520.000	41.063,960	4.075.000.000	41.880,600	3.840.000.000	40.421,812	18.031.155.000	Dinas Perikanan
				Perdagangan																		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Tertaksananya Promosi Produk Unggulan Daerah	kali	5	3	61.293.650	4.000	277.700.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	4.000	277.700.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
				Program Perlindungan Konsumen dan Penguatan Perdagangan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang diselesaikan	pengaduan	0 Kasus	0	217.862.088	3.000	184.982.000	3.000	536.066.000	0,000	1.322.058.000	0,000	928.000.000	0,000	874.500.000	6.000	3.845.606.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
					Persentase penurunan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan tentang ukuran dan tertib niaga	persen		0		0,000		0,000		10,000		10,000		10,000		30,000		

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar berkondisi layak	unit	2	0	4.228.867.350	4,000	5.827.435.000	5,000	6.754.800.000	0,000	4.327.217.000	0,000	2.581.000.000	0,000	2.486.800.000	0,000	21.977.252.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
					Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)	persen		0		0,000		0,000		10,000		10,000		10,000		30,000			
				Industri																			
			Meningkatnya PORB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan	Persen	-	0	85.021.300	0,000	0	0,000	0	0,000	0	30,000	83.584.000	35,000	95.060.000	35,000	178.644.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
				Program Standarisasi Industri	Peningkatan produk IKM yang mendapatkan standarisasi produk	persen	0 IKM	0	38.252.100	10,000	0	10,000	60.000.000	10,000	79.506.000	0,000	0	0,000	0	30,000	139.506.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Wirausaha Industri Kecil Baru	wirausaha	0 IKM	0	83.690.100	132,000	94.660.500	196,000	508.355.500	0,000	685.000.000	0,000	1.738.000.000	0,000	1.773.500.000	0,000	4.799.516.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
					Industri kecil menengah (IKM) yang nilai produksinya meningkat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan (IKM)	Persen		0		0,000		45,000		52,000		59,000		66,000		66,000			
				Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pengembangan produk	IKM	-	0	-	8,000	0	2,000	44.377.000	0,000	100.000.000	0,000	0	0,000	0	10,000	144.377.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
					Peningkatan IKM yang proses produksinya meningkat setelah mendapat fasilitasi	IKM		0		0,000		2,000		3,000		0,000		0,000		5,000			
				Program Pengembangan Industri Kerajinan	Peningkatan nilai produksi IKM Kerajinan	IKM	-	0	-	10,000	334.865.200	12,000	637.945.000	15,000	984.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	1.956.810.200	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri yang difasilitasi	sentra	-	0	-	1,000	50.400.000	1,000	97.730.000	0,000	368.218.000	0,000	502.000.000	0,000	654.000.000	2,000	1.672.348.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
					Pengembangan sentra IKM	Sentra		0		0,000		0,000		2,000		3,000		4,000		4,000			
TOTAL											161.646.153.189		195.074.464.492		228.524.853.345		277.036.603.324		281.735.080.544		1.144.017.154.894		



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah indikator-indikator yang diperoleh dari penurunan sasaran pembangunan lima tahunan dan indikator kinerja urusan. IKU Kabupaten Belitong Timur tahun 2016-2021 dan Indikator Kinerja Daerah disajikan pada Tabel di bawah ini:



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

Tabel 8 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
Misi 1: Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Belitong Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan						
Tujuan 1.1 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang profesional						
1.1.1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (%)	Perencanaan, Pengawasan, Kepegawaian, Komunikasi dan Informatika, Keuangan, Urusan Penunjang	1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Sekretariat Daerah 7. OPD pelayanan publik	Laporan Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Refomasi Daerah
		Jumlah Unit Kerja dengan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Pengawasan	1. Insektorat 2. DPMPSTPP 3. Dindukcapil	Laporan tim penilai	Jumlah Unit Kerja dengan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
1.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan Keuangan Daerah	Keuangan	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Laporan BPK	Opini BPK terhadap laporan keuangan



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
Misi 2: Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan						
Tujuan 2.1 : Meningkatkan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitong Timur						
2.1.1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase akses sanitasi masyarakat (%)	Perencana, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Pendidikan	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB 3. DPUPR 4. Dinas Lingkungan Hidup Daerah 5. Dinas Pendidikan	Laporan hasil pelaksana kegiatan	Jumlah persentase akses pelayanan dasar (air limbah dan persampahan) + persentase akses PHBS
		luas kawasan kumuh (ha)	Perumahan dan kawasan permukiman	1. DPUPR 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan hasil pelaksana kegiatan	luas kawasan kumuh tahun n
		Rasio Rumah Layak Huni	Perumahan dan kawasan permukiman	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan hasil pelaksana kegiatan	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$
		Akses air bersih masyarakat (%)	Perumahan dan kawasan permukiman, Kesehatan	1. DPUPR 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Kesehatan	Laporan hasil pelaksana kegiatan	$\frac{\text{jumlah Rumah Tangga (RT) yang terlayani air bersih}}{\text{jumlah total Rumah Tangga}} \times 100\%$
		Persentase kondisi baik jalan	Pekerjaan umum dan penataan	1. DPUPR 2. Dinas Perumahan Rakyat	Laporan hasil pelaksana kegiatan	$\frac{\text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$

8.3 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten (%)	ruang	dan Kawasan Permukiman		panjang jalan kabupaten
		Jumlah lintas pelayanan angkutan	Perhubungan	1. Dinas Perhubungan	Laporan hasil pelaksana kegiatan	Jumlah lintas pelayanan lintas angkutan
Tujuan 2.2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah						
2.2.1	Pembangunan infrastruktur kawasan strategis	Persentase kawasan strategis daerah dengan infrastruktur baik (%)	Pekerjaan Umum, pariwisata, Perumahan dan kawasan permukiman, Kesehatan, Kelautan dan Perikanan,	1. DPUPR 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksana kegiatan	$\frac{\text{jumlah kawasan startegis cepat tumbuh dengan infrastruktur baik}}{\text{jumlah kawasan strategis}} \times 100\%$
2.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup	Laporan hasil pelaksana kegiatan	30% IPA + 30% IPU + 40% ITL
2.2.3	Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW	Ketaatan tata ruang (%)	Tata Ruang	1. DPUPR	Laporan hasil pelaksana kegiatan	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana peruntukan}} \times 100\%$
2.2.4	Penanggulangan dan penanganan bencana	Tingkat resiko bencana (%)	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. DPUPR 3. Dinas Perumahan Rakyat	Laporan Kajian Resiko Bencana	Gabungan tingkat kapasitas dan tingkat kerugian



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
				dan Kawasan Permukiman		
Misi 3: Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Belitong Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan						
Tujuan 3.1: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi						
3.1.1	Meningkatnya PDRB sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persentase Kontribusi PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. BPS	Dokumen PDRB Kabupaten	PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan ----- x 100% PDRB Kabupaten
		Persentase Kontribusi PDRB PDRB sektor industri pengolahan (%)	Pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi dan UKMK	1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 3. Dinas PM, PTSP dan Perdagangan 4. BPS	Dokumen PDRB Kabupaten	PDRB Sektor industri pengolahan ----- x 100% PDRB Kabupaten
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor penyediaan	Pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dokumen PDRB Kabupaten	PDRB Sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman ----- x 100%



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
		akomodasi makanan dan minuman (%)				PDRB Kabupaten
3.1.2	Menurunnya angka pengangguran	Angka pengangguran terbuka (%)	Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Laporan hasil pelaksana kegiatan	$\frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$
3.1.3	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) (Rp)	Penanaman Modal	1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perdagangan	Laporan hasil pelaksana kegiatan	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)
3.1.4	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat lokal	Indeks daya saing UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Laporan Indeks daya saing UMKM	Indeks daya saing UMKM
		Indeks daya saing Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Laporan Indeks daya saing UMKM	Indeks daya saing Koperasi
3.1.5	Penurunan laju inflasi	Laju Inflasi (%)	-	Seluruh OPD	Laporan hasil pelaksana kegiatan	$\frac{\text{Laju inflasi th n} - \text{Laju inflasi tahun n-1}}{\text{Laju inflasi th n-1}} \times 100\%$
Tujuan 3.2 : Penurunan Angka Kemiskinan						
3.2.1	Meningkatnya pendapatan	PDRB Perkapita	-	Seluruh OPD	Buku PDRB Kabupaten Belitong	PDRB Perkapita



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
	masyarakat				Timur	
3.2.2	Perlindungan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial kesehatan (%)	Kesehatan, Sosial	1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Basis Data Terpadu	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial kesehatan ----- x 100% Jumlah masyarakat miskin
		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial (%)	Sosial	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Basis Data Terpadu	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial ----- x 100% Jumlah masyarakat miskin
		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial pendidikan (%)	Pendidikan, Sosial	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Basis Data Terpadu	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial Pendidikan ----- x 100% Jumlah masyarakat miskin
Tujuan 3.3 : Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup						
3.3.1	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2. BPS	Buku IPM	$MYS = \frac{1}{P_{15}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (lama\ sekolah\ penduduk\ ke - i)$



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
						P_{15+} = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = - Tidak pernah sekolah = 0 - Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1 - Masih sekolah di S1/S2 = konversi ijazah terakhir +1 - Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
3.3.2	Meningkatnya usia harapan hidup	Usia harapan hidup (tahun)	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Buku IPM	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
3.3.3	Meningkatnya ketahanan keluarga	Kategori Indeks Ketahanan Keluarga (kategori : sangat Rendah, Rendah, Cukup, Tinggi, Sangat Tinggi)	Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Dinas kependudukan dan pencatatan sipil - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan Indeks Ketahanan Keluarga	Kategori Ketahanan Keluarga



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
3.3.4	Pengendalian penduduk	Pengendalian penduduk	Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan	1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Laporan	Laju pertumbuhan penduduk



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR Tahun 2016-2021

Tabel 8 2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Fungsi Penunjang Lainnya									
1.1	Pertumbuhan ekonomi	persen	4,40	4,25	4,85	4,85 - 5,0	5,0 – 5,25	5,25 - 5,5	5,5 – 6,00	5,5 – 6,00
1.2	PDRB per kapita	Ribu rupiah	51.309	54.145	57.405	60.665	63.925	67.185	70.445	70.445
1.3	Angka pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	10.523	10.729	10.894	11.302	-	-	-	-
1.4	Tingkat kemiskinan	persen	7,33	6,99	6,81	7,06	6,71	6,35	6	6
1.5	Inflasi	persen	-	3,02	3,61	3,5	2,4 - 4,5	2,4 - 4,5	2,4 - 4,5	2,4 - 4,5
1.6	Persentase Kontribusi PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	25,49	25,85	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
1.7	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	persen	19,38	19,05	20,02	20,03	20,04	20,05	20,06	20,06



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.8	Persentase Kontribusi PDRB Sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	persen	2,28	2,32	2,33	2,34	2,35	2,36	2,37	2,37
	Kesejahteraan Sosial									
1	Pendidikan									
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,91	7,95	8	8,05	8,15	8,18	8,20	8,20
2	Kesehatan									
2.1	Angka usia harapan hidup	tahun	71,23	71,30	71,37	71,45	71,52	71,61	71,68	71,68
2.2	Persentase balita gizi Buruk	persen	0,06	0,04	0,04	0,13	0,12	0,11	0,1	0,1
3	Tenaga Kerja									
3.1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	2,55	2,29	2,62	1,5	1,45	1,40	1,35	1,35
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib Dasar										
1	Pendidikan									



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	Persentase sekolah yang memenuhi SPM pendidikan TK/SD/SMP	Persen	58	60	62	65	68	71	74	74
1.2	Persentase guru bersertifikasi	persen	46,63	64,32	64,32	75	80	85	90	90
1.3	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	persen	78,5	89,5	91,46	93,5	95,50	98,50	99,50	99,50
1.4	Persentase capaian realisasi target SPM	Persen	96,91	65	75	86	91	97	100	89,8
2	Kesehatan									
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	77	78,5	78,6	79,44	80,5	81	81,25	81,25
2.2	Indek Keluarga Sehat	persen	-	40	45	46	47	48	50	50
2.3	Persentase angka penyakit menular	Persen	2,76	2,91	1,28	1,26	1,24	1,19	1,14	1,14
2.4	Persentase angka penyakit tidak menular	Persen	27,70	2,49	24,67	19,02	16	14,9	14,9	14,9
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.1	Rasio jaringan irigasi	Persen	22,67	27,28	38,45	35	40	45	50	50
3.2	Kapasitas Jalan kabupaten (Pembangunan/Peningkatan Jalan)	Km	0	0	4	8	12	16	20	20
3.3	Persentase tersedianya Luasan RTH Publik	Persen	14,59	14,59	14,59	15	16	18	20	20
3.4	Persentase jumlah IMB yang diterbitkan	Persen	4,09	4,51	4,13	6	7	8	9	9
3.5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	79,86	80,64	78,10	70,10	80	80	80	80
3.6	Persentase Kawasan rawan gelombang pasang dan Kawasan Rawan Abrasi yang ditanggulangi	Persen	22	22	22	0	33,33	72	100	100
3.7	Persentase Terpenuhinya Infrastruktur penahan Tanah dan Pengendalian Daya Rusak Air	persen	100	100	100	100	100	100	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.8	Ketaatan Tata Ruang	persen	-	65	65	65	75	80	85	85
3.9	Akses sanitasi masyarakat	Persen	-	64,58	62,88	81,02	82	89	100	100
3.10	Akses Air Bersih Masyarakat	Persen	-	74,41	81,12	83,89	93,66	100	100	100
3.11	Akses air minum masyarakat	Persen	-	74,41	74,39	73,57	86	91	100	100
3.12	Persentase keberadaan sumber air pada daerah rawan bencana sesuai dengan fungsi dan manfaat	Persen	0	0	0	0	50	75	100	100
3.13	Persentase kawasan strategis daerah dengan infrastruktur baik	Persen	16	16	16	16	16	16	33,3	33,3
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
4.1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	40,42	40,4	54,5	58,89	60	63	66	66
4.2	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persen	-	3,17	5,05	46,83	55	74	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.3	Persentase Permukiman yang Tertata	Persen	96,29	96,41	96,48	99,12	99,27	99,56	100	100
4.4	Luas kawasan kumuh	ha	124,56	120,61	118,27	29,66	24,66	14,66	0	0
4.5	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	39,69	38,21	51,82	56,23	61	64	69	69
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
5.1	Persentase menurunnya kasus konflik sosial	Persen	90	80	80	70	60	50	0	0
5.2	Persentase partisipasi pemilih	Persen	75,93	0	75,93	0	80	80	0	0
5.3	Persentase kasus penyelenggaraan demokrasi	Persen	3	3	0	0	1	0	0	0
5.4	Persentase perubahan perilaku terhadap bahaya Napza	Persen	10	16,6	40	50	60	75	90	90
5.5	Persentase terwujudnya aparaturnya polisi pamong praja yang tangguh dan profesional	Persen	90	80	80	100	100	100	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.6	Tingkat resiko bencana	Persen	-	-	-	-	50	75	90	90
6	Sosial									
6.1	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Unit	19,89	16,96	46,15	61,29	50	50	50	50
6.2	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	2,00	19,01	13,89	14	15	15	15	15
6.3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	70,44	8,39	12,50	12,37	18	18	18	18



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6.5	Persentase peningkatan akses, kemudahan dan jangkauan rumah tangga miskin	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase peningkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga sasaran	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial kesehatan	Persen	-	75	80	85	90	95	98	98
6.8	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial	Persen	-	75	61	64	78	82	90,80	90,80
6.8	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial pendidikan	Persen	23,55	33,42	24,21	82,23	84	87	90	90
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1	Tenaga Kerja									



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	Persentase penurunan sengketa hubungan industrial	Persen	-	26,58	13,68	9,30	9	8,75	8,50	8,50
1.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	68,11	68,52	68,00	71,93	72,00	72,10	72,20	72,20
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	53,3	53,3	52,30	54	54	54	54	54
2.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	46,7	46,7	47,70	48	48	48	48	48
2.3	Rasio KDRT	rasio	0,002	0,079	0,058	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	49,45	48,24	51,89	37	37	37	37	37
2.5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persen	47	100	100	90	90	90	90	90
2.6	Indeks Ketahanan Keluarga	Kategori	-	-	-	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Pangan									



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.1	Ketersediaan pangan utama	(kg/thn/ 1.000 penduduk)	128.454	115.217,7	83.142,71	95.939	142.234	145.904	145.904	145.904
4	Pertanahan									
4.1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	persen	-	-	100	100	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup									
5.1	Indeks Pencemaran Air	Persen	-	-	-	49,17	49,37	49,57	49,77	49,77
5.2	Indeks Pencemaran Udara	Persen	-	-	-	97,48	97,68	97,88	98,08	98,08
5.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	64,255	64,455	64,655	64,855	64,855
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	81,15	84,38	88,08	93	97	100	100	100
6.2	Cakupan kepemilikan kartu keluarga	persen	77,29	82,42	86,87	91	96	100	100	100
6.3	Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	-	25	29,97	60	100	100	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6.4	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	persen	79,95	83,28	82,94	89	92	95	97	97
6.5	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Persen	70,55	76,85	79,45	80	82	84	86	86
6.6	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder dinas	persen	-	6	8,83	50	100	100	100	100
6.7	Jenis Inovasi Pelayanan	Jenis	1	2	3	7	8	9	9	9
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	2	3	4	4	4	4	4	4
7.2	Jumlah PKK aktif	PKK	47	47	47	47	47	47	47	47
7.3	Jumlah Posyandu aktif	Posyandu	133	133	133	133	133	133	133	133
7.4	Persentase aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7.5	Profil Desa sesuai standar	Desa	39	33	30	32	39	39	39	39



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7.6	Persentase penyusunan dan pengelolaan keuangan Desa yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7.7	BUMDes yang terbentuk	BUMDes	7	11	27	37	39	39	39	39
7.8	Desa yang menyusun RKPDes per tahun	Desa	39	39	39	39	39	39	39	39
7.9	Posyantek aktif	Kecamatan	2	2	2	2	4	4	4	4
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 – 19 tahun	Persen	59	58	56	54	50	48	47	47
8.2	Cakupan peserta KB aktif	Persen	89,97	84,19	85	77,84	77,9	77,95	77,98	77,98
8.3	Pengendalian Penduduk	Persen	2,2	2,18	2,16	2,14	2,08	2,05	2,02	2,02
9	Perhubungan									
9.1	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas (%)	Persen	-	-	-	-	60	65	70	70



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9.2	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Persen	97,08	68,42	47,22	50	55	60	65	65
9.3	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	Persen	0,00362	0,001049	0,002916	0,007579	0,1	0,2	0,2	0,2
9.4	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan darat, laut/penyeberangan	Persen	23,33	0	0	0	20	20	20	20
9.5	Persentase Pembangunan kawasan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitong Timur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
9.6	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	Persen	-	5	10	15	20	25	0	70
9.10	Jumlah Lintas Pelayanan Angkutan	Trayek	-	6	2	0	5	7	7	7
10	Komunikasi dan Informatika									
10.1	Indeks SPBE	nilai	-	-	-	1,8	1,9	2,2	2,6	2,6
10.2	IKM terhadap pelayanan informasi publik	persen	-	-	-	-	75	77	80	80



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
11.1	Persentase Koperasi Sehat	Persen	0,1	0,27	0,27	0,27	0,28	0,29	0,3	0,3
11.2	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai ijin usaha	Persen	0,115	0,013	0,05	3,19	3,1	3,2	3,3	3,3
11.3	Indeks daya saing UMKM	kategori	-	-	-	-	cukup	cukup	cukup	cukup
11.4	Indeks daya saing Koperasi	kategori	-	-	-	-	cukup	cukup	cukup	cukup
12	Penanaman Modal									
12.1	Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan	hari	9	5	<5	<5	4	4	4	4
12.2	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan PTSP	skor	82,96	81,9	82	78,2	83	83,5	84	84
12.3	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	514.219.561.226	211.051.631.894	472.918.842.124	150.898.690.033	478.848.062.107	483.636.542.728	489.681.999.512	2.287.035.768.398
12.4	Investor yang berinvestasi	investor	10	7	9	8	1	1	1	27



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
13	Kepemudaan dan Olahraga									
13.1	Persentase Pemuda Pelopor	Persen	-	60	60	60	80	81	81	82
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	-	60	60	60	67	68	69	69
13.3	Persentase pembangunan/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga dalam kondisi baik	Persen	-	70	70	70	90	90	90	90
13.4	Persentase pembinaan olahraga	Persen	-	70	70	80	80	85	85	85
13.5	Jumlah Medali Emas	Medali	-	30	30	35	35	35	35	200
14	Statistik									
14.1	Persentase ketersediaan data	Perse n	-	-	-	-	75	80	85	85
15	Persandian									
15.1	Indeks KAMI	Nilai	-	-	-	-	-	200	540	540
16	Kebudayaan									



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16.1	Jumlah event seni dan budaya	kali	4	5	3	3	3	4	4	17
17	Perpustakaan									
17.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	100	100	100	145	100	100	100	100
18	Kearsipan									
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	18	32	24	31	55	75	100	100
Layanan Urusan Pilihan										
1	Kelautan dan Perikanan									
1.1	Produksi perikanan Tangkap	Ton	41.612,10	43.570,87	35.853,20	42.826,31	40.264,02	41.063,96	41.880,60	41.880,60
1.2	Produksi perikanan Budidaya	Ton				70,36	111,28	119,22	126,4	126,4
1.3	Konsumsi ikan per tahun	(kg/kapita/tahun)	47,64	47,97	44,6	48,25	48,6	48,9	49	49
2	Pariwisata									
2.1	Jumlah kunjungan wisata	Orang	167.680	232.921	250.326	344.996	250.000	250.000	270.000	1.242.973



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1	2	1	1	1	2	2	1,4
3	Pertanian									
3.1	Persentase peningkatan produksi padi	Persen	100	-20,11	-4,92	12,14	33,53	51,36	59,48	59,48
3.2	Persentase peningkatan produksi tanaman karet	Persen	100	-27,32	-26,87	16,08	27,69	33,61	39,3	39,3
3.3	Persentase peningkatan produksi tanaman lada	Persen	100	-10,44	-25,31	4,42	63,33	90,92	99,11	99,11
3.4	Persentase peningkatan populasi sapi	Persen	100	1,59	-10,82	-6,40	14,63	18,29	21,95	21,95
4	Perdagangan									
4.1	Persentase stok bahan pokok strategi di distributor berdasarkan kebutuhan konsumsi	Persen	-	-	-	-	75	76	77	77
4.2	Persentase alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	Persen	-	-	58,92	61,67	78	80	85	85



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.3	Persentase barang dalam kemasan tertutup (BDKT) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan jumlah BDKT yang diuji	Persen	-	-	-	-	75	80	85	85
5	Perindustrian									
5.1	Pertumbuhan Industri kecil dan Menengah	persen	11	11	12,21	1,24	1,28	1,3	1,32	1,32
Penunjang Urusan										
1	Perencanaan									
1.1.	Persentase keselarasan program antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD)	persen	-	85	100	93,18	100	100	100	100
1.2.	Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan RKPD	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.	Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan Renstra	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100
1.4.	Persentase rata-rata capaian program terhadap RKPD	persen	-	90,21	95,49	94,28	>87	>87	>87	>87
1.5.	Persentase Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan	persen	-	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan									
2.1	Ketepatan waktu penetapan persetujuan bersama APBD	Tepat/ Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2.2	Ketepatan waktu penetapan persetujuan bersama APBD Perubahan	Tepat/ Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2.3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	Tepat/ Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2.4	Persentase OPD dengan penyerapan anggaran sesuai target	Persen	-	-	-	85	85	90	90	90



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.5	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	Persen	-	-	-	85	85	85	85	85
2.6	Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persen	57	57	61,5	66	67	71	75	75
2.7	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	Persen	69	69	76	87	87	90	93	93
2.8	Persentase Pencapaian Pajak Daerah	Persen	92,37	92,37	125,22	107,2	100	100	100	100
2.9	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	45,53	45,53	61,97	69,84	66,97	66,97	66,97	66,97
2.10	<i>Tax Ratio</i> (Ratio Pajak terhadap Penerimaan Daerah)	Persen	5,45	5,45	8,05	9,14	9,00	9,00	9,00	9,00
2.11	Persentase Sumber Pajak Daerah yang didata per Tahun	Persen	21,52	21,52	11,64	16,94	22,94	26,94	26,94	26,94
2.12	Persentase Data Wajib Pajak PBB P2 yang dimutakhirkan	Persen	40,47	40,47	36,80	40,7	45,7	48,7	51,2	51,20
2.13	Opini Laporan Keuangan Daerah	kategori	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Kepegawaian									
3.1	Presentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100 (2714)
4	Pendidikan dan Pelatihan									
4.1	Presentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi	Persen	100	103,01	83,75	91,88	100	100	100	100
4.2	Presentase PNS jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan dan Jabatan Fungsional yang sudah mengikuti ujian kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100% (1.250 PNS)
5	Fungsi Penunjang Lainnya									
5.1	Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Damar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di Kecamatan Damar	%	100	100	100	100	100	100	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.3	Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Dendang	%	-	81,15	85,13	86,06	86,50	86,60	86,75	100
5.4	Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di Kecamatan Dendang	%	25	50	75	100	100	100	100	100
5.5	Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Gantung	%	-	-	100	100	100	100	100	100
5.6	Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di Kecamatan Gantung	%	-	-	100	100	100	100	100	100
5.7	Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Kelapa Kampit	%	70	70	75	75	78	80	80	80
5.8	Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di Kecamatan Kelapa Kampit	%	80	80	100	100	100	100	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.9	Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Manggar	%	-	81,25	81,26	81,28	81,30	81,31	81,32	81,32
5.10	Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di Kecamatan Manggar	%	-	-	11	33	55	77	100	100
5.11	Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Simpang Pesak	%	-	77,50	79,35	81,32	81,33	81,33	81,50	81,50
5.12	Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di Kecamatan Simpang Pesak	%	-	-	100	100	100	100	100	100
5.13	Meningkatnya Persentase Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) kecamatan Simpang Renggang	%	79,88	79,89	79,89	79,68	81,5	81,7	82	81,5



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.14	Meningkatnya persentase Desa yang tertib administrasi di Kecamatan Simpang Renggang	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.15	Persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.16	Persentase kebijakan di bidang sosial kesejahteraan sosial yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.17	Persentase pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.18	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.19	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.20	Persentase kegiatan perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.21	Persentase jumlah layanan pengadaan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.22	Persentase SDM yang berkualitas dan profesional dibidang PBJ	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.23	Persentase penataan hukum	persen	80	80	85	87	90	93	95	90
5.24	Persentase realisasi penetapan peraturan perundang-undangan	persen	80	80	80	83	85	87	90	90
5.25	Persentase OPD yang tepat ukuran dan kaya fungsi	Persen	100	40	100	100	100	100	100	100
5.26	Persentase OPD Tata Laksana Yang Optimal	Persen	100	60	100	100	100	100	100	100
5.27	Persentase OPD dengan IKM baik	Persen	100	50	100	100	100	100	100	100



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.28	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.29	Persentase fasilitas aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.30	Persentase Fasiliasi rapat-rapat Dewan tepat waktu	Persen	76,5	98,33	72,5	100	100	100	100	94,5
5.31	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100	66,67	66,67	100	100	100	100	93,34
5.32	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	-	-	50,62	51,5	52,5	55	60	60
6	Pengawasan									
6.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	Persen	-	-	63,54	48,69	50	60	70	70
6.2	Kapabilitas APIP	Level	-	-	2	2	2	2	3	3



RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN BELITONG TIMUR Tahun 2016-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja a Pada Awal RPJMD	Capaian			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6.3	Maturitas SPIP	Level	-	-	1	2	2	3	3	3
6.4	Jumlah Unit Kerja yang Berpredikat WBK	Unit Kerja	0	0	0	0	0	2	2	2
7	Kelitbanagan									
7.1	Persentase ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan kelitbanagan	persen	-	-	100	100	100	100	100	100
7.2	Persentase hasil kelitbanagn yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	persen	-	-	100	100	100	100	100	100

